

PARLIAMENT *Watch*

**EKSPERIMEN DEMOKRASI :
DILEMA INDONESIA**

Talk Show

Denny J.A

Metro TV



Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Denny J.A.

Parliament Watch: Eksperimen Demokrasi Dilema Indonesia

Denny J.A.; editor, Fransiskus Surdiasis.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006

xiv, 425 hlm. : 23 Cm.

ISBN 979-416-883-1

1. Demokrasi.

II. Fransiskus Surdiasis

I. Judul.

321.8

PARLIAMENT WATCH

Eksperimen Demokrasi: Dilema Indonesia

Oleh: Denny J.A.

06 | UM | 03

Desain Sampul : Hendy G.

Editor : Agus Sudibyo

Penata Letak : A. Herda

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan,

anggota Ikapi, Jakarta

Cetakan Pertama, 2006

PARLIAMENT WATCH

EKSPERIMEN DEMOKRASI:
DILEMA INDONESIA

Talkshow Denny J.A.
Metro TV

Pustaka Sinar Harapan
Jakarta, 2006

DENNY J.A

*Untuk Tiga Matahari:
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

Daftar Isi

Kata Pengantar	ix
BAB I REFORMASI HUKUM dan PEMILU	1
1. Tentara dan Komisi Konstitusi	3
2. Perempuan Tersingkir dari DPR?	19
3. Sistem Dua Ratus Partai	33
4. RUU Kerukunan Umat Beragama	49
5. Menjaring Partai Peserta Pemilu	63
6. Komplikasi Pemilu di Aceh	77
7. Upaya-upaya Pengagalan Pemilu	91
BAB II KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MASA TRANSISI	103
8. Mengganti Presiden Megawati	105
9. Kontroversi Akbar Tabdjung Pasca Kalah	121
10. Memilih Politisi dalam Sistem Pemilihan Terbuka	135
11. Membatalkan Pemilihan Gubernur	151
BAB III MEMERANGI KORUPSI	165
12. Perang Baru Terhadap Korupsi	167
13. Korupsi Yang Maha Perkasa	179
14. Mengusut Kekayaan Pejabat	195
15. Kasus Suap di DPR	209
16. Suap di Pusat Suap di Daerah	221
17. Politik Uang Calon Legislatif	235
BAB IV KONFLIK DAN REKONSILIASI	249
18. Poso Kembali Berdarah	251
19. Momentum Baru di Aceh	265
20. Rekonsiliasi TNI-GAM	281
21. Rehabilitasi Korban Komunisme	293

BAB V	TERORISME DAN RADIKALISME AGAMA	305
22.	Terorisme Mengancam Indonesia	307
23.	Indonesia vs Terorisme	321
24.	Satu Tahun Bom Bali	335
25.	Bom Bali dan Islam Militan	347
26.	Menangkap Alumni Afganistan	361
27.	Sikap DPR atas Terorisme	375
BAB VI	BURUH MIGRAN DI ERA REFORMASI	389
28.	Terlantarnya TKI di Malaysia	391
29.	Tangisan Buruh di Luar Negeri	407
	Asal tulisan	421

KATA PENGANTAR

Demokrasi pertama-tama bukan kisah sukses untuk bangkit dari rejim otoritarian menuju sistem sosial-politik yang demokratis. Demokrasi adalah kisah tentang keberanian untuk mencoba kemungkinan sukses itu, dengan berbagai resikonya. Dengan kata lain, demokrasi pada gilirannya lebih berurusan dengan keberanian untuk mencoba, untuk bereksperimen.

Layaknya sebuah eksperimen, proses demokratisasi kadang berhasil, kadang gagal. Kadang berhasil untuk sebagian, dan gagal untuk sebagian yang lain. Pada tempat lain demokratisasi dipenuhi dengan kisah-kisah sukses yang tertunda, yang harus dicapai melalui jalan berliku, dengan sederet kegagalan dan penderitaan. Demokratisasi berbicara tentang prospek yang membutuhkan upaya keras untuk mentransformasikannya menjadi realitas. Meskipun demikian, sebuah eksperimen bukannya dilakukan tanpa asumsi, alasan, dan perhitungan yang matang.

Eksperimen demokrasi itulah yang beberapa tahun belakangan ditempuh oleh Indonesia. Bangsa Indonesia sesungguhnya bisa berkaca dari tersendat-sendatnya transformasi politik yang berlangsung di Filipina, pasca jatuhnya Rezim Marcos, yang penuh gejolak dan konflik. Transformasi politik yang terjadi di negara tetangga itu menunjukkan bahwa jika tidak hati-hati, demokratisasi untuk sebagian justru menimbulkan penderitaan yang tak kunjung usai bagi rakyat kecil. Pengalaman Filipina pasca Marcos dengan jelas menunjukkan betapa “sakitnya” melahirkan demokrasi. Namun segenap unsur bangsa Indonesia tak bergeming, reformasi politik adalah satu-satunya pilihan, dan rezim Orde Baru yang otoriter dan anti kebebasan harus diakhiri. Ketika itu, Malaysia dan Singapura, dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga masuk akal, memutuskan untuk tidak melakukan perubahan politik, dan tidak terpancing euforia reformasi yang berkembang di Asia. Mahatir Muhammad bahkan dengan sinis menyatakan Malaysia tidak akan menempuh jalan beresiko yang dipilih Indonesia.

Dengan latar belakang hantaman krisis moneter yang menggoyahkan stabilitas politik nasional, meletuslah gerakan reformasi di Indonesia. Setelah serangkaian aksi demonstrasi “people power” yang dramatis dan massif, dalam situasi nasional yang mencekam, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden pertengahan Mei 1998. Salah satu diktator terkuat di Asia pada tiga dekade terakhir, dan berkuasa dalam kurun waktu yang sangat lama : 32 tahun, merasa tak mampu lagi mengendalikan situasi yang berkembang di Indonesia saat itu.

Namun, jatuhnya rezim Soeharto bukan segalanya, ia hanyalah kisah pembuka dari proses demokratisasi di Indonesia. Setelah itu jalan panjang dan berliku-liku demokratisasi di Indonesia harus dilalui dengan berbagai resiko. Menjatuhkan Soeharto memang sangat penting, namun menuntut kerja yang lebih keras untuk menindaklanjutnya. Sejak Mei 1998 itu, bangsa Indonesia disibukkan oleh riuh-rendah gerakan reformasi, euforia kebebasan terjadi pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Namun pada saat yang sama, sesungguhnya bangsa Indonesia belum berhasil lepas dari jeratan dampak-dampak krisis ekonomi : inflasi yang tinggi, terpuruknya nilai tukar rupiah, kenaikan harga-harga kebutuhan hidup , inflasi yang tinggi, perginya para investor asing, tingkat pengangguran yang terus meningkat. Krisis ekonomi semakin lama semakin tak terkendali dan membuat kehidupan rakyat kecil semakin terpuruk.

Buku PARLIAMENT WATCH, EKSPERIMEN DEMOKRASI : DILEMA INDONESIA, Talksow Denny J.A. di Metro TV ini bercerita tentang kisah sukses maupun kisah gagal –atau setidaknya-tidaknya kisah sukses yang tertunda– gerakan reformasi di Indonesia. Dengan komprehensif yang menarik, buku ini mencatat perkembangan demi perkembangan, perdebatan demi perdebatan, dan komplikasi masalah dalam perjalanan reformasi di Indonesia. Buku ini berisi kumpulan talkshow “Parliament Watch” pada periode 8 Agustus 2002 hingga 18 Desember 2003. Acara yang hadir setiap Kamis malam di layar Metro TV ini diasuh intelektual dan pengamat politik Dr. Denny J.A. Analisis politik yang tajam dan perhatiannya yang sangat mendalam terhadap aspek-aspek penting reformasi di Indonesia, sangat membantu

dalam menghadirkan dialog-dialog yang aktual, kritis dan relevan bagi kehidupan publik. Perhatian yang serius terhadap seluk-beluk gerakan reformasi di Indonesia, juga memungkinkan Bung Denny menghadirkan tema-tema yang hangat, urgens, serta dengan pilihan narasumber yang beragam dan kompeten. Tentu sebuah pekerjaan yang menguras tenaga menyelenggarakan talkshow yang rutin setiap hari Kamis, dalam kurun waktu yang lumayan lama, dengan keharusan menampilkan perbincangan yang hangat dan interaktif, serta fokus pada persoalan-persoalan yang spesifik. Namun Bung Denny berhasil membuktikan konsistensinya untuk mengasuh acara itu, dan secara rutin mendialogkan perkembangan demi perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode itu.

Merekam aspek-aspek gerakan reformasi, buku ini sesungguhnya banyak bicara tentang tegangan. Salah satunya adalah tegangan antara inovasi dan anarkhi dalam reformasi perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pembentukan Komisi Konstitusi menjadi contoh menarik di sini. Di satu sisi lembaga ini dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan konstitusi, dengan berwenang mengoreksi undang-undang agar tidak bertentangan dengan perintah konstitusi. Namun pada sisi lain, tidak ada jaminan bahwa Komisi Konstitusi tidak akan sewenang-wenang dan selalu kedap terhadap kepentingan-kepentingan politik. Pada sisi lain, kita memang berhasil mereposisi militer, mereduksi sebanyak mungkin peran politik militer, melalui berbagai undang-undang yang lahir pasca reformasi. Namun bisa jadi militer memanfaatkan celah-celah yang ada dalam berbagai undang-undang itu untuk tetap eksis dalam kancah politik. Bisa jadi pula militer sesungguhnya belum sepenuhnya dapat menerima peran barunya yang terbatas, dan berusaha menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkannya untuk berperan lebih besar lagi di bidang politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem politik multipartai di satu sisi adalah terobosan penting dalam reformasi politik di Indonesia. Namun pada sisi lain, sistem multipartai juga bisa melahirkan kondisi-kondisi inefisiensi, anarkhis. Maka menarik untuk menyimak kembali talkshow bertajuk “Sistem Dua

Ratus Partai” dalam buku ini. Tegangan antara inovasi dan anarkhis juga tercemin dalam sub bab RUU kerukunan Umat Beragama. Di satu sisi, RUU ini merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik berbasis agama yang marak pasca 1998. Namun pada sisi lain, RUU ini berbahaya sekali karena membuka peluang bagi negara untuk intervensi terlalu jauh terhadap aspek-aspek keberagaman masyarakat atau individu.

Tegangan yang lain dalam buku ini adalah tegangan antara “kemauan untuk berubah” dan “kemauan untuk menjaga establishmen”. Di satu sisi, berbagai pihak ingin melakukan terobosan politik yang penting, mewujudkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan politik, dengan memperjuangkan kuota 30 persen perempuan dalam struktur keanggotaan DPR dan kepengurusan partai. Namun di sisi lain, banyak pihak yang menganggap kaum perempuan memang masih lemah kemampuannya dan pemberian kuota itu justru bertentangan dengan “hukum besi” demokrasi. Di satu sisi pemilu dianggap sangat penting bagi perjalanan demokrasi dan reformasi politik di Indonesia. Namun di sisi lain masih ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan pemilu, karena pemilu mengancam establishmen kepentingan tertentu.

Tegangan antara “kemauan untuk berubah” dan kemauan untuk menjaga establishmen” juga terlihat dari dinamika problem korupsi di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah, DPR, dan kelompok-kelompok penekan berusaha memerangi korupsi, melahirkan mekanisme-mekanisme baru untuk menekan laju korupsi. Namun pada sisi lain, elit-elit politik yang terbiasa dengan sistem yang korup dan tertutup, masih saja memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk untuk mencapai tujuan-tujuannya. Maka DPR yang diharapkan berada di garis depan dalam perang melawan korupsi, justru tak putus dirundung isu korupsi. Pencalonan anggota DPR diwarnai praktek politik uang. Bahkan Ketua DPR pun harus menghadapi delegitimasi yang luar biasa keras dari publik karena masalah korupsi juga.

Gambaran nyata tentang “sakitnya melahirkan demokrasi” terasa sekali ketika kita berbicara tentang serangkaian konflik lokal yang

terjadi pasca 1998. Indonesia selalu bangga dengan keanekaragaman budayanya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan terbesar negeri ini. Namun ketika perimbangan politik berubah, dan goyah pula kontrol keamanan di Indonesia, maka terlihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan demi perbedaan itu menyimpan bahaya laten, bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Maka meletuslah serangkaian konflik horisontal di Ambon, Maluku Utara, Pontianak, Mataram, Kupang, Aceh, dan Poso. Sesama bangsa baku bunuh karena perbedaan agama atau suku, dan puluhan ribu orang terbantai dengan cara yang keji. Sangat ironis karena mereka sebelumnya bertetangga, rekanan bisnis, bahkan terikat hubungan keluarga. Reformasi menimbulkan kerumitan baru dalam menjaga stabilitas keamanan dalam teritori Indonesia yang begitu luas. Namun ada perkembangan menggembirakan berkaitan dengan perkembangan rekonsiliasi konflik. Semakin lama, pemerintah dan masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya merehabilitasi korban-korban G30S/1965. Maka lahirlah perundang-undangan yang bertujuan mengembalikan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial korban-korban G30S/1965.

Buku ini juga memotret dilema gerakan reformasi, dalam kaitannya dengan problem-problem terorisme di Indonesia. Di saat kita sedang berusaha mereformasi peran militer, dengan mengembalikannya ke barak, dengan mengurangi keterlibatannya dalam urusan politik dan pemerintahan, kita dihadapkan pada fakta-fakta baru yang justru membutuhkan peran lebih militer. Aksi-aksi terorisme yang belakangan sering terjadi di Indonesia, pada satu sisi menunjukkan lemah sistem pertahanan dan keamanan negara dalam menjamin rasa aman warganya dan warga asing, dan dalam menjaga teritori Indonesia yang begitu luas. Untuk mengatasi masalah ini, sistem pertahanan dan keamanan nasional harus diperbaiki, dan berarti sulit dihindari opsi untuk membekali TNI/Polri dengan wewenang-wewenang yang lebih dan khusus, dalam kaitannya dengan upaya mendeteksi jaringan terorisme. Maka lahirlah Perppu UU Anti Terorisme, serta kemudian UU Penanggulangan Terorisme, yang diantaranya memberi wewenang

polisi untuk menindak, menangkap, dan menginterogasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan jaringan terorisme.

Dilema yang muncul kemudian adalah tidak ada jaminan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terjadi abuse of power. Atas nama usaha memerangi terorisme, ada kecenderungan aparat keamanan main tangkap orang tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku, tanpa memperhatikan azas-azas praduga tak bersalah. Atas nama perang terhadap terorisme, perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak-hak sipil cenderung dikesampingkan.

Dalam prakteknya usaha memerangi terorisme juga mendeskreditkan kelompok-kelompok agama tertentu. Memang ada indikasi-indikasi keterlibatan kelompok agama tertentu dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Namun tetap perlu dihargai hak-hak individu atau kelompok untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, untuk menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa paksaan dan teror. Dilema-dilema seperti inilah yang secara bernas ditampilkan buku ini, dengan narasumber dan analisis yang beragam.

Buku ini ditutup dengan satu bab yang menunjukkan betapa lemahnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya. Para buruh migran pergi ke negeri orang karena tidak banyak yang bisa dilakukan di negeri sendiri untuk bertahan hidup. Negara telah gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup, telah gagal menyejahterakan warganya. Maka orang pun berbondong-bondong mencari nafkah ke negeri orang. Perlu diingat, para buruh migran itu bekerja bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, namun juga untuk negara. Setiap tahun mereka menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi negara, maka dijuluki sebagai “pahlawan devisa.” Namun apa yang kemudian terjadi? Ketika banyak masalah menghampiri mereka di negeri orang : kekerasan fisik, pemerkosaan, gaji yang tidak diberikan, dan seterusnya, pemerintah tidak berusaha keras melindungi mereka. Bahkan ketika di dalam negeri pun mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi : menjadi obyek pemerasan oleh perusahaan

pemberangkatan TKI/TKW dan oleh oknum-oknum aparat ketika mereka pulang ke Indonesia. Alih-alih memikirkan bagaimana memanusiakan para pahlawan devisa itu, para pejabat pemerintah justru sibuk saling lempar-tanggung jawab, bahkan menganggap para buruh migran sebagai “kerikil” dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain.

Pemerintahan yang seperti ini jelas bukan menjadi tujuan dari gerakan reformasi. Namun faktanya, gerakan reformasi sejauh ini memang belum berhasil mengubah kultur dan kinerja unsur-unsur pemerintah. Reformasi belum berhasil mentransformasikan orientasi-orientasi dan lembaga pejabat publik, serta meningkatkan sensibilitas mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi publik. Dengan demikian, masih ada banyak hal yang harus diperbuat dan diperbaiki ke depan. Buku ini, bisa menjadi bahan untuk melihat agenda-agenda reformasi apa saja yang sudah tercapai, serta agenda-agenda reformasi apa saja yang sudah dicapai. Pemikiran-pemikiran yang muncul di dalamnya, bisa menjadi referensi untuk merumuskan perbaikan-perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan akselerasi pencapaian agenda-agenda reformasi di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2006

Agus Sudibyo

Editor

BAB I

REFORMASI HUKUM DAN PEMILU

TENTARA DAN KOMISI KONSTITUSI

Tanggal : 8 Agustus 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : J. Kristiadi (peneliti CSIS), Syamsudin Haris (Peneliti LIPI), Salim Said (pengamat politik & Militer)

Tak ada yang menduga, bintang dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 adalah Fraksi TNI Polri. Ketika banyak partai politik besar masih memaksakan diri untuk menuntaskan amandemen keempat, TNI Polri justru menawarkan perlunya amandemen konstitusi transisi, lalu dibentuk Komisi Konstitusi yang menjaga pelaksanaan konstitusi. Bisa saja usulan ini akhirnya tidak diadopsi, bisa jadi pula bahwa gagasan tentang Komisi Konstitusi itu sesungguhnya gagasan unsur masyarakat sipil, tetapi TNI/Polri di sini telah menunjukkan sikap yang lebih liberal dan maju. Tanpa Komisi Konstitusi, hampir dapat dipastikan seluruh proses amandemen yang sedang berlangsung hanya melahirkan konstitusi yang compang-camping. Mengapa ide yang cukup maju ini dikemukakan oleh TNI/Polri bukan oleh partai politik besar? Di satu sisi, mungkin TNI/Polri memang sudah berubah dan berhasil mereformasi diri. Ketika partai besar sibuk dengan persoalannya masing-masing, TNI/Polri berlari terlebih dahulu dengan pandangan yang visioner. Tapi di sisi lain, bisa jadi usulan itu menunjukkan betapa canggih TNI/Polri dalam berpolitik, dan sasaran

yang sesungguhnya adalah membuka kemungkinan bagi TNI/Polri untuk kembali dalam kancah politik. Semoga TNI/Polri benar-benar serius dengan komitmennya untuk menarik diri dalam gelanggang politik.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sudah hadir di studio, Bung J. Kristiadi, Peneliti CSIS, Bung Salim Said, pakar politik dan militer. Kita juga akan menjumpai Bung Syamsudin Haris, Peneliti LIPI. Seperti biasa, untuk memperkaya diskusi kita saksikan pengantar berikut :

“Tak diduga, yang menjadi leader dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bukanlah partai politik besar yang menang pemilu, tetapi Fraksi TNI Polri. Ketika banyak partai politik besar masih memaksakan diri untuk menuntaskan amandemen keempat, TNI Polri justru menawarkan perlunya amandemen konstitusi transisi, lalu dibentuk Komisi Konstitusi yang menyempurnakan konstitusi itu. Akankah usulan TNI/Polri mengenai Komisi Konstitusi akhirnya diadopsi ? Mengapa TNI/Polri kini terkesan jauh lebih liberal bahkan dibandingkan partai politik besar sekali pun ? Tanpa Komisi Konstitusi hampir dapat dipastikan seluruh proses amandemen yang kini berlangsung hanya melahirkan konstitusi yang compang-camping. Ini berbahaya, bukan hanya dari segi sistematika perundang-undangan, tetapi juga bahaya ditinjau dari kemungkinan konflik kelembagaan. Konstitusi hasil amandemen tidak koheren dalam platform politik. Proses amandemen konstitusi kita tidak mengikuti kaidah dan metodologi reformasi konstitusi yang benar. Anggota MPR langsung masuk mengubah pasal per pasal yang dicicil per tahun tanpa ada blue print dan tidak ada pula validasi. Sangatlah mungkin dengan cara ini pasal yang satu akan bertentangan dengan pasal yang lain. Melihat pertarungan yang ada di MPR sekarang, Komisi Konstitusi hanya dijadikan sekoci politik. Partai politik besar tampaknya ingin berjuang sehabis-habisnya untuk menyelesaikan amandemen keempat.

Setelah selesai, energi yang ada dikonsentrasikan untuk membuat undang-undang politik sebagai operasionalisasi konstitusi yang sudah diamandemen. Misalnya membuat UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Presiden, dan UU Mahkamah Konstitusi.

Mengangkat Komisi Konstitusi dianggap hanya menunda perkelahian politik, dan justru akan memberikan beban kepada pemerintah di tahun selanjutnya. Komisi Konstitusi hanya mungkin terbentuk jika ada kemungkinan dead lock dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Ini terjadi jika kelompok yang menolak amandemen ketiga dan atau keempat cukup besar. Penolakan kelompok ini harus diakomodasi, jika tidak menginginkan dead lock. Pembentukan Komisi Konstitusi akan dipilih sebagai sekoci politik untuk penyelamatan. Sementara Komisi Konstitusi dipilih, gagasan yang dikemukakan TNI/Polri dianggap yang paling maju sekaligus kompromistis. Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru memang memiliki konsep lebih liberal dan maju, namun karena mereka menolak anggota MPR masuk ke dalam Komisi Konstitusi, maka gagasan Koalisi Ornop itu tidak populer di kalangan anggota MPR. Sedangkan, gagasan TNI/Polri jelas mengakomodasi setiap fraksi MPR, juga memberi tempat kepada birokrat yang ditunjuk presiden, di samping ada ruang pula bagi utusan daerah. Para pakar dan tokoh masyarakat bertanya-tanya, mengapa ide yang cukup maju ini dikemukakan oleh TNI/Polri bukan oleh partai politik besar? Di sinilah canggihnya TNI/Polri dalam berpolitik. Ketika partai besar sibuk dengan persoalannya masing-masing, TNI/Polri berlari terlebih dahulu dengan pandangan yang visioner. Semoga TNI/Polri ikut terlibat dalam politik hanya dalam situasi genting saja.”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita mulai diskusi dari Bung Kristiadi. Mengenai proposal amandemen dari tentara, apakah ini merupakan respon tentara yang tepat di era reformasi ?

J. KRISTIADI :

Pertama, pengantar tadi bagi saya tidak menyegarkan, tapi agak menjengkelkan. Karena sebetulnya Komisi Konstitusi itu pasti bukan gagasan TNI, itu gagasan teman-teman yang semula disebut Koalisi Ornop, kemudian berkembang lebih luas disebut Koalisi Untuk Konstitusi Baru, tapi pasti bukan TNI. Sebenarnya kita juga tidak keberatan teman-teman lain mengadopsi itu, tetapi bahwa itu dikatakan sebagai barang baru, dan TNI memunculkan gagasan ini. Dan kemudian partai besar dikatakan seakan-akan tidak mau menggubris. Sebenarnya itu tidak demikian. PKB juga salah satu partai yang semula sangat concern dengan komisi ini.

Kedua, saya tidak melihat setelah ada pernyataan panglima TNI dan kemudian juga diikuti pandangan umum dari Mas Slamet Supriyadi sebagai ketua fraksi di MPR. Saya lebih melihat secara keseluruhan bahwa sebetulnya memang kita bisa salah paham dengan apa yang dikatakan panglima TNI. Tetapi kemudian saya melihat dengan sangat baik bahwa ternyata fraksi TNI yang juga secara resmi mewakili TNI mengatakan akan mundur dan minta doa restu rakyat. Akan mundur tapi jangan diganggu. Saya pikir itu sesuatu yang sudah lebih jelas, bahwa sekarang ini mereka mau mundur dari politik. Justru oleh karena itu, pernyataan sangat penting yang disampaikan oleh fraksi TNI, bahwa jangan sampai kita dirayu-rayu lagi untuk ikut diseret-seret lagi ke dalam bidang politik. Itu saya kira sesuatu yang sangat baik. Jelas sekali tentara hanya sebagai instrumen negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

DENNY J.A. :

Ketika Jendral Soetarto mengajukan proposal amandemen, apakah anda melihat itu satu back to basic TNI kembali ke dunia politik ?

J. KRISTIADI :

Tidak. Sebenarnya ada kecurigaan dan masukan-masukan yang sampai kepada Pak Tarto yang tidak komprehensif, sehingga kemudian

apa yang disampaikan itu bisa menjadikan masyarakat malah menduga-duga. Seakan-akan kalau tidak diterima secara keseluruhan amendemen ini, kemudian kembali kepada naskah asli. Nah ini bisa ribut, kalau begitu Undang-Undang Dasar yang jadi diamandemen akan seperti apa kalau kita harus kembali ke asli ?

DENNY J.A. :

Dalam menuju tentara profesional, apakah sebaiknya TNI absen saja dalam soal amendemen ?

J. KRISTIADI :

Ya, kalau memang suasana di dalam TNI juga mau mundur dari politik yang sudah digariskan, tahun 2004 mundur dari DPR dan tahun 2009 mundur dari MPR. Andai kata memang yang menyampaikan itu fraksi TNI/Polri kepada MPR, kalau kemudian masyarakat bingung, panglima TNI masih bisa meluruskan. Tetapi begitu panglima menyampaikan kemudian ada masyarakat yang menghantam, menurut saya kurang tepat. Jadi walaupun substansi dari policy-nya itu baik, sebaiknya TNI itu lebih baik abstain. Karena nanti lebih taktis kalau yang menyampaikan itu dari fraksi TNI dan kemudian juga saya kira memang untuk menunjukkan bahwa panglima TNI sudah tidak ikut-ikutan politik dan sudah memasuki masa-masa akhir dalam berpolitik.

DENNY J.A. :

Kalau kita mengatakan, misalnya TNI merasa amendemen ini menuju pada dead lock sehingga mereka mempunyai legitimasi untuk terlibat lagi dalam politik. Masih ada tema seperti itu ?

J. KRISTIADI :

Yang dikhawatirkan bahwa ada satu hal lagi yang waktu itu kontroversial. Dikatakan di media, bahwa panglima TNI juga

mengatakan, kalau memang nanti terjadi perkembangan yang harus memunculkan dekrit, kalau memang dekrit itu berguna untuk rakyat banyak, kita akan mendukung. Itu juga mengejutkan, tapi tentu apa konteksnya waktu itu sudah berlainan dengan sekarang.

DENNY J.A. :

Jadi selama amandemen ini tentara banyak memberikan sinyal yang justru tidak baik ?

J. KRISTIADI :

Tidak begitu, sinyal itu sebenarnya maunya baik tetapi karena penyampaiannya tidak jelas bisa menimbulkan salah tafsir. Sehingga masyarakat merasa kok TNI begitu lagi. Tetapi setelah ada pidato ketua fraksi TNI di MPR bahwa mereka ingin meninggalkan panggung politik, tidak ada masalah. Mereka meminta doa restu dan meminta supaya sipil tidak menggangukannya.

DENNY J.A. :

Ini finishing yang bagus ya ? Baik, kita ke Bung Salim Said. Bagaimana Bung proposal amandemen dari tentara, apakah ini sinyal yang salah di era reformasi bahwa tentara berpolitik kembali ?

SALIM SAID :

Sebenarnya tentara belum meninggalkan politik, buktinya mereka diwakili di DPR dan MPR. Ini memang menarik. Pada bulan April 2000, di Cilangkap ada Rapim TNI, di mana diputuskan tanpa menyebut kata dwi fungsi, mereka meninggalkan peranan politik pada bulan Agustus di tahun yang sama. Sidang tahunan MPR mengeluarkan Tap No.7 yang memperpanjang tentara dan polisi sampai tahun 2009. Jadi anda bisa membuat tafsiran macam-macam, tapi satu hal yang penting di DPR dan MPR tentara masih ada. Tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali secara legal tentara masih diakui sebagai kekuatan politik.

DENNY J.A. :

Apakah nantinya memang tentara diarahkan sepenuhnya untuk tidak berpolitik ?

SALIM SAID :

Sebelum sampai ke sana, saya ingin menanggapi pernyataan panglima TNI Soetarto dan Kapolri Da'i Bachtiar. Kita selalu menyebutkan Panglima Soetarto, padahal itu ditandatangani bersama antara Jenderal Soetarto dan Jenderal Da'i Bachtiar, dua orang yang bertanda tangan begini, ada yang mengatakan mengapa harus panglima dan Kapolri ? Mengapa tidak ketua fraksi saja ? apa yang dikatakan Kristiadi itu tadi benar. Semestinya kalau bisa ditembak dengan "bedil" tidak usah dengan "canon". Tetapi jangan lupa pernyataan itu dikeluarkan di sebuah balai pertemuan yang terkenal sebagai tempat pesta perkawinan, tidak dikeluarkan di markas besar TNI. Artinya Soetarto dan Da'i Bachtiar—meskipun Da'i Bachtiar tidak hadir—sadar betul bahwa ini tidak datang dari tentara sebagai kekuatan yang bersenjata, tetapi sebagai sebuah kekuatan politik yang diwakili secara resmi DPR dan MPR. Dengan kata lain, hari itu Soetarto dan Da'i Bachtiar berfungsi dan berbicara sebagai "DPP" dari "partai" TNI dan Polri. Nah kalau tentara dan polisi diakui sebagai kekuatan politik atau masih diakui di DPR/MPR, maka dia mempunyai hak yang sama dengan partai lain, yang DPP-nya memberikan keterangan politik. Secara legal Soetarto dan Da'i Bachtiar tidak bersalah.

DENNY J.A. :

Apakah nantinya tentara kita akan lebih mirip di Turki, misalnya tidak sepenuhnya keluar dari politik. Ataupun seperti di negara Barat yang tentaranya profesional ?

SALIM SAID :

Kita memerlukan perjalanan jauh ke arah sana, ini ceritanya terlalu panjang. Tetapi saya melihat bahwa berdasarkan pengamatan

sejarah adalah sulit untuk mengharapkan TNI sama sekali tidak terlibat politik, seperti misalnya tentara di negeri-negeri Barat yang demokratis. Jadi model yang akan kita lihat di Indonesia nanti, saya kira model Turki.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Kris, bagaimana menurut Anda bahwa sulit sekali bagi tentara untuk sepenuhnya keluar dari politik melihat dari situasi sosiologis di Indonesia ?

J. KRISTIADI :

Menurut saya berpolitiknya tentara tidak seperti pada masa lalu, karena sangat diperlukan masukan dari beberapa kebijakan yang memang harus melibatkan tentara. Misalnya kebijakan pertahanan, tentu tentara akan ikut berbicara. Saya setuju dengan Bung Salim Said yang mengatakan, bahwa tentara di DPR sampai 2004 dan di MPR sampai 2009. Tetapi ini sebetulnya sesuatu yang memang sangat legalistik. Tentu itu benar tapi jangan lupa juga bahwa ada UU Pertahanan yang lahir belakangan, mengatakan tugas pokok TNI adalah mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan sebagainya. Itu sesuatu yang lebih pokok daripada berpolitik. Oleh karena itu dalam masa-masa seperti sekarang ini TNI idealnya mengikuti suasana kebatinan masyarakat yang menghendaki revenue TNI di sana. Jadi tidak usah lagi menyampaikan sesuatu yang dianggap mengejutkan. Walaupun secara formal TNI masih mempunyai hak, tetapi secara kultur seharusnya sudah mulai meninggalkan.

SALIM SAID :

Tetapi saya ragu. Sejak kita merdeka, adanya tentara di dalam politik karena ada basis sosial bagi tentara untuk berpolitik. Dan sekarang pun masih ada. Jadi seperti kata Saudara Kristiadi, secara legal tentara masih mempunyai hak politik, karena ada Tap MPR dan ada kesepakatan Ciganjur. Menurut saya, TNI sudah waktunya

berpikir bahwa mereka akan lebih baik dan negara akan lebih baik kalau mereka berada di luar lembaga-lembaga politik. Sebab meskipun tentara tidak terlibat politik seperti masa lalu, tidak mempunyai wakil di DPR dan MPR, tidak menjadi catur tunggal atau Muspida, dan sebagainya.

J. KRISTIADI :

Itu bukan basis soal, bahkan kultur militer di situ yang lebih besar sebetulnya.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita hubungi pakar politik LIPI, Bung Syamsudin Haris. Halo Bung, selamat malam ? Sekarang ini fraksi TNI/Polri menyetujui bahwa semua anggota MPR dipilih dan meminta amandemen satu sampai empat dituntaskan. Tampaknya politik TNI/Polri sekarang ini semakin liberal, bagaimana pendapat Anda ?

SYAMSUDIN HARIS :

Ya, selamat malam juga, Bung. Saya ingin kembali kepada statement Jenderal Soetarto bahwa dia dan TNI pada umumnya memang pandai menangkap momentum. Jadi, momentumnya adalah situasi di mana teman-teman politisi sipil sedang konflik, mengenai setuju atau tidak setuju amandemen konstitusi. Nah tiba-tiba muncul panglima TNI sehingga menimbulkan tanggapan positif maupun negatif. Saya melihat di sini memang satu kelebihan, kepandaian, atau kelihaihan TNI memanfaatkan momentum. Jadi ada public image. Mengenai politik tentara sekarang ini lebih liberal atau tidak sebetulnya ini sangat tergantung pada teman-teman politisi sipil juga. Kalau kita kembali pada paradigma baru TNI yang dibuat sejak zaman Wiranto, memang ada keinginan untuk mendukung profesionalisme TNI dan supremasi sipil di pihak lain. Namun, demikian di lingkungan politisi sipil sendiri memang tidak banyak yang mempunyai visi jelas mengenai bagaimana seharusnya TNI dalam kehidupan politik kita.

jadi TNI tampak liberal justru karena sipil tampak lebih konservatif sekarang. Di sisi lain di tubuh TNI pun mulai tumbuh generasi yang memang tidak mau dilibatkan terlampau jauh dalam kehidupan politik akibat pengalaman masa lalu yang tidak begitu enak.

DENNY J.A. :

Kalau politik liberal di TNI, apakah ini gejala dominan ataukah masih minoritas di kalangan elit tentara aktif yang berpengaruh sekarang ?

SYAMSUDIN HARIS :

Ya, kalau kita melihat pada umumnya Fraksi TNI/Polri di majelis misalnya, kalau tidak salah kebanyakan bintang satu, ada beberapa kolonel, serta beberapa bintang dua. Nah kalau melihat generasi ini, bisa jadi keinginan untuk menegakkan TNI yang profesional memang semakin banyak di lingkungan TNI. Hanya apakah itu cukup dominan mungkin tidak mudah membacanya.

DENNY J.A. :

Fraksi TNI mengatakan mereka setuju bahwa MPR masa mendatang harus dipilih semua, apakah ini akhir dari masa dinas TNI/Polri di parlemen ?

SYAMSUDIN HARIS :

Ya, secara institusional memang dengan suasana majelis yang mencakup DPD dan dewan itu tidak ada lagi yang diangkat, termasuk TNI dan Polri. Namun demikian jangan lupa di dalam rancangan UU Pemilu, ada peluang bagi anggota TNI, kepolisian, atau PNS untuk duduk sebagai anggota DPD. Saya melihatnya sebagai momentum bagi kalangan militer untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik nasional, melalui DPD, walaupun sekali lagi tidak bersifat institusi. Tetapi mereka harus nonaktif dulu untuk bisa duduk di sana,

bahkan memang semestinya pensiun dulu sejak masa pencalonan.

DENNY J.A. :

Mereka mengajukan bahwa Komisi Konstitusi harus didirikan tahun ini juga, apakah Anda setuju ?

SYAMSUDIN HARIS :

Dalam konteks Komisi Konstitusi, yang penting disepakati bahwa lembaga ini berfungsi menyempurnakan atau membenahi hasil amandemen yang sudah dilakukan selama empat kali. Saya melihat memang sebaiknya dibentuk pada sidang tahunan ini, sedangkan untuk tahun depan adalah masa kerja bagi Komisi Konstitusi yang akan membenahi hasil amandemen konstitusi itu.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, terima kasih banyak. Kita explore dulu Bung J. Kristiadi, bagaimana porsi Komisi Konstitusi ? Menurut tentara, anggotanya 35 orang termasuk pakar birokrat dan anggota MPR, Anda setuju komposisi ini ?

J. KRISTIADI :

Harus kita bicarakan dulu lebih mendalam mengenai Komisi Konstitusi ini. Komisi Konstitusi telah menjadi isu populis, semua ingin menyebut tetapi dengan makna dan isi yang berbeda juga. Menurut saya, sudah merupakan kemajuan bahwa MPR sudah memutuskan akan dibentuk Komisi Konstitusi dan dibicarakan oleh badan pekerja. Kita masih bisa bernegosiasi menjelaskan apa maksud sesungguhnya Komisi Konstitusi ini. Kalau diusulkan oleh TNI, saya kira justru hanya untuk melakukan penulisan kembali dari amandemen satu, dua, tiga, dan empat. Saya ingin memberikan catatan merespon dari Bang Salim tadi mengenai basis politik TNI. Saya kira justru memang lebih dahsyat daripada sekedar basis, tetapi mind set yang militeristik di kalangan sipil. Mas Syamsudin tadi juga mengatakan bahwa sipil

kadang-kadang tidak mengerti juga bagaimana menempatkan TNI yang benar. Sebagaimana penilaian profesional masih banyak aturan yang harus dibuat, dalam rangka memetakan TNI di dalam posisi yang benar. Saya kira memang pekerjaan sipil banyak, di samping dia harus memberikan frame work hukum yang jelas bagi TNI, juga dengan dirinya membangun partai yang kuat, institusi, dan kontrol politik. Jadi, menurut saya keterlibatan tentara di politik juga diundang politisi sipil sendiri. Sekarang ini biang keladinya memang sipil.

DENNY J.A. :

Soal Komisi Konstitusi, Anda setuju anggota MPR dilibatkan juga di sana?

J. KRISTIADI :

Tidak ada yang mutlak-mutlakan. Kita melihat bukan karena MPR, tetapi melihat integritas orang-orangnya, dan lain sebagainya.

DENNY J.A. :

Dan juga Anda setuju bahwa kewenangannya dibatasi tidak lagi membuat konstitusi baru, tetapi hanya rewriting saja?

J. KRISTIADI :

Komisi Konstitusi yang kita usulkan sebetulnya adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh MPR, untuk mempersiapkan suatu rancangan yang menyeluruh, yaitu kewenangan mempersiapkan, mensosialisasikan, dan melakukan konsultasi publik dan sebagainya. Tetap kewenangan politik itu tentu ada di MPR.

DENNY J.A. :

Bung Salim, Anda mempunyai pandangan mengenai Komisi Konstitusi versi tentara ini? Apakah kewenangan dibatasi hanya untuk menelaraskan berbagai amandemen yang sudah dibuat tetapi tidak membuat konstitusi baru ?

SALIM SAID :

Saya bukan ahli hukum, jadi agak repot menjawab pertanyaan Anda. Saya lebih cenderung menjawabnya secara common sense saja. Menurut saya yang mempunyai hak menurut konstitusi untuk mengubah undang-undang dasar itu MPR. Pengalaman kita menunjukkan bahwa MPR itu orangnya tidak equip untuk melakukan itu, tetapi mereka mempunyai wewenang dan hak untuk itu. Alangkah baiknya dalam rangka itu MPR dibantu oleh sebuah lembaga yang mengerti dan mengetahui bagaimana menyusun, memperbaiki, dan mengamandemen undang-undang. Nah ini cerita mengenai Komisi Konstitusi pada Sidang Istimewa tahun 1998 _ saya kebetulan menjadi anggota MPR masa transisi. Jadi, ide amandemen itu mendapatkan bentuknya pada waktu Sidang Istimewa.

DENNY J.A. :

Jadi kewenagannya membuat sebuah draf begitu, ya ?

SALIM SAID :

Ya, dan menurut saya itu adalah tugas ahli. Setelah selesai mereka mengembalikan kepada MPR, untuk meresmikan konstitusi itu. Kalaupun ekarang berkembang gagasan misalnya referendum dan sebagainya, saya tidak mengerti itu. Tetapi sebaiknya kita mengakui itu hanya wewenang MPR.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita mendengar komentar publik melalui telepon, dimulai dari Bung Abdul dari Jakarta, silakan, Bung.

ABDUL :

Selamat malam, Mas Denny, Pak Kris, dan Pak Salim Said. Kalau saya melihat sekarang ini jangan-jangan TNI/Polri ahlinya dalam bidang politik, tidak dalam bidang kemananan. Kalau mereka ahli

dalam bidang keamanan, masalah Aceh sudah lama terpecahkan, juga tidak akan terjadi konflik di Poso dan Maluku. Tetapi saya melihat rekomendasi dalam bidang politik mereka cukup bagus juga. Nah ini harus dipertimbangkan juga. Saya menyarankan dan sepakat jika Komisi Konstitusi dibentuk tahun 2004. Kita menjalankan undang-undang yang sudah diamandemen sekarang ini.

DENNY J.A. :

Bung Abdul, terima kasih banyak. Sekarang ke Bung Rico di Tangerang, silakan, Bung.

RICO :

Halo selamat malam untuk semua. Menurut saya logis kalau panglima TNI mengeluarkan statement seperti itu. Panglima memberikan signal bahwa ada sesuatu hal yang membahayakan. Karena saya melihat hanya tentara yang merasa ada yang mengobok-obok Undang-Undang Dasar sebagai junjungan yang tertinggi. Karena kelompok tentara merasa diacak-acak dan tugas tentara untuk menjaga kesatuan, artinya bilamana itu diobok-obok maka kesatuan akan hancur. Kalau masalah nanti TNI tidak berpolitik tahun 2004 dan tahun 2009, saya menyarankan mereka untuk berpolitik dalam artian politik praktis tidak di parlemen saja. salah satu contoh biarkanlah keluarga-keluarga tentara itu untuk bergaBung.

DENNY J.A. :

Terima kasih, satu lagi Bung Hasyim, silakan.

MUH. HASYIM :

Selamat malam semuanya. Saya tertarik pada pandangan tentang pernyataan dari panglima TNI. Kalau kita melihat pasal 2 UU Tahun 1999, itu sudah memberikan tugas khusus kepada MPR supaya ABRI memfungsikan diri untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Pada

TNI, kami dari generasi muda mahasiswa yang jelas-jelas membela keras dengan pernyataan yang dilakukan atau yang diajukan panglima terhadap MPR. Yang kedua, kami melihat MPR dan DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa seharusnya mereka menunggu atau meminta petunjuk dari ABRI dan segala macam pihak-pihak tertentu termasuk “Parliament Watch”. Jadi kami memohon kepada pemerintah terutama kepada “Parliament Watch” untuk mendukung kelompok-kelompok yang mendesak agar ada pembentukan Komisi Konstitusi.

DENNY J.A. :

Bung Hasyim kita sudah menangkap message-nya. Pemirsa Metro TV, kembali kita menghuBungi Bung Syamsudin Haris. Dari komentar penelepon tadi mengatakan bahwa TNI keahliannya di bidang politik, bukan kemandirian. Dan juga masalah politik liberal tadi jangan-jangan bukan politik tentara, tapi bagian dari image building di era amandemen ini, bagaimanakah komentar Anda ?

SYAMSUDIN HARIS :

Sebagian saya setuju dengan apa yang anda kemukakan, bahwa TNI membutuhkan simpati publik, dan momentum amandemen itu yang dimanfaatkan. Walaupun demikian, saya juga setuju untuk sebagian pandangan teman-teman di TNI kadang-kadang lebih maju dibanding teman-teman sipil. Dalam kaitannya Komisi Konstitusi misalnya, saya melihat bahwa sebaiknya diputuskan pada Sidang Tahunan bulan Agustus, sebab kalau ditunda ini akan kehilangan momentum.

DENNY J.A. :

Apakah cukup waktu, Bung ? Kalau sekarang ini diputuskan kira-kira kapan selesainya undang-undang berikutnya sebagai operasionalisasinya ?

SYAMSUDIN HARIS :

Ya, memang itu menjadi masalah, tetapi yang paling penting adalah bahwa ada suatu putusan politik yang mendelegasikan kewenangan penyusunan konstitusi itu pada sebuah institusi yang bukan hanya majelis.

DENNY J.A. :

Sekarang Bung Salim. Bagaimana, Bung ? Ada kesan politik tentara lebih liberal ?

SALIM SAID :

Saya melihat dengan pengalaman sekian puluh tahun Dwi Fungsi yang berakhir dengan dihujat, perlu diketahui bahwa sebenarnya di tahun-tahun terakhir Dwi Fungsinya, tentara itu sudah resah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang keadaan itu memungkinkan mereka belajar. Sejarah menunjukkan bahwa tanpa Dwi Fungsi pun tentara adalah kekuatan politik. Kalau mereka mempelajari dengan seksama pengalaman politik tentara sebelum Pidato Jenderal Nasution–Pidato “Jalan Tengah” pada bulan November 1958 maka mereka akan bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk apa membuat doktrin, memberi beban berlebihan kepada tentara, kalau tentara bisa memainkan peranan politik tanpa itu. Untuk apa menaruh orang di DPR/MPR kalau tanpa itu pun tentara selalu bisa membuat kekuatan politik. Padahal sebenarnya tentara tetap menjadi kekuatan politik, bercermin pada pengalaman mereka. Mudah-mudahan mereka membaca sejarah mereka sebelum pidato Jenderal Nasution bulan November 1958.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Kris, Anda mempunyai komentar ?

J. KRISTIADI :

Ya, saya sangat senang dengan pernyataan beberapa penelepon tadi, itu merupakan sentilan-sentilan yang paling baik untuk tokoh-tokoh partai politik, ternyata lebih dianggap planable politic. Memang setelah 30 tahun tentara boleh berpolitik terus-menerus, namun jangan lupa bahwa kita harus meyakinkan pada masyarakat bahwa tentara tugasnya adalah perang. Partai-partai harus mendidik rakyat berpolitik, dan tugas partai sekarang ini sangat berat tetapi harus dilaksanakan.

DENNY J.A. :

Sekarang closing statement, dimulai dari Bung Syamsudin Haris. Silakan, Bung.

SYAMSUDIN HARIS :

Bagaimanapun saya melihat bahwa TNI meninggalkan politik adalah tuntutan masa depan dan supremasi sipil adalah suatu keniscayaan global yang tidak bisa dielakkan oleh bangsa kita juga.

J.KRISTIADI :

Kepada teman-teman di MPR, sekarang adalah momentum untuk membuat sejarah emas bagi perjuangan mereka untuk membangun sebuah konstitusi yang baru. Kalau ingin dicatat sebagai pelaku sejarah dengan tinta emas dengarkanlah suara masyarakat, tetapi kalau ingin dengan tinta buruk, maka abaikanlah pendapat masyarakat. Dan kepada TNI saya kira teruskan saja reformasi di dalam, dan sipil akan membantu bagaimana membuat suatu aturan agar anda semua mendapat tempat yang terhormat sebagai tentara profesional yang bisa perang dan tidak usah ikut berpolitik.

SALIM SAID :

Saya melihat bahwa sipil inilah yang selalu memberikan kesempatan kepada tentara untuk kelihatan lebih cantik dari aslinya.

Jadi, sekarang ini orang memuji-muji ide-ide Komisi Konstitusi dari tentara. Tadi ada yang mengatakan kalau seakan-akan tentara mendesain gagasan itu, ini semata-mata karena kesalahan politisi sipil. Dan sejarah kita menunjukkan bahwa majunya tentara dan masuknya tentara ke dalam politik selalu karena politisi sipil kita menciptakan peluang-peluang bagi tentara.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak kepada semua pembicara, pro dan kontra politik tentara akan terus berlangsung. Seandainya pun tentara harus mengambil tanggung jawab politik mudah-mudahan yang kali ini adalah yang terakhir kalinya.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

PEREMPUAN TERSINGKIR DARI DPR ?

Tanggal : 14 November 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Choesyana Soffat (Wasekjen KPPI), I Nyoman Sumaryadi (Depdagri), Hamdan Zoelva (PBB), Eka Komariah Kuncoro (Golkar)

Populasi perempuan di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan populasi laki-laki. Namun keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah. Sejak pemilu 1955 hingga 1999, keterwakilan perempuan rata-rata 8,6% di DPR pusat, 5% di DPRD propinsi, dan 2,5% di DPRD kabupaten. Dalam konteks ini isu quota perempuan menjadi isu yang menarik sekaligus kontroversial menjelang pemilu 2004. Berbagai pihak, khususnya para aktivis perempuan mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk mengadopsi usulan 30% quota perempuan pada kepengurusan partai dan keanggotaan DPR dalam UU Partai Politik. Namun sejauh ini usaha tersebut menemui kegagalan. Mayoritas anggota DPR, tanpa terkecuali yang perempuan, menganggap quota 30% perempuan itu berlebihan dan belum diperlukan. Bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam politik ? Haruskah melalui kompetisi bebas ? Atau harus melalui upaya khusus seperti memberikan quota 30% kepada perempuan di DPR dan di partai politik ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Perempuan Tersingkir Dari DPR ?” Untuk membahas topik ini, telah hadir di studio, Ibu Choesyana Soffat dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Bung I Nyoman Sumaryadi dari Depdagri, serta dua anggota DPR, Ibu Eka Komariah Kuncoro dari Golkar, dan Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang (PBB). Sebelum berdiskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut ini :

“Aktivitas perempuan dari berbagai kelompok mengeksperisikan kekecewaan terhadap pembahasan RUU Partai Politik. Unsur-unsur DPR gagal memasukkan quota minimal 30% bagi perempuan di kepengurusan partai politik. Ironisnya, mereka yang setuju penghapusan quota ini tidak semuanya politisi laki-laki, tetapi juga politisi perempuan. Mereka berpandangan, tanpa quota sekali pun, jabatan tertinggi seperti presiden sudah dijabat perempuan.

Pro dan kontra seputar quota perempuan terus berlanjut. Mereka yang kontra terhadap quota menyatakan, sistem demokrasi adalah sistem yang mengatur prosedur bukan hasil. Pemilu 1999 adalah pemilu yang demokratis, semua partai diperbolehkan mencalonkan siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Jika hasilnya perempuan hanya mendapatkan 8,6% di DPR, itulah suara rakyat yang harus diterima dengan lapang dada. Quota untuk perempuan juga dianggap justru menjadi diskriminatif, seakan-akan kaum perempuan harus diistimewakan terlebih dahulu sebelum mencapai cita-citanya. Padahal demokrasi sangat mensucikan prinsip persamaan hak, jenis kelamin, agama, warna kulit, dan ideologi seseorang.

Sementara mereka yang pro atas quota menyatakan quota perempuan melalui affirmative action bukan pengistimewaan perempuan. Quota hanya dilakukan sementara sebagai recovery yang cepat atas keterpurukan komunitas perempuan. Sudah sejak lama perempuan hidup dalam masyarakat dan kultur yang patriakal. Melalui proses sejarah, kapabilitas perempuan dan laki-laki memang sudah tidak sama.

Jika mereka diminta bertarung dalam kesempatan sama, tentu lelaki mendominasi. Hanya quota yang dapat menyelamatkan minimnya keterwakilan perempuan. Permasalahannya, akankah politik kita lebih baik jika banyak perempuan menjadi politisi ? Akankah undang-undang kita lebih berkualitas jika lebih banyak perempuan yang menjadi anggota DPR ?”

DENNY J.A. :

Pertama-tama kita ke Ibu Choesyana dulu. Menurut Anda, mengapa sedikit sekali perempuan yang terpilih di DPR ?

CHOESYANA SOFFAT :

Menurut saya yang salah bukan demokrasinya, tetapi rekrutmen dalam pengisian jabatan-jabatan politik. Rekrutmen politik selama ini kurang responsif gender. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau perempuan yang terpilih sedikit.

DENNY J.A. :

Apa akibatnya jika jumlah perempuan di DPR sangat sedikit ?

CHOESYANA SOFFAT :

Produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR cenderung tidak responsif gender. Misalnya yang berkaitan dengan belum adanya kebijakan yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja wanita.

DENNY J.A. :

Ternyata buruk sekali kalau di DPR minim perempuan. Anda dan kawan-kawan memperjuangkan quota perempuan minimal 30%. Mengapa harus quota ?

CHOESYANA SOFFAT :

Karena quota adalah upaya akselerasi persamaan de facto yang bersifat sementara. Dan upaya ini konstitusional, karena peraturan perundangan nasional yang ada, mendukung.

DENNY J.A. :

Mengapa 30% ?

CHOESYANA SOFFAT :

Pemilihan angka kritis 30% sebagai critical numbers, dikarenakan pada hasil penelitian lembaga-lembaga internasional dinyatakan, dalam satu kehidupan organisasi atau kelompok apabila tidak mencapai 30%, maka ide-ide atau aspirasi-aspirasi yang muncul dari anggota organisasi atau kelompok tersebut tidak akan terdengar.

DENNY J.A. :

Kita mendengar panitia kerja (Panja) RUU partai Politik sudah mencoret quota 30%. Komentar Ibu ?

CHOESYANA SOFFAT :

Ini menjadi keprihatinan perempuan karena hal itu bertentangan dengan UUD 1945.

DENNY J.A. :

Pak Nyoman, Depdagri dituduh menghilangkan quota perempuan 30% di politik. Apa reason-nya ?

I NYOMAN SUMARYADI :

Kalau dilihat dari perspektif gender, sebetulnya usul tersebut sungguh simpatik. Tetapi satu hal yang perlu dikaji ulang secara rasional, apakah harus dicapai dengan quota ? Mengapa tidak dicapai dengan peningkatan kapabilitas dan kapasitas pribadi ?

DENNY J.A. :

Persaingan yang equal, di mana buruknya quota itu sampai bisa merusak tata negara ?

I NYOMAN SUMARYADI :

Sebenarnya tergantung bagaimana kita melihat. Kalau merusak tatanan negara, contohnya tatanan pemerintahan propinsi, harus dipertimbangkan lagi. Kita mempunyai 30 gubernur. Kalau 30% harus perempuan, berarti 10 orang dari 30 gubernur itu harus perempuan. Bagaimana mengaturnya ? Siapa yang mengaturnya ? Belum lagi dengan bupati dan walikota.

DENNY J.A. :

Bagaimana di DPR ?

I NYOMAN SUMARYADI :

Bagaimana mengatur agar masing-masing partai 30% anggota DPR-nya perempuan ? Ini yang dimaksudkan dengan takaran konkret dari satu tata pemerintahan.

DENNY J.A. :

Apakah undang-undang akan menghapus quota perempuan sama sekali ?

I NYOMAN SUMARYADI :

Peluang itu sangat kecil. Sebetulnya tidak semestinya ditumpahkan pada mekanisme bahwa pemerintah itu menolak. Pemerintah, dalam hal ini Depdagri saat menanggapi usul dari Fraksi Golkar dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan simpatik, tetapi ini keputusan kolektif.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita mendengar suara anggota DPR. Kita mulai dari ibu Komariah. Partai Golkar sejak awal memperjuangkan 30% quota perempuan. Apakah motivasinya ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Pertama, partisipasi perempuan di bidang politik sangat rendah. Kedua, kita melihat potensi wanita saat ini sudah memenuhi 50% dari populasi. Secara kualitas memungkinkan untuk berperan dibidang politik. Dari sisi minat, terlihat adanya peningkatan keinginan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

DENNY J.A. :

Kita mengerti jumlah perempuan harus lebih banyak di politik. Tetapi mengapa harus dengan quota ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Itu merupakan suatu affirmative action, tindakan khusus sementara. Karena kita melihat dari hasil-hasil kajian rata-rata peningkatan per periode pemilu, hanya 0,5%. Kalau dibiarkan tanpa ada quota, untuk mencapai angka 30% atau sepertiga dari jumlah yang ada, memerlukan waktu minimal 75 tahun.

DENNY J.A. :

Kalau hanya kompetisi bebas, menurut anda mustahil perempuan bisa mencapai angka 30% dalam waktu 5-10 tahun ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Betul, tidak mungkin tercapai.

DENNY J.A. :

Mengapa Partai Golkar akhirnya mengalah agar quota itu dihapus?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Sebenarnya bukan mengalah, kita akan tetap mengusahakan. Hanya suara mayoritas waktu di Panja tidak memungkinkan untuk bersikeras memperjuangkan quota itu. Dengan catatan bahwa dalam kalimat “pemahaman proporsional”, kalau proporsional berarti sesuai jumlah populasi yang ada, artinya perempuan dan laki-laki sama. Kemudian ada istilah “peningkatan kualitas dan kuantitas signifikan”. Signifikan berarti lonjakan, ada terobosan. Sama saja kita menggunakan istilah quota, hanya angkanya yang belum disepakati.

DENNY J.A. :

Walaupun Ibu mengalah, tetapi ada kompensasi tidak tertulis bahwa partai politik akan semakin mengakomodasi perempuan ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Betul. In mind masing-masing partai ada semacam tindakan khusus untuk menyiapkannya.

DENNY J.A. :

Tetapi RUU ini belum menjadi undang-undang, masih ada Pansus dan sidang pleno. Apakah Golkar akan kembali bertarung dan menetapkan kembali quota itu ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Kalau memungkinkan, kita akan fight lagi karena belum keputusan akhir.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Bung Hamdan Zoelva. Berbeda dengan Golkar, partai anda dikenal sejak awal tidak mendukung quota 30% perempuan, mengapa ?

HAMDAN ZOELVA :

Karena kami memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam Syari'at Islam. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Untuk apa kita pertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Kita memberikan kesempatan yang sama laki-laki dan perempuan untuk mengabdikan kepada negara, apakah menjadi anggota DPR, gubernur, atau walikota. Dan harus diingat, tidak ada dalam muatan undang-undang majunya perempuan harus menjadi pimpinan negara, menjadi anggota DPR dan menjadi gubernur.

DENNY J.A. :

Banyak yang melihat partai anda bernafaskan Islam. Apakah karena muatan Islam sehingga anda menolak quota perempuan ?

HAMDAN ZOELVA :

Tidak. justru banyak aktivis Islam perempuan di partai kami dan banyak yang menjadi anggota DPR. Persoalannya bukan itu. Tetapi mengapa tidak banyak anggota DPR atau gubernur wanita? Persoalannya adalah pada pendidikan, kualitas, dan kesadaran politik. Seharusnya yang harus diperbaiki adalah aspek-aspek itu.

DENNY J.A. :

Ibu Komariah tadi mengatakan, jika tidak ada quota dan hanya kompetisi bebas, akan memakan waktu 75 tahun untuk sampai pada taraf 30 persen keterwakilan perempuan. Bagaimana menurut pendapat anda ?

HAMDAN ZOELVA :

Persoalannya adalah apakah negara gawat kalau tidak ada perempuan dalam politik ? Kami memandang laki-laki dan perempuan sama saja. Kalau perempuannya rusak, rusak juga negara. Kalau lelakinya rusak, rusak juga negara. Kami melihat dalam komposisi yang sama.

DENNY J.A :

Bagaimana dengan pernyataan Ibu Choesnaya yang mengatakan kalau perempuan yang duduk di DPR sedikit, produk hukumnya akan tidak sensitif gender ?

HAMDAN ZOELVA :

Tidak. undang-undang tidak mengatur bahwa laki-laki itu upahnya lebih tinggi dari perempuan. Itu di tataran praktis saja.

DENNY J.A :

Bukan pada tataran de jure, tetapi sosiologi masyarakat ?

HAMDAN ZOELVA :

Bukan regulasi yang perlu diperbaiki kalau begitu, tetapi sosiologi masyarakat yang disempurnakan : pendidikan, peningkatan mutu, kualitas, dan sebagainya.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, apakah negara akan menjadi baik kalau perempuan menjadi politisi atau pemimpin ?

HAMDAN ZOELVA :

Sama saja laki-laki atau perempuan yang berkuasa, sama besar kemungkinannya untuk jelek dan rusak.

DENNY J.A. :

Kembali ke Ibu Choesyana. Pak Hamdan mengatakan jumlah perempuan bertambah pun tidak menjamin kebijakan publik menjadi lebih baik. Bagaimana menurut Anda ?

CHOESYANA SOFFAT :

Terkait adanya keterwakilan perempuan bisa mengubah struktur ketatanegaraan, sebetulnya di dalam UUD 1945, jelas dikatakan bahwa struktur ketatanegaraan hanya akan berubah apabila ada penambahan atau pengurangan lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan. Dan bisa juga merubah struktur ketatanegaraan apabila ada kewenangan. Bukan pada perubahan komposisi laki-laki dan perempuan.

DENNY J.A. :

Mengenai kesulitan teknis, bagaimana 30% gubernur harus perempuan ?

CHOESYANA SOFFAT :

Sebenarnya sebuah tantangan bagi bangsa kita untuk menyadari bahwa pendidikan politik bagi perempuan itu penting. Hak-hak perempuan harus diberikan. Seperti persamaan di depan hukum, seakan-akan affirmative action dalam bentuk quota ini menyalahi asas persamaan di depan hukum.

DENNY J.A. :

Kembali ke Pak Nyoman. Bagaimana menurut anda mengenai jumlah perempuan belum menjamin kebijakan publik lebih baik ?

I NYOMAN SUMARYADI :

Jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan sebagainya seyogyanya tidak dicapai melalui rekayasa. Kami melihat dalam quota justru ada

unsur rekayasa dan diskriminasi.

DENNY J.A. :

Oke Pak, kami bisa menangkap pesan Bapak yang menolak quota dengan perspektif equal opportunity. Sekarang komentar publik melalui telepon dari Bung Edi Komar di Cibubur, silakan.

EDI KOMAR :

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada semua narasumber. Pertama, mengenai quota 30%, hal itu tidak usah dipaksakan, alami saja. Kalau nanti hasilnya lebih dari 30% alhamdulillah. Itulah kemampuan seorang wanita. Kedua, kalau nanti yang memimpin perempuan lagi, apa boleh buat, rakyat yang memilih.

DENNY J.A. :

Menurut Ibu Choesyana, apakah Ibu Megawati cukup memperjuangkan keadilan gender ?

CHOESYANA SOFFAT :

Sebetulnya kita ini berbicara mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Indikator jaminan keterwakilan perempuan dalam politik itu bukan adanya presiden perempuan atau wakil presiden perempuan, tetapi adanya kaum perempuan yang betul-betul bersuara, ikut dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mendapat kesempatan secara kontinyu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

DENNY J.A. :

Ibu Megawati sebagai perempuan apakah memperjuangkan aspirasi gerakan feminis ?

CHOESYANA SOFFAT :

Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, bagi kami adalah kebanggaan. Namun, kami merasa beliau kurang mendukung pengisian jabatan politik untuk perempuan.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Ibu Komariah. Menurut ibu, apakah Ibu Megawati cukup memperjuangkan keadilan gender di ruang sosial ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Secara umum kurang terasa, walaupun secara kepartaian dia mempunyai policy sendiri di mana dia mengintruksikan kepada anggota-anggotanya untuk merekrut satu perempuan di antara lima laki-laki.

DENNY J.A. :

Apa yang harus Ibu Megawati lakukan untuk memperjuangkan gender di ruang sosial ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Sebenarnya dalam RUU Partai Politik, beliau bisa berbuat karena dasar hukumnya kuat. UU HAM, UU tentang Hak Politik Perempuan, UU Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan terakhir dalam TAP MPR No.6 Tahun 2002, jelas merekomendasikan, presiden harus merekrut, membuat kebijakan, membuat peraturan untuk rekrutmen jabatan politik perempuan minimal 30%.

DENNY J.A. :

Sebelum dikomentari, ada telepon dari Ibu Dian, silakan.

DIAN :

Saya melihat persoalan rekrutmen politik ini kalau perempuan tidak diberi akses khusus, maka tidak akan bisa sampai pada kesetaraan. Kalau ketentuan yang netral diberikan kepada laki-laki dan perempuan di mana keadaannya berbeda, berarti tidak adil bagi perempuan. Kalau seperti Pak Nyoman sampaikan bagaimana implementasinya ? Sepanjang mekanismenya adil, maka akan lebih terbuka peluang bagi perempuan.

DENNY J.A. :

Terima kasih Ibu Dian, selanjutnya Bung Trisno di Jakarta, silakan.

TRISNO :

Sebenarnya saya tidak setuju dengan pemberian quota perempuan, karena laki-laki dan perempuan sama saja, yang penting keahlian dan kemampuannya. Kita jangan terjebak dengan koridor pemberian quota. Kalau ternyata quota 30% tidak terpenuhi, maka bisa menjadi bumerang bagi kita. Lebih baik kita serahkan kepada proses demokrasi, artinya laki-laki dan perempuan itu sama saja.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Hamdan Zoelva, partai anda sudah jelas menolak quota perempuan. Apa yang partai anda lakukan untuk meningkatkan sumber daya perempuan di dunia politik ?

HAMDAN ZOELVA :

Yang penting tidak ada hambatan bagi partisipasi perempuan dalam politik terutama dalam keanggotaan DPR. Bagaimana meningkatkan peran dan partisipasi mereka ? Dalam partai kami ada Muslimat Bulan Bintang yang khusus melatih dan mengkader perempuan untuk berpolitik. Di sana ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan Muslimat agar perempuan sadar berpolitik. Di samping struktur resmi dalam

partai, kami selalu mensyaratkan ada pengurus perempuan agar kesadaran politik semakin utuh.

DENNY J.A. :

Apakah ada komitmen di partai anda untuk menambah porsi perempuan di kepengurusan ?

HAMDAN ZOELVA :

Ada. Kami selalu minta agar perempuan dilibatkan dalam struktur formal partai.

DENNY J.A. :

Apakah ada persentasenya Bung, tahun ini 20% atau 30% ?

HAMDAN ZOELVA :

Tidak ada. Kami tidak mempresentasikan karena tergantung daerah masing-masing.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Ibu Komariah, apa yang partai anda lakukan untuk meningkatkan sumber daya perempuan di dunia politik ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Kami melakukan pendidikan dan pelatihan, baik khusus perempuan atau yang tergaBung dengan laki-laki. Kita juga berkerjasama dengan LSM-LSM dan organisasi-organisasi perempuan sampai ke daerah-daerah untuk melakukan penyadaran pendidikan politik.

DENNY J.A. :

Pendidikan politik, efeknya jangka panjang ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Betul.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan caleg ? Adakah komitmen mulai tahun 2004 Golkar akan meningkatkan presentase caleg perempuan ?

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Golkar sebenarnya sudah menerapkan quota 20%. Tetapi mengapa pada tahun 1999 terjadi penurunan yang drastis ? Karena perolehan suara Golkar turun, sehingga sistem rekrutmen Golkar juga harus kita perbaiki.

DENNY J.A. :

Terimakasih Ibu. Di penghujung diskusi kita, kami meminta tiga pembicara untuk berbicara singkat mengenai renungan masing-masing soal peran politik perempuan. Dimulai dari Ibu Choesyana.

CHOESYANA SOFFAT :

Terima kasih. Pertama, mengenai affirmative action dalam bentuk quota, tidak diskriminatif. Kedua, quota perempuan bukan salah satu bentuk meminta-minta, melainkan bentuk recovery, di mana selama ini hak-hak perempuan diabaikan. Ketiga, affirmative action dalam bentuk quota tidak pernah menyalahi asas persamaan di depan hukum, karena suatu peraturan yang diberlakukan secara sama kepada semua orang yang kondisi dan situasinya berbeda-beda, akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada sebagian kelompok lain. Dan akhirnya, mengapa kita berbicara partisipasi politik, kesetaraan tidak dipermasalahkan. Tetapi mengapa ketika berbicara keterwakilan perempuan dalam politik kesetaraan baru dipermasalahkan. Ini adalah bentuk ketidakadilan.

I NYOMAN SUMARYADI :

Saya sepakat keadilan perlu ditegakkan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Kalau itu disepakati, mengapa dipersoalkan suatu quota ? Dorongan kami untuk kaum perempuan, harus diintegrasikan ke dalam politik secara bersama-sama dengan laki-laki sehingga dia ikut mendiskusikan dan mendefinisikan realitas politik. Dan partai membuka kesempatan perempuan untuk “bermain” di situ. Perempuan sendiri harus meningkatkan kapabilitas, kualitas, dan kredibilitasnya.

HAMDAN ZOELVA :

Tidak perlu quota, karena itu memaksa. Seakan-akan perempuan tidak berdaya dan akan berdaya kalau diatur oleh undang-undang. Yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran politik dan kualitas yang baik bagi perempuan agar lebih aktif dalam politik.

EKA KOMARIAH KUNCORO :

Demokrasi bukanlah demokrasi kalau tidak ada keterwakilan yang cukup, dan bagi kaum wanita sekarang keterwakilan yang cukup itu 30%.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih kepada pembicara. Pemirsa Metro TV, jumlah perempuan memang lebih dari separuh jumlah penduduk. Jika perempuan tidak diberdayakan, maka masyarakat tidak bergerak dalam full capacity. Kita berharap partai besar aktif dalam rekrutmen dan kaderisasi politik perempuan.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

SISTEM DUA RATUS PARTAI

Tanggal : 26 Desember 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Eros Djarot (Ketua PNBK), Tumbu Saraswati (F-PDIP DPR-RI), Sjahrir (Ketua PIB)

Sejak awal reformasi 1998, pertumbuhan partai politik di Indonesia sangat mengagumkan. Kini menjelang pemilu 2004, Indonesia memiliki sekitar 200 partai politik. Banyak di antaranya adalah partai-partai politik baru. Muncul pertanyaan, sesungguhnya apa yang ditawarkan partai-partai baru? Apakah benar platform, perangai, dan sikap mereka berbeda dengan partai-partai lama? Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat publik menghormati partai politik? Karena bersamaan dengan pertumbuhan pesat partai politik itu justru terjadi degradasi kepercayaan dan harapan publik terhadap partai politik. Bagaimana tidak, di era multi partai sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia justru semakin terpuruk. Tidak ada kemajuan yang konkrit dalam bidang ekonomi ataupun politik. Korupsi bertambah parah, krisis ekonomi tidak kunjung selesai, harga semakin menjulang tinggi, pengangguran bertambah, hutang negara bertumpuk, dan hukum tidak berjalan efektif. Pada saat yang sama, masyarakat melihat elit partai sibuk dengan perkelahian internal di partainya masing-masing. Melihat sinisme publik yang tinggi atas

partai politik, kita tidak perlu bertanya bagaimana kelangsungan demokrasi dan reformasi di Indonesia ke depan. Karena mustahil demokratisasi berjalan tanpa kuatnya legitimasi partai politik di mata publik luas.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita berjumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sekarang sudah hadir di studio, pertama Bung Eros Djarot, Ketua Umum Partai Nasional Bung Karno. Di sampingnya Bung Sjahrir, Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Kita juga akan menjumpai Ibu Sarawati anggota DPR dari PDIP, dan Amir Santoso pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia. Untuk memperkaya diskusi kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Menurut Departemen Kehakiman, Indonesia kini mempunyai lebih dari 200 partai politik. Di samping partai lama yang melewati electoral threshold 2%, ada begitu banyak partai baru. Sebagian dari partai baru itu adalah reinkarnasi dari partai lama yang gagal melewati electoral threshold 2%, lalu mengganti nama partai. Sebagian adalah pecahan partai lama akibat konflik internal elit partai dengan menggunakan nama lain. Dan jauh lebih banyak partai yang memang partai yang sama sekali baru, di mana elit pemimpinnya baru pertama kali ikut pemilu di tahun 2004 nanti. Apa yang menyebabkan Indonesia memiliki begitu banyak partai politik ? Padahal berdasarkan survei harian Kompas, publik semakin tidak percaya kepada partai politik. Di tahun 2000 misalnya, publik menganggap partai politik mewakili aspirasi mereka. Jumlah responden yang positif terhadap partai politik sekitar 41%, namun jumlah itu di tahun 2001 merosot menjadi hanya 19%. Kini di tahun 2002 hanya 14% saja yang merasa bahwa partai politik mewakili aspirasi mereka. Survei yang sama menunjukkan pula ketidakpercayaan kepada kontribusi partai politik. Sekitar 64% responden merasa partai politik tidak membuat kondisi bangsa lebih baik, hanya 28% responden yang percaya partai politik memberikan kontribusi positif kepada kemajuan bangsa.

Mengapa publik begitu kecewa kepada partai politik ? Kekecewaan itu semakin besar. Sejak reformasi, partai politik bertambah, namun tidak ada kemajuan yang konkrit dalam bidang ekonomi atau pun politik. Korupsi dirasakan bertambah parah, krisis ekonomi tak kunjung selesai, harga semakin menjulang tinggi, pengangguran bertambah, hutang negara bertumpuk, dan hukum tidak efektif. Pencuri motor dibakar massa, sementara pencuri uang negara triliyunan rupiah justru ditoleransi dan dibebaskan dari hukuman pidana. Elit partai sibuk dengan perkelahian internal di partainya masing-masing. Lalu apa yang ditawarkan partai baru ? Bagaimana pula membuat publik menghormati partai politik ? Mustahil demokrasi kuat tanpa kuatnya legitimasi partai politik di mata publik luas. Melihat sarkasme yang tinggi atas partai politik, agaknya memang demokrasi dan reformasi kita, kini diambang bahaya.”

DENNY J.A. :

Isu paling penting soal partai politik saat ini adalah isu ketidakpuasan publik. Kompas membuat survei di tahun 2002, hanya 12% dari publik yang percaya bahwa partai yang ada sekarang ini masih membawa aspirasi publik. Partai politik seperti terasing dari publiknya, apa yang menjadi penyebabnya ? Kita akan menjumpai ketua umum partai-partai baru, pertama Bung Eros Djarot. Apakah Anda melihat bahwa publik semakin tidak percaya pada partai-partai besar yang sekarang ?

EROS DJAROT :

Ya, saya melihatnya. Dari kunjungan ke beberapa daerah, memang apa yang disurvei oleh Kompas itu banyak benarnya. Memang publik sekarang antusiasmenya bukan terhadap partai-partai besar pemenang pemilu. Kalau mau dilihat bagaimana antusias publik terhadap kedatangan kami—bukan hanya PNBK saja ya, partai baru-baru lain juga— menunjukkan satu hal. Mereka sebelumnya merasa kehilangan sebuah harapan, kemudian dengan kedatangan kami muncul sebuah harapan. Walaupun tentunya, ini bukan merupakan suasana yang

bersifat umum, tetapi di kelompok-kelompok tertentu, di akar-akar tertentu, reaksi itu sangat terlihat.

DENNY J.A. :

Kalau kita coba meloihat lebih jauh, menurut Anda apa kesalahan partai besar sehingga mereka mengejar-ngejar dukungan publik sekarang ini ?

EROS DJAROT :

Saya rasa mungkin pada saat semua, setelah 20 Juli ada suatu gerakan yang bersifat mengerucut, di mana seluruh tumpuan harapan menyatu pada satu partai, partainya menjanjikan suatu perubahan dan perbaikan. Jadi seluruh harapan itu terakumulasi di partai-partai besar, terutama partai pemenang pemilu. Sehingga pada saat berkuasa diharapkan apa yang dijanjikan di pemilu atau pun hal-hal yang selama betahun-tahun dibayangkan dan diimpi-impikan akan datang pada saat itu. Jadi harapannya sendiri terlalu besar pada saat itu, malampaui kemampuan riil partai. Artinya harapan masyarakat sangat tinggi, sementara performance pemerintah sangat rendah. Ini salah satu yang mungkin menjadi penyebab utama. Juga konsistensi partai-partai pemenang pemilu memang sangat memprihatinkan. Tidak adanya pendidikan politik publik, kanalisasi aspirasi politik publik, dan pembukaan ruang-ruang partisipasi publik, tidak ada sama sekali. Sehingga sekarang ada banjir partai politik baru. Nah kita harus melihat apakah yang kita bahas itu penyebab banjirnya atau banjirnya itu sendiri ?

DENNY J.A. :

Kalau kita meneliti akar-akarnya lagi, menurut Anda apakah ini masalah leadership partai politik yang terlalu short term interest ?

EROS DJAROT :

Ya, karena dalam kenyataannya, dari segi pendekatan legal formal memang ada partai yang ada di dalam kaitan realitas sehari-hari dan juga substansi dari permasalahan demokrasi atau bangunan demokrasi. Memang Indonesia masih memerlukan lahirnya partai-partai. Partai-partai yang sesungguhnya, bukan partai-partai yang karena mekanisme pergantian kepemimpinan lima tahun sekali. Mungkin hanya bentuk dan tampilannya saja yang baru tetapi substansi dan muatannya masih lama. Jadi partai modern yang terlembaga itu belum benar-benar ada, kalau dari substansinya memang belum ada partai yang ideal.

DENNY J.A. :

Kalau melihat Turki di tahun 2002, menurut Anda apakah akan terjadi di sini 2004 nanti, di mana partai-partai besar berguguran ?

EROS DJAROT :

Itu masih memerlukan satu diskursus lagi. Ada kontraksi-kontraksi sosial, ekonomi, dan politik yang cukup signifikan. Ini gejalanya sudah ada, sehingga saya yakin mengapa partai-partai baru mempunyai kesempatan yang sangat besar, karena partai-partai politik yang besar ini sudah mengampanyakan diri setiap tahun.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Bung Sjahrir. Sebanyak 12% publik tidak percaya terhadap partai yang ada sekarang, apakah Anda melihat hal yang sama ?

SJAHRIR :

Tahun 2003 merupakan tahun keenam krisis ekonomi. Dan selama tahun keenam ini kita melihat kenaikan harga selama enam tahun juga. Maka pekerja-pekerja ataupun orang profesional yang mempunyai

penghasilan tetap, daya belinya menurun. Kita melihat bahwa buruh tani dan juga buruh di perkotaan, mengalami begitu banyak persoalan di bidang kemanan maupun menurunnya daya beli. Sense of crisis sama sekali tidak ada ditunjukkan di sini. Sehingga saya kira kalau pun ada sebuah rekomendasi, barangkali survei itu diasosiasikan partai, sebagai suatu organisasi politik yang hanya mau mengetahui caranya menggunakan kekuasaan, tetapi tidak menggunakan kekuasaan itu untuk kemaslahatan masyarakat. Itu yang menjadi penyebab utama. Sehingga berkali-kali saya mengatakan kepada teman-teman di PIB, musuh kita itu bukan partai lain, tetapi musuh kita adalah kebencian pada partai-partai yang sekarang kuat sekali.

DENNY J.A. :

Banyak juga yang memberikan apology bahwa politik makro begitu sulit, sehingga partai mana pun memerintah memang akan kesulitan sekarang ini ?

SJAHRIR :

Kita tidak perlu terlalu tinggi melihat politik makro. Sederhana saja, apakah kita bisa menciptakan kesempatan kerja ? Kalau bisa menciptakan kesempatan kerja, kita hanya memerlukan penggenjotan pertumbuhan ekonomi. Apakah sulit menggenjot pertumbuhan ekonomi ? Tentunya tidak mudah, tetapi jelas itu tidak bisa dilakukan kalau misalnya di dalam kabinet sendiri para menterinya berkelahi. Jadi bagaimana ada koordinasi kebijakan kalau perkelahian para anggota kabinet dibiarkan saja ? contoh terakhir kasus “R dan D”, sudah dikatakan bahwa inpres dari presiden akan melaksanakan release and discharge. Lalu Menteri Kwik Kian Gie mengatakan ‘terkejut’, kalau dia terkejut semestinya ada yang mengambil sikap politik yang jelas juga, dan tidak terus mendongkel partai yang membuat dia ‘terkejut’.

DENNY J.A. :

Di tahun 2004, menurut Anda apakah kasus Turki di mana partai-partai besar jatuh berguguran, akan terjadi di Indonesia ?

SJAHRIR :

Kita melihat di Pakistan juga begitu. Pakistan adalah suatu situasi di mana praktis partai-partai yang ada adalah partai-partai yang tidak berorientasi pada agama yang terlalu kuat. Tetapi karena perbuatan Musyharaf, kita melihat ada survivor yang luar biasa. Saya melihat bahwa di Indonesia pun ada tanda-tanda rakyat akhirnya akan kembali kepada akal sehat. Masa kita memilih ketua partai yang divonis bersalah ? Masa kita memilih partai seperti itu ? Masa kita memilih partai yang nyata-nyata merupakan partai yang korup ? Sehingga akal sehat itu mengarahkan kita, menuju perubahan.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menghubungi Ibu Tumbu dari PDIP. Selamat malam Ibu ? Mengapa hanya 12% responden yang percaya bahwa partai-partai itu benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat ? Termasuk PDIP tentunya.

TUMBU SARASWATI :

Begini mas, keadaan ini kadang-kadang semakin memburuk. Tetapi di satu pihak ada juga yang mengalami kemajuan signifikan. Tetapi kalau kita melihat secara global apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat, di mana bahan-bahan pokok makanan sudah meningkat harganya. Seperti tadi dikatakan bahwa gaji tetap, tetapi harga-harga lebih naik, sehingga daya beli kurang. Itu masalahnya adalah, kalau kita mengetahui kalau kerusakan-kerusakan di republik ini sudah melalui tahap-tahap yang lama. Karena konteks makronya memang sulit, sehingga bagaimana pun pasti sulit sekarang ini. Pasti tidak bisa semudah secara instan atau pun semudah membalikkan telapak tangan, bahwa itu akan berhasil lebih cepat. Tetapi sebetulnya itu bisa diminimalisir kalau semua komponen bangsa sadar bahwa mereka juga harus bekerja sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa.

DENNY J.A. :

Kalau kita kembali ke contoh kasus PDIP misalnya, kritik bahwa sekarang ada jarak yang jauh sekali antara slogan dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. PDIP dianggap partai wong cilik, tetapi riil yang terjadi justru PDIP terlalu banyak membela konglomerat yang bermasalah. Apakah ini juga menjadi bagian dari kekecewaan publik menurut Ibu ?

TUMBU SARAWATI :

Kita harus melihat lebih jauh lagi ke belakang. Kita tahu bahwa putusan kebijakan, misalnya yang telah digariskan oleh teman-teman dari DPR, itu harus diterima dan dikeluarkan oleh kabinet. Kita tahu sekarang 'kabinet pelangi', dan seperti tadi dikatakan Pak Sjahrir, bahwa ada friksi diantara anggota kabinet, sehingga kualitas kebijakan-kebijakan ke bawah pun akhirnya amat buruk dan sangat sulit digunakan untuk mengatasi keadaan. Seandainya para komponen bangsa bisa secara bersama-sama dan mempunyai hati nurani untuk mengentaskan keadaan di dalam negeri ini, tentu hal ini tidak akan terjadi.

DENNY J.A. :

Jadi PDIP tidak mengontrol pemerintahan sendirian karena itu harus kompromi, begitu Bu ?

TUMBU SARASWATI :

Menurut saya ada beberapa anggota PDIP yang mempunyai hati nurani di parlemen. Tetapi apabila tidak didukung oleh partai-partai lain, tidak menjadi suatu putusan untuk suatu kebijakan.

DENNY J.A. :

Jadi dua alasan Ibu tadi, pertama konteks ekonomi makro yang begitu sulit, dan kedua konteks koalisi yang membuat PDIP harus

kompromi. Itu mungkin yang membuat PDIP agak merosot kinerjanya, begitu Bu ?

TUMBU SARASWATI :

Kalau dikatakan merosot tidak benar, karena kami adalah anggota baru, tetapi kami berangkat dari human right. Misalnya seperti saya, sebagai human right lawyer, tentunya pemikiran-pemikirannya akan selalu menuju apa yang terbaik untuk negara ini.

DENNY J.A. :

Prospek partai baru, seperti yang dibuat Pak Sjahrir dan Bung Eros Djarot, bagaimana Ibu melihatnya ? Ini prospektif ataukah hanya pemain sambilan yang akan hilang juga di depan ?

TUMBU SARASWATI :

Saya kira kalau melihat tokoh-tokohnya, ke depan tidak akan hilang, apalagi kalau mereka tetap konsisten. Dan tentunya akan banyak partai-partai lain juga yang mempunyai pemikiran-pemikiran sama yang didukung konspirasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bersih dan berwibawa.

DENNY J.A. :

Ok Bu, sekarang kita menghuBungi pakar politik Pak Amir Santoso. Soal partai-partai besar dulu Pak Amir, hanya 12% yang percaya pada partai-partai besar lama. Menurut Pak Amir apakah ini riil dan mengapa ?

AMIR SANTOSO :

Memang riil, karena seperti dikatakan oleh Bung Sjahrir, sudah enam tahun perut kita menunggu untuk memperoleh perbaikan-perbaikan ekonomi, dan ternyata memang tidak ada perbaikan sama sekali. Yang dilihat masyarakat kemudian hanya cek-cok kalangan

elit politik. Itu membuat orang menjadi sangat bosan. Sebab jangan lupa, bagi masyarakat, masalah kesejahteraan itu adalah hal yang paling utama. Hal berikutnya baru masalah-masalah lain, dan itu tidak dipenuhi oleh partai politik yang ada sekarang. Jadi ini bisa dilihat sebagai masalah leadership. Karena ketika peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi, ada masa krisis. Ketika masa krisis, persoalannya tidak muncul pemimpin politik yang mampu mengatasi krisis. Nah karena itu kemudian berlanjut kepada ketidakpastian yang terus-menerus.

DENNY J.A. :

Tahun 2004 nanti apakah partai-partai besar akan ditinggalkan pemilih dan partai-partai baru mengambil alih dominasi ?

AMIR SANTOSO :

Saya berharap akan ada perubahan dalam cara berpikir masyarakat, dari yang hanya mengutamakan dukungan-dukungan emosional kepada dukungan-dukungan yang rasional. Mudah-mudahan kemandegan dan bahkan kemunduran sekarang ini bisa menyadarkan masyarakat, bahwa mereka memerlukan pemerintahan yang baru. Kalau itu menjadi dasar pemikiran masyarakat, saya berharap bahwa partai-partai baru bisa memperoleh dukungan yang baik.

DENNY J.A. :

Tapi bagaimana kenyataannya ? Apakah pemilih kita memang rasional ?

AMIR SANTOSO :

Sebagian masih tradisonal. Karena itu menjadi tantangan bagi partai-partai baru ini untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena di sebagian daerah, saya kira kharisma pemimpin masih sangat dominan.

DENNY J.A. :

Dan menurut analisis Anda, apakah partai-partai baru bisa menjadi partai keempat, kelima, atau ketiga terbesar misalnya ?

AMIR SANTOSO :

Itulah yang saya harapkan. Kalau keadaan terus-menerus memburuk, alternatifnya bisa menjadi dua, apakah partai baru itu akan muncul atau kemudian ada kekuasaan lain di luar partai yang muncul. Sebab jangan lupa, pada tahun 1959 pernah terjadi seperti itu, dan kita pun harus melakukan prediksi ke arah itu. Mengapa masyarakat muak dengan partai politik ? Dan bisa saja partai baru juga mendapatkan dampak buruknya. Publik bisa lari kepada kekuatan lain, katakanlah militer, kalau mereka memang yang dianggap bisa menyelamatkan keadaan.

DENNY J.A. :

Ok, Pak Amir, sekarang kita menghuBungi Bung Eros Djarot. Anda membuat partai politik sekarang, kita mengetahui tadinya Anda di PDIP dan seorang seniman besar.

EROS DJAROT :

Ya, kalau saja partai-partai besar itu mampu menampung aspirasi kita semua, sebenarnya buat apa kita membuat partai baru ? Ini persoalan yang sangat mendasar. Saya dulu penasihat politik Megawati. Oleh karenanya melihat apa yang terjadi sekarang memang bukan tanggung jawab saya sebagai pribadi, dan tentunya ini satu hal yang harus menjadi tanggung jawab secara moral, intelektual, dan politik harus dilakukan. Ini juga pilihan ideologis di mana keberpihakan kepada rakyat secara institusional partai. Kalau secara pribadi saya tidak masalah, tetapi secara institusi sudah tidak lagi menunjukkan kepedulian terhadap rakyat dan bahkan kecenderungan untuk meninggalkan apa yang disepakati bersama itu sangat kuat. Nah, sebagai contoh tadi saya surprise. Kita sudah bertahun-tahun, tapi

dikatakan Bu Tumbu tadi ketika ini dampak–untuk tidak mengatakan warisan Orde Barudan seterusnya– yang sangat klasik, sebetulnya ke arah sana. Kalau sudah tahu begitu, serius dong bekerja ! Komitmen yang dulu bagaimana kita merancang bangunan ini secara bersungguh-sungguh, jangan lagi ada KKN yang dulu kita perangi. Sekarang KKN sudah merupakan suatu cara, jalan keluar untuk membesarkan partai.

DENNY J.A. :

Kalau kita coba melihat, kira-kira di mana bedanya partai Anda nanti dibanding partai lama ?

EROS DJAROT :

Agenda yang jelas adalah penyikapan terhadap masalah yang berkembang. Saya tetap mengatakan bahwa apapun namanya –KKN tidak bisa lagi. Jadi penegakkan hukum harus dilakukan. Coba kita berkonsentrasi ke petani, nelayan, dan buruh yang begitu menderita. Dan juga sama-sama serius menggarap masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa. Jangan sampai seperti sekarang ini, yang terjadi justru sebaliknya, bukan ekonomi rakyat yang dipikirkan tetapi ekonomi para pemimpin partai.

DENNY J.A. :

Jadi partai Anda mungkin lebih ideologis ke ajaran-ajaran Bung Karno supaya lebih konsisten ?

EROS DJAROT :

Ya, sebenarnya lebih kepada ajaran Bung Karno, muara dari para pendiri republik. Dengan kata lain bukan apa yang seperti dikatakan “Oh, itu mundur ke belakang”, justru pondasinya saja yang belum dihayati.

DENNY J.A. :

Prospek ke depan, bagaimana Anda melihat partai Anda ? Apakah ada kans masuk ke tiga atau empat besar ? Atau Anda tidak peduli dengan itu ?

EROS DJAROT :

Saya kalau kalah tidak takut, justru saya takut menang. Karena memang realitasnya seperti itu. Justru sekarang yang penting adalah ke depan ini. Apa arti kemenangan di pemilu nanti ? Kalau toh kita memang di atas sebuah kerangka kekalahan sebuah bangsa yang sudah porak poranda. Jadi kita tidak ada pilihan lain kecuali bersatu.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Sjahrir. Anda juga dikenal sebagai ekonom kawakan. Mengapa tiba-tiba Anda mengambil satu sikap memimpin partai ?

SJAHRIR :

Saya tidak usah jauh pada level Presiden Megawati yang dulu dekat dengan Bung Eros. Saya berbicara hal yang sederhana. Natal ini saya ke Kupang. Saya memperhatikan APBD Propinsi NTT. Tahukah Anda dari tahun 2000 ke 2001 seluruh total APBD meningkat sangat besar, tetapi besarnya itu adalah karena ada peningkatan anggaran rutin yang jauh lebih besar lagi, sementara anggaran pengeluaran pembangunan justru menurun. Jadi kita melihat propinsi seperti NTT hanya masuk ranking yang sangat rendah. Kabupaten-kabupatennya merupakan kabupaten yang sangat rendah dilihat dari human development index tentang pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan tentang harapan hidup. Dan itu bukan karena pekerjaan di pusat, karena memang ada satu euforia reformasi, yang sesungguhnya tidak lebih adalah pesta para korupsi. Itu satu-satunya yang menghuBungkan kita dari ujung ke ujung; korupsi. Nah, karena itu kalau buat saya, apa yang membedakan partai ? Pertama-tama

kalau disebut 200 partai, itu buat saya terlalu sedikit, karena yang mendirikan partai hanya 50 orang. Tetapi partai peserta pemilu ini yang barangkali harus dipikirkan bagaimana persyaratannya, tetapi para pemimpin di DPR termasuk Ibu Tumbu Saraswati, seperti yang telah saya katakan, membuat aturan undang-undang partai politik yang sangat janggal. Jadi kita hanya bisa mengubah semua itu lewat partai politik. Kita tidak ada pilihan lain, karena memang kita sekarang mengatakan bahwa proses demokratisasi harus melalui partai politik. Bahwa kita sebagai ekonom atau sebagai seniman memang mempunyai concern, tapi concern itu sudah tahun keenam.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Sjahrir. Kita kembali ke Ibu Tumbu. Apakah memang seharusnya partai politik dipersulit untuk didirikan di Indonesia ?

TUMBU SARASWATI :

Bukan masalah dipersulit, tetapi apakah mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UU Parpol. Misalnya kalau memang itu adalah didirikan oleh 50 anggota, yang merupakan warga negara Republik Indonesia, dan sudah berusia 21 tahun. Namun untuk menjadi partai politik, misalnya untuk ikut di dalam pemilu, tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya. Harus mempunyai 50% setiap propinsi. Mempunyai jumlah 50% dari jumlah kabupaten atau pun kota dari setiap propinsi, dan 50% dari seluruh propinsi di negara kita. Kemudian juga 25% dari kecamatan dari satu kabupaten/kota. Dan mempunyai kantor tetap di sana. Memang sangat sulit sekali untuk dicapai oleh partai-partai baru, karena bisa sangat mahal.

DENNY J.A. :

Apakah ini didesain supaya hanya sedikit saja partai yang berdiri dan ikut pemilu ?

TUMBU SARASWATI :

Saya kira bukan begitu. Jadi setiap partai politik yang didirikan juga harus mempunyai perwakilan-perwakilan yang dapat menyerap aspirasi dari seluruh propinsi, minimal 50%.

DENNY J.A. :

Nanti lewat RUU Pemilu, apakah juga akan dibuat syarat yang lebih ketat lagi sehingga yang ikut pemilu hanya 10 atau 15 partai saja ?

TUMBU SARASWATI :

Saya belum mengetahui karena undang-undangnya belum selesai, mungkin Januari.

DENNY J.A. :

Di luar undang-undang, secara konseptual apa sebaiknya partai yang ikut pemilu sedikit saja Bu ? Tidak lebih dari 10 partai misalnya?

TUMBU SARASWATI :

Kalau lebih dari 10 partai, dan setiap partai kualitasnya bagus, saya kira tidak ada salahnya. Tetapi memang untuk membuat suatu kebijakan di parlemen haruslah setiap partai itu mempunyai visi dan misi ke depan yang jelas. Jadi ada tiga level soal partai, yaitu partai yang didirikan, partai yang ikut pemilu, dan partai yang di parlemen. Dan setelah era pemilu nanti ada juga treshold yang bisa membuat partai masuk parlemen atau tidak.

DENNY J.A. :

Jadi kalau begitu bisa diperbesar lagi angka treshold-nya. Mungkin sampai 10% ?

TUMBU SARASWATI :

Belum tahu.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang ke Pak Amir Santoso. Apakah sebaiknya partai kita semakin banyak atau semakin sedikit supaya demokrasi stabil ?

AMIR SANTOSO :

Saya setuju bahwa partai itu seharusnya tidak terlampau banyak. Namun ada kontradiksi dalam undang-undang itu. Kita bersepakat melaksanakan demokrasi tetapi janganlah membunuh partai-partai dengan cara yang tidak demokratis. Artinya dalam ketidaksetujuan terhadap banyak partai, janganlah partai-partai yang di dalam pemerintahan membunuh partai-partai baru. Artinya serahkanlah ‘pembunuhan’ partai itu kepada masyarakat di dalam pemilu. Oleh karena itu menurut saya UU Parpol ini kok melanggar UUD dan melanggar HAM. Mestinya tidak disahkan.

DENNY J.A. :

Jadi tidak apa-apa partai itu banyak sekali, dan biarkan rakyat yang menjadi hakimnya di pemilu ?

AMIR SANTOSO :

Tidak apa-apa, yang menjadi hakim jangan partai, melainkan rakyat. Rakyat itulah yang akan membuat partai hidup atau mati. UUD 1945 sendiri sudah mengatakan adanya hak kebebasan berkumpul dan berserikat.

DENNY J.A. :

Tapi untuk demokrasi yang stabil, apakah sebaiknya partai di parlemen tidak usah terlalu banyak biar mudah untuk berkompromi misalnya ?

AMIR SANTOSO :

Bisa saja banyak, asal tidak ada koalisi-koalisi. Jadi memang yang sedikit itu menjadi lebih baik, tetapi menjadikannya sedikit itu harus diserahkan kepada rakyat.

DENNY J.A. :

Ok, ke Pak Sjahrir dulu. Apakah Anda melihat UU Parpol tidak demokratis ? Misalnya menjadi terlalu sulit membuat partai ?

SJAHRIR :

Bahkan absurd. Untuk Ibu Tumbu saya memberikan catatan sedikit. Kalau persyaratan kecamatan itu mau diperiksa, tugas Menteri Kehakiman dan HAM, setelah sebuah partai melaporkan diri memenuhi syarat. Dia hanya mempunyai waktu 10 hari melakukan pengecekan. Bayangkan 200 partai. Satu provisi seperti NTT saja mempunyai lebih dari 120 kecamatan. Anda bayangkan, begitu banyak kabupaten di Jawa Timur—sekitar 30-40— dan masing-masing kabupaten mempunyai 5-38 kecamatan. Bagaimana kita mengeceknya ? Nah ini yang saya pikir absurd. Sementara pada saat ini di dalam pematangan proses UU Pemilu. Syarat ke partai-nya tidak seberat UU partai Politik, tidak disebut syarat kecamatan itu.

DENNY J.A. :

Bung Eros, apakah UU Partai Politik tidak menjegal partai-partai baru untuk ikut tampil ?

EROS DJAROT :

Kalau melihat gejalanya kelihatan sekali bahwa sebetulnya ada semacam pembodohan ke masyarakat, bahwa partai itu jenisnya ada partai massa, ada partai kader, dan ada juga partai yang memang tidak boleh mengikuti pemilu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan

Bung Amir Santoso, biarlah proses kualifikasinya dan legitimasinya dilakukan atau diberikan oleh rakyat.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita akan mendengar komentar-komentar terakhir dari pembicara, yang singkat saja untuk renungan kita. dimulai dari Bung Amir, kemudian Bu Tumbu, Bung Eros, dan diakhiri Bung Sjahrir. Silakan Bung.

AMIR SANTOSO :

Ya, saya berharap bahwa undang-undang baru ini jangan ditandatangani dulu, karena semestinya masyarakat berhak untuk menyeleksi partai-partai politik, supaya mereka menjadi lebih dewasa dalam memilih pemimpin dan juga dalam memilih partainya.

TUMBU SARASWATI :

Ya, saya mengharapkan juga, walaupun partai politik banyak sekali, tetapi kalau mereka mempunyai platform yang benar serta dijadikan arah kebijakan pada waktu mereka memerintah nanti, saya mengharapkan juga bisa menyelesaikan krisis-krisis yang ada di tanah air kita, terutama sekali penegakkan hukum. Kalau dari pusat hingga ke daerah tidak konsisten dengan penegakkan hukum, maka suatu negara akan runtuh.

EROS DJAROT :

Pendidikan politik saya rasa penting. Sekarang kalau kita melihat pimpinan partai kita, kan tidak ada dialog politik, komunikasi politik, maupun diskursus politik. Maka jangan mengharapkan ada solusi politik. Saya rasa Indonesia memerlukan partai-partai baru dan bagaimana jalan keluar pemecahan masalah ekonomi. Tidak ada suatu rujukan yang bisa kita ikuti dan kita baca bersama. Jadi kesimpulan saya, banyak orang mengatakan ini masalah ekonomi dan

politik, tetapi yang pasti dalam satu sisi yang sangat mendasar, yang sedang dihadapi bangsa ini adalah mengalami suatu krisis kebudayaan yang luar biasa. Jadi masalah ini adalah bagaimana nation character building akan menjadi bagian. Mungkin kita akan bekerjasama dengan partai-partai baru lainnya yang mempunyai kesadaran yang sama. Inilah sinergi yang harus kita ciptakan di bangsa yang sedang krisis ini.

SJAHRIR :

Kita melihat satu tatanan dunia di mana kekuatan militer Amerika Serikat tidak tertandingi. Kita melihat suatu dunia di mana imbang-imbangan ekonomi dari Eropa, Amerika, China, serta Jepang tidak tertandingi. Kita berhadapan dengan dunia di mana disebut kekuatan society forces secara internasional juga tidak bisa dikontrol. Secara simbolik tampak bahwa itu begitu hebat, preticion technology Amerika di angkatan udara. Toh yang namanya kepala Al-Qaeda tidak bisa dibunuh. Kalau melihat begitu, kita juga melihat suatu teror yang sekarang menjadi bagian dalam proses politik kita yang sangat mengkhawatirkan. Nah karena itu bangsa Indonesia harus kembali kepada akal sehat, dan politiknya adalah politik akal sehat. Kita mau satu, saya juga dengan partainya Bung Eros dan Pak Zaenuddin MZ mengatakan, kita menghindari konflik kepentingan. Kalau Bung Eros menjabat apa pun nanti, dia akan melepaskan pimpinannya di partai. Ini kesepakatan kita yang tidak dipenuhi oleh partai-partai lain, partai lama yang menganggap bahwa kalau dia ketua partai, dia bisa saja datang lalu disambut sebagai pejabat. Padahal itu untuk urusan partai. Ini yang harus kita tiadakan. Nah itulah tekad kami, dan kami menginginkan pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan sebagai program utama dari PIB.

DENNY J.A. :

Ok, terimakasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, publik semakin tidak percaya kepada partai politik. Kita mengharapkan pemimpin partai yang mengubah orientasi politiknya.

Jika tidak, partai akan semakin terasing dari publiknya, dan itu adalah bahaya bagi demokrasi.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Tanggal : 16 Oktober 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Munir (Imparsial), Ichtijanto (Peneliti Utama Litbang Depdag), Abdul Ba'sid (Amir Jama'ah Ahmadiyah)

Persoalan kerukunan beragama, adalah persoalan laten dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan situasi sosial yang damai dan penuh toleransi, ketika pada kenyataannya kehidupan sosial tersegregasi menurut agama, aliran agama, etnisitas, dan budaya. Dan pada kenyataannya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan perbedaan agama berujung pada rasa permusuhan, benci, dan konflik berdarah. Maka kita melihat bagaimana di Ambon, Maluku Utara, Poso, dan tempat-tempat lain masyarakat baku bunuh karena masalah agama. Kompleksitas masalah agama ini yang kiranya melatarbelakangi lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Namun RUU ini kemudian justru mencemaskan banyak pihak. Tendensi yang muncul bukan sekedar bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama, tetapi juga tendensi untuk memberi otoritas yang begitu besar kepada negara untuk mengatur aspek-aspek keberagamaan masyarakat. Pendirian rumah ibadah harus mendapatkan ijin pemerintah. Apa yang disebut agama, juga ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah juga menyiapkan

hukum pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan itu. Kegiatan penyiaran agama dibatasi. Bantuan asing untuk organisasi keagamaan harus dengan persetujuan pemerintah. Mengapa pemerintah diberi otoritas untuk mengintervensi keberagaman masyarakat, dan apa jaminannya pemerintah tidak menyalahgunakan otoritasnya ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsya Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita adalah “Mengatur Kerukunan Umat Beragama”. Sudah hadir di studio DR. Ichtijanto, S.H. dari Departemen Agama, Bung Munir, aktivis HAM dari Imparsial, dan Bung Abdul Ba’sid, seorang Amir Jama’ah Ahmadiyah. Untuk memperkaya diskusi, kita simak dulu pengantar berikut :

“Ketika reformasi dimulai, kebebasan mulai bersemi. Namun, reformasi juga menjadi awal dari aneka kerusuhan yang sering melibatkan sentimen agama. Di ambon, Poso, dan Mataram konflik berdarah terjadi. Berdiri Laskar Jihad, Laskar Islam, Laskar Kristen, dan sebagainya. Konflik agama memang menjadi masalah laten. Maklum Indonesia adalah negara yang plural, sekaligus masyarakatnya mudah diprovokasi. Peran pemerintah lalu diperluas dan ikut mengatur aspek sosial dari keberagaman warga negara. Lahirlah RUU Kerukunan Umat Beragama. Banyak aspek sosial dalam kehidupan beragama harus memperoleh ijin pemerintah. Aspek penting dari penyiaran agama dibatasi. Bantuan asing untuk organisasi keagamaan harus dengan persetujuan pemerintah. Pendirian rumah ibadah harus pulan mendapatkan ijin pemerintah. Apa yang disebutkan agama, juga ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah juga menyiapkan hukum pidana bagi mereka yang melanggar.

Mengapa pemerintah harus ikut campur dalam urusan umat beragama ? Apa hak pemerintah mendefinisikan mana yang agama dan bukan agama ? Siapa yang menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan perannya ? Bukankah di Departemen Agama korupsi juga merajalela ? Apa jadinya jika pemerintahan yang korup mengatur umat beragama ?”

Pemirsa Metro TV, salah satu isu penting adalah perbedaan tafsir dalam satu agama. Karena perbedaan ini berujung pada kekerasan dan penganiayaan. Seperti yang dialami oleh Jama'ah Musli Ahmadiyah. Bung Abdul Ba'sid, bisa menceritakan apa yang Anda alami Bung ?

ABDUL BA'SID :

Kejadiannya tahun lalu. Di Desa Manisoh, Kuningan, terjadi perusakan dan penjarahan. 70 rumah diratakan, 2 masjid, 2 mushola, 2 penggilingan padi, dan beberapa toko besar yang dirusak dan dijarah. Hal ini terjadi karena ada perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang Islam dan ajaran-ajaran pokoknya.

DENNY J.A. :

Apa sebenarnya penyebab perusakan tersebut ?

ABDUL BA'SID :

Penyebabnya menurut kelompok di sana kami bukan Islam, menyalahi ajaran Islam.

DENNY J.A. :

Apakah Anda merasa menyimpang Bung ?

ABDUL BA'SID :

Tidak, karena pegangan kami juga Al-Qur'an dan hadist. Ada persepsi yang berbeda.

DENNY J.A. :

Ada persepsi yang berbeda tentang agama yang berakhir pada penganiayaan. Ada dokumen yang akan menjadi undang-undang, di mana diatur bahwa setiap orang dilarang menafsirkan dan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Anda setuju ?

ABDUL BA'SID :

Tidak, karena pemikiran manusia itu berubah, bertambah maju.

DENNY J.A. :

Ok Bung, terima kasih banyak. Pemirsa Metro TV, ini contoh konkret perbedaan tafsir soal agama yang berakhir pada kekerasan dan penganiayaan. Bagaimanakah Kerukunan Umat Beragama mengaturnya ? Bung Munir, komentar umum dulu.

MUNIR :

Ada kecenderungan konflik, baik dalam tafsir satu lingkup agama maupun antar agama, dan itu mendominasi penyebab pertikaian selama ini. Meskipun di tingkat tertentu latar belakangnya tafsir, tetapi ada latar belakang sosial dan ekonomi yang memengaruhi sebuah konflik menjadi konflik komunal.

DENNY J.A. :

Apakah RUU kerukunan Umat Beragama cukup mengatur dan melindungi ?

MUNIR :

Kerukunan umat beragama tidak bisa diatur undang-undang. Itu fenomena sosial yang sangat ditentukan oleh proses yang tumbuh di antara kepemimpinan beragama, dan organisasi keagamaan. Tidak mungkin menyerahkan semua urusan pada negara.

DENNY J.A. :

Bagaimana jika pemerintah tetap memaksakan dan memberlakukan RUU Kerukunan Umat Beragama dan melarang ajaran yang dianggap menyimpang ?

MUNIR :

Saya melihat kalau undang-undang ini dipaksakan, yang pertama terjadi justru tidak mengeratkan, tetapi justru memulai pertarungan dan berebut akses terhadap negara atas nama aliran keagamaan. Agama yang mestinya menjadi inspirasi akhirnya menjadi aspirasi politik. Kedua, memberikan kewenangan kepada negara yang begitu luas akan melanggar prinsip berdemokrasi, karena negara menjadi pengendali tunggal seluruh aktifitas publik. Akan berbahaya jika pemerintah ikut mengatur urusan agama.

DENNY J.A. :

Baik, kita ke Dr. Ichtijanto. Apa latar belakangnya tiba-tiba pemerintah ikut mengatur masalah tafsir agama yang menyimpang dan tidak menyimpang ?

ICHTIJANTO :

Saya sebenarnya keberatan disebut RUU Kerukunan Umat Beragama, sebab ini masih gagasan awal. Ajaran yang menyimpang atau tidak, itu sejarahnya dalam Penpres No. 1 Tahun 1965, menjadi UU No. 5, yang dimasukkan dalam KUHP pasal 156a. Mengapa ? Karena dulu PKI mengadakan kegiatan-kegiatan kerohanian dan sering menafsirkan agama menurut kemauan tertentu.

DENNY J.A. :

Berlatar belakang politik begitu ?

ICHTIJANTO :

Bukan hanya itu. Di literatur Jawa, ada buku “Gatholoco” yang menerjemahkan ayat Al Qur’an dengan sangat porno sebagai “Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi”. Orang Islam pasti tersinggung.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan jika pemerintah ikut mengatur ajaran mana yang menyimpang dan mana yang tidak, justru buruk nantinya ?

ICHTIJANTO :

Tidak begitu. Pemerintah adalah satu kekuasaan bersama, kita bentuk bersama, dan tanggung jawab bersama. Pemerintah mempunyai upaya mengatur mengatur masyarakat sebaik-baiknya.

DENNY J.A. :

Apakah Ahmadiyah dianggap sebagai ajaran yang menyimpang ?

ICHTIJANTO :

Dalam ajaran Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi dan menerima wahyu lewat mimpi, dan wahyu itu ditambahkan dalam Al-Qur'an. Itu masalahnya.

DENNY J.A. :

Apakah pemerintah boleh ikut campur menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam soal aqidah umat ?

ICHTIJANTO :

Saat ini pemerintah belum sampai pada tingkat memutuskan.

DENNY J.A. :

Tetapi di pasal ini sudah dirancang melarang menafsirkan dan melarang ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok agama ?

ICHTIJANTO :

Bukan hanya RUU, tetapi dalam pasal KUHP pasal 156a ketentuan itu sudah ada.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Munir ?

MUNIR :

Yang diatur dalam KUHP bukan soal penyimpangan aliran. KUHP itu tidak mewakili satu aliran berpikir dalam prinsip-prinsip keagamaan tetapi mengatur tentang penghinaan terhadap satu ajaran keagamaan, bukan tafsir. Aneh kalau pemerintah dianggap bisa merepresentasi satu mazhab dalam keagamaan, itu akan berbahaya dan mustahil.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, pemerintah sebaiknya netral terhadap berbagai tafsir agama ?

MUNIR :

Benar, tafsir adalah urusan penganut, bukan urusan negara.

DENNY J.A. :

Ada undang-undang yang mengatakan, ini menyimpang dan ini tidak menyimpang.

MUNIR :

Tidak bisa. Biarkan masyarakat menilai, kalau mereka menyetujui berarti aliran. Agama membutuhkan kebebasan untuk menumbuhkan dirinya tanpa negara memaksakan.

DENNY J.A. :

Apakah sebaiknya pemerintah netral dan membiarkan agama menjadi urusan warga?

ICHTIJANTO :

Dalam kaitannya dengan perbedaan paham, pemerintah netral. Tetapi terkait terhadap perlindungan terhadap agama, dari pencemaran yang tidak senonoh, tidak ada salahnya pemerintah melindungi agama.

DENNY J.A. :

Siapa yang menentukan, tafsir ini mencemarkan atau tidak?

ICHTIJANTO :

Pengadilan.

DENNY J.A. :

Bung Ba'sid, Anda setuju pemerintah ikut campur menentukan mana ajaran yang sesat dan yang tidak?

ABDUL BA'SID :

Tidak. karena itu hak setiap individu.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, Anda mendengar komplikasi jika negara ikut menentukan mana ajaran yang benar dan mana yang tidak. Negara seharusnya bertindak jika masing-masing pihak melakukan aksi kekerasan dan kriminal.

Di masyarakat beredar dokumen RUU Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 8 ayat 3 dalam RUU ini melarang syi'ar agama terhadap mereka yang sudah beragama. Apakah aturan ini dapat merukunkan agama? Ataukah tidak realistis karena menentang doktrin semua agama benar? Bagaimana Bung Munir pendapat Anda ?

MUNIR :

Pertama, pengaturan ini tidak realistis. Sekarang alat-alat komunikasi yang dipakai dalam syi'ar agama menggunakan internet, website-nya luar biasa banyak, dan itu tidak bisa dihalangi. Isu lama bahwa satu rumah didatangi karena kemiskinan, diberi beras, dan sebagainya. Sekarang syi'ar agama tidak begitu. Pelarangan tersebut tidak realistis.

DENNY J.A. :

Substansinya disetujui, tetapi teknisnya susah?

MUNIR :

Kedua, sebetulnya syi'ar agama itu menyangkut kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif adalah bagaimana menguatkan orang untuk semakin yakin dengan agama yang menjadi syi'ar. Dan mengajak orang lain yang dianggap tersesat keagamannya untuk mengikuti. Itu prinsip dasar syi'ar agama di mana pun. Proses seperti itu, tidak memungkinkan pengaturan menjadi strike. Karena pengaturan mempunyai implikasi-implikasi politik. Kalau negara diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan tentang syi'ar agama, melalui pelarangan, maka seluruh aturan perijinan tentang syi'ar agama akan berlaku. Ceramah-ceramah agama harus di teks, substansi harus dibaca oleh aparat negara, dan tempatnya harus disetujui aparat negara. Peristiwa semacam itu sudah pernah terjadi. Bagaimana para khotib yang akan memberikan ceramah Idul Fitri dikontrol, dan seluruh teksnya harus diserahkan kepada negara untuk dibaca, secara substansial apakah menyerang pemerintah, agama, dan sebagainya.

DENNY J.A. :

Pak Ichtijanto, bagaimana muncul larangan terhadap syi'ar beragama terhadap mereka yang sudah beragama ?

ICHTIJANTO :

Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama. Di Indonesia terjadi pluralitas agama. Kalau dibolehkan begitu saja, misalnya yang Islam mengatakan Katolik itu sesat, atau sebaliknya, akan terjadi perkelahian.

DENNY J.A. :

Tetapi di negara Barat tidak terjadi, justru bebas ?

ICHTIJANTO :

Di sana tidak menganut paham untuk menghidupkan agama.

DENNY J.A. :

Sekarang masalah teknis, ada internet, ada acara agama di televisi, bagaimana ?

ICHTIJANTO :

Sebetulnya penerapannya pada nilai-nilai moral. Misalnya mubaligh Islam tidak akan meng-Islamkan yang Katolik dan sebaliknya. Kita saling menghormati.

DENNY J.A. :

Tetapi apakah realistis, karena doktrin agama ingin menyampaikan kesaksian suci kepada semua pihak ?

ICHJANTO :

Betul, tetapi mereka harus “ngerem”, menahan diri agar masyarakat tetap rukun. Kalau dibenarkan akibatnya akan terjadi perbenturan, dan kita tidak menghendaki itu.

DENNY J.A. :

Baik pak. Kita ke Bung Abdul Ba’sid. Bagaimana menurut anda, syi’ar beragama dilarang bagi mereka yang sudah beragama ?

ABDUL BA’SID :

Saya tidak setuju, karena manusia berpikir, memiliki akal. Biarkan semua menyampaikan ajarannya dengan baik. Dan fitrah manusia selalu mencari yang lebih baik.

DENNY J.A. :

Menurut anda, pengaturan lebih kepada metodenya Bung ?

ABDUL BA’SID :

Approach-nya. Pemerintah mengatur bagaimana agar tidak terjadi konflik. Biarkan mereka berkembang. Sekarang pembatasan tidak bisa berlaku. Adanya internet memberikan kesempatan setiap agama untuk menonjolkan dan memberikan yang terbaik.

DENNY J.A. :

Bagaimana jika pemerintah bersikeras tetap menetapkan larangan tersebut ?

ABDUL BA’SID :

Itu pengebirian. Pembatasan-pembatasan itu bisa menimbulkan konflik. Pemahaman bahwa apa yang dianut negara adalah apa yang

benar bisa menjadi alasan dan legitimasi di daerah atau tempat-tempat lain untuk melakukan penghancuran. Pemerintah harus mengatur jangan sampai terjadi tindakan anarkis.

DENNY J.A. :

Bung Munir, apakah metodenya saja yang diatur pemerintah ?

MUNIR :

Tidak perlu. Misalnya ceramah agama yang menyerang agama lain secara terbuka, itu bisa saja dihukum tetapi bukan memakai UU kerukunan Umat Beragama, melainkan kriminal biasa. Tetapi jangan memberikan kewenangan seolah-olah pemerintah lebih dewasa dibandingkan masyarakat. Ini pikiran-pikiran yang diwariskan oleh rezim-rezim otoritarian, bahwa hanya negara yang memiliki kedewasaan untuk menilai, sementara masyarakat selalu awam, lemah dan tidak berkembang.

DENNY J.A. :

Terima kasih Bung. Pemirsa Metro TV, kita menangkap motif positif pemerintah untuk merukunkan warga negara dengan melarang syi'ar Islam atau syi'ar agama manapun bagi mereka yang sudah beragama. Tetapi ini akan mengalami kesulitan teknis yang luar biasa. Dan larangan ini tidak dijumpai di negara demokratis mana pun. Seberapa jauh negara harus ikut campur dalam masalah agama warga negara ? Kita menghuBungi Bung Papanov di Depok, silakan Bung.

PAPANOV :

Mengenai negara mengatur agama, saya sepakat dengan Bung Munir bahwa negara harus dipisahkan dengan agama. Yang penting adalah tujuan dari agama itu.

DENNY J.A. :

Ok Bung, terima kasih banyak. Penelpon kedua, Ibu Iriyanto di

Bekasi silakan.

IRIYANTO :

Saya selaku muslim sangat setuju bila negara mengatur kehidupan beragama, karena bagi seorang muslim ada perintah harus masuk agama secara total. Karena agama tidak hanya mengatur kehidupan di alam “sana” nanti, tetapi juga mengatur kehidupan di dunia ini.

DENNY J.A. :

Apakah Ibu setuju kalau syi'ar agama dilarang bagi mereka yang sudah beragama ?

IRIYANTO :

Saya setuju. Fakta yang ada bagi kalangan muslim sangat nyata, ada unsur-unsur yang menghalalkan segala cara dari agama tertentu untuk menggoyangkan keimanan umat agama lain. Itu sangat meresahkan. Kalau tidak diatur, akan menimbulkan konflik dan bom waktu yang setiap saat akan meledak. Kita mayoritas muslim, tetapi kita berada dalam posisi yang termarjinalkan. Kasus Poso, Ambon, dan sebagainya, justru mayoritas dibantai oleh minoritas. Itu fakta yang kami yakini.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak, di sini saya, Bung Munir, Bung Ichjanto, dan Bung Abdul Ba'sid semua muslim. Tetapi ada perbedaan dalam memahami bagaimana negara harus terlibat dalam agama.

Pemirsas Metro TV, negara Indonesia dibangun untuk semua warga negara apa pun agamanya. Apa jadinya kalau Indonesia menjadi instrumen satu agama? Bung Munir, bagaimana sebaiknya negara dan agama di Indonesia Bung ?

MUNIR :

Saya menghindari perdebatan soal sekulerisme karena temanya

akan berbeda dengan yang kita diskusikan. Menurut saya, pertama, jangan sampai ada satu produk undang-undang yang disahkan sematamata untuk menghadapi satu keadaan yang kecil tanpa menghitung dampak-dampak yang tidak dapat dihitung. Di Indonesia, tidak ada yang merepresentasikan agama dalam konstruksi kekuasaan. Kedua, umat Islam adalah yang paling banyak menjadi korban politik kontrol terhadap umat beragama. Tahun 1984 setelah Kasus Tanjung Priok, bagaimana ceramah-ceramah agama dikontrol negara dengan alasan mereka menyerang agama lain. Kalau undang-undang ini disahkan, sama saja memberi satu tiket gratis kepada negara untuk bertindak, bisa menghantam Islam atau menghantam yang lain. Hal itu bisa berdampak politik yang lebih luas. Ketiga, kalau seseorang berpindah agama, yang harus dikuatkan adalah pola syi'ar para pemimpin agama. Dalam Islam ada fastabikhul khairat, berloma-lomba menuju kebaikan. Berlombalah meyakinkan masyarakat bahwa pola berpikir agama Anda adalah yang terbaik, tetapi tidak dengan memaksakan, mengancam dan menghina yang lain.

DENNY J.A. :

Bagaimana bila negara tidak usah terlibat dalam perdebatan agama dan negara ?

ICHJANTO :

Saya setuju dengan Soekarno yang mengatakan bahwa dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jauh lebih baik dari Amerika dan Uni Soviet. Dalam kaitannya dengan agama, negara mempunyai peran untuk mendorong umat beragama dapat tumbuh dengan baik, lebih rasional, dan toleran.

DENNY J.A. :

Pak Ichjanto, menurut anda UU Kerukunan Umat Beragama itu memang harus dibuat ?

ICHJANTO :

Betul.

DENNY J.A. :

Sekarang Pak Abdul Ba'sid, apakah perlu agama dipisahkan dari negara atau justru menjadi instrumen dari agama ?

ABDUL BA'SID :

Saya lebih setuju kalau agama dipisah dari negara. Karena agama mempunyai keunikan dan peribadahannya masing-masing. Tidak ada negara yang ikut campur dalam urusan itu. Tetapi ada norma-norma yang bisa disetujui, misalnya jangan mencaci-caci dan menyakiti perasaan orang.

DENNY J.A. :

Kalau pemerintah ingin mengatur kerukunan umat beragama, apa yang mesti dilakukan ?

ABDUL BA'SID :

Pemerintah hanya menyikapi atau membuat undang-undang supaya tidak terjadi tindakan-tindakan kekerasan. Biarkan mereka bebas, justru di situlah orang akan melihat kelebihan agama-agama.

DENNY J.A. :

Pemerintah hanya mengendalikan jangan sampai terjadi kekerasan dibalik tafsir itu. Bagaimana Bung Munir ?

MUNIR :

Peran pemerintah untuk menghindari kekerasan, maka kekerasan itu yang harus dipidanakan, bukan mengatur dan mengelola bagaimana mereka berceramah. Krisis toleransi dan kekhawatiran konflik antar umat beragama kuncinya justru bukan dengan membangun

negara yang kuat, tetapi jauh lebih penting membangun komunitas keagamaan dan pemimpin agama yang kuat. Itu tantangannya.

DENNY J.A. :

Kerukunan sebaiknya dimainkan oleh civil society dan publik sendiri.

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, anda mendengar bahwa ada maksud baik pemerintah untuk merukunkan umat beragama dengan membuat UU Kerukunan Umat Beragama. Tetapi harus diteliti seberapa jauh pemerintah bisa terlibat dalam kehidupan beragama masyarakat. Jika tidak, yang terjadi justru pengekangan dan diskriminasi praktek agama.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan bersama saya Denny.J.A.

MENJARING PARTAI PESERTA PEMILU

Tanggal : 12 April 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Anas Urbaningrum (Anggota KPU), Ray Rangkuti (Ketua KIPP), Muckhtar Pakpahan (Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat)

Setelah lima tahun reformasi, kita belajar banyak bahwa ternyata demokrasi dan kebebasan saja tidak cukup. Kita membutuhkan pemerintahan yang stabil, dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemilu 2004 adalah mekanisme yang mengoreksi segala kelemahan pemerintahan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang kita berada di awal tahapan pemilu 2004 dan KPU sudah menetapkan 12 partai politik peserta pemilu. Enam partai lama dan enam partai baru. Semua pihak menginginkan perubahan dan perbaikan kondisi. Namun tampaknya agak sulit mengharapkan akselerasi perubahan itu pada partai-partai besar itu, karena sudah diketahui bersama bagaimana kualitas mereka ketika memimpin pemerintahan dan bagaimana perilaku politik mereka terhadap problematika pelaksanaan agenda-agenda reformasi. Akan tetapi pada sisi lain, menunggu kiprah partai-partai baru untuk kehidupan sosial-politik Indonesia yang lebih baik tampaknya juga bukan pilihan yang realistis. Problemnnya adalah partai-partai baru itu mempunyai mesin politik dan sumber-sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menjadi

salah satu partai besar dalam pemilu 2004 ? Seandainya pun peluang ini cukup besar, benarkah mereka bisa menghadirkan sesuatu yang baru : visi, platform, kultur dan perangai politik, serta bukan sekedar sebagai pengekor atau 'bentuk lain' partai-partai pendahulunya ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara "Parliament Watch" bersama saya denny J.A. Di studio sudah hadir, pertama Bung Anas Urbaningrum, anggota KPU, Dr. Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat, serta Bung Ray Rangkuti dari KIPP. Selamat malam semuanya. Untuk memperkaya diskusi saksikan dulu pengantar berikut ini :

"Seberapa jauh partai-partai baru dalam pemilu 2004 akan menjadi pemain utama ? Apakah mereka akan dapat secara signifikan mempengaruhi kultur pemerintahan selanjutnya ? Ini pertanyaan penting yang muncul setelah kita mengikuti hasil sementara pengumuman KPU hingga tanggal 2 Desember 2003, bahwa telah lolos 12 partai politik peserta pemilu. Separuh dari partai itu adalah pemain baru, setidaknya partai dengan nama baru. Hasil final partai mana saja yang berhak untuk menjadi peserta pemilu 2004 baru akan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2003. Banyak kalangan menduga jumlah partai politik peserta pemilu 2004 akan lebih sedikit dibandingkan peserta pemilu 1999 yang berjumlah 48 partai. Seleksi pada pemilu kali ini memang jauh lebih ketat sehingga tidak heran jumlah partai yang lolos verifikasi faktual KPU akan lolos sedikit saja. Dari daftar partai yang nantinya diloloskan KPU sebagai peserta pemilu banyak pula pemain barunya. Seberapa besar para new comers ini akan menyegarkan politik Indonesia ? Atau sebaliknya mereka tidak perlu diperhitungkan karena kesiapan mereka yang ala kadarnya. Semua partai politik baru mungkin mengimpikan Indonesia akan seperti Turki, di mana pada pemilu terakhir partai besar di Turki berguguran, bahkan tidak lolos treshold. Sementara partai baru Pimpinan Erdogan langsung melesat dan menjadi partai mayoritas di parlemen.

Namun setidaknya menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia 2003, peluang partai kecil untuk mendominasi atau masuk enam besar agak sulit. Bahan untuk lolos threshold 3% saja mereka membutuhkan perjuangan yang keras. Lahan politik di Indonesia memang jauh lebih sulit, dengan teritori begitu luas dari Aceh sampai Papua. Jumlah pemilih kita mencapai 145 juta pemilih yang tersebar di ribuan desa dan kota. Sebagian dari pemilih mempunyai hambatan transportasi dan komunikasi sehingga sulit dijangkau. Hal ini merupakan kendala besar bagi partai baru. Untuk melakukan penetrasi membutuhkan waktu yang lama dan dana yang sangat besar. Jika nama partai belum pernah didengar oleh pemilih, bagaimana mungkin partai itu akan dipilih ? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah partai baru akan mampu berperan besar dalam politik Indonesia pasca pemilu 2004 ?”

DENNY J.A. :

Yang pertama kali, kita ingin bertanya kepada Bung Anas Urbaningrum dari KPU. Bagaimana mekanisme KPU untuk memastikan hasil verifikasi ini akurat ?

ANAS URBANINGRUM :

Akurasi itu sangat ditentukan oleh prosedur dari awal. KPU membangun prosedur yang relatif mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, juga bisa dimengerti dengan mudah oleh partai politik yang mendaftar dan juga oleh publik secara umum. Jadi akurasi ini dijamin oleh prosedur. Selain prosedur di dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual di propinsi, kabupaten, dan kota, KPU juga melakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur itu dilakukan secara benar oleh propinsi dan kabupaten/kota.

DENNY J.A. :

Kita mempunyai 31 propinsi, apakah ke seluruh propinsi KPU mengeceknya ?

ANAS URBANINGRUM :

Tidak ke seluruh propinsi, tetapi dengan mengambil sampel, lebih dari separuh jumlah propinsi di Indonesia. Dan dari seluruh propinsi yang kami kunjungi bisa disimpulkan bahwa prosedur itu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU.

DENNY J.A. :

Ada syarat bahwa di setiap kepengurusan itu ada 1000 kartu tanda anggota misalnya, bagaimana KPU mengeceknya ?

ANAS URBANINGRUM :

Ya, secara teknis itu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, ada alternatif 1000, ada alternatif 1/1000 dari jumlah penduduk. Dan dalam konteks itu dilakukan dengan sampling 10%. Kalau 1000 misalnya yang dicek hanya seratus. Mengenai keakuratan hasil akhirnya, semuanya dituangkan dalam berita acara verifikasi dan oleh karena itu bisa ditelusuri dengan mudah.

DENNY J.A. :

Bagaimana, Bung Muchtar ? Anda puas dengan kerja KPU ini ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Saya kira soal akurasi cukup baik, kami merasakannya. Dilihat dari performance kawan-kawan di KPU cukup reliable untuk menjalankan tugas ini, karena mereka profesional, independen, dan netral. Kami mengalami di lapangan seperti itu. Tetapi memang ada hal-hal teknis yang kadang-kadang menjadi kendala. Misalnya KPU Pusat, karena begitu banyak yang diketik, 416 kabupaten, 32 propinsi, tidak bisa serentak dalam tempo dua hari diketik semua, lalu semua data itu sudah sampai di KPU Propinsi. Ada yang baru sampai lima hari baru sampai. Dan begitu sudah sampai, ada yang salah ketik aturan. Seperti pengalaman kami, aturannya 11 cabang menjadi 10 cabang. Tetapi secara menyeluruh akurasinya sudah cukup bagus.

DENNY J.A. :

Dalam pengumuman 2 Desember 2003 kemarin, dari 12 partai politik yang masuk, partai Anda belum masuk, Bung ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Ya, karena kemarin baru 26 propinsi, sementara ketika 26 itu, kami baru 19 yang lolos dan ada enam propinsi yang belum melapor. Kalau sudah melapor sebagian dan kami tadi sudah 21 propinsi, saya kira positif tanggal 7 Desember harus dikeluarkan SK-nya. Pada tanggal 2 Desember kemarin, partai kami belum diumumkan karena kenyataan bahwa kami belum memenuhi 21 propinsi. Begitu kami mengecek, ternyata betul belum masuk juga.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung ? Kabarnya 2 Desember itu seharusnya semua partai sudah diverifikasi ? Apa mungkin ada keterlambatan ?

ANAS URBANINGRUM :

Ya, ini fakta obyektif yang dihadapi oleh KPU, karena masih ada enam propinsi yang datanya belum bisa direkap oleh KPU. Sehingga tidak mungkin KPU mengumumkan kalau partai itu belum bisa dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Tetapi ini semata-mata soal teknis, tidak ada niatan KPU untuk mengklasifikasi bahwa partai yang lolos awal ini adalah partai utama, kemudian yang lolos tanggal 7 Desember adalah partai tambahan. Tidak ada kasta-kasta dalam konteks ini. Tetapi memang terjadi keterlambatan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kami mengharapkan tanggal 2 Desember semua selesai, tetapi ternyata faktanya ada beberapa propinsi yang belum tuntas sehingga terpaksa ditunda sampai tanggal 7 Desember. Karena memang ada hak partai yang sudah memenuhi syarat, dan kedua, ada kehausan publik tentang informasi partai-partai di luar enam parpol yang lolos electrocal treshold yang sudah memenuhi syarat.

DENNY J.A. :

Dan menurut Anda partai yang terlambat untuk diumumkan 7 Desember nanti tidak menghadapi problem soal citra di mata publik?

ANAS URBANINGRUM :

Saya kira tidak, karena memang kami menunggu data itu. Lalu hak semua partai, baik yang lolos tanggal 2, 6, atau 7 Desember adalah sama persis, tidak ada yang berkurang.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Muchtar ? Karena partai Anda diumumkan tanggal 7 Desember nanti, apakah Anda merasa dirugikan dari aspek citra partai?

MUCHTAR MUHAMMAD :

Dirugikan sih tidak, tetapi anggota kami sempat juga tegang khawatir tidak lolos. Kami baru menjelaskan bahwa ada 6 propinsi lagi yang belum masuk seperti NTT, Banten, Kalimantan Barat, dan Riau. Di 6 propinsi itu menurut kawan-kawan kita dari DPD tidak ada problem, jadi terus saja menunggu. Begitu sudah masuk 21 propinsi, kita mengirim SMS ke teman-teman, "Ini sudah P4 berarti tinggal menunggu SK-nya saja". Memang sebelumnya sempat ada kegelisahan ketika partai kami belum diumumkan, sempat beranggapan hanya yang diumumkan itu yang menjadi peserta pemilu.

DENNY J.A. :

Ada yang berkomentar bahwa pemilu kita dapat tertunda-tunda, jika jadwal verifikasi KPU saja bisa terlambat apalagi tahapan pemilu lainnya. Bagaimana, Bung Anas ?

ANAS URBANINGRUM :

Tidak juga, karena memang jadwal pokoknya tanggal 8 Desember ketika KPU mengundang partai-partai yang sudah lolos menjadi

partai peserta pemilu untuk mengambil undian. Undian itu adalah undian nomor urut partai politik peserta pemilu, baru tahapan berikutnya adalah pencalonan dengan proses seperti ini. Penundaan sebagian pengumuman peserta pemilu paling lambat 7 Desember, tidak mempunyai pengaruh pada lambat atau cepatnya jadwal.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, apakah kinerja KPU terlampaui berat dengan jumlah anggota yang ada saat ini ?

ANAS URBANINGRUM :

Sebenarnya kalau dari anggota menurut saya memadai, tetapi memang volume kerjanya sangat tinggi. Ini berkaitan dengan rincian tugas yang memang sudah diamanatkan dengan undang-undang. Kami menyadari sekarang ini KPU-KPU Propinsi dan kabupaten/kota, secara internal masih dalam proses pelembagaan, karena baru pertama kali ada KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota.

DENNY J.A. :

Tahun 2004 nanti, akan ada tiga pemilu : Pemilu DPR, pemilu presiden babak pertama, dan pemilu presiden babak kedua. Apakah Anda yakin tidak ada keterlambatan dalam schedule ?

ANAS URBANINGRUM :

Schedule disusun dengan sangat rinci, walaupun antar tahapan itu sangat mepet. Jadi kalau molor sedikit saja pada tahapan-tahapan tertentu, tentunya akan menabrak tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi KPU sesungguhnya di dalam penyusunan tersebut itu –kecuali pada tahapan-tahapan tertentu yang mutlak tidak boleh mundur– ada space waktu. Kalau hanya mundur seminggu tidak mengganggu jadwal keseluruhan. Tetapi juga ada tahapan-tahapan tertentu yang kalau mundur sehari atau dua hari mempunyai implikasi yang serius.

DENNY J.A. :

Bung Muchtar, jika verifikasi partai saja telat, mungkin pemilu juga dapat tertunda ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Kalau dilihat dari jadwal belum ada yang tertunda. Karena kalau dilihat dari jadwal yang serius, seperti pengambilan nomor partai tanggal 8 Desember, itu masih berjalan. Jadi kalau tanggal 8 Desember itu pengumuman nomor-nomor partai, pengundian nomor-nomor partai berjalan sesudah itu, saya kira tidak ada lagi masalah-masalah yang cukup serius. Kecuali jika misalnya kotak suara yang dicetakkan tidak selesai.

DENNY J.A. :

Dan pemilu 2004 nanti menurut Anda juga akan sesuai schedule?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Saya kira tetap dalam schedule, karena kami dari Partai Buruh juga secara intens hampir setiap hari memonitor di KPU. Dari pemantauan kawan yang ada di sana, tidak ada masalah.

DENNY J.A. :

Jumlah parpol yang lolos pemilu tahun 2004 ini akan jauh lebih sedikit dibanding pemilu tahun 1999. Apa sebaiknya peserta pemilu jangan terlalu banyak ?

ANAS URBANINGRUM :

Sesungguhnya berapa pun asal memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu, KPU harus menetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Hanya kalau dilihat dari fakta-fakta dan data-data yang ditemukan di lapangan, memang sudah pasti partainya lebih

sedikit dibandingkan peserta pemilu 1999. Selain karena persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu sekarang jauh lebih berat, proses verifikasi juga jauh lebih detail dan lebih akurat.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung, menurut Anda ? Apakah sebaiknya peserta pemilu sedikit saja ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Barangkali perlu dilihat dari undang-undangnya, jadi bukan jumlahnya. Kalau dia bisa memenuhi ketentuan undang-undang, mau banyak juga terserah. Kalau mengacu ke disertasi saya tahun 1992, memang sistem kepartaian yang demokratis akan seperti itu. Waktu itu saya menulis threshold-nya malah di atas 5%, sedangkan sekarang 3%. Kalau kita ingin sehat memang jumlah partai jangan terlalu banyak, tetapi yang menentukan partai itu banyak atau tidak, biarlah rakyat yang menentukannya.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita menjumpai Bung Ray Rangkuti dari KIPP. Halo, Bung ? Bagaimana Anda menilai akurasi verifikasi KPU ?

RAY RANGKUTI :

Halo, Mas Denny. Sebetulnya agak sulit menilainya, karena sejauh ini memang agak sulit untuk terlibat serta dalam setiap proses verifikasi yang dilakukan KPU. Hanya yang menjadi catatan saya atau catatan kita, pertama, memang waktu yang sangat sempit. Kedua, pemahaman yang berbeda-beda di tingkat KPUD terhadap seluruh Juklak yang diberikan oleh KPU. Ini juga mengakibatkan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak selancar seperti yang kita bayangkan.

DENNY J.A. :

Apakah Anda mengetahui proses verifikasi KPU juga diawasi lembaga lain, misalnya Panwaslu ?

RAY RANGKUTI :

Panwaslu nampaknya kurang aktif untuk hadir. Kalau terlibat mungkin susah, karena memang bukan tugas mereka untuk terlibat dalam setiap tahapan verifikasi faktual. Itu juga salah satu yang sebetulnya kita sayangkan, karena dengan begitu bisa terjadi pro-kontra.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Anas, apakah ada kontrol Panwaslu terhadap kerja KPU dalam verifikasi partai ?

ANAS URBANINGRUM :

KPU selalu menyampaikan pada KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan Panwaslu setempat, bahkan juga dengan unsur publik. Mulai dari pengambilan sampel, bisa mengundang Panwaslu dan juga pemantauan lokal. Jadi dari situ sesungguhnya ada ruang keterlibatan. Walaupun misalnya kalau ada kasus di suatu daerah Panwaslu tidak diundang, itu sama sekali tidak mengurangi hak Panwaslu setempat untuk melakukan pengawasan, karena memang 100% Panwaslu mempunyai tugas melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu. Ini memang harus menjadi hak inisiatif Panwaslu untuk terlibat mengawasi. Dan KPU memberikan ruang, tetapi kalau ada satu-dua daerah yang mungkin realisasinya kurang bagus, itu sama sekali tidak mengurangi hak Panwaslu setempat untuk melakukan pengawasan.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Ray lagi. Dengan diumumkan secara bertahap

partai politik yang lolos pemilu tanggal 2 Desember dan nanti tanggal 7 Desember, menurut Anda apakah ini menjadi masalah ?

RAY RANGKUTI :

Pada tingkat ideal ini masalah. Pertama, ada asumsi yang kemudian berkembang luas di masyarakat, bahwa partai-partai yang terlambat dinyatakan sebagai peserta pemilu seolah-olah partai yang bersangkutan tidak lolos. Paling besar atau minimal diasumsikan partai yang bersangkutan tidak serius untuk pelaksanaan pemilu. Padahal ketika kita melihat, misalnya dari anatomi partai politik yang terlambat diumumkan kelolosannya ini justru adalah partai-partai politik yang kita kenal dengan tokoh yang cukup kredibel. Misalnya, Partai Indonesia Baru-nya Bung Sjahrir, atau Partai Sarikat Indonesia-nya anak-anak muda seperti Jumhur. Kalau saya menyarankan sebaiknya partai yang lolos diumumkan bersama-sama tanggal 7 Desember nanti daripada seperti itu. Karena bagaimanapun efek-efeknya terhadap partai-partai lain kemudian menjadi –minimal pada taraf asumsi– bersifat negatif.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Anas menanggapi kritik dari KIPP ?

ANAS URBANINGRUM :

Ya, apa pun keputusan KPU tentu ada kritiknya. Kalau KPU misalnya menunda pengumuman sampai 7 Desember, tetap saja ada yang mengkritik pada sisi lain. Oleh karena itu KPU mengambil tanggal 2 Desember tetap ada pengumuman terhadap partai-partai yang sudah nyata-nyata lolos sebagai partai politik peserta pemilu. Yang lain, karena datanya belum lengkap, tentu belum bisa diumumkan.

DENNY J.A. :

Bagaimana, Bung Ray ?

RAY RANGKUTI :

Kalau menurut saya berguna, supaya tidak berkembang dugaan dan asumsi yang kita duga, yaitu ada perasaan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa partai-partai politik yang belum diumumkan tidak serius mengikuti pemilu. Harus ada penjelasan kepada publik beberapa persoalan yang dialami oleh partai politik, apakah hasil sementara verifikasi benar-benar menunjukkan memang partai politiknya tidak serius atau jangan-jangan keterlambatan teknis yang dialami oleh KPU, misalnya seperti itu. Hal ini fundamental bagi partai politik secara umum, baik yang diumumkan pada tanggal 2 Desember kemarin ataupun nanti tanggal 7 Desember, juga masyarakat secara umum. Karena masyarakat nampaknya tidak lagi memiliki ruang dan waktu yang lebih besar untuk melakukan proses seleksi alami dan politis terhadap partai politik dan juga calon-calon kandidat yang sudah mengambil formulirnya pada tanggal 9 Desember.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, terima kasih banyak atas partisipasi Anda langsung dari Bali.

KPU sudah menetapkan 12 partai peserta pemilu dengan munculnya banyak partai-partai baru. Seberapa jauh partai-partai baru ini dapat memberikan inovasi atau darah segar yang membuat politik tahun 2004 nanti berbeda ? Ataupun partai-partai baru yang diabaikan saja karena bagaimanapun politik akan tetap dikuasai oleh partai-partai lama dan pemain-pemain lama ? Sebelum kita menggali lebih lanjut, akan dibacakan dulu hasil polling kerjasama Metro TV dengan MARS. Pertanyaan pertama, “Puaskah Anda dengan partai-partai peserta pemilu 1999 ?” yang menjawab ‘tidak puas’ 62%, ‘puas’ 32%, dan ‘tidak peduli’ 6%. Pertanyaan kedua, “Pada pemilu 2004 nanti apakah Anda akan memilih partai yang sama dengan yang Anda pilih pada pemilu 1999 ?” Yang menjawab ‘partai berbeda’ 55%, ‘partai yang sama’ 28%, ‘tidak tahu’ 17%. Pertanyaan ketiga, “Menurut Anda adakah partai baru yang akan mendapatkan jumlah

suara yang tinggi di pemilu 2004 nanti ?” Yang menjawab ‘tidak ada’ 46%, ‘ada’ 32%, dan ‘tidak tahu’ 22%.

Sekarang kita menerima telepon dulu dari Wahyudi, silakan Bung.

WAHYUDI :

Nama saya Wayudi, kebetulan saya seorang guru tata negara di SMU 1 Samarinda. Saya mengamati apa yang disampaikan oleh Bung Muchtar Pakpahan dan Bung Anas tadi. Pertama, kalau dari pengamatan Bung Muchtar Pakpahan tadi, secara realitas bahwa kini kita sedang dalam masa polarisasi politik, jadi wajar kalau partai itu begitu banyak. Yang kedua, nanti ada tahap kristalisasi politik, itu sudah mencapai pada taraf di mana partai tadi akan hilang sendiri-sendiri dan tinggal sedikit yang bertahan. Seperti di Amerika dulu banyak, sekarang tinggal tinggal sedikit. Harapan kita partai-partai baru yang tumbuh ini jangan selalu menyalahkan KPU. Mari kita berkaca pada masing-masing partai sendiri. Yang kedua kalau memang KPU belum maksimal bekerja mari kita membantunya, bukan mencaci maki. Semua itu untuk kita bersama, bukan untuk kelompok tertentu. Ini yang tolong dipahami oleh saudara-saudara, khususnya aktivis-aktivis partai, baik yang lama maupun yang baru.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak, Bung. Jadi Anda sangat yakin partai pada akhirnya akan mengerucut menjadi multipartai sederhana mungkin. Selanjutnya penelepon kedua. Silakan, Bung.

HAMID :

Saya Hamid, dari Ambon. Saya ingin mengkritisi kebijakan KPU selama ini. Pertama, kebijakan KPU memberikan empat kursi kepada Maluku itu melanggar undang-undang. Dan sudah ada kesempatan bersama partai-partai politik di Maluku, bahwa kalau tidak dikembalikan ke enam kursi, maka seluruh partai politik di Maluku, tidak mengajukan calon anggota DPR. Yang kedua, menjadi

pertanyaan verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM terhadap partai politik itu 30 propinsi, tetapi oleh KPU dinaikkan menjadi 32 propinsi, di mana dua propinsi di Irian yang dianggap bermasalah pun dimasukkan.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak dari Ambon. Kita akan menjawab beberapa hal yang cukup substansial, pertama ke Bung Muchtar Pakpahan mengenai fenomena partai-partai baru, seberapa jauh partai-partai baru ini hanya datang dan pergi saja karena toh akhirnya dalam situasi yang stabil, hanya tinggal tiga atau empat partai besar yang permanen. Bagaimana Bung Muchtar ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Kalau partai buruh lebih baik hanya satu yang tinggal, supaya kita bisa meniru langkah Australia, Inggris, atau Jerman. Partai baru kalau mau berkibrah tentu ada empat hal yang perlu dipenuhi. Pertama, platform, visi, strategi dan programnya apa ? Bagaimana menjawab tantangan kemiskinan, pengangguran, penegakkan hukum, dan korupsi yang merajalela. Yang kedua, tokoh-tokohnya siapa ? Harus dilihat dari sejarah hidupnya apakah di masa lalu dia termasuk orang korup, penindas dan moralnya bagaimana ? Pernah skandal tidak ? Track record-nya ? Yang ketiga organisasinya rapi apa tidak ? anggaran dasar, tujuan, kepemimpinan, dan yang terakhir tentu memang perlu dana walaupun itu tidak menentukan.

DENNY J.A. :

Tahun 1999, dari tujuh partai besar tidak ada satupun partai buruh? Di mana salahnya?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Ya, tidak ada. Waktu itu memang ada Partai Buruh tetapi tidak

'nyangkut'. Ada tiga hal, pertama, tidak ada tokoh yang bisa diberikan alternatif, kedua, dia tidak mempunyai dana, dan yang ketiga, terlalu singkat waktu untuk bersaing.

DENNY J.A. :

Dan Anda yakin sekarang ini akan ada Partai Buruh yang 'nyangkut' sebagaimana di Inggris maupun di Australia ?

MUCHTAR PAKPAHAN :

Ya, karena disebabkan hal-hal tadi, welfare state yang digalang di dunia itulah visi kami. Saya kira mungkin di seluruh dunia saya diakui sebagai pemimpin buruh, juga di Indonesia. Dari ketokohan bisa dijawab.

DENNY J.A. :

Hal kedua yang penting juga dari Bung Anas. Kita perluas saja pertanyaan dari pemirsa di Ambon tadi, kira-kira hal apa saja yang masih menjadi problem dari KPU sekarang ini, yang bisa menyebabkan kontroversi di masyarakat ?

ANAS URBANINGRUM :

Pertama soal alokasi kursi, KPU tidak bisa keluar dari perintah undang-undang. Ada perintah jumlah kursi DPR 550. Ada rumus ABC di dalam undang-undang yang juga harus dipenuhi oleh KPU. Jadi di dalam alokasi kursi KPU sesungguhnya tidak melihat propinsi A, propinsi B, propinsi C. Yang kita lihat adalah data jumlah penduduk kemudian kita mencocokkan dengan rumus yang ada di dalam undang-undang, dengan patokan 550 kursi.

DENNY J.A. :

Jadi untuk Ambon tadi tidak bisa diubah dari empat menjadi enam?

ANAS URBANINGRUM :

Memang ada keinginan bahwa Maluku itu tetap enam, Sulawesi Utara tetap tujuh, tetapi kalau itu diberlakukan, minimal membutuhkan kursi 557. Ini yang menjadi soal. KPU dalam konteks ini semata-mata melaksanakan perintah undang-undang. Bahwa hasilnya ternyata ada propinsi-propinsi yang merasa kurang puas, saya kira ini bukan soal KPU, ini soal undang-undang.

DENNY J.A. :

Kedua, soal jumlah propinsi yang menjadi 32 ?

ANAS URBANINGRUM :

Sebetulnya bukan menjadi 32 tetapi jumlah propinsi kita sekarang ini memang 32. Dan itulah yang dijadikan patokan KPU di dalam memproses seleksi partai politik peserta pemilu. Kabupaten/Kota-nya pada saat pendaftaran ditetapkan 416, kalau sekarang sudah lebih lagi. Itu berbeda dengan Departemen Kehakiman dan HAM, karena proses seleksi di sana berdasarkan undang-undang parpol, kemudian waktunya jauh lebih awal dari yang dilakukan di KPU.

DENNY J.A. :

Menarik sekali diskusi kita kali ini, terima kasih kepada semua pembicara.

Pemirsa Metro TV sekalian, demikian tadi ragam opini seputar ketetapan KPU soal 12 partai pemilu, dan kita mengucapkan selamat kepada partai-partai yang lolos untuk pemilu 2004 dan kita berharap partai-partai ini tidak mengulangi kesalahan partai-partai lama yang membuat reformasi mati suri.

Jumpa lagi minggu depan bersama saya Denny J.A.

KOMPLIKASI PEMILU DI ACEH

Tanggal : 11 Juni 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Usman Hamid (Koordinator BP Kontras), R.K.
Sembiring Meliala (Komisi I DPR), Smita Notosusanto (Direktur
Eksekutif CENTRO)

Situasi politik boleh berubah, kepemimpinan nasional boleh berganti, namun tidak demikian dengan problem Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM hingga saat ini sudah berusia lebih dari 25 tahun. Dalam selama itu pula masyarakat Aceh hidup dalam cengkraman konflik yang berdarah dan penuh kekerasan. Bahkan gerakan reformasi pun tidak bisa mengubah apa-apa pada kondisi di Aceh. Kini pemerintah memutuskan memperpanjang kembali Darurat Militer di Aceh. Sebuah pengakuan bahwa GAM memang masih sangat kuat. Persoalannya, kita akan menyelenggarakan pemilu bulan April 2004. Saat itu mungkin Aceh masih di bawah Darurat Militer. Apakah mungkin pemilu dilaksanakan dalam kondisi Darurat Militer ? Tidak ada jaminan bahwa GAM sudah bisa ditundukkan pada bulan itu, dan tidak melakukan aksi-aksi kekerasan yang dapat mengacaukan penyelenggaraan pemilu. Komplikasi masalah kian bertambah karena pemilu 2004 akan berlangsung dalam beberapa tahap yang membutuhkan waktu lebih panjang.

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch”, bersama saya Denny J.A. Indonesia sudah mengganti tiga presiden tapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum bisa ditaklukan. Kini pemerintah memperpanjang status Darurat Militer di Aceh. Sebuah pengakuan bahwa sebenarnya GAM masih kokoh. Persoalannya, kita akan menyelenggarakan pemilu di bulan April 2004, dan saat itu mungkin Aceh masih di bawah Darurat Militer. Apakah efek Darurat Militer terhadap pemilu di Aceh ? Dan apa pula efek Darurat Militer bagi pemilu nasional ? Ini topik kita malam ini, dan sekarang sudah hadir di studio Bung Usman Hamid dan Kontras, Bung Sembiring Meliala dari Komisi I DPR, serta Smita Notosusanto dari CETRO. Untuk memperkaya diskusi saksikan dulu pengantar berikut :

“Menurut jadwal, Darurat Militer di Aceh akan berakhir tanggal 19 November 2003. Namun pemerintah secara resmi akan mengumumkan perpanjangan Darurat Militer itu untuk jangka waktu sampai enam bulan. Terbuka kemungkinan Darurat Militer di Aceh berakhir sebelum pemilu legislatif April 2004, namun mungkin pula pemilu di Aceh akan diselenggarakan di bawah kondisi Darurat Militer. GAM kemungkinan sudah lemah, tapi mungkin pula masih kuat dan bersembunyi. Justru karena ketidakpastian itu, pemilu di Aceh menjadi banyak komplikasinya, apalagi pemilu tahun 2004 berlangsung sangat lama. Dalam kondisi di atas semua pilihan menjadi sulit dan bermasalah. Pemilihan pertama pemilu diselenggarakan di Aceh dan Darurat Militer dicabut jauh hari sebelumnya. Berarti situasi di Aceh dinormalkan kembali untuk waktu sekitar satu tahun lamanya. Melalui pemilu, rakyat Aceh akan memilih wakilnya, namun apa pun yang terjadi jika dalam waktu setahun itu GAM mempunyai kesempatan emas untuk konsolidasi. Pilihan kedua Darurat Militer diteruskan dan pemilu tidak dilaksanakan di Aceh. GAM dikikis habis tanpa interupsi. Ketika propinsi lain sibuk pemilu, tentara dan polisi mengejar aktivis dan tokoh GAM sampai ke sarang-sarangnya.

Setelah pemilu usai, GAM akan semakin lemah namun pemilu akan kehilangan legitimasinya karena tidak dilaksanakan secara nasional di semua propinsi.

Pilihan ketiga adalah pemilu dilaksanakan di Aceh dan Darurat Militer juga terus diberlakukan. Pemilu dilaksanakan agar klaim pemilu nasional bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu di semua propinsi. Darurat Militer juga di terapkan agar tidak memberi ruang bagi GAM untuk memanfaatkan situasi pemilu yang sangat lama. Tapi bukankah suasana pemilu dan ketidakbebasan Darurat Militer menjadi bertentangan ? Jalan tengahnya mungkin pembagian tertori di Aceh, di mana ada pembagian antara wilayah yang aman dan rawan. Untuk wilayah yang aman pemilu dilaksanakan seperti biasa tanpa Darurat Militer, untuk wilayah yang rawan harus ada kontrol yang ketat dari pihak militer. Tak perlu menerapkan Darurat Militer di wilayah rawan itu, tapi cukup menggunakan ketentuan dalam UU tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini presiden diberi kewenangan untuk mengerahkan kekuatan tentara dalam menghadapi ancaman bersenjata.”

Selanjutnya kita mendengar Bung Usman dulu. Menurut Anda mengapa pemerintah memperpanjang Darurat Militer ?

USMAN HAMID :

Saya kira ada tiga hal yang menjadi landasan mengapa pemerintah memperpanjang Darurat Militer. Pertama berkaitan dengan perubahan strategi GAM menjadi pemberontakan dengan cara gerilya. Yang kedua keberhasilan pemerintah membangun semangat perlawanan masyarakat Aceh terhadap GAM. Dan yang ketiga, banyak kasus kekerasan di Aceh sudah dibawa ke Mahkamah Militer. Ketiga hal ini menurut saya tidk sepenuhnya benar karena sudah 27 tahun lebih GAM berjuang dengan cara-cara gerilya dan sampai hari ini strategi ini masih digunakan. Saya menghargai apa yang diputuskan oleh pemerintah, tapi kita menyesalkan pada akhirnya pemerintah memperpanjang Darurat Militer, seolah tidak

ada alternatif lain. Padahal kita tahu bahwa untuk tetap mengatasi gangguan-gangguan keamanan, yang saya kira tidak lagi di seluruh wilayah Aceh, tapi hanya beberapa wilayah Aceh, ada alternatif lain dengan menggunakan UU Pertahanan Negara di mana pemerintah bisa men-supply pasukan terhadap wilayah-wilayah tertentu tanpa harus memperpanjang Darurat Militer.

DENNY J.A. :

Ok Bung nanti kita ke Anda lagi. Bung Sembiring bagaimana komentar umum Anda bahwa pemerintah memperpanjang Darurat Militer ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Setelah enam bulan memberlakukan Darurat Militer memang harus diakui keadaan semakin kondusif. Namun tidak sepenuhnya kekuatan separatis GAM sudah bisa dilumpuhkan atau ditiadakan. Oleh karena itu momentum yang sudah baik harus dipelihara. Kalau kita menghentikan Darurat Militer sekarang, itu sama saja meberikan ruang, waktu, dan kesempatan bagi kalangan separatis untuk melakukan konsolidasi. Jika Darurat Militer dicabut berbahaya bagi Aceh karena GAM bisa membesar, sama dengan memberikan orang kesempatan beristirahat sambil memperkuat diri dan berkonsolidasi. Dan kenyataannya sebagian besar kelompok masyarakat di Aceh sekarang menyatakan keinginannya supaya TNI dan Polri tetap di sana. Jadi mungkin pemilu April 2004 nanti, Darurat Militer masih diterapkan. Kita mengharapkan tentunya dalam waktu tiga atau empat bulan ini mudah-mudahan suasana sudah lebih kondusif. Tapi kalau memang tidak, maka kepentingan lebih besar yang kita utamakan. Mungkin kompromi di daerah-daerah tertentu yang keadaannya masih belum memungkinkan, terpaksa tetap diberlakukan, dan di tempat yang lain barangkali seperti tadi kita pulangkan ke UU Pertahanan Negara.

DENNY J.A. :

Ok Bung, nanti kita ke Anda lagi, sekarang kita ke Smita. Bagaimana pendapat Anda, pemerintah memperpanjang Darurat Militer di Aceh?

SMITA NOTOSUSANTO :

Menurut saya perpanjangan Darurat Militer ini akan sangat mengganggu proses pemilu 2004, karena banyak hal yang merupakan persyaratan utama untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tidak dapat dipenuhi di bawah status Darurat Militer. Salah satunya adalah kebebasan informasi yang sangat dibutuhkan baik oleh pemilih maupun peserta pemilu. Informasi yang bebas, tidak berpihak, dan akurat, itu perlu diperoleh oleh pemilih maupun peserta pemilu. Mengenai penyelenggaraan pemilu sendiri dan juga hak-hak pemilih, sudah jelas tidak bisa dipenuhi di bawah status Darurat Militer, karena sekarang pun kebebasan pers sudah dipasung di sana.

DENNY J.A. :

Smita, bagaimana dengan alasan bahwa jika Darurat Militer dicabut GAM akan semakin membesar dan bisa berbahaya bagi Aceh sendiri ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Saya pikir pendapat saudara Usman juga harus dipertimbangkan, bahwa operasi militer atau metode militer menyelesaikan konflik di Aceh yang sudah memakan waktu beberapa dekade, menunjukkan bahwa metode militer tidak selalu bisa menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Dan seharusnya operasi militer dilakukan hanya sebagai penunjang bagi suatu upaya diplomatis. Seharusnya yang opsional itu status Darurat Militernya bukan pemilunya. Pemilu adalah kepentingan yang lebih besar dari sekedar Darurat Militer.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan alasan Pak Sembiring bahwa mungkin tidak apa-apa kita mengorbankan sedikit pemilu di Aceh dalam rangka tujuan yang lebih besar yaitu menghambat kemajuan GAM ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Saya tidak setuju, karena kepentingan yang lebih besar justru adalah pelaksanaan pemilu yang demokratis di Indonesia, untuk menjadi uji coba bahwa penyelenggaraan kelembagaan negara yang demokratis di Indonesia sejak transisi tahun 1998 sudah berjalan dengan baik. Dan ini harus berlaku secara nasional, tidak bisa ada di satu propinsi pemilu dilaksanakan di bawah satu pemerintahan militer. Ini merupakan kontradiksi yang prinsipil. Pemilu adalah satu proses yang terlaksana di sebuah negara demokrasi yang notabene harus berada di bawah supremasi sipil.

DENNY J.A. :

Bung Sembiring, menurut Smita pemilu yang luber di Aceh jauh lebih penting ketimbang memelihara Darurat Militer untuk mencegah GAM ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Saya kita kita semua sepakat bahwa pemilu yang bebas luber itu adalah prioritas utama, tapi tidak ada jaminan bahwa kalau tidak ada Darurat Militer lalu GAM kembali lagi pada posisi semula, lalu GAM bebas tidak luber juga. Jadi pilihan kita bukan Darurat Militer apa tidak, pilihan itu adalah apakah kalau Darurat Militer itu dicabut betul-betul suasana akan bebas, orang tidak di bawah tekanan, tidak dalam perasaan ketakutan begitu. Kenyataannya ada atau tidak operasi militer di sana, sebenarnya penduduk sebagian besarnya tetap di bawah tekanan. Cuma kalau sekarang pemerintah melakukan operasi militer, lalu katakanlah sedikit banyak kebebasan berkurang, tapi sebagian besar masyarakat juga merasa aman.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Usman, apakah Darurat Militer ini bisa mengurangi keabsahan pemilu di Aceh ?

USMAN HAMID :

Pemilu di Aceh atau di Indonesia sendiri membutuhkan satu kondisi yang kondusif bagi civil liberty. Dalam hal ini, Darurat Militer potensial membunuh kebebasan sipil seperti itu. Saya kira akan sulit membayangkan bahwa pemilu akan berlangsung di Aceh berada dalam satu situasi yang tertekan. Dan kadang pemberlakuan Darurat Militer secara keseluruhan di wilayah Aceh akan membuat situasi di Aceh begitu tidak kondusif. Rakyat tidak bisa bebas melakukan pemilihan di Aceh secara langsung.

DENNY J.A. :

Tapi apakah ada pasal-pasal yang dilanggar dalam UU Pemilu oleh Darurat Militer ini ?

USMAN HAMID :

Sebenarnya tidak ada larangan yang spesifik dalam UU Pemilu. Misalnya untuk satu daerah tidak boleh dalam keadaan Darurat Militer. Tapi saya kira satu prinsip umum yang universal bahwa satu proses pemilu harus berlangsung secara bebas dan setiap masyarakat mempunyai kebebasan mengekspresikan pilihan-pilihannya. Saya kira tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana membangun atau menciptakan situasi kedamaian sebelum proses pemilu nanti akan diadakan.

DENNY J.A. :

Ok, bagaimana Smita, apakah ada pasal-pasal yang dilanggar dengan menerapkan Darurat Militer di Aceh soal pemilu ini ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Saya pikir ini masalah interpretasi. Menurut saya seluruh esensi dari UU Pemilu itu sudah terlanggar, karena prinsip kebebasan informasi, kebebasan mobilitas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul, juga mobilitas untuk para pemantau independen domestik maupun pemantau independen internasional itu diakui dalam UU Pemilu. Dalam hal ini secara prinsipil sudah jelas tidak terpenuhi dalam status Darurat Militer. Tapi kemungkinan pelanggaran kita tidak akan pernah tahu karena tidak ada kemungkinan bagi pihak-pihak independen untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut.

DENNY J.A. :

Siapa yang mempunyai otoritas menyatakan bahwa ini melanggar atau tidak ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Menurut saya Panwas maupun pemantau pemilu independen bisa menyatakan, karena hak ini dilindungi dalam UU Pemilu. Tapi karena mobilitas dari Panwas, saya meragukan mereka bisa mengawasi secara menyeluruh semua penyelenggaraan pemilu, dan ini termasuk tahapan pra-pemungutan suara, seperti pendaftaran pemilih, verifikasi parpol, dan pencalonan yang seharusnya berjalan sekarang.

DENNY J.A. :

Jika memang dianggap ada pasal-pasal yang dilanggar oleh Darurat Militer, kira-kira apa konsekuensi yang paling buruk ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Konsekuensi yang paling buruk adalah pelaksanaan pemilu di Aceh bisa dinyatakan tidak absah sama sekali. Mengganggu legitimasi pemilu nasional dan mencemari komitmen Pemerintahan Megawati terhadap demokratisasi di Indonesia.

DENNY J.A. :

Ok, bagaimana Pak Sembiring, ini tampaknya cukup gawat konsekuensinya ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Gawat itu kan dalam situasi sekarang, keadaan krisis, karena ada separatis yang memang melakukan perlawanan bersenjata, jadi gawatnya di situ. Tapi saya tidak sepakat bahwa orang pergi ke kotak suara dibawah tekanan ? Karena TNI dan Polri dalam hal ini tidak ada kepentingan politik apa pun terhadap pemilu. Siapa pun yang menang, buat mereka sama saja dan mereka sudah menyatakan jauh-jauh hari tidak akan menggunakan suara dalam pemilu. Jadi sepanjang berkaitan dengan aspirasi politik, saya yakin walaupun ada pretensi kehadiran TNI di sana, tidak ada masalah. Bahkan sekarang ini situasi menunjukkan masyarakat merasa lebih bebas, lebih tidak tertekan, dan tidak khawatir sama sekali daripada sebelumnya.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan pandangan Smita bahwa bisa diinterpretasi ada pasal-pasal yang dilanggar oleh Darurat Militer itu jika dipaksakan dalam pemilu di Aceh nanti ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Tergantung siapa yang menginterpretasikan. Saya kira dalam pemilu 1999 pun tidak semua daerah Aceh mengikuti pemilu, dan kita menganggap pemilu 1999 adalah pemilu terbaik yang pernah dilakukan Republik Indonesia. Apakah kita tidak bisa mencari jalan solusi di sana, artinya kepentingan keamanan tetap berjalan ? Sebab bagaimanapun juga kalau GAM mempunyai peluang untuk kembali ke desa-desa, dan mereka yang sudah bangkit semangat perlawanannya akan menyebabkan masyarakat yang sudah menunjukkan kesetiaan kepada republik ini menanggung resiko yang sangat besar, yaitu bisa kehilangan nyawanya.

DENNY J.A. :

Ok kita ke Smita lagi, jika kita melihat komparasi studi di luar negeri, bagaimana negara lain mengatasi pemilu di daerah-daerah konflik itu ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Memang ada pengalaman misalnya di Kosovo atau Kamboja yang melaksanakan pemilu dalam masa transisi dan masih dalam situasi konflik. Di kedua wilayah itu ada keterlibatan pihak ketiga yaitu PBB. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah suatu contoh yang harus diikuti, tapi perlu digarisbawahi bahwa kedua negara melaksanakan pemilu tidak dalam situasi Darurat Militer atau di bawah pemerintahan militer. Pemilu dilaksanakan di bawah supremasi sebuah pemerintahan sipil transisional di bawah PBB. Jadi masih banyak mekanisme antara jadi atau tidak, harus hitam atau putih antara Darurat Militer atau dicabut sama sekali.

DENNY J.A. :

Tapi agak sulit menyertakan lembaga-lembaga internasional untuk mengawasi pemilu di Aceh ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Ya, tapi masih ada mekanisme antara seperti yang tadi disebutkan Usman, misalnya penggunaan UU No. 3 Tahun 2002 yang seharusnya menegasikan undang-undang sebelumnya. Jadi tidak usah seluruh wilayah Aceh diberlakukan Darurat Militer. Apa bedanya dengan pelaksanaan operasi militer yang sebelumnya juga belum pernah dievaluasi efektifitasnya ?

DENNY J.A. :

Bung Usman, memang komprominya Darurat Militer tapi hanya di beberapa kabupaten saja ?

USMAN HAMID :

Ya, karena mencabut Darurat Militer sendiri saya kira tidak mungkin, baik dari sisi kepentingan pemerintah maupun juga dari posisi masyarakat. Selama pemberlakuan Darurat Militer ada satu situasi yang diciptakan untuk melahirkan ketergantungan masyarakat Aceh terhadap militer. Ketergantungan ini bisa dilihat dari strategi pelibatan masyarakat sipil dalam melakukan perburuan GAM, baik dalam bentuk tenaga bantuan operasi maupun demonstrasi-demonstrasi. Kalau kita masih mengingat pada masa KOHA, ada mobilisasi massa yang digerakkan oleh militer untuk menentang GAM dan juga menghancurkan kantor-kantor GSG menjadi security committee. Dan saya kira banyak sekali praktek yang serupa pada masa pemberlakuan Darurat Militer yang kalau saja nanti militer kemudian dicabut atau ditarik dari Aceh, maka masyarakat akan berhadapan secara vis a vis dengan GAM. Dan situasi inilah yang tidak memungkinkan bagi masyarakat Aceh untuk mengatakan tidak kepada Darurat Militer.

DENNY J.A. :

OK Bung Usman, sebelum kita menggali lebih jauh dengan narasumber, kita mendengar juga suara publik melalui telepon. Pertama dari Bung John di Papua, silakan.

JOHN :

Selamat malam Bung Denny, terma kasih. Masyarakat di Nangroe Aceh Darussalam mempunyai hak penuh untuk mengikuti pemilu. TNI tidak berhak untuk melakukan suatu penekanan, semacam intimidasi atau paksaan. TNI mempunyai tugas mengamankan rakyat untuk mengikuti pemilu dengan baik. Karena itu merupakan hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR.

DENNY J.A. :

Bung John, bagaimana dengan argumen justru untuk melindungi pemilu di Aceh, Darurat Militer dibutuhkan ?

JOHN :

Saya sangat setuju dengan hal demikian. Darurat Militer di Aceh itu pada waktu dilaksanakannya pemilu harus dibuat untuk mengamankan masyarakat sipil, jadi mereka mengikuti pemilu dengan tidak ada masalah, tidak ada pemberontak-pemberontak yang mengacaukan. Jadi tugas TNI mengamankan rakyat pada saat pemilu itu dengan baik.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih Bung. Kedua dari Bung Abraham di Karawang, silakan Bung.

ABRAHAM :

Sekarang pemilu memang akan lebih berarti daripada Darurat Militer, itu benar. Tetapi jaminannya apa jika sekarang Darurat Militer dicabut ? Karena TNI tidak ikut dalam pemilu, malah dia mengamankan. Bahkan bagi rakyat tidak ada jaminan keamanan kalau sekarang Darurat Militer dicabut. Jadi saya masih setuju, tetap ada TNI di Aceh karena ada yang menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS-TPS. Saya setuju Darurat Militer diperpanjang di Aceh.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih Bung. Kita ingin mendengar bagaimana respon Ibu Smita ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Ya, menurut pendapat saya para pemirsa Metro TV ini juga didasari dari maraknya informasi tentang definisi Darurat Militer dan pengaman pemilu. Secara universal pengamanan pemilu seharusnya berada ditangan polisi yang tunduk kepada suatu pemerintahan sipil. Tidak ada satu pun pelaksanaan pemilu di dunia yang pengamannya

dilaksanakan oleh angkatan bersenjata. Selain itu perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat mengenai opsi-opsi lain di bawah Darurat Militer yang masih bisa dilakukan seperti pelaksanaan UU No. 3 tadi, yang membolehkan adanya operasi militer terbatas hanya di wilayah-wilayah tertentu. Juga harus dipikirkan opsi, misalnya penundaan atau pelaksanaan pemilu ulang yang juga dibolehkan dalam undang-undang pemilu, apabila terjadi kerusuhan yang menghambat pelaksanaan pemilu, bahkan di satu kabupaten pun.

DENNY J.A. :

Sebelum ke narasumber lain, kita kembali ke penelepon. Halo Bung Rizal, silakan.

RIZAL :

Halo. Saya baru pulang dari Aceh, dua hari yang lalu sampai di Jakarta. Saya seorang kontraktor. Menurut saya kalau melihat kondisi di Aceh sekarang yang sebenarnya, jangan diperpanjang lagi Darurat Militer karena sekarang masyarakat Aceh sudah hilang kepercayaannya kepada militer. Sekarang kalau kita bertanya satu-persatu kepada masyarakat Aceh, mereka tidak mau Darurat Militer diperpanjang lagi, karena sekarang masyarakat Aceh tertekan batinnya. Menurut saya sekarang berikan hak masyarakat Aceh.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda, Darurat Militer perlu dicabut justru supaya ada referendum di Aceh ?

RIZAL :

Bukan seperti itu, perkara referendum terserah kepada pemerintah sekarang. Yang saya katakan bahwa masyarakat Aceh sudah mempercayai NKRI, bukan lagi GAM. Keinginan masyarakat Aceh, operasi militer jangan diperpanjang lagi karena masyarakat Aceh sudah sengsara sekali.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak. Selanjutnya dari Bung Arief, silakan.

ARIEF :

Terima kasih Mas Denny. Saya hanya mau mengomentari pendapat dari Kontras maupun CETRO, yang selalu terkesan memojokkan pihak TNI dan pemerintah yang menerapkan Darurat Militer, tapi tanpa memberikan solusi konkrit kira-kira kalau pemilu dilaksanakan dengan cara apa kalau Darurat Militer ditarik ? Ini bukan situasi yang mudah di negara yang sedang dalam keadaan krisis dan kacau. Apa bisa pemilu di Aceh cukup diawasi polisi sedangkan yang kita hadapi adalah pemberontak senjata ? Saya khawatir kalau TNI yang tidak menjalankan. Tetapi naif kalau ada orang yang mengatakan bahwa jika ada Darurat Militer pasti akan mengintimidasi dan mengancam masyarakat. Karena dalam rangka pemilu mereka tetap bisa bebas memilih.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak. Penelepon selanjutnya, Bung Adi, silakan.

ADI :

Terima kasih Bung Denny. Saya hanya mau mengomentari Pak Usman, bahwa dengan adanya Darurat Militer membuat rakyat Aceh merasa tertekan. Ini konteksnya bagaimana ? Tertekan karena dipaksa menentukan satu pilihan terhadap partai tertentu ? Setahu saya TNI sekarang sudah netral. Dan yang kita hadapi adalah orang bersenjata. Kita melihat aksi-aksi mereka menculik dan sebagainya. Jadi perlu dipahami, Kontras jangan asal bicara.

DENNY J.A. :

Ok Bung Adi, terima kasih banyak. Kita membahas ini, pertama dari Bung Sembiring.

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Saya mendengar betul dengan cermat para penelepon, dan saya hanya mencatat satu orang yang mengatakan tidak perlu lagi diberlakukan Darurat Militer, yaitu Saudara Rizal yang baru pulang dari Aceh. Tapi alasannya pun karena rakyat Aceh sekarang sudah sedemikian besar rasa keterlibatannya dengan NKRI, sehingga tidak perlu lagi dikhawatirkan bahwa mereka akan keluar dari republik ini. Sehingga menurut beliau sudah waktunya rakyat Aceh diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri keadaan keamanannya. Penelepon yang lain saya melihat, semuanya menilai positif terhadap Darurat Militer bahwa mereka percaya TNI di sana tidak akan mengganggu pernyataan aspirasi politik, dalam hal ini hak memilih rakyat. Justru mereka akan mengamankan hak rakyat untuk memilih. Jadi saya kira perbedaan memang ada di situ, tetapi justru perbedaannya yang satu menilai situasi sudah demikian kondusifnya, tapi saya kira belum terlalu kondusif. Pengamatan dari DPR dan pemerintah, sisa-sisa dari gerakan separatis masih ada di beberapa tempat dan masih bisa mengacaukan.

DENNY J.A. :

Pandangan mayoritas dari para penelepon Darurat Militer justru diperlukan untuk security di Aceh, bagaimana Bung Usman ?

USMAN HAMID :

Saya mengerti sekali kekhawatiran ketika Darurat Militer dicabut kemudian GAM akan lebih leluasa melakukan berbagai tindak kekerasan dan ancaman kepada masyarakat sipil. Artinya masyarakat sipil kembali diposisikan dalam situasi yang berbahaya. Hanya yang perlu kita ingat, bahwa dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, gangguan-gangguan itu bukan hanya dari GAM namun juga dari aparat militer. Kekhawatiran itu saya kira seharusnya ditempatkan bahwa adalah kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan GAM sebelum proses pemilu nanti berlangsung. Kesalahan pemerintah dalam memperhitungkan enam bulan Darurat Militer akan berhasil

menghancurkan GAM itu, kemudian tidak serta merta membenarkan untuk mengorbankan masyarakat sipil dalam mengikuti proses pemilu nanti.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda Darurat Militer ini sebaiknya sampai sebelum pemilu saja ?

USMAN HAMID :

Saya kira tidak ada pilihan lain karena pemerintah sudah mengambil keputusan itu, dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengurai atau meminimalisir sebisa mungkin supaya proses pemilu nanti atau kampanye tidak berjalan di dalam situasi yang darurat. Sekali lagi kita masih memiliki alternatif-alternatif yang konstitusional untuk melakukan tindakan-tindakan itu, yaitu melalui UU Pertahanan Negara.

DENNY J.A. :

Setelah 25 tahun, ternyata GAM masih menjadi momok kita dan juga mengganggu pemilu 2004, apa yang mesti dilakukan agar pemilu di Aceh nanti terjadi secara normal ?

SMITA NOTOSUSANTO :

Saya pikir perlu disosialisasikan lebih lanjut upaya-upaya yang bisa diambil Aceh khususnya untuk penyelenggaraan pemilu. Tidak memperpanjang status Darurat Militer lebih dari sebulan, karena apabila lebih panjang dari itu, akan mengganggu integritas hasil pemilu secara nasional.

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Saya pikir justru rasa aman itu sangat erat kaitannya dengan kebebasan seseorang. Kalau di bawah tekanan atau rasa takut, tidak

mungkin dia bebas. Jadi kalau rakyat sudah menyatakan bahwa mereka memerlukan rasa aman, maka itu yang harus kita dengarkan. Soal tadi disarankan bagaimana caranya supaya pemilu legitimate, saya kira kita bisa memikirkannya. Pada tahun 1999 pun, bekas presiden Carter datang ke sini melihat sendiri. Kita tidak mengetahui nanti tahun 2004 siapa yang akan datang ke Aceh. Kalau memang merasa cukup kami persilakan saja tapi saya yakin TNI tidak mempunyai kepentingan politik apa-apa dalam hal ini. Justru dia akan mengamankan pemilu 2004 ini berlangsung dengan bebas. Soal yang lain itu saya kira adalah di luar wewenang dan kemauan saya untuk membahas.

DENNY J.A. :

Ok sekarang Bung Usman, silakan.

USMAN HAMID :

Ya, saya kira pemerintah harus memiliki satu mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, bagi hak asasi manusia di Aceh. Yang kedua, harus ada mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan kekuatan TNI untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan di masa yang akan datang.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Jadi pemirsa Metro TV sekalian, kita semua memang menginginkan pemilu yang aman, tapi kita juga menginginkan pemilu yang legitimate. Mungkin kompromi mesti dibuat, bahwa Darurat Militer hanya diterapkan di beberapa kabupaten yang masih rawan saja, tidak di keseluruhan Aceh.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan bersama saya Denny J.A. Selamat malam.

UPAYA-UPAYA PENGGAGALAN PEMILU

Tanggal : 13 November 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Idrus Marham (Tokoh Muda Golkar), Arbi Sanit
(Pengamat Politik), Hamid Awaludin (KPU)

Pemilu masih jauh, tetapi korban sudah berjatuhan. Di Bali, pendukung dua partai terbesar, PDIP dan Golkar terlibat kekerasan massal, dua orang tewas. Apa jadinya bila kekerasan serupa berlangsung di hari pemilu? Pemilu 2004 menjadi sangat kompleks dari beberapa sisi. Pertama, masyarakat semakin terhimpit oleh problem-problem ekonomi: kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga-harga, dan lain-lain. Rasa keadilan mereka tercederai karena pada saat yang sama praktek-praktek korupsi jalan terus dan pemerintah belum berbuat banyak untuk mengatasinya. Dalam keadaan terjepit dan kecewa tersebut, masyarakat mudah terprovokasi untuk melakukan kerusuhan. Kedua, kalangan elit justru sering memanfaatkan situasi bersama untuk menciptakan kerusuhan sosial, demi mencapai tujuan tertentu. Ketiga, pemilu 2004 jauh lebih kompleks daripada pemilu 1999. Dalam satu tahun, kita akan menghadapi tiga pemilu sekaligus: pemilu legislatif, pemilu presiden babak I, dan yang paling rawan pemilu presiden babak II. Apakah pemilu 2004 akan berjalan penuh konflik dan berdarah-darah? Apakah pemilu 2004 akan bisa dilaksanakan sesuai rencana?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, kita berjumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A.. Topik kita kali ini adalah seputar “Upaya-Upaya Penggagalan Pemilu”. Sudah hadir di studio Bung Idrus Marham, tokoh muda Golkar. Di sampingnya tokoh senior Bung Arbi Sanit, Pengamat Politik. Dan Bung Hamid Awaludin dari KPU. Seperti biasa, sebelum diskusi, kita dengarkan dulu pengantar berikut ini :

“Konflik di Buleleng memberikan sinyal bahwa pemilu 2004 mungkin akan berlangsung berdarah-darah. Bentrokan pendukung PDIP dan Golkar tidak hanya berakhir dengan tewasnya dua korban, tetapi puluhan warga setempat ikut mengungsi. Luka sosial masyarakat setempat hanya dapat sembuh dalam waktu lama. Hubungan partai ikut menjadi tegang. Jika pendukung PDIP dan Golkar yang mempunyai platform sama bentrok, apalagi pendukung yang platform-nya berbeda. Bali yang warganya homogen bentrok, apalagi di wilayah lain yang berbeda-beda dalam agama, etnis, ras, dan ekonominya. Konflik yang lebih besar pasti mudah terjadi.

Level akar rumput memang sangat rawan dan mudah untuk diprovokasi. Berbagai persoalan menumpuk di segmen ini membuat mereka seperti rumput kering yang mudah terbakar. Mereka saat ini semakin sulit secara ekonomi, jumlah pengangguran semakin banyak, harga-harga semakin tidak terjangkau. Pada saat yang sama, mereka juga menyaksikan merajalelanya korupsi. Mereka juga tahu berapa jumlah konglomerat hitam yang lepas dari jeratan hukum. Rasa ketidakadilan dan ketidakberdayaan membuat mereka nekad. Celakanya kalangan elit kita gemar memprovokasi. Mereka tidak sungkan-sungkan mempermainkan sentimen agama untuk memukul lawan politik. Penyakit lain dari kalangan elit ini adalah belum terbiasa dengan kultur kekalahan. Padahal dalam pemilu, pasti ada

yang menang dan yang kalah. Namun, kita masih mempunyai alasan untuk optimis bahwa pemilu 2004 akan sepi dari kekerasan. Jika elit yang berpengaruh di tahun 2004 dapat menerima siapa pun yang kalah dan yang menang.”

DENNY J.A. :

Kita mulai dari Bung Idrus. Mengapa partai Anda dan PDIP terlibat bentrok di Bali ?

IDRUS MARHAM :

Satu hal yang perlu saya kemukakan, Partai Golkar mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun di Bali, berangkat dari satu pemikiran bahwa kita sekarang dalam satu komitmen untuk membangun demokrasi ke depan. Dan ini juga kita tangkap dari tokoh PDIP, seperti Taufik Kiemas yang menyampaikan bahwa kita ini dewasa berpolitik, tidak ada dendam dan sebagainya. Berangkat dari situ, maka kita menetapkan Bali sebagai salah satu tempat untuk melakukan peringatan HUT. Kami kaget ketika menuju tempat peringatan, ternyata di Tabanan dicegat oleh kader-kader PDIP. Tetapi bisa lolos karena ada aparat keamanan.

DENNY J.A. :

Melibatkan massa dalam jumlah yang besar, Bung ?

IDRUS MARHAM :

Betul, di samping itu mereka mengusung simbol-simbol partai. Sebelumnya juga banyak bendera PDIP, karena kami mengetahui bahwa PDIP juga menyiapkan acara pelantikan Banteng Muda Indonesia (BMI) Denpasar dan Buleleng.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Bung Arbi Sanit. Menurut Anda, mengapa akhirnya terjadi bentrokan di Bali, padahal pemilu masih jauh ?

ARBI SANIT :

Ada dua hal yang kita tangkap dari peristiwa ini. Pertama, bahwa batas antara kegiatan rutin partai dengan kampanye pemilu tampaknya sudah dikaburkan atau tidak jelas lagi. Kalau kampanye banyak simbol dan simpatisan, tetapi kalau upacara tidak mungkin sebesar itu. Kedua, ada paradigma yang mungkin tidak tepat dengan sekarang. Di masa Orde Baru daerah adalah wilayah Golkar. Tetapi sudah dibuktikan oleh pemilu 1999 bahwa wilayah Golkar tidak seperti tahun sebelumnya lagi. Sudah banyak wilayah yang menjadi basis PDIP dan partai-partai lain. Kasus di Tabanan, sebenarnya daerah itu sudah menjadi basis PDIP. Partai Golkar masuk, orang PDIP menjadi marah.

DENNY J.A. :

Menurut anda, penyebab kampanye belum dimulai, tetapi sudah terjadi show of force Golkar di kantong partai lain ?

ARBI SANIT :

Benar.

DENNY J.A. :

Bagaimana menurut Anda, Bung Idrus ?

IDRUS MARHAM :

Ketika kita memiliki komitmen membangun demokrasi, demokrasi tidak mengenang kapling-kapling. Ketika kita sudah mengkapling-kaplingkan, bagaimana negara ini bisa ke depan ? Ini kondisi yang akan mempercepat bangsa menuju perpecahan !

DENNY J.A. :

Menurut Bung Arbi, kampanye belum dimulai tetapi sudah show of force, sehingga mengundang reaksi partai lain ?

IDRUS MARHAM :

Kalau dikatakan jarak antara kampanye dan upacara sudah tidak ada. Sebenarnya di mana pun ada upacara senantiasa ada simbol-simbol partai, dan tentu pesan-pesan yang kita sampaikan adalah kepada kader-kader kita sendiri, bukan kepada yang lain.

DENNY J.A. :

Bung Hamid, bagaimana menurut Anda melihat terjadinya bentrokan dua partai terbesar di Bali ini, padahal pemilu masih jauh?

HAMID AWALUDIN :

Pertama, saya menyesalkan, karena ini akan merusak citra partai yang bersangkutan. Kedua, daerah Bali baru saja dilanda kerusuhan yang membuat image nasional sangat buruk. Akibat kekacauan ini saya khawatir orang takut masuk Bali.

DENNY J.A. :

Apakah anda setuju dengan sinyalemen Bung Arbi bahwa kampanye belum dimulai, show of force Golkar di kantong partai lain menjadi penyebab kekekrasan ini ?

HAMID AWALUDIN :

Di mana-mana kalau crowded mass, apalagi memiliki latar belakang yang berbeda, tindakans seperti itu selalu terbuka, bukan hanya kampanye politik. Komunitas yang padat dengan latar belakang yang berbeda, tujuan sama tetapi dengan berkompetisi, kecenderungan itu selalu ada. Menurut saya bukan hanya persoalan kampanye yang bisa menyebabkan persoalan ini, tetapi crowded mass memang selalu begitu.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, Anda mendengar bahwa terdapat daerah-daerah yang rawan dan penduduknya mudah untuk diprovokasi. Peran pemimpin partai dan elit lokal sangat penting untuk mengendalikan massanya sehingga pemilu nanti akan kita hadapi secara lebih rileks.

Bung Arbi Sanit, menurut Anda apakah sebelum kampanye sebaiknya jangan dulu ada pengerahan massa ?

ARBI SANIT :

Harus dijelaskan antara kampanye dengan kegiatan rutin. Meminjam teori Webber bahwa kalau rutinitas dan kharisma itu berkonflik, akan terjadi kekacauan. Dalam kaitan ini yang disebut rutinitas adalah soal alasan pertemuan kader, sedang kharisma itu pertemuan massa. Itu dua hal yang berbeda, kalau dicampur-aduk akan terjadi kekacauan.

DENNY J.A. :

Apa belum ada regulasi bahwa sebelum kampanye tidak boleh ada pengerahan massa ?

ARBI SANIT :

Belum ada. Hendaknya pemimpin partai mengerti sosiologi politik sehingga tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang kacau seperti ini.

DENNY J.A. :

Bung Hamid, apakah sebaiknya sebelum kampanye, pengerahan massa di kantong lawan tidak dilakukan ?

HAMID AWALUDIN :

Benar, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini percikan api

mudah sekali menyala dan mudah menyebar ke mana-mana. Partai mau melakukan kaderisasi, pertemuan kader, boleh saja. Tetapi sebaiknya dihindari mobilisasi massa yang bisa menyinggung perasaan orang lain.

DENNY J.A. :

Terutama di kantong lawan ?

HAMID AWALUDIN :

Saya tidak mau berbicara kantong lawan, karena jangan berpolitik dengan claim territory, itu tidak bagus.

DENNY J.A. :

Mengapa KPU tidak membuat regulasi soal ini, Bung ?

HAMID AWALUDIN :

Persoalan pembinaan partai politik, KPU tidak mempunyai kewenangan. KPU oleh UU Partai Politik hanya diberi fungsi pengawasan keuangan. Masalah kampanye, KPU hanya berwenang dalam dua hal. Dalam masa kampanye kalau ada parpol yang menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, dan merusak alat peraga partai lain, baru KPU bisa menegur atau menghentikan kampanye. Bahwa KPU diberi mandat oleh UU untuk melakukan regulasi, kita sedang memproses regulasi sampai sededailnya. Regulasi yang ini sangat detail, termasuk tidak boleh memasang gambar berdekatan atau berhimpitan.

DENNY J.A. :

Wewenang siapa yang mengatur kampanye sebelum waktunya ?

HAMID AWALUDIN :

Itu wewenang Panwaslu. Pawaslu memiliki kewenangan yang sangat besar. Dia menerima dari masyarakat, pemantau pemilu, peserta pemilu yakni parpol atau individu, kemudian mengklasifikasinya.

DENNY J.A. :

Bagaimana tanggapan Bung Idrus, bahwa sebelum kampanye sebaiknya jangan dulu mengerahkan massa ?

IDRUS MARHAM :

Saat ini kita dalam proses pendewasaan politik untuk mengakhiri transisi demokrasi. Masalah-masalah seperti itu tidak bisa kita hindari dan harus kita siasati. Kalau kita menghindari maka akan memperlambat proses itu. Persoalannya bagaimana kita menyiasati masalah itu ? Ada beberapa langkah yang bisa kita pikirkan. Pertama, persoalan keamanan. Kedua, persoalan elit politik. Ada komitmen, ada etika politik yang harus kita tegakkan secara bersama-sama. Misalnya ada kerusuhan, hal itu merupakan tanggung jawab partai dan terkait dengan sanksi.

DENNY J.A. :

Menurut anda pengerahan massa tidak boleh dilarang, karena itu hak partai walaupun itu sebelum kampanye ?

IDRUS MARHAM :

Kalau kita melarang, dan pada saat kampanye baru keluar, justru emosi massa bisa membludak tidak terkendali. Tetapi kalau kita mulai dari awal, sedikit demi sedikit akan terbiasa dan tidak akan lagi emosional.

DENNY J.A. :

Anda setuju pengerahan massa diatur ?

IDRUS MARHAM :

Saya kira perlu.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Hamid ?

HAMID AWALUDIN :

Ada logika yang tidak saya mengerti dari Bung Idrus. Apa kaitannya dengan transisi demokrasi ? Saya tidak melihat ada same of logic antara transisi demokrasi dengan pengerahan massa. Bung Idrus perlu memisahkan antara pendidikan politik dengan pengerahan massa. Kalau penekanan transisi demokrasi ini harus mendewasakan dan mendidik rakyat berpolitik, caranya bermacam-macam, tidak hanya bertumpu pada metode pengerahan massa.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Arbi penilaian Anda ?

ARBI SANIT :

Harus dilihat kondisi masyarakat yang diarahkan, massa ini adalah masyarakat yang amat promodial. Jadi pemilu 1999 itu sudah memprimordialkan pemilih. Sangat sensitif justru kalau massa dipermainkan.

DENNY J.A. :

Oke, nanti kita teruskan kembali. Pemirsa Metro TV, Anda mendengar kontroversi apakah sebaiknya pengerahan massa boleh atau jangan dilakukan dulu sebelum kampanye, karena ini rawan terutama bila terjadi di daerah-daerah konflik. Semua sepakat pengerahan massa adalah hak partai politik, tetapi perlu pengaturan yang lebih detail dan arif terutama di daerah-daerah konflik.

Kita simak dulu hasil polling Metro TV bekerjasama dengan Mars. Pertanyaan pertama, “Menurut anda apakah yang menjadi penyebab bentrok kader PDIP dan Golkar di Buleleng ?” Sebanyak 77% responden menjawab “unsur politik”, 13% “unsur kriminal murni”, dan 10% “tidak tahu”. Pertanyaan kedua, “Setujukah anda bentrok kader PDIP dengan Golkar di Buleleng merupakan salah satu bentuk kekurangdewasaan dalam berpolitik ?” Sebanyak 80% responden menjawab “tidak setuju”, 15% “setuju”, dan 5% “tidak tahu”. Pertanyaan ketiga, “Menurut anda apakah bentrok massa antar partai akan sering terjadi pada pemilu 2004 ?” Sebanyak 79% responden menjawab “Ya”, 15% “Tidak”, dan 6% “Tidak Tahu”.

Mayoritas pemilih (79%) melalui telepon mengatakan bahwa sangat mungkin pemilu 2004 nanti diwarnai bentrok dan kekerasan yang akan membuat politik menjadi tidak stabil. Ada yang meminta KPU mengambil inisiatif mengumpulkan ketua partai untuk duduk bersama dan membuat kode etik yang mengatur kampanye dan pengerahan massa sebelum kampanye. Apakah seruan ini cukup realistis ? Kita menghuBungi Bung Hamid. Bagaimana inisiatif dari KPU ?

HAMID AWALUDIN :

Saya setuju. Pertanyaannya sekarang, “Maukah partai politik itu datang untuk duduk berembug, bersilaturrehmi satu sama lainnya ?” Karena bagaimana pun kampanye tidak bisa diatur secara limitative berdasarkan aturan main yang kita buat, tetapi harus ada nuansa moral dan etika di dalamnya. Kalau setuju partai politik melakukan pertemuan seperti itu untuk membahas kode etik bagaimana berakhlakul karimah dalam berkampanye, saya sangat setuju. KPU akan mencobanya.

Dan yang perlu diatur di antaranya adalah court of conduct, bagaimana berperilaku dalam kampanye. Misalnya kalau berkampanye arak-arakan, bagaimana perilaku anda. Hal seperti ini yang harus disepakati.

DENNY J.A. :

Bung Arbi, bagaimana tentang kode etik para pemimpin partai ini?

ARBI SANIT :

Tentu saja, kegiatan profesional seperti itu memerlukan kode etik, karena menyangkut tanggung jawab kepada masyarakat luas, sehingga ada jaminan bahwa kelakuan para politisi tidak melampaui batas dan tidak melanggar hak orang yang tidak berpolitik, atau melanggar fasilitas-fasilitas sosial. Harus ada jaminan dan kode etik.

DENNY J.A. :

Katakanlah ada kode etik, tetapi apa jaminannya bahwa kode etik ini akan ditaati dan apakah ada sanksinya ?

ARBI SANIT :

Kode etik bisa efektif kalau ada frame tentang sanksi dan pelaksanaannya. Panwaslu menggunakan itu sebagai ukuran untuk melakukan pengusutan apakah terjadi pelanggaran pemilu oleh yang bersangkutan.

DENNY J.A. :

Sanksi tetap diberikan oleh pemerintah bukan oleh parpol ?

ARBI SANIT :

Kesepakatan poin-poinnya oleh partai tetapi regulasi resminya oleh KPU.

DENNY J.A. :

Bagaimana, Bung Idrus ?

IDRUS MARHAM :

Proses demokrasi hanya akan bisa berjalan apabila ada aturan main, dan bagian dari aturan main ini adalah kode etik. Oleh karena itu bagi Golkar tidak ada jalan lain kecuali mendorong proses demokratisasi, dan salah satu di antaranya adalah kode etik.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, anda mendengar sendiri salah satu solusi yang bisa dicoba adalah KPU beserta partai besar mengambil inisiatif bertemu membuat kode etik sehingga ada semacam guide-line dan aturan untuk kampanye. Mungkin ini solusi yang tepat untuk mengatasi dan mencegah bentrok antar pendukung partai seperti yang terjadi di Bali. Kita akan menggali masalah ini lebih lanjut, tetapi sebelumnya kita mendengarkan suara publik melalui telepon. Bung Yunan di Jakarta. Halo, Bung. Silakan.

YUNAN :

Terima kasih Bung Denny. Ada beberapa hal yang bisa kita kemukakan dalam peristiwa Tabanan. Pertama, tidak ada batas yang tegas antara masa kampanye dengan proses kegiatan yang menjadi ritual politik dari partai politik menjelang pemilu 2004. Kedua, masih sangat kuat melekat paradigma bahwa birokrasi adalah Golkar. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan politik yang menyangkut partai politik selalu aparat keamanan memberikan ruang seluas-luasnya kepada partai tertentu. Sebenarnya belum ada regulasi yang menetapkan hal itu. Mestinya yang harus dilakukan adalah mengeliminir sedemikian mungkin kegiatan-kegiatan semacam itu.

DENNY J.A. :

Anda melihat tidak netralnya aparat keamanan ?

YUNAN :

Betul. Yang ketiga adalah budaya politik. Para elit politik tidak memberikan pembelajaran yang benar pada konstituennya, sehingga menjadi cermin bahwa pemilu 2004 tidak akan ada perubahan signifikan secara kualitas.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak, Bung. Dari Bung Purwacaraka, silakan.

PURWACARAKA :

Golkar harus realistis. Kapan sih Golkar berjuang untuk rakyat ? Baru-baru ini Konvensi Golkar jelas-jelas katanya untuk kepentingan partai. Itu statement politik paling memalukan dalam 3 bulan terakhir. Dan ingat kasus Akbar Tandjung, ketika orang yang mengembalikan uang, berarti dia mengakui telah mengambilnya.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak. Pemirsa Metro TV, kira-kira what should be done, apa yang mesti dibuat agar pemilu 2004 bersih dan tanpa kekerasan ? Kita mulai dari Bung Hamid, silakan.

HAMID AWALUDIN :

Menurut saya ada tiga. Pertama, partai politik sebaiknya menyadari untuk segera melakukan territorial mapping, untuk mengetahui daerah-daerah mana yang potensial konflik, pernah ada konflik atau bara konflik itu selalu ada. Dengan demikian mereka harus ada kecerdasan memahami aspek sosiologi bangsa ini dalam artian territorial space. Kedua, partai politik harus menghindari adanya territorial claim, mengklaim teritori tertentu sebagai basis teritori eksklusif bagi partai tertentu, dengan demikian orang lain tidak masuk. Republik ini milik bersama tidak boleh ada klaim-klaim teritori seperti itu. Dan ketiga, partai politik tingkat pusat segera duduk bersama bagaimana berperilaku dalam masa sebelum kampanye.

DENNY J.A. :

Terima kasih, Bung. Bung Idrus, silakan.

IDRUS MARHAM :

Yang pertama, saya sependapat dengan Bung Hamid bahwa partai politik tidak boleh mengotak-kotakkan bangsa ini, tetapi kita harus secara bebas untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan yang menjadi visi kita untuk membangun bangsa di masa depan. Sebab begitu bangsa ini kita kotak-kotakkan, kita membatasi partai lain untuk bereaksi yang lebih besar dan ujung-ujungnya terjadi kerusuhan. Tetapi kalau kita bebaskan untuk menyampaikan ide dan gagasan, masyarakat meresponnya secara rasional akan lebih bagus. Kedua, saya juga sependapat bahwa pimpinan partai harus segera melakukan pertemuan untuk membicarakan bagaimana seharusnya kita berperilaku, bersikap. Ada kode etik yang disepakati dan ada kesepakatan sanksi. Ketiga, bagaimana pihak kepolisian benar-benar netral sebagai penegak hukum, tidak mengabdikan kepada kekuasaan.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih. Terakhir Bung Arbi Sanit, silakan.

ARBI SANIT :

Perlu antisipasi komprehensif yang diperlukan terhadap kemungkinan konflik massa dalam pemilu. Pertama, KPU dan partai politik membangun kode etik. Kedua, partai-partai besar membangun forum dari tingkat pusat sampai daerah. Ketiga, aparat keamanan mengontrol dan mengoordinasikan satgas partai. Ada sistem deteksi atau peringatan dini untuk mengetahui bahwa di daerah tertentu akan ada kekerasan, dan sebagainya. Dan keempat, memberdayakan peran ormas. Ormas itu warganya masuk ke bermacam-macam partai. Perlu ada kesadaran dari ormas-ormas tersebut kepada warganya yang terlibat dalam partai agar mempunyai kesadaran yang lebih tinggi.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak kepada para pembicara.

Pemirsa Metro TV, anda mendengar berbagai opini dan merupakan solusi agar pemilu 2004 nanti aman. Satu yang juga perlu ditambahkan adalah agar para pemimpin partai melakukan civic education kepada massanya atau pendukungnya bahwa pemilu adalah hal yang rutin, sehingga segala persaingan dan kompetisi dalam pemilu harus dihadapi dengan lebih rileks.

Pemirsa Metro TV sekalian, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan, bersama saya Denny J.A.

BAB II

KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MASA TRANSISI

MENGGANTI PRESIDEN MEGAWATI

Tanggal : 23 Januari 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Patrialis Akbar (F-Reformasi DPR-RI), Jacob Tobing (F-PDIP DPR-RI), Satya Arinanto (Pakar Hukum Tata Negara)

Indonesia adalah tempat yang paling tidak nyaman untuk menjadi presiden. Empat presiden kita terdahulu, semuanya berakhir dengan buruk. Tiga presiden dijatuhkan di tengah jalan, dan satu presiden laporannya ditolak oleh MPR. Apa yang salah dengan kehidupan politik di negara kita ? Kini muncul kembali aksi menggoyang Presiden Megawati, yang semakin meluas ke berbagai kota. Akankah Megawati mengikuti tradisi presiden sebelumnya yang jatuh di tengah jalan ? Ataukah Megawati membangun tradisi sendiri, mampu bertahan bahkan kembali dipilih dalam pemilu 2004 ? Apakah sebaiknya kita mempercepat pemilu presiden dan bagaimana juga dengan RUU pemilihan presiden ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A.. Sekarang sudah hadir di studio, pertama Bung Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi. Di sebelahnya Bung Jacob Tobing dari PDIP. Dan kita juga akan menjumpai Bung Satya Arinanto,

seorang pakar tata negara. Untuk memperkaya diskusi kita saksikan pengantar berikut :

“Mereka-mereka yang pada hari ini ingin melakukan kerusuhan, ingin melakukan tindak kekerasan, ingin memprovokasi, mari kita bertarung dengan fair di pemilu 2004” demikian kata Presiden Megawati Sokarnoputri. Tantangan Megawati itu adalah respon paling keras dan paling mutakhir atas gerakan menggoyang Megawati-Hamzah. Pemerintah sudah menunda kenaikan tarif telepon, harga BBM, dan listrik juga sudah disesuaikan. Namun aksi protes masyarakat tidak juga mereda. Mahasiswa tetap turun ke jalan, tidak hanya berteriak, mereka juga membakar poster Megawati. Ibu-ibu rumah tangga secara militan terus berdemo, sementara petualang-petualang politik yang ditantang Megawati semakin terkonsolidasi. Kini tuntutan aksi protes sudah bergeser temanya, bukan lagi pembatalan harga BBM, tarif listrik, dan telepon, tetapi pelengseran Megawati-Hamzah. Ide presidium nasional sebagai pengganti Megawati-Hamzah semakin berdentung. Bagaimanakah proses politik dari aksi protes ini ? Dapatkah Megawati dijatuhkan MPR sebelum pemilu 2004 ?

Menurut UUD 1945 hasil amandemen, seorang presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kebijakannya. Seorang presiden mungkin saja membuat kebijakan yang buruk buat rakyatnya. Tapi kebijakan itu sah diambil sebagai kebijakan politik yang memang menjadi wewenang seorang presiden. Seburuk apa pun kebijakan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan presiden di tengah jalan. Pemimpin partai besar berkepentingan agar Megawati tidak jatuh sebelum pemilu 2004. Mereka mempertahankan Megawati bukan karena cinta, tetapi karena mereka melindungi kepentingan politik dan ambisi mereka sendiri. Mereka mempunyai ambisi untuk menjadi presiden dan menggantikan Megawati. Namun mekanisme paling aman, elegan, dan memperoleh legitimasi adalah pemilu 2004. Hanya segelintir elit politik yang berharap Mega-Hamzah bisa jatuh sebelum pemilu 2004 atau bahkan di tahun 2003. Mereka menyimpan ambisi untuk menggantikan Megawati melalui presidium

nasional atau dewan presidium. Mereka tidak peduli dengan tradisi bahwa presiden hanya boleh diganti dengan pemilu, kecuali jika presiden melanggar hukum tingkat tinggi. Bagaimana prospek aksi protes ini ? Akankah ia menjatuhkan presiden ? Apakah sebaiknya pemilu presiden dipercepat? Bagaimana dengan rancangan undang-undang pemilihan presiden ? Apa yang seharusnya dilakukan DPR saat ini ?”

Jajak pendapat harian Kompas menyimpulkan bahwa semakin lama publik semakin tidak puas dengan pemerintahan Megawati. Setelah 18 bulan memerintah, menurut Kompas ketidakpuasan publik sudah melampaui angka 80%. Sebuah angka yang tinggi sekali. Dalam demokrasi parlementer tingkat ketidakpuasan itu sudah dapat menjatuhkan pemerintah. Apakah jajak pendapat Kompas ini akurat ? Seandainya akurat di mana kesalahan pemerintahan Megawati ? Kita menghuBungi para narasumber. Pertama Bung Patrialis Akbar, menurut Anda apakah memang sebesar itu angka ketidakpuasan publik ?

PATRIALIS AKBAR :

Kita tidak bisa mengingkari apa yang sudah disampaikan Kompas. Karena polling itu dilakukan tentu berdasarkan pada satu kenyataan yang ada di masyarakat. Ini merupakan bagian dari peringatan kepada pemerintah untuk segera introspeksi diri, bahwa 80% lebih masyarakat Indonesia tidak puas. Kalau pemerintah tidak hati-hati, ketidakpuasan bisa mencapai 100%.

DENNY J.A. :

Menurut Anda Bung, di mana salahnya 18 bulan pemerintahan Megawati ?

PATRIALIS AKBAR :

Mungkin berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Misalnya kebijakan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat secara mendasar, kemudian kebijakan yang berkaitan dengan

tidak hati-hatinya pemerintah dalam menjaga aset-aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Mungkin juga ada penampilan pemimpin-pemimpin bangsa kita di bawah Kabinet Gotong Royong yang kelihatannya arogan dan tidak menghargai pikiran-pikiran rakyat.

DENNY J.A. :

Menurut Anda juga seberapa besar ada politisasi dari lawan politik lain, misalnya menjelang pemilu 2004 ini, sehingga aksi protes begitu banyak sekarang ini ?

PATRIALIS AKBAR :

Menurut saya kita tidak bisa menyatakan politisasi tetapi sekarang adalah sesuatu yang memang dirasakan oleh rakyat. Ini kan bahaya secara keseluruhan. Jadi partai politik tenang-tenang saja.

DENNY J.A. :

Sekarang kita mendengar dari Bung Jacob Tobing. Bung Jacob apakah memang sampai sebesar 80% yang tidak puas terhadap Megawati ?

JACOB TOBING :

Ya, lepas dari cara polling itu sendiri, tetapi baru saja kita mengingat polling, betapa populernya Megawati dan itu berubah-ubah terus. Teknik polling juga menentukan. Itu suatu dinamika tapi secara keseluruhan lebih baik memang kita melihat aspek introspektifnya. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi ini bergerak dan juga tentunya tidak luput dari berbagai politisasi yang terjadi.

DENNY J.A. :

Anda setuju apa yang dikatakan Bung Patrialis Akbar bahwa banyak sekali kebijakan Ibu Mega yang kontroversial ? Misalnya

soal kenaikan BBM, penjualan Indosat, kemudian juga penghapusan pidana konglomerat hitam ?

JACOB TOBING :

Bisa saja, kadang-kadang masyarakat itu mengalami distorsi. Berbagai kebijakan dari pemimpin yang bertanggung jawab, memang tidak selalu harus populer, walaupun popularitas harus dijaga. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana rakyat dibela.

DENNY J.A. :

Mungkinkah ada masalah komunikasi politik Megawati sendiri dalam menyosialisasikan program ?

JACOB TOBING :

Ini sisi penempatan politik ekonomi. Dari hal-hal begini secara mendasar kebijakan itu benar tapi placing-nya, komunikasinya, dan juga pengemasannya memang harus diperbaiki.

DENNY J.A. :

Apakah Anda melihat ada politisasi dari lawan politik juga di aksi-aksi besar yang sekarang ini berlangsung dalam rangka 2004 itu ?

JACOB TOBING :

Sampai sejauh itu, merupakan sesuatu yang biasa terjadi, supaya rakyat juga mengetahui bahwa tidak sepenuhnya hal ini berjalan secara obyektif, bahwa politisasi selalu ada.

DENNY J.A. :

Salah satu yang dituduh adalah tokoh dari reformasi sendiri, Bung Fuad Bawazier. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Apakah Pak Jacob juga melihat ada empat tokoh yang dikatakan BIN itu ?

JACOB TOBING :

Iya, itu bisa dibaca di koran.

PATRIALAIS AKBAR :

Saya melihatnya pemerintahan sekarang khususnya dalam masalah ekonomi, masih saja berbicara tataran konsep dan teori. Tidak bicara tentang fakta sosiologis masyarakat yang kondisinya sudah kacau-balau seperti ini. Jadi ini bukan hanya masalah komunikasi politik saja, tetapi substansi kebijakan itu sendiri. Saya kira rakyat sekarang melihat bagaimana besok bisa hidup, itu yang paling penting bagi rakyat. Kita berteori saja, jadi tidak bakalan kena. Misalnya mengapa pemerintah ingin mencabut subsidi kepada masyarakat, padahal subsidi itu adalah sesuatu yang sedang dibutuhkan. Waktu mereka sedang membutuhkan tiba-tiba dicabut, ya mereka kaget.

DENNY J.A. :

Tapi kan disetujui oleh DPR Bung ?

PATRIALIS AKBAR :

Saya kira belum. Kalau pun DPR setuju, bagaimana teknis pelaksanaannya, sejauh ini tidak pernah dibicarakan sama sekali.

DENNY J.A. :

Pak Jacob, jadi menurut Pak Patrialis Akbar, bukan hanya komunikasi politik tetapi visi kebijakan-kebijakan Megawati yang tidak banyak memihak kepada rakyat, wong cilik ?

JACOB TOBING :

Itu justru untuk memperbaiki fundamental ekonomi. Orang tua tidak begitu saja mengikuti apa-apa yang dikehendaki anggota keluarganya. Dia bertanggungjawab bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk besok. Kalau semua resources, semua bahan

makanan dihabiskan hari ini, apa yang harus dimakan besok ? Inilah tanggung jawab pemimpin. Pemimpin harus mempunyai tanggung jawab, bukan hanya menjual popularitas saja.

PATRIALIS AKBAR :

Bagaimana bisa masyarakat berpikir untuk besok, sementara sekarang dia sudah mau mati.

DENNY J.A. :

Jadi Bung, katanya kebijakan tadi mungkin cocok di era normal, tetapi bukan di era krisis ?

PATRIALIS AKBAR :

Ya, kalau normal saya kira tidak usah subsidi. Bahkan kita harus banyak membantu negara ini. Sekarang bagaimana masyarakat mau membantu, makan saja susah !

DENNY J.A. :

Sekarang kita menjumpai pakar hukum tata negara, Bung Satya Arinanto. Bung, apakah kebijakan yang tak populer seperti kenaikan harga BBM dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan presiden ?

SATYA ARINANTO :

Agak sulit, sekarang mekanismenya berdasarkan pasal 7 perubahan yang ketiga UUD 1945, melalui mekanisme semacam impachment yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian karena MK belum terbentuk maka kita melihat dasarnya adalah peraturan Mahkamah Agung (MA), karena MA yang menjalankan. Sementara berdasarkan perubahan ke empat dan dia sudah membuat peraturan MA nomor 2 tahun 2002 tentang pelaksanaannya.

DENNY J.A. :

Menurut UUD 1945 hasil amandemen, alasan untuk menjatuhkan presiden apakah sebuah kebijakan bisa dijadikan alasan ataukah harus pelanggaran hukum yang sangat konkrit ?

SATYA ARINANTO :

Memang di sana ditekankan pelanggaran hukum, didalam pasal 7 itu memang ada beberapa yang mengambil dari ketentuan Konstitusi Amerika. Jadi agak sulit untuk memakai alasan kebijakan ini kecuali kalau memang nanti ada yang berkaitan dengan unsur pelanggaran hukum.

DENNY J.A. :

Jadi meng-impeach presiden sekarang ini mesti ada verifikasi hukum dari MA ?

SATYA ARINANTO :

Ya, sekarang MK belum terbentuk sehingga dilaksanakan oleh MA.

DENNY J.A. :

Soal usulan mempercepat pemilu, seberapa lazim ini terjadi dalam perspektif hukum tata negara ?

SATYA ARINANTO :

Pada umumnya memang pemerintahan di negara-negara yang menganut sistem parlementer pada saat posisinya sedang bagus di mata rakyat, biasanya dia mengusulkan untuk mempercepat pemilu. Sehingga dia mendapatkan semacam relegitimasi dari rakyat untuk meneruskan pemerintahannya. Tetapi tuntutan mempercepat ini datang dari kelompok di luar pemerintahan. Tetapi itu secara teori wajar saja.

DENNY J.A. :

Tapi mungkin tidak diterapkan di Indonesia akhir tahun 2003, misalnya pemilihan presiden setelah RUU Pemilihan Presiden disahkan?

SATYA ARINANTO :

Ya, kalau memang itu disahkan bisa saja. Sebenarnya kalau dari satu sisi, sekarang kita juga menunggu bagaimana penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung itu. Hanya kelemahannya RUU-nya belum jadi. Jadi pemilu dapat dipercepat sejauh ada konsensus dan sudah disahkan oleh DPR. Itu sama saja dengan pada masa Pak Habibie. Pada saat itu di mana ada kesepakatan untuk mempercepat pemilu.

DENNY J.A. :

Dari perspektif tata negara murni, seberapa mungkin presiden dan wapres dijatuhkan dan digantikan oleh sebuah presidium nasional?

SATYA ARINANTO :

Presidium ini tidak ada landasannya. Sampai sekarang pada saat berhentinya Presiden Soeharto, dan digantikan oleh Presiden Habibie, memang juga pernah muncul gagasan semacam itu. Jadi secara konstitusional mustahil presidium itu muncul, kecuali melalui revolusi, dan mungkin juga melalui perubahan konstitusi kalau memang dimungkinkan.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak Bung Satya Arinanto. Kita ke Pak Jacob dulu. Apakah benar UUD 1945 yang diamandemen menyebutkan, sebuah kebijakan seburuk apapun tak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan presiden ?

JACOB TOBING :

Ya, itu secara pasti memang tidak bisa. Hanya pelanggaran pidana yang sudah ditunjuk oleh UUD 1945 dan sudah harus dibuktikan lebih dulu bersalah oleh MK. Jadi siapapun presidennya, jika tidak melanggar hukum tidak bisa dijatuhkan di MPR.

DENNY J.A. :

Bung Patrialis, Anda setuju ?

PATRIALIS AKBAR :

Kita memahami konstitusi ini juga harus secara komprehensif. Karena ada beberapa alasan yang diisyaratkan oleh UUD. Pelanggaran hukum itu berbentuk apa ? Pertama, adalah berbentuk pengkhianatan terhadap negara. Kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah berkategori pengkhianatan terhadap negara dan itu diajukan oleh DPR kepada MK, dan MK menyatakan telah terbukti bersalah, presiden bisa di-impeach. Ada empat kategori pelanggaran hukum, itu bersifat pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana pelanggaran berat lainnya, serta perbuatan tercela atau memang tidak memenuhi syarat lagi.

DENNY J.A. :

Dari kebijakan-kebijakan Ibu Mega sampai sekarang apakah ada yang masuk kategori itu ? Misalnya seperti penjualan Indosat ?

PATRIALIS AKBAR :

Kalau itu nanti urusannya DPR. Saya tidak bisa menyatakan apakah itu masuk atau tidak. Sekarang ini kan juga sudah ada hak angket yang diajukan oleh anggota DPR. Nanti kita melihat karena juga belum bisa memvonis bahwa apakah kasus itu melanggar atau tidak.

DENNY J.A. :

Ingin dimasukkan ke dalam kategori mengkhianati kepentingan negara ?

PATRIALIS AKBAR :

Saya kira kita juga belum bisa mengatakan seperti itu, mari hak angketnya berjalan dulu apa pun hasilnya nanti baru diputuskan.

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Jacob soal hak angket ini, seberapa jauh ini berbahaya bagi Ibu Megawati ?

JACOB TOBING :

Menurut saya tidak kepada masalah jabatan, tapi masalahnya itu akan kena kepada popularitas menjelang pemilu 2004. Ini lebih politis.

DENNY J.A. :

Bung Satya, bagaimana nasib hak angket Indosat, apakah bisa berbahaya bagi posisi presiden ?

SATYA ARINANTO :

Berdasarkan UU No.6 Tahun 1954, tidak begitu saya melihatnya. Apalagi nanti dikaitkan penerapannya dengan peraturan tata tertib DPR yang agak ambigu. Sebagaimana diketahui, banyak masalah muncul pada saat era Presiden Abdurrahman Wahid, yang pada waktu itu juga semestinya menggunakan UU No.6 Tahun 1954. Jadi kasus Indosat ini juga tidak mungkin bisa menjatuhkan presiden di MPR. Sementara ini kasus itu ditujukan pada menteri, mungkin menternya yang goyah, tergantung bagaimana dia mempertahankan diri nanti.

DENNY J.A. :

Bung Patrialis, masalah presidium nasional. Bagaimana sikap partai Anda ?

PATRIALIS AKBAR :

Presidium itu suatu konsep yang inkonstitusional karena dalam UUD kita itu sudah mengatur kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden. Kalau dua-duanya berhalangan ada triumvirat. Kalau itu dianggap presidium ya silakan. Tetapi itu secara eksplisit sudah diatur.

DENNY J.A. :

Pak Jacob Tobing, soal mempercepat pemilu 2004, apakah ini perlu ?

JACOB TOBING :

Menurut saya tidak perlu, karena itu salah satu hal yang pasti didalam sistem yang kita pilih adalah fix turn. Dan kita mencantumkan juga bahwa siklus itu adalah lima tahun dan sekarang pun masa jabatan itu adalah lima tahun.

DENNY J.A. :

Kita tampilkan dulu jajak pendapat yang dibuat oleh Metro TV. Pertanyaan pertama, “Bagaimana menurut Anda sikap Megawati akhir-akhir ini ? Yang menjawab “Bijaksana” 6%, “Emosional” 40%, dan “Biasa-biasa saja” 54%. Pertanyaan kedua, “Apa pilihan Anda menyikapi politik akhir-akhir ini ?” Yang menjawab “Percepatan pemilu” 40%, “Tetap memertahankan Megawati sampai 2004” 45%, dan “Membentuk dewan presidium” hanya 15%. Pertanyaan ketiga, “Dalam pemilihan presiden yang akan datang menurut Anda cara pemilihan apa yang paling tepat ?” Yang menjawab “Presiden dipilih langsung oleh rakyat” 86%, “Presiden dipilih oleh MPR” 8%, dan “Tidak peduli” 6%.

Dari polling ini tampaknya memang masyarakat tetap konservatif, cenderung taat pada aturan-aturan di UUD 45. Sekarang kita mendengar pandangan publik melalui telepon. Dimulai dari Rani di Jakarta. Halo Rani, silakan.

RANI :

Saya melihat ibu Megawati ini agak “lelet” menyikapi permasalahan bangsa yang harus segera direspon. Seperti demonstrasi besar-besaran tanggal 7 Januari mengenai BBM, baru direspon tanggal 20 Januari. Dan keterlambatan itu fatal sekali. Kenaikan harga sudah melambung, dan sampai sekarang harga-harga itu tidak bisa turun.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak ya Bu. Selanjutnya Bung Yusup dari Tangerang, silakan Bung.

YUSUP :

Menurut saya kalian yang ada di Senayan itu kompak dan bersatu kalau pada saat menjatuhkan dan menaikkan presiden yang baru. Tetapi begitu membangun bangsa ini agar lebih baik kalian bercerai-berai. Terbukti nyata waktu menjatuhkan Habibie, Gus Dur, begitu kompak kalian, ada kerjasama lintas partai segala. DPR mengaku kepentingan rakyat, buktinya mana sekarang ? Padahal rakyat lagi kembang-kempis. Katanya kalian membawa aspirasi rakyat, rakyat yang mana ?

DENNY J.A. :

Ok, sekarang Bung Agung dari Jakarta, silakan Bung.

AGUNG :

Kebijakan Megawati dengan kabinetnya telah menyengsarakan rakyat kecil yang implikasinya membuat PDIP kehilangan konstituen. Konstituen merasa dibohongi para politisi PDIP. Presiden Megawati seharusnya secara legowo menyerahkan kembali mandatnya ke MPR melalui sidang istimewa. Saya mengharapkan pemilihan umum dipercepat saja, daripada lama-lama kita menderita.

DENNY J.A. :

Satu lagi dari Bung Abu, silakan.

ABU :

Saya ingin memberikan sedikit masukan, kadang-kadang jarang disebut masalah yang sangat financial, seperti masalah Ibu Megawati dan suami, itu sampai sekarang belum menyerahkan daftar kekayaan. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat frustrasi dan tidak puas, termasuk privatisasi BUMN yang kebablasan, release and discharge untuk konglomerat, pemborosan ketika pergi ke luar negeri dan lain-lain.

DENNY J.A. :

Terima kasih Bung Abu. Sekarang kita menghuBungi dulu Pak Jacob Tobing. Pertanyaan masalah leadership Megawati yang dianggap tidak pas dengan suasana krisis yang membutuhkan pemimpin yang lebih komunikatif, dan lebih agresif. Bagaimana Anda meresponnya ?

JACOB TOBING :

Mbak Mega itu ya begitu, bukan berarti lantas gayanya itu salah. Mungkin untuk orang yang memerlukan agresivitas, ini salah. Tetapi mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih tenang, ini mungkin lebih cocok. Yang penting adalah hasilnya, perubahan-perubahan dilakukan tetapi memang harus dikomunikasikan kepada rakyat. Dalam hal ini kita hendaknya membiasakan melihat negara ini seharusnya tidak tergantung pada satu orang, tapi suatu sistem dan suatu tim. Dalam hal ini kabinetnya presidensial. Harusnya mereka itu masing-masing di bidangnya mengomunikasikan kebijakan-kebijakan, jangan saling menunggu. Jadi yang penting adalah bukan gaya leadership tapi output dari kebijakannya.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Satya dulu. Meluasnya aksi protes ke pemerintah menurut Anda apakah sebaiknya kita cukup mengikuti saja jadwal pemilu 2004 nanti ataukah memang perlu dipercepat 2003 misalnya?

SATYA ARINANTO :

Berdasarkan pengalaman pemilu 1999, paket RUU politik selesai pada akhir bulan Januari 1999, itu membutuhkan sekitar minimal empat bulan. Tetapi ini untuk persiapan yang saya kira terlalu cepat pada saat itu.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda jika RUU Pemilihan Presiden, RUU Partai Politik, dan RUU Pemilu disahkan pada bulan-bulan Februari-Maret ini, dan DPR berkonsensus pada akhir tahun 2003 itu bisa dimulai sebuah pemilu yang dipercepat ?

SATYA ARINANTO :

Ya agak sulit juga karena terutama yang pemilihan presiden secara langsung itu kita belum mempunyai pengalaman. Kalau pemilu 1999 itu hampir sama dengan sebelumnya. Kalau memang melihat waktu, dengan tidak bermaksud membela siapa-siapa, pelaksanaan pemilu yang ideal 2004. Itu pun sudah terlalu dekat karena sampai sekarang RUU-nya belum selesai dirumuskan.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Pak Patrialis Akbar. DPR ini begitu kompak hanya untuk mengontrol presiden dan menjatuhkannya, tapi untuk kerja-kerja undang-undang agak lelet katanya?

PATRIALIS AKBAR :

Saya kira sahabat kita tadi juga tidak banyak memahami fungsi DPR. Ada fungsi legislasi membuat undang-undang, kemudian fungsi

kontrol pemerintah, kemudian adalah fungsi budget, bagaimana kita bisa menentukan anggaran bersama-sama juga dengan pemerintah.

DENNY J.A. :

Sikap dari partai Anda sendiri apakah memilih pemilu dipercepat ataukah ikut jadwal semula 2004 ?

PATRIALIS AKBAR :

Kalau Fraksi reformasi atau PAN, memang kami ingin menghantarkan pemerintahan ini sampai 2004, tetapi kami berharap betul apa yang disampaikan oleh rakyat diperbaiki. Jangan sampai rakyat sengsara berkelanjutan.

DENNY J.A. :

Kalau dalam RUU, yang bisa mencalonkan presiden hanyalah lima partai terbesar di DPR. Apakah ini menurut Anda prinsip yang baik ataukah tidak fair ?

SATYA ARINANTO :

Tergantung mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Jadi itu cerminan nanti sebagai suatu kesatuan yang berkaitan apakah pemilihan DPR dulu misalnya. Kalau DPR dulu seolah-olah sudah ada gambaran komposisi partai-partai yang bersangkutan itu bagaimana urutannya. Didalam perolehan kursi memang mungkin bisa masuk logikanya, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari ketentuan dasar, pokoknya yang mencalonkan itu partai politik dan dia harus memenuhi syarat-syarat ketersebaran itu. Saya kira bukan persyaratan partai besar atau tidak, tapi secara sosiologis memang menentukan sekali.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Satya. Pak Jacob, sedikit saja mungkin perlu disinggung apakah sebaiknya memang hanya lima partai terbesar saja yang boleh

mencalonkan presiden dalam rangka menjaga perpolitikan yang lebih stabil misalnya ?

JACOB TOBING :

Kita ini bangsa yang besar, majemuk. Syarat itu harus kita cerminkan dalam sistem. Seorang calon presiden yang tidak mempunyai potensi persebaran nasional, tidak akan bisa mencapai harapan kita untuk memimpin semua orang. Bukan hanya pemimpin orang yang terbanyak, tapi pemimpin bagi bangsa ini mulai dari Aceh, Papua, dan Sulawesi. Oleh karena itu dari awalnya dia sudah harus mempunyai potensi itu. Makanya kalau pemilihan DPR dulu sudah kelihatan partai-partai mana yang memang mempunyai akar yang luas di tanah air ini.

DENNY J.A. :

Bung, Anda setuju juga akan hal itu ?

PATRIALIS AKBAR :

Kalau saya agak berbeda, yang paling penting sekarang kita lihat keikutsertaan partai politik dalam pemilu itu susah sekali. Jadi tidak akan banyak partai politik bisa ikut pemilu karena persyaratannya itu 2/3 dari jumlah propinsi. Kemudian kalau memang mereka bisa mengikuti pemilu, berikanlah kesempatan kepada mereka. Kita tidak usah khawatir, tidak akan banyak. Jadi berikan kesempatan kepada rakyat untuk saat pertama ini, bagaimana rakyat bisa menentukan.

DENNY J.A. :

Kita ingin mendengar renungan yang singkat saja dari pembicara, dimulai dari Bung Satya, Bung Patrialis, kemudian Bung Jacob. Silakan.

SATYA ARINANTO :

Mengenai masalah kemungkinan partai-partai mencalonkan itu,

secara teoritis harus dibuka agak lebar. Karena memang di kalangan masyarakat ada sinyalemen mungkin ada partai yang menang pemilu DPR, tapi belum mempunyai calon presiden dan calon wakil presiden yang kuat. Atau sebaliknya suatu partai mempunyai calon presiden dan wakil presiden yang kuat tapi dia belum tentu menjadi lima besar dalam pemilu DPR. Walaupun ini mungkin bisa diperdebatkan. Dan yang kedua adalah kemungkinan wacana calon presiden non partisan semacam itu di kalangan masyarakat, siapa pun calonnya.

PATRIALIS AKBAR :

Pertama, saya meminta pemerintah supaya segera merespon keinginan-keinginan rakyat. Seperti apa yang dilakukan para demonstran sekarang ini. Yang kedua, kita berharap pemerintah jangan sensitif melihat demonstrasi-demonstrasi dan jangan sampai melakukan tuduhan kepada orang tertentu, sebab tuduhan itu saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Yang paling penting adalah substansi, masalah hakikat dari keinginan rakyat bagaimana bisa hidup sehat dan sejahtera.

JACOB TOBING :

Kita sudah cukup lama menderita, terutama penderitaan rakyat, ekonomi yang sulit, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah menghadirkan suatu sistem baru yang menawarkan suatu periode yang stabil dan demokratis, di mana kita akan membangun, mengatasi berbagai kesulitan. Kita butuh waktu dan ketekunan, oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama jangan masa transisi yang sulit ini kita rusak, dan lantas kita kehilangan lagi kesempatan dan jatuh kembali ke dalam perpecahan dan diktatorship.

DENNY J.A. :

Baik Pak Jacob, terima kasih kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, menumbuhkan demokrasi hampir sama dengan

menumbuhkan pohon kelapa, yang membutuhkan proses waktu yang sangat lama sekali. Tetapi kita tahu demokrasi itu dapat tumbuh. Jika presiden selalu dijatuhkan di tengah jalan, maka pemilu adalah satu-satunya cara untuk mengganti atau mempertahankan presiden jika kita ingin demokrasi semakin kuat.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

KONTROVERSI AKBAR TANDJUNG PASCA KALAH BANDING

Tanggal : 30 Januari 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Dwi Ria Latifa (F-PDIP DPR-RI), Mahadi Sinambela
(Ketua DPP Partai Golkar), Maswadi Rauf (Pengamat Politik)

Diawal reformasi, pemberantasan korupsi di lingkungan DPR adalah salah satu prioritas tindakan. Tetapi apa yang terjadi kemudian ? Lembaga perwakilan rakyat itu justru tak henti-henti dilanda isu korupsi. Puncaknya adalah ketika Ketua DPR Akbar Tandjung divonis bersalah atas isu korupsi. Tak pelak, muncul gerakan untuk melengserkan Akbar Tandjung dari kursi Ketua DPR atau Ketua Umum Golkar. Namun publik pada akhirnya sampai pada titik jenuh juga menghadapi kasus ini. Tanpa disadari, setahun sudah upaya pelengseran Akbar Tandjung sejak dia dinyatakan sebagai tersangka. Namun layaknya pohon beringin yang mengakar dan subur, Akbar tetap kokoh. Akbar sepertinya tidak tersentuh oleh berbagai upaya untuk menjatuhnya secara hukum dan secara politik. Dia tetap aktif menjadi Ketua DPR. Apa yang membuat Akbar Tandjung begitu kokoh? Mengapa hukum di Indonesia terkesan lunak kepada pejabat publik yang sudah menjadi tersangka atau pun terdakwa ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita berjumpa lagi dalam acara “Parliamen Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Kontroversi Akbar Tandjung Pasca Kalah Banding”. Sudah hadir di studio Dwi Ria Latifa dari PDIP, Bung Mahadi Sinambela dari Partai Golkar, dan pakar politik Bung Maswadi Rauf. Untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Akbar Tandjung terkesan sakti ? Dua hal yang membuat Akbar Tandjung kokoh. Pertama, Akbar Tandjung sangat mungkin memegang kartu truf, dia mengetahui ke mana aliran dana Bulog yang diterima Golkar. Jika Akbar membuka kartu truf, Golkar bisa dilikuidasi. Akbar juga sangat mungkin mengetahui kemungkinan tokoh partai lain mendapatkan aliran dana Bulog. Jika dia membuka kartu, tokoh partai lain akan terkena skandal atau akan menanggung malu juga. Tidak heran jika berkali-kali apa yang para musuhnya lakukan, berkali-kali pula upaya itu gagal. Kedua, yang membuat posisi Akbar Tandjung kuat adalah lubang hukum. Seluruh hukum tertulis di Indonesia seakan-akan dirancang untuk tidak mendapatkan pemerintah yang bersih. Bahkan semua produk hukum yang dibuat sejak era reformasi tidak didesain untuk menghukum para terdakwa koruptor. Tidak ada satu pasal pun dalam Tap MPR, undang-undang, atau tata tertib yang mengharuskan seorang tersangka untuk non aktif dari jabatan publik. Tidak ada pula aturan untuk menon-aktifkan pihak yang sudah terkena vonis pengadilan tingkat pertama dan kedua. Akbar Tandjung secara sah mengatakan keputusan belum final karena masih ada kasasi. Seandainya pun kasasi sudah putus, masih mungkin ada peninjauan kembali atau PK atas kasasi. Sah-sah saja jika Akbar dan pendukungnya berkata pekerjaannya secara teknis tidak terganggu oleh status hukumnya yang masih temporer, mengapa harus mengundurkan diri dari ketua DPR atau ketua umum Golkar ? Jika Akbar menolak mundur, tidak ada yang dapat memaksanya secara hukum. Akbar hanya dapat dikritik dari sisi moral dan etika. Namun dalam atmosfer politik yang buruk, mayoritas DPR tak peduli dengan etika. Bukankah semua anggota DPR juga sudah melanggarnya ?”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita ke Ria Latifa dulu. Kelompok Anda menggoyang berkali-kali, tetapi Akbar Tandjung tetap kokoh, apa penyebabnya ?

DWI RIA LATIFA :

Saya tidak menggoyang Bang Akbar Tandjung secara pribadi, tetapi sebagai Ketua DPR yang divonis tiga tahun penjara. Bukan kepada personalnya tetapi kebijakannya, keteladanannya yang kita harapkan, juga berdasarkan Tap MPR.

DENNY I.A. :

Mengapa upaya Anda yang sangat kuat secara moral belum cukup berhasil ?

DWI RIA LATIFA :

Namanya juga perjuangan. Tetapi saya yakin apa pun hambatannya, kebenaran tidak akan pernah menyerah.

DENNY J.A. :

Sistem hukum terkesan melindungi Akbar Tandjung, tidak ada satu pasal pun yang meminta Akbar Tandjung untuk non aktif.

DWI RIA LATIFA :

Kalau kita berbicara hukum, sudah jelas putusan pengadilan negeri, 3 tahun penjara, dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi, apalagi proses persidangan itu sangat terbuka.

DENNY J.A. :

Tetapi masih ada kasasi bukan ?

DWI RIA LATIFA :

Ya, silakan mengajukan kasasi sebagai upaya hukum. Tetapi kita melakukan ini untuk menggugah Bang Akbar supaya memberikan contoh kepada kami.

DENNY J.A. :

Ok, kita ke Bung Mahadi. Apa benar Pak Akbar tidak memberikan keteladanan dengan tidak mau mundur dari DPR ?

MAHADI SINAMBELA :

Apakah dengan mundur itu teladan ? Pak Akbar dan kami melihat masih ada upaya hukum yang bisa dimanfaatkan. Selama kekuatan hukum belum mempunyai kekuatan final, maka Pak Akbar dan kawan-kawan beranggapan, jalur-jalur hukum harus dimanfaatkan.

DENNY J.A. :

Final, menurut Anda sampai di mana Bung ? Kasasi atau grasi ?

MAHADI SINAMBELA :

Bukan grasi tetapi kasasi.

DENNY J.A. :

Kalau kasasi Pak Akbar tetap dinilai bersalah, menurut Anda, Pak Akbar harus mundur ?

MAHADI SINAMBELA :

Kalau itu yang terjadi mungkin Pak Akbar akan betul-betul menghargai.

DENNY J.A. :

Ria, mengapa Anda tidak mau sabar menunggu kasasi supaya kukuh ketetapan hukumnya ?

DWI RIA LATIFA :

Saya mengetahui proses hukum. Tetapi saya merasa risih ketika kita bicara penegakan hukum, reformasi hukum, tetapi hukum itu sendiri dijadikan tameng, 'bemper' untuk menunjukkan kemerosotan kita dalam etika moral, khususnya etika moral para pemimpin bangsa.

DENNY J.A. :

Apakah Anda setuju Pak Akbar belum bisa dikatakan bersalah secara tetap, secara final ?

DWI RIA LATIFA :

Saya tidak setuju kalau dikatakan belum berkekuatan hukum tetap. Tetapi dua proses peradilan yang terjadi dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu satu proses yang sangat panjang.

DENNY J.A. :

Secara politik, apakah mungkin kasasi bisa membatalkan dua keputusan sebelumnya ?

DWI RIA LATIFA :

Kemungkinan bisa ada dan bisa juga tidak. Tetapi sangat jarang terjadi. Ketika proses itu sudah begitu dikuatkan di pengadilan tinggi kemudian tiba-tiba harus dibatalkan dalam situasi perkara yang sangat terbuka seperti ini, menurut saya terlalu berani Mahkamah Agung untuk bermain.

DENNY J.A. :

Bung Mahadi, apakah kasasi bisa membatalkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ?

MAHADI SINAMBELA :

Saya tertarik pendapat Prof. Andi Hamzah yang menilai tuntutan jaksa penuntut umum tidak bisa dibuktikan dan perkara tidak perlu digelar di pengadilan karena yang namanya perkara korupsi, apabila uang negara itu dikembalikan maka sudah tidak ada tuntutan pidana. Andi Hamzah mengatakan jaksa harus menunjukkan berapa uang yang dikorupsi oleh Akbar Tandjung. Berbicara substansi, pengadilan tidak cerdas karena ingin menghukum orang berdasar asumsi.

DENNY J.A. :

Anda merasa ada politisasi di belakang ini. Bagaimana Mbak Ria?

DWI RIA LATIFA :

Berbicara politisasi dalam proses pengadilan sudah tidak relevan lagi, karena begitu terbukanya persidangan dan begitu banyaknya skenario yang terbongkar di pengadilan.

DENNY J.A. :

Bung Mahadi, karena khawatir ada politisasi, Anda menunggu sampai kasasi ? Kapan kasasi bisa direalisasikan ?

MAHADI SINAMBELA :

Betul. Tetapi itu urusan Mahkamah Agung. Kalau kita menduga-duga, itu sudah termasuk intervensi.

DENNY J.A. :

Mbak Ria, apakah Anda ingin mempercepat kasasi ?

DWI RIA LATIFA :

Jelas, kita berharap supaya lebih cepat.

DENNY J.A. :

Dalam spektrum politik, Golkar berada di tengah. Di sebelah kiri ada partai nasionalis yang dipimpin oleh PDIP, di sebelah kanan ada partai-partai Islam yang dipimpin oleh Poros Tengah. Dalam pertarungan politik, jika Golkar memihak PDIP maka PDIP yang menang, jika Golkar memihak Poros Tengah, maka Poros Tengah yang menang. Golkar sangat menentukan. Apakah gara-gara ini semua fraksi besar ingin tetap berteman dengan Golkar ? Kita menghuBungi Maswadi Rauf. Kita melihat yang bergerak menggoyang Akbar ini hanya individu-individu saja, fraksi-fraksi besar enggan untuk berkeringat. Menurut Bapak apa sebabnya ?

MASWADI RAUF :

Karena sebenarnya yang bergerak hanya beberapa orang yang tidak mendapat dukungan dari ketua fraksinya dan juga tidak diagendakan oleh DPR.

DENNY J.A. :

Apakah kepentingan elit-elit politik itu yang lebih diutamakan ?

MASWADI RAUF :

Kita tidak mengetahui. Tetapi yang jelas hal ini menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat karena ‘mengapa seorang narapidana memimpin DPR ?’

DENNY J.A. :

Apakah Anda melihat ada semacam oligarki lintas partai yang tidak ingin saling mengganggu sehingga mereka secara tidak langsung melindungi Akbar Tandjung ?

MASWADI RAUF :

Itu salah satu kemungkinan. Secara individu, silakan. Tetapi kalau sudah berbicara atas dasar pimpinan fraksi atau pimpinan partai, kelihatannya memang masing-masing pihak menahan diri.

DENNY J.A. :

Menurut prediksi Anda, sebelum kasasi turun, apakah Pak Akbar Tandjung tetap bisa bertahan ?

MASWADI RAUF :

Tetap bertahan. Sebab inilah yang diusahakan selama beberapa bulan terakhir oleh panitia di DPR.

DENNY J.A. :

Ok Pak, apa saran Anda kepada Ria dan kawan-kawan, berhenti atau jalan terus ?

MASWADI RAUF :

Dalam politik, hasil itu nomor dua, usaha nomor satu. Kalau orang yakin hasilnya pasti bagus baru dia beraktifitas politik, jika tidak mereka tidak akan pernah melangkah.

DENNY J.A. :

Anda yakin Akbar tidak jatuh tetapi Anda mengusulkan Ria dan kawan-kawan untuk terus ?

MASWADI RAUF :

Iya. Sebab penting menunjukkan bahwa di DPR masih ada kelompok atau orang yang ingin memperbaiki keadaan, ingin membuat citra DPR lebih baik.

DENNY J.A. :

Ibu Ria, menurut prediksi, sebelum kasasi turun, mustahil Akbar dapat diturunkan. Anda setuju ?

DWI RIA LATIFA :

Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus meyakini apa yang kita lakukan benar adanya serta akan berhasil. Kalau kita sudah melawan hati nurani kita, mau dibawa ke mana bangsa ini ?

DENNY J.A. :

Mengapa Fraksi PDIP tidak secara formal mendukung Anda ?

DWI RIA LATIFA :

Denngan tidak dilarangnya kami melakukan hal ini, sudah suatu sikap buat kami. Dan sampai hari ini tidak ada larangan buat saya untuk melakukan apa pun.

DENNY J.A. :

Tetapi fraksi tidak mau lebih jauh lagi ?

DWI RIA LATIFA :

Masalah fraksi tidak mendukung secara formal tidak masalah, yang penting kami tidak dilarang.

DENNY J.A. :

Bung Mahadi, mengapa partai-partai besar tidak mendukung menggoyang Pak Akbar ?

MAHADI SINAMBELA :

Mereka mungkin memahami Pak Akbar tidak dalam posisi bersalah.

Bisa saja ada orang seperti Ria dan teman-teman yang puritan itu, tetapi mereka melihat secara fakta hukum tidak tepat.

DENNY J.A. :

Apakah ada perhitungan-perhitungan politik praktis, bukan pertimbangan moral ?

MAHADI SINAMBELA :

Saya tidak mengetahui soal itu. Tetapi Akbar Tandjung menjadi pemimpin DPR adalah kesepakatan nasional.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, apakah tanpa dukungan fraksi, mustahil gerakan individual ini bisa berhasil ?

MAHADI SINAMBELA :

Di DPR, tanpa fraksi maka tidak akan pernah ada pembicaraan, karena fraksi yang mewakili di rapat pleno dan paripurna DPR.

DENNY J.A. :

Pak Maswadi, bagaimana membuat fraksi-fraksi ini ikut terlibat dan bilang, “ya, secara formal saya mendukung” atau “saya tidak mendukung.” ? Apa perlu pressure dari luar ?

MASWADI RAUF :

Tidak bisa.

DENNY J.A. :

Menurut Anda ketua-ketua fraksi ini berpikir tidak dalam kerangka moral tetapi lebih ke kepentingan politik ?

MASWADI RAUF :

Saya pikir begitu, tetapi kepentingan politik apa ? Ini yang harus dikaji lebih lanjut.

DENNY J.A. :

Terima kasih Pak. Ada jajak pendapat yang dibuat oleh Metro TV. Pertanyaan pertama adalah, “Apakah adil tuntutan anggota DPR yang, menginginkan Akbar Tandjung mundur dari jabatan ketua DPR, sedangkan status Akbar Tandjung belum berkekuatan hukum tetap ?” Yang menjawab “Adil” 57%, “Tidak Adil” 29% dan “Tidak Tahu” 14%. Pertanyaan kedua, “Melihat status hukumnya saat ini, apa yang mesti dilakukan Akbar Tandjung ?” yang menjawab “Menunggu Ketetapan Hukum dari MA” 21%, “Mundur dari jabatan ketua DPR” 70%, yang menjawab “Tidak tahu” 8%. Pertanyaan ketiga, “Menurut Anda dengan melihat kondisi saat ini, apakah Anda percaya bahwa DPR masih mampu mendengarkan aspirasi rakyat ?” Yang menjawab “Percaya” 18%, “Tidak Percaya” 72%, dan “Tidak Peduli” 9%.

Ria, 70% jajak pendapat meminta Akbar turun. dari ketua DPR, bagaimana ?

DWI RAI LATIFA :

Ya, itulah cerminan dari apa yang kita lakukan.

DENNY J.A. :

Tetapi metodologi ini tidak terlalu scientific karena populasi telepon hanya 5% dari populasi keseluruhan. Kita menerima telepon dulu, dari Bung Heri di Jakarta. Halo Bung Heri, silakan.

HERI :

Saya mau menanggapi pembicaraan Mas Sinambela, kalau uang hasil korupsi dikembalikan, tuntutananya gugur. Kalau begitu enak

menjadi pejabat. Tidak masuk akal yang begitu. Saya minta dengan hati nurani yang baik, Pak Akbar mundur saja.

DENNY J.A. :

Selanjutnya dari Pak Bambang, silakan.

BAMBANG :

Saya mengharapkan masalah Akbar Tandjung diserahkan kepada hukum yang berjalan. Saya juga tidak sependapat dengan Bung Sinambela, karena baik Pak Akbar Tandjung maupun hukumnya itu sudah salah. Saya mengharapkan kawan-kawan di DPR memperbaiki hukum di Indonesia, karena mereka yang membuat hukum, yang membuat undang-undang. Sekarang terserah Mahkamah Agung. Apakah Mahkamah Agung akan memihak kepentingan rakyat atau yang lain ? Kami mengharapkan hal ini berjalan dengan sebaik-baiknya.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Sekarang dari Bung Frans. Halo Bung, silakan.

FRANS :

Pak Sinambela mengatakan Pak Akbar tidak bersalah karena sudah mengembalikan uang korupsi sebesar 40 milyar tersebut. Kalau Pak Sinambela menjadi pengacara, hancurlah negara ini, banyak koruptor yang akan lolos. Dan PDIP yang mayoritas di DPR, mengapa tidak berkoalisi dengan partai lain untuk menurunkan Pak Akbar Tandjung? Sebagai mayoritas, PDIP sebenarnya bisa menjatuhkan Akbar Tandjung.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih. Ada dua hal penting, pertama, mengapa PDIP membiarkan Dwi Ria Latifa sendirian bergerak, tidak disokong partai

secara formal ? Dan kedua, seharusnya Akbar Tandjung dipertahankan sebagai ketua umum Golkar karena itu adalah masalah partai politik milik sebuah komunitas, tetapi sebagai ketua DPR –karena itu milik publik– Akbar harus mengundurkan diri.

Kembali ke Pak Maswadi Rauf. Pak Maswadi, PDIP sebagai partai terbesar yang mempunyai komitmen menegakkan pemerintahan yang bersih, mengapa tidak mendukung secara formal dan kelembagaan langkah Ibu Ria dan kawan-kawan ?

MASWADI RAUF :

Ada ketidaktegasan di sini. Pertama, solidaritas di antara partai-partai besar. Kedua, kalau nanti pimpinan partai secara terang-terangan mendukung pengusutan atau penjatuhan, bisa mempunyai dampak tertentu terhadap partai yang bersangkutan.

DENNY J.A. :

Anda menduga Akbar Tandjung atau Golkar mempunyai kartu truf tentang kelemahan PDIP ?

MASWADI RAUF :

Kelihatannya begitu. Kita harus bertanya kepada pimpinan fraksi untuk mendapat kepastian tersebut.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Mbak Ria. Mengapa partai Anda tidak mendukung secara kelembagaan ?

DWI RIA LATIFA :

Saya tidak berkecil hati, karena hal tersebut menyangkut nurani personal, bukan nurani fraksi dalam satu lembaga. Saya pikir tidak ada alasan untuk diungkapkan.

DENNY J.A. :

Anda tidak menyalahkan fraksi atau partai yang tidak mau mem-back up secara lebih terang-terangan ?

DWI RIA LATIFA :

Tidak. Ketika ada sikap resmi bahwa apa yang saya lakukan tidak dilarang, buat saya itu sudah cukup.

DENNY J.A. :

Tetapi Anda mengetahui, secara politik gerakan ini mustahil berhasil jika tidak didukung oleh partai secara kelembagaan.

DWI RIA LATIFA :

Tidak ada yang mustahil di dunia ini, saya yakin sekali saatnya nanti Bang Akbar akan turun.

DENNY J.A. :

Bung Mahadi, bagaimana jika ada kompromi, Golkar adalah milik Anda sehingga Akbar Tandjung bisa dipertahankan di sana. Tetapi di DPR, Akbar milik publik karenanya Pak Akbar harus non-aktif, menurut pemirsa Metro TV.

MAHADI SINAMBELA :

Hal itu wajar. Tetapi Akbar menjadi ketua DPR merupakan kesepakatan semua kekuatan partai politik, kalau mereka tidak setuju, kita tidak akan begitu peduli. Karena ketua DPR itu sebenarnya hanya protokoler, tidak mempunyai kekuatan mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah anggota di komisi dan fraksi. Ketua DPR hanya membuka dan menutup sidang.

DENNY J.A. :

Secara teknis tidak berpengaruh, tetapi sebagai simbol, besar pengaruhnya kepada lembaga ?

MAHADI SINAMBELA :

Ya, tetapi tergantung Anda melihatnya dari mana.

DWI RIA LATIFA :

Saya ingin menanggapi, kalau sebagai ketua DPR dikatakan hanya sebuah protokoler, itu tidak benar. Saya berpikir bagaimana jadinya ketika melihat Bang Akbar Tanjung sebagai ketua DPR berbicara tentang pemberantasan KKN, berbicara korupsi, tentang segala hal yang menyangkut etika dan moral, justru beliau menjadi subyek dari masalah itu sendiri .

DENNY J.A. :

Anda melihat lebih ke beban image-nya ?

DWI RIA LATIFA :

Tidak hanya masalah image, tetapi bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas, berkepercayaan tinggi, dan keteladanan buat masyarakat. Kemudian mengenai uang korupsi yang dikembalikan kemudian tidak ada proses hukum, saya menduga Pak Sinambela salah menangkap pernyataan dari Prof. Amir Hamzah.

MAHADI SINAMBELA :

Saya mempunyai bukti. Amir Hamzah mengatakan pidana korupsi bukan pendendam, orangnya tidak harus dihukum.

DWI RIA LATIFA :

Kalau begitu semua masyarakat bisa korupsi kemudian bisa mengembalikan lagi.

MAHADI SINAMBELA :

Silakan kalau mau korupsi, siapa yang melarang ?

DENNY J.A. :

Pak Maswadi, bagaimana jika uang dikembalikan dan pidana hilang. Apakah ini wajar, logis, dan adil ?

MASWADI RAUF :

Tidak. Kalau begitu tidak ada orang yang dihukum. Kalau semua pencuri mengembalikan apa yang diambilnya kemudian selesai semua, logika awam pun agak sulit menerimanya.

DENNY J.A. :

Sekarang segmen terakhir. Kita akan mendengar renungan-renungan singkat dari pembicara, masing-masing 30 sampai 45 detik, dimulai dari Bung Maswadi.

MASWADI RAUF :

Saya ingin mengomentari hasil polling tadi. Di situ terlihat kepercayaan terhadap DPR sudah sangat lemah dan citranya sudah terlanjur buruk. Faktor Akbar Tandjung juga ikut berperan dalam menjatuhkan citra DPR. Saya berharap citra DPR diperbaiki.

MAHADI SINAMBELA :

Saya ingin mengklarifikasi, bahwa proses pengadilan belum berbicara substansi karena banyak kasus seperti ini tidak diadili oleh pemerintah.

DENNY J.A. :

Lebih besar ?

MAHADI SINAMBELA :

Jauh lebih besar. Banyak perkara besar yang tidak diperhatikan pemerintah. Kalau Akbar Tandjung harus dihukum karena kesalahan perintah Presiden Habibie, mengapa Habibie tidak diperiksa? Mengapa kasus-kasus serupa di zaman Pak Harto tidak diperiksa? Marilah kita berbicara soal keadilan. Saya berbicara tentang pengadilan yang tidak bekerja dengan benar.

DENNY J.A. :

Baik, Ria...last word.

DWI RIA LATIFA :

Putusan pengadilan merupakan suatu dasar yang kuat untuk meminta Bang Akbar mundur. Saya berharap, jangan menambah beban DPR yang sudah tersandera kasus Akbar Tandjung ini. DPR sebenarnya sudah menjadi satu lembaga yang citranya luar biasa menurun.

DENNY J.A. :

Terima kasih kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, walaupun ada reformasi, korupsi di negara kita semakin parah, mungkin karena hukum dan penerapan hukum terlalu lunak kepada koruptor.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

MEMILIH POLITISI DALAM SISTEM PEMILIHAN TERBUKA

Tanggal : 6 Februari 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Ali Masykur Musa (PKB), Todung Mulya Lubis
(CETRO), Hamid Awaludin (KPU)

Pemilu memang bukan obat mujarab yang dapat menyembuhkan semua penyakit politik. Namun pemilu adalah soko guru demokrasi. Demi demokrasi, daripada kita mengembangkan sentimen anti pemilu, lebih baik kita memperbaiki sistem pemilu secara bertahap. Namun pada sisi lain sentimen anti pemilu juga hak rakyat, dan pada banyak sisi juga sebuah sikap yang masuk akal. Karena selama ini partai politik dan para wakil rakyat belum memenuhi janji-janjinya kepada konstituen, dan cenderung menyerahkan waktu dan pikirannya kepada kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Persoalan inilah yang dihadapi bangsa Indonesia menjelang pemilu 2004. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang kian menurun di satu sisi, perubahan sistem politik yang lebih memberi peluang pada otonomi publik sebagai pemilih pada sisi lain. Apakah angka golput akan semakin tinggi karena semakin tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai-partai besar ? Atau sebaliknya, antusiasme dan partisipasi publik dalam pemilu justru akan meningkat karena perubahan sistem pemilu yang semakin kondusif bagi otonomi pemilih ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sudah hadir di studio Bapak Ali Masykur Musa dari PKB, di sampingnya Bung Todung Mulya Lubis, aktivis dari CETRO, dan Bung Hamid Awaludin dari KPU. Untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Daftar keluhan dan tuntutan publik sudah semakin panjang. Korupsi bertambah liar dan telanjang. Publik terkena demam dan hobi menurunkan presiden di tengah jalan. Sudah tumbuh pula semangat antipartai politik yang kian mengental. Di kalangan yang radikal, ekspresi kekecewaan itu muncul dalam aneka bentuk. Muncul ide presidium nasional, solusi lain yang ditawarkan adalah potong satu generasi. Semua solusi menafikan pemilu. Penggantian kekuasaan dilakukan melau jalur di luar pemilu atau melakukan revolusi. Dalam bentuk yang lebih lembut, solusi yang ditawarkan adalah golput, publik beramai-ramai memboikot pemilu. Bagi kalangan ini, partai politik sudah tidak dapat dipercaya.

Namun di samping tumbuh kemarahan kalangan radikal, tetap ada kelompok rasional yang mempunyai persepsi positif. Mereka menyadari bahwa membangun demokrasi seperti menanam pohon kelapa. Diperlukan waktu yang panjang untuk menikmati buahnya. Tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu. Harus pula disyukuri setelah empat tahun reformasi kita memiliki RUU Pemilu yang lebih baik. Dalam sistem baru, kita memang masih memilih partai. Namun pemilih dapat memilih tokoh partai yang disukainya dalam satu partai yang sama. Perubahan mendasar dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah. Jika basis pemilihannya propinsi, lalu ada sekitar 40 parpol yang ikut dan masing-masing partai menyerahkan nama 50 tokoh, maka antri mencoblos akan terlalu lama. Jelas ini tidak efisien. Saat ini aturan identifikasi penyumbang untuk partai lebih detail, siapa yang menyumbang dan berapa banyak menyumbang batasannya diatur. Diatur pula hukuman pidana bagi yang melanggar. Pemilu yang akan datang akah lebih terlindungi dari money politics,

walaupun tentu tidak bisa bersih sama sekali. Namun aturan baru soal dana kampanye masih dapat dimanipulasi. Seorang pengusaha yang menyumbang 10 milyar rupiah misalnya, dapat memecah sumbangannya menjadi empat ribu nama fiktif, masing-masing 2,5 juta rupiah. Jika memang demokrasi yang menjadi pantai harapan, tak bisa tidak pemilu harus dihormati. Sedikit dipuja dan diperbaiki terus kualitasnya. Spirit antipemilu, tidak akan membawa kita ke mana-mana, kecuali ke jurang otoriterisme.”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, survei harian Kompas tahun lalu, sebanyak 85% responden merasa anggota DPR tidak mewakili kepentingannya. Kita bertanya kepada Bung Ali Masykur Musa dulu. Menurut Anda, apa yang salah dalam cara kita memilih anggota DPR tahun 1999 dulu ?

ALI MASYKUR MUSA :

Yang pertama saya ingin membenarkan sebuah polling yang menyebutkan, bahwa kinerja partai politik pada umumnya tidak memuaskan. Hampir seluruh partai tidak memuaskan kinerjanya. Menurut saya ini berakar dari rekrutmen partai yang tidak memperhatikan hubungan timbal balik antara yang memilih dan yang dipilih. Sehingga seringkali anggota dewan tidak memperhatikan atau kurang mencerminkan siapa yang diwakili. Lebih mencerminkan kepentingan diri atau kelompok. Karena dulu pimpinan partai tidak memilih tokoh-tokoh yang dekat dengan pemilihnya. Pada saat itu, sistem pemilu kita adalah memakai sistem proporsional tertutup, sehingga siapa yang dekat dengan DPP, merekalah yang dicalonkan. Tetapi anehnya publik tidak diberi kesempatan untuk memilih orang. Apa yang diberikan partai itulah yang harus diterima publik.

DENNY J.A. :

Apakah ada masalah SDM yang terbatas, sehingga yang ditampilkan juga terbatas ?

ALI MASYKUR MUSA :

Saya pikir pengetahuan politik bisa diasah, tetapi yang perlu pengasahan itu adalah komitmen politik. SDM memang tidak terlalu baik, apalagi komitmennya tidak benar-benar mencerminkan citra seorang wakil rakyat yang 'melek' politik.

DENNY J.A. :

Kita sekarang ke Bung Mulya dulu. Bagaimana menurut Anda dengan hasil survei ini ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Saya kira itu masalah yang sangat serius dalam sistem politik kita. Banyak sekali partai yang gagal dalam kaderisasi politik. Banyak sekali 'preman-preman politik' yang masuk ke dalam gedung parlemen misalnya. Dalam sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup yang dulu, kita memang menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik, sehingga tidak ada ketakutan bahwa publik akan bisa melakukan kontrol, pengawasan yang ketat terhadap siapa pun yang dipilih. Dengan sistem proporsional terbuka, akan ada kehati-hatian yang ekstra dari partai politik untuk menampilkan calon-calonnya yang layak untuk dipilih dan mempunyai prospek. Sistem proporsional terbuka pasti efeknya baik. Kalau model yang diusulkan oleh PDIP sekarang, ini tentu satu langkah maju penolakan yang sebelumnya dilakukan oleh PDIP. Tetapi akan menimbulkan respon yang luar biasa juga pada masyarakat pemilih. Saya tidak bisa membayangkan satu propinsi dengan jumlah kursi yang banyak sekali akan dihadapkan pada satu sistem proporsional terbuka dengan basis propinsi, di mana rakyat dipaksa untuk memilih partai atau orang misalnya. Ini tidak gampang dan akan membingungkan. Sistem yang diajukan pemerintah jauh lebih baik, apalagi yang disederhanakan. Tentu voter education tetap sangat penting, tanpa adanya voter education kita akan kesulitan.

DENNY J.A. :

Ada kekhawatiran, dengan sistem terbuka akan terpilih banyak politisi lokal atau berorientasi lokal ? Yang dikhawatirkan, banyak politisi yang populer di daerah tetapi cara pandanginya sektarian dan aspirasinya sangat lokal, sehingga politik nasional lebih diwarnai friksi-friksi lokal. Anda setuju dengan itu ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Mau tidak mau kalau nantinya partai lokal memilih sistem proporsional terbuka, maka akan ada kedekatan dengan pemilih. Artinya akan banyak orang-orang daerah yang dicalonkan. Memang ada bahaya seperti sektarian dan sebagainya, tetapi institusi pemilu pada akhirnya akan mengharuskan partai politik dengan sangat hati-hati menentukan calon-calonnya yang akan dipilih.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Mulya terima kasih. Kita kembali ke Bung Ali Masykur Musa. Anda memimpin PKB, apakah benar banyak politisi lokal yang populer yang bisa Anda tawarkan, tetapi orientasinya juga lokal dan sektarian ?

ALI MASYKUR MUSA :

Kalau tokoh lokal itu yang muncul, bukan berarti dia tidak mempunyai pikiran yang segar buat bangsa dan negara. Bukan berarti pula dia berpikiran sempit. Justru pemimpin-pemimpin lokal itulah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat bawah. Sehingga dengan demikian ketika di bawa ke forum nasional, dalam mengambil keputusan dan kebijakan itu lebih 'kena'. Yang terpenting dengan sistem proporsional terbuka, rakyat diberi kewenangan untuk memilih partai terbaik di antara partai yang ada. Dan di sisi lain, rakyat diberi juga kesempatan selebar-lebarnya menentukan siapa calon yang terbaik. Rakyat mempunyai otonomi. Jadi keunggulan sistem yang baru terutama pada kedekatan antara yang memilih dan

yang dipilih. Sistem politik dalam hubungannya dengan pemilu paling tidak harus menjawab tiga hal. Pertama, the degree of competition-nya harus baik. Kedua, harus menghasilkan wakil rakyat yang menjawab kualitas atau derajat keterwakilannya. Dan yang ketiga, proses akuntabilitasnya juga baik. Sistem proporsional terbuka lebih bisa menjawab ketiga hal itu dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menjumpai Bung Hamid Awaludin. Apakah KPU lebih antusias dengan sistem baru; proporsional terbuka ?

HAMID AWALUDIN :

Secara pribadi saya sangat antusias, dari dulu saya pro dengan sistem ini. Karena rakyat bisa memiliki tingkat kepercayaan terhadap siapa yang dipilih dan yang membawakan aspirasinya. Ini yang menjadi soal selama ini. Selama beberapa dekade, rakyat selalu bertanya siapa yang mewakili saya dan apa yang diartikulasikan.

DENNY J.A. :

Ada juga pendapat yang perlu diverifikasi, sistem baru ini membuat pemilihan tidak efisien karena banyak sekali nama yang harus dipilih.

HAMID AWALUDIN :

Tentu saja sistem baru ini dari segi penghitungan dan proses pencoblosannya lebih rumit dibandingkan sistem proporsional. Tapi ini persoalan teknis, jangan dijadikan alasan untuk meninjau ulang kesepakatan bahwa kita akan memilih sistem proporsional terbuka.

DENNY J.A. :

PDIP, bahkan juga sebelumnya Golkar, tiba-tiba setuju pada sistem proporsional terbuka ?

HAMID AWALUDIN :

Saya adalah bagian dari orang yang kaget tetapi bersyukur. Pertama, partai-partai yang tadinya sangat konservatif tidak mau berubah, tiba-tiba sekarang ingin mendengarkan rakyat. Kedua, menurut saya belakangan ini timbul wacana tentang golput. Dengan cara mengubah sistem pemilu, ini adalah menu baru yang ditawarkan kepada rakyat. Dengan demikian rakyat antusias kembali terhadap kehidupan politik, dengan demikian partisipasi politik bisa tetap tinggi.

DENNY J.A. :

Tapi bagi partai, vested interest perubahan sistem ini bisa berbahaya, karena partainya mungkin kuat secara partai, tetapi lemah secara SDM. Ini bisa membuat kemenangan menjadi kekalahan nantinya. Hal lain, karena sistemnya terbuka, politisi daerah banyak dicalonkan, padahal mereka banyak yang sektarian?

HAMID AWALUDIN :

Kuncinya bagaimana partai politik menghadirkan menu atau orang-orang terbaik, karena pada akhirnya rakyat yang menentukan putra terbaik mana yang akan dipilih. Tidak selamanya politisi lokal identik dengan sektarian. Anda harus tahu beberapa tahun terakhir, mass media, terutama media elektronik sudah mencapai desa. Ini telah mengubah wawasan, cara berpikir orang. Saya tidak setuju dengan argumentasi yang seperti itu.

DENNY J.A. :

Basis pemilihan mana yang dipilih KPU, propinsi, kabupaten, atau gabungan kabupaten ?

HAMID AWALUDIN :

Terserah kepada pembuat undang-undang, kami hanya pelaksana undang-undang.

DENNY J.A. :

Bung Ali, kalau kita melihat preferensi basis pemilihan, PKB di mana posisinya ?

ALI MASYKUR MUSA :

Basis pemilihan itu satu di antara enam item sistem pemilu kita. Yang pertama adalah bagaimana kursi itu harus ditentukan, apakah berdasarkan perimbangan penduduk atukah berdasarkan kabupaten. Setiap kabupaten satu kursi, posisi sekarang di Jawa ada 115 kabupaten, di luar Jawa ada 322 setelah pemekaran. Tetapi kalau memang penentuan quota kursi atas dasar perimbangan penduduk, maka sungguh sangat terjadi disparitas. Sebaliknya, kalau posisi perimbangan penduduk yang dijadikan rujukan, menurut simulasi yang saya buat, maka di MPR itu selisihnya hanya 0,5% untuk luar Jawa. Ketika anggota DPD itu jumlahnya 4 dari sekian propinsi, di Jawa 6, dikumpulkan di MPR, nanti 0,5%. Ini menunjukkan balancing antara Jawa dan luar Jawa. Kembali kepada pertanyaan Bung Denny, basis atau daerah pemilihan semakin kecil, itu akan semakin menjawab keterwakilan. Karena itu saya menyetujui usulan pemerintah bahwa daerah pemilihan itu adalah bagian propinsi atau propinsi, di mana kalau propinsi itu jumlah kursinya di bawah 10, maka daerah pemilihannya ya propinsi itu sendiri. Seperti daerah yang berpenduduk padat di Jawa –Jawa Tengah dan Jawa Timur– maka daerah pemilihannya bisa menjadi 10-12. Jadi basis daerah pemilihan ini lebih kepada jumlah calon yang akan dipertarungkan kira-kira 10-12. Ini menjawab aspek keterwakilan. Keterwakilan ini harus menjawab prinsip one person, one vote.

DENNY J.A. :

Sekarang Bung Mulya, apakah Anda setuju bahwa sebaiknya ini dilakukan ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Ya, untuk menghindari hal-hal teknis yang akan menimbulkan kebingungan pemilih. Petugas-petugas di TPS juga memerlukan satu training yang khusus dalam hal ini. Oleh sebab itu yang diusulkan pemerintah adalah hal yang sangat realistis sebetulnya. Ini pun tetap menuntut satu vote education. Saya kira yang disampaikan oleh Mas Ali Masykur tadi, one person, one vote, one value, itulah yang ingin diperjuangkan, karena memang disparitas ini sangat mengganggu. Dan kalau misalnya usulan Partai Golkar itu diikuti, ini juga akan menimbulkan satu discrepancy keterwakilan. Jadi memang suka atau tidak suka, pemerintah saya kira berhasil menemukan terobosan yang memungkinkan kita melahirkan satu sistem yang bisa mendekatkan pemilih kepada calon-calon wakilnya.

DENNY J.A. :

Bagaimana buruknya usulan Golkar, jika satu kabupaten, satu wakil ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Usulan Golkar minimal satu kabupaten mendapatkan satu kursi, kita akan melihat bahwa jumlah keterwakilan dari luar Jawa akan lebih besar. Sementara kalau kita menggunakan pertimbangan one person, one vote, one value, akan ada keadilan yang lebih dirasakan. Kalau basis pemilihannya di kabupaten, menguntungkan partai yang kuat di luar Jawa.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Ali, apakah Anda setuju Golkar yang paling kuat di luar Jawa ?

ALI MASYKUR MUSA :

Kita sebaiknya tidak berpikir untuk kepentingan siapa, tetapi berikan kepada masyarakat nilai yang sama. Sebagai tambahan, interval atau ring di kabupaten, kalau itu dijadikan rujukan, maka ada kabupaten yang jumlah penduduknya 24 ribu di satu sisi, seperti di kota Sabang, dan di sisi lain ada yang berjumlah 4 juta seperti di kota Bandung.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Hamid Awaludin, menurut Anda apakah sebaiknya basis pemilihan ini satu kabupaten, satu propinsi, atau gabungan kabupaten ?

HAMID AWALUDIN :

Saya kira apa yang tadi disampaikan Bung Mulya itu lebih realistis, hanya ada yang perlu saya perjelas, bahwa dengan keterwakilan DPD mengurangi disparitas antara DPR. Hanya masalahnya peran dan fungsi DPD jauh lebih rendah dibandingkan DPR. Kalau kita melihat konstitusi, dia hanya mengurus isu-isu otonomi daerah, keuangan daerah, dan sebagainya. Jadi mungkin Anda perlu mencari pola lain, dan tidak menjadikan itu sebagai dasar.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Hamid Awaludin. Pemirsa Metro TV, sekarang saya bacakan dulu hasil jajak pendapat yang dilakukan Metro TV tentang topik kita untuk empat pertanyaan. Pertama, "Menurut anda, apakah RUU Pemilu yang sedang dibahas ini lebih demokratis ?" Sebanyak 28% menjawab 'lebih demokratis', 33% 'lebih tidak demokratis', dan 39% 'tidak tahu'. Kedua, "Dalam pemilu 2004 nanti, apa yang akan Anda lakukan ?" Sebanyak 57% responden menjawab 'ikut pemilu', 34% 'memilih Golput', dan 29% 'belum bersikap'. Pertanyaan ketiga, "Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan terhadap penganjur

golput ?” Sebanyak 28% responden menjawab ‘dihukum pidana’, 50% ‘dibiarkan saja’ dan 23% ‘tidak tahu’. Pertanyaan keempat, “Apa pendapat Anda dengan peserta pemilu yang puluhan partai ?” Sebanyak 85% responden menjawab ‘membingungkan’, 7% ‘lebih baik’, dan 8% ‘tidak peduli’.

Sekarang kita mendengar suara publik lewat telepon, dimulai dari Bung Najamudin di Palembang, silakan.

NAJAMUDIN :

Saya sangat terkesan dengan “Parliament Watch” malam ini karena menggambarkan bahwa kita benar-benar sudah maju satu langkah. Bahwa sistem proporsional terbuka itu sangat menghargai pemilih. Sebab selama ini kita melihat partai betul-betul berkuasa menentukan hidup matinya anggota DPR, terbukti pelantikan pergantian antarwaktu sulit, karena memang kursi thank you. Saya sangat setuju dengan Pak Mulya dan Pak Masykur, bahwa sekarang ini harus benar-benar diperjuangkan hak para pemilih, jangan kita tergiur dengan gambar-gambar walaupun dihati para pemilih tetap ada pilihannya. Tetapi mereka ingin suatu waktu bisa menelepon orang yang dicoblos itu. “Saya ini memilih saudara, tolong diperjuangkan.”

DENNY J.A. :

Terima kasih Bung Najamudin. Kembali ke Bung Mulya, seberapa jauh sistem baru bisa mengurangi golput ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Sebetulnya apa yang disampaikan Bung Hamid Awaludin tadi make sense bahwa dengan dianutnya sistem proporsional terbuka seharusnya ada antusiasme politik yang lebih besar dibandingkan sistem proporsional tertutup. Akan tetapi kita bicara sekaligus the singer and the song. Tidak betul kalau hanya the singer but not the song. Jadi singer dan song-nya harus bagus. Partai politik yang tidak

memenuhi janjinya selama kampanye, akan menimbulkan antipati yang lebih besar.

DENNY J.A. :

Baik Bung, kita terima dulu penelepon berikutnya, silakan.

ROSO :

Langsung kepada Bung Mulya, memilih adalah hak rakyat yang dilindungi undang-undang. Tidak memilih pun adalah hak yang juga dilindungi. Hanya anehnya, di negara yang demokratis sekarang ini, orang yang mengajak memilih partai diizinkan, sementara orang yang memilih golput konon mau dipidanakan. Di mana letak hukumnya ? Kemudian kalau saya tidak mengajak golput, tetapi saya mempunyai teman-teman yang kebetulan golput, apakah saya juga akan ditangkap terkena tindak pidana ? Saya memilih golput karena sudah tidak ada yang bisa dipercayai, termasuk para pengamat politik sudah menjadi 'pengamen-pengamen politik', dan juga partai alternatif, partai-partai baru misalnya, tidak ada yang saya percaya, karena melihat kualitas orang-orangnya belum ada yang sekualitas Soekarno.

DENNY J.A. :

Bung Ali dulu, apakah benar bahwa penganjur golput ini akan ditindak pidana ?

ALI MASYKUR MUSA :

Saya ingin menyetujui pendapatnya Pak Roso, bahwa berpolitik kaitannya dengan pemilu, secara makro itu adalah hak rakyat, hak untuk menggunakan hak pilihnya, artinya ikut mencoblos atau mengambil bagian dalam pemilu, maupun tidak. Karena tidak mencoblos pun harus dianggap sebagai wujud dari partisipasi, dan itu pilihan juga. Namun demikian itu menjadi sesuatu yang positif, artinya isu atau wacana golput sekarang ini, menjadi dorongan bagi

partai-partai untuk segera memperbaiki diri. Karena bagaimanapun juga kalau partainya tidak menunjukkan komitmen atau konsistensi dalam memperjuangkan rakyat, bagaimana dia akan memilih. Jadi mengenai ancaman tindak pidana bagi penganjur golput, yang saya pahami dari rumusan yang ada justru untuk memproteksi hak politik rakyat. Kata kuncinya dua. Pertama, sengaja dan sistematis melakukan gerakan. Dan yang kedua dengan ancaman kekerasan, pemaksaan. Selama tidak melakukan dua hal itu, mau golput, mau mencoblos itu hak rakyat.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita menghuBungi Bung Hamid Awaludin. Bung, membesarnya gerakan golput ini, menurut Anda seberapa besar mendelegitimasi pemilu 2004 ?

HAMID AWALUDIN :

Saya juga ragu apakah benar membesar angkanya. Anyway, saya kira ini signifikan karena kalau kita melihat bahwa pemerintahan harus didukung rakyat, logikanya semakin besar dukungan itu maka semakin legitimated. Persoalan sebenarnya, jangan bertanya kepada orang-orang yang ingin golput, tetapi bertanyalah kepada orang-orang yang ingin dipilih, partai yang menawarkan orang. Sebab, orang memilih bukan karena apa-apa, dia senang dengan orang yang dipilih karena cerdas, mempunyai visi, misi dan artikulatif, bisa dipercaya membawa aspirasi, begitu pula dengan program kerja yang ditawarkan. Kalau partai politik tidak menawarkan kriteria-kriteria ini, apa pun yang Anda lakukan hukum represif pun tetap akan ada.

DENNY J.A. :

Bung Mulya, apa benar dengan prediksi bahwa golput memang besar ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Saya memprediksi bahwa jumlah golput akan sedikit membesar, tetapi tidak sampai 40-50%. Karena golput mungkin hanya di kalangan kelas menengah yang secara sadar, cerdas, dan kritis melihat masalah dalam sistem pemilu dan sistem kepartaian seperti sekarang ini. Jawaban sebenarnya berpulang pada partai politik dan pemerintah. Mampukah partai politik melakukan satu proses politik internal yang melahirkan calon-calon yang akan dipilih itu bisa mewakili aspirasi publik. Kalau tidak, antipati itu akan semakin besar.

DENNY J.A. :

Bung Ali, golput sebenarnya justru menguntungkan partai-partai yang sedang berkuasa. Di mana suara ini tidak diberikan kepada oposisi tetapi abstain. Justru Anda sebenarnya diuntungkan dengan golput, Anda setuju ?

ALI MASYKUR MUSA :

Kalau saya tidak berpikir dalam arti untung atau tidak. Selama sistem memberikan otonomi kepada rakyat untuk memberikan hak suara, itu urusan rakyat. Ketika angka golput itu tinggi, meningkat kecenderungannya, justru ini menjadi hikmah bagi partai, terutama partai kami untuk segera memperbaiki diri terutama peningkatan komitmennya. Menurut saya dengan sistem proporsional terbuka ini rakyat dihadapkan pada sebuah pilihan. Kalau tidak suka dengan partainya, paling tidak masih ada pilihan orang-orang yang dianggap mampu untuk memperjuangkan sesuatu.

DENNY J.A. :

Dan juga untuk klarifikasi saya kira, berapa pun besar suara golput tidak ada masalah. Karena di Amerika Serikat itu jumlah turn out, yang memilih itu selalu kurang dari 65%. Jadi untuk memilih sekitar 35-40%, dan di sana toh sistem terus berjalan ?

ALI MASYKUR MUSA :

Memang idealnya angka golput tidak terlalu tinggi, dan dibarengi dengan kinerja partai-partai yang baik. Sehingga dengan demikian rakyat secara langsung ikut berpartisipasi dan mengambil kebijakan secara nasional.

DENNY J.A. :

Kita mendengar lagi penelepon, Bung Idris di Bogor, silakan Bung.

IDRIS :

Saya sangat memahami mengapa terjadi golput, karena selama ini partai tidak berpihak kepada rakyat, dalam arti kata partai hanya merupakan suprastruktur dari pemerintahan. Sehingga interpretasi para politisi begitu dia duduk di DPR juga seperti itu, bukan keberpihakan pada masyarakat akan tetapi lebih setia kepada partai.

DENNY J.A. :

Bung Idris, mengapa mereka yang marah kepada partai sekarang ini tidak memberikan suaranya kepada partai-partai baru ?

IDRIS :

Pada persoalan partai baru, kita melihat nanti ke depan. Tetapi yang jelas, saya juga sebenarnya sedikit sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamid Awaludin, tetapi jangan lupa bahwa proporsional terbuka pun tidak menjamin. Selama partai itu sendiri bukan infrastruktur, tetapi lebih cenderung kepada suprastruktur, sehingga politisi tidak mencoba berpihak kepada rakyat secara utuh. Itulah yang mengakibatkan masyarakat secara umum merasa kecewa. Ini tolong dipahami bersama dan dikaji masalahnya.

DENNY J.A. :

Baik, Bung terima kasih. Bung Hamid Awaludin, di samping sistem proporsional terbuka, apakah masalah SDM yang terbatas tetap akan menjadi masalah di partai pada pemilu 2004 sehingga politisi yang terpilih nantinya juga politisi yang terbatas kompetensinya ?

HAMID AWALUDIN :

Pasti, karena Anda ingat dengan perubahan sistem pemilu di mana orang memilih orang, itu sangat tergantung pada kualitas SDM. Karena itulah partai politik diuji sejauh mana mereka mampu menampilkan putra-putra terbaik yang mereka miliki. Pak Idris tadi mengatakan bahwa tidak ada jaminan sistem proporsional terbuka ini lebih bagus. Menurut saya memang tidak ada jaminan, tetapi ada harapan dengan persyaratan seperti yang beliau kemukakan. Ini adalah batu ujian bagi partai politik untuk mengubah diri. Partai politik dengan sistem yang baru sekarang tidak boleh lagi menyanyikan lagu, “Aku masih seperti yang dulu”.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Hamid Awaludin. Bung Mulya mungkin ada sisi lemah dari RUU Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Sebetulnya karena memang ada beberapa propinsi yang cukup besar, cukup banyak kabupatennya, cukup banyak kursinya, dan tentu kalau misalnya usulan pemerintah yang sudah lebih disederhanakan itu masih belum mampu dicerna oleh pemilih dan petugas TPS, ini akan menjadikan persoalan baru nanti di lapangan. Kelemahannya adalah dalam memilih dan penghitungan suara. Tetapi dikatakan oleh Bung Hamid Awaludin tadi, ini soal teknis. Saya lebih melihat aspek vote education yang jauh lebih penting untuk mengatasinya. Saya kira sebelum kita sampai pada satu sistem politik yang memungkinkan

sistem distrik dengan jumlah partai yang sederhana, ini mungkin yang terbaik.

DENNY J.A. :

Bung Ali, menurut Anda apa ada kelemahan RUU sistem proporsional terbuka ?

ALI MASYKUR MUSA :

Saya pikir ini memang jalan tengah, di satu sisi dulu dengan sistem proporsional tertutup, di mana DPP sangat menentukan segalanya, di sisi lain berkeinginan distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, di satu sisi partai masih mempunyai otoritas untuk mencalonkan, tetapi proses penentuannya adalah rakyat. Yang terpenting sekarang dibuat bagaimana, meskipun sistem proporsional terbuka, rakyat tidak bingung dalam proses memberikan suara.

DENNY J.A. :

Kita akan mendengar komentar-komentar terakhir yang singkat dari para pembicara, dimulai dari Bung Hamid Awaludin, kemudian Bung Ali Masykur Musa, dan terakhir Bung Todung Mulya Lubis.

HAMID AWALUDIN :

Saya membayangkan bahwa setiap partai politik di negeri ini, mulai sekarang mempunyai komitmen dan berjanji bahwa mereka menghilangkan tradisi dan tabiat internal konflik. Lalu sebisa mungkin mereka melakukan polling pendapat ke rakyat tentang figur atau kriteria yang rakyat inginkan untuk mewakili rakyat.

ALI MASYKUR MUSA :

Parpol itu instrumen rakyat, sedangkan pemilu adalah pintu masuk dari sebuah sistem bernegara ke depan. Maka jadikanlah parpol bersenyawa dengan rakyat. Apa yang menjadi agenda rakyat, itulah yang harus menjadi agenda parpol, sehingga rakyat betul-betul

berdaulat di negara yang mengatakan sebagai negara demokratis. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi agenda nasional ke depan betul-betul berangkat dari nurani dan agenda-agenda rakyat.

TODUNG MULYA LUBIS :

Semangat anti partai politik sudah mulai kelihatan. Dan kecenderungan untuk menjadi golput terlihat di mana-mana. Terpulang kepada partai politik, bisa atau tidak mentransformasikan dirinya menjadi lokomotif demokrasi yang berperan dalam demokrasi dan demokratisasi. Kalau tidak, akan ada mosi tidak percaya dan kita akan dihadapkan pada satu persoalan yang mungkin lebih dahsyat.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak semua pembicara. Pemirsa Metro TV, pemilu memang bukan obat mujarab yang dapat menyembuhkan semua penyakit politik, tapi pemilu adalah soko guru demokrasi. Demi demokrasi, daripada kita mengembangkan sentimen antipemilu, lebih baik kita mengembangkan untuk memperbaiki sistem pemilu secara bertahap.

Sampai jumpa Kamis minggu depan.

MEMBATALKAN PEMILIHAN GUBERNUR

Tanggal : 21 Agustus 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Oentarto Sindung Mawardi (Dirjen Otonomi Daerah), Wayan Nuastha (F-PDIP DPRD Bali), Wayan Sudirta (Bali Corruption Watch), Dr. Muhammad Asrul (Pakar Hukum Tata Negara)

Mengapa pemilihan gubernur sering diwarnai konflik dan kontroversi ? Di Maluku Utara, pemilihan gubernur harus diulang. Di Lampung, gubernur yang terpilih tak kunjung dilantik dalam waktu yang lama. Kini kehebohan serupa menimpa Bali. DPRD Bali sudah menetapkan Gubernur Bali yang baru, namun perlawanan publik agaknya sangat keras dan situasinya menjadi lebih runyam. Gubernur terpilih berasal dari unsur PDIP, namun yang melakukan perlawanan juga berasal dari PDIP. Lalu lembaga peradilan PTUN menetapkan agar keputusan DPRD tentang gubernur Bali ditunda pelaksanaannya karena ada bukti-bukti money politic. Tetapi pemerintah pusat cenderung melaksanakan pelantikan gubernur Bali sesegera mungkin. Bagaimana muara dari konflik soal Gubernur Bali ini ? Apa sesungguhnya yang terjadi ? Dan bagaimana pengaruhnya bagi perkembangan pemerintahan daerah ke depan ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, kita jumpa lagi dalam acara "Parliament Watch" bersama saya Denny J.A.. Di studio sekarang

sudah hadir, pertama Pak Oentarto Sindung Mawardi, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri. Di sampingnya Pak Wayan Nuastha, anggota DPRD Bali dari PDIP. Di sebelahnya lagi Pak Wayan Sudirta, dari Bali Corruption Watch (BCW). Selamat malam semuanya.

Kita nanti juga akan menghubungi pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhammad Asrul. Untuk memperkaya diskusi saksikan dulu pengantar berikut ini :

“Akankah pemilihan gubernur di Bali dibatalkan ? Lalu diadakan pemilihan ulang yang kemudian dibatalkan lagi ? Ini mungkin pertanyaan agak sinis dari banyak pihak yang kecewa dengan hasil dan mekanisme pemilihan gubernur. Perkembangan terakhir, Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan pihak penggugat pemilihan Gubernur Bali atas dugaan terjadinya money politic. Berbagai pihak terutama Bali Corruption Watch meminta pemilihan gubernur dibatalkan. Akibat keputusan itu tekanan publik Bali kepada DPRD Bali juga semakin keras. Adanya unsur uang di seputar pemilihan gubernur Bali sudah diakui oleh berbagai pihak. Pihak penerima membeberkan travel cheque sebagai bukti sementara. Pihak pemberi dana juga sudah mengakui ada uang itu, namun dengan alasan pemberiannya berbeda-beda. Satu pihak mengatakan, uang itu merupakan hasil konsolidasi partai, sementara yang lain mengatakan itu uang pemberian seorang ayah kepada anaknya. Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno agaknya tidak terpengaruh, ia tetap ingin mengesahkan pemilihan gubernur Bali. Keputusan PTUN yang membatalkan hasil pemilihan itu menurut Mendagri hanya mengikat DPRD Bali, tidak mengikat Mendagri. Hanya DPRD Bali yang bisa membatalkan pemilihan gubernur di Bali bukan dirinya selaku Mendagri.

Kasus di Bali hanya puncak gunung es dari persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa kita. Tak hanya di Bali, dan tidak hanya menimpa PDIP. Pada dasarnya kita sebagai bangsa menghadapi kanker yang sama, yaitu mengganasnya praktek money politic. Di samping soal money politic, kisruh pemilihan gubernur juga terjadi karena gaya

kepemimpinan partai yang sentralistis. Dalam gaya kepemimpinan ini berlaku asumsi bahwa pimpinan pusat mengetahui lebih banyak. Sebaiknya pemimpin partai di daerah menjadi anak manis, mengikuti saja keinginan pimpinan pusat partai. Legitimasi DPRD untuk memilih gubernur pun semakin rendah. Hasil yang sah dari sidang DPRD tidak lagi sepenuhnya dipercayai, pemerintah sendiri juga tidak percaya pada hasil pemilihan gubernur oleh DPRD Lampung. Dan kini untuk kasus Bali, sebaliknya masyarakat yang tidak percaya. Semoga kasus Bali adalah kasus terakhir kisruh pemilihan gubernur. Sudah saatnya gubernur dipilih secara langsung, tidak lagi lewat anggota DPRD yang segelintir saja. Jika sekarang bisa, mengapa kita harus menunggu setelah tahun 2004 ?”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, lembaga peradilan PTUN di Bali sudah terlibat dalam kontroversi gubernur Bali. Suasana politik semakin panas, haruskah gubernur Bali yang baru terpilih tetap dilantik ? Ataukah ditunda pelantikannya atau malah dibatalkan ? Sekarang kita menghuBungi narasumber di studio. Pertama ke Pak Mawardi dulu. Apakah sesuai dengan jadwal, kalau Mendagri akan tetap melantik gubernur Bali tanggal 28 Agustus 2003 ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Bapak Mendagri atas nama presiden akan berkenan melantik kalau memang sudah ada keputusan presiden mengenai penetapan gubernur maupun wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD. DPRD Bali boleh saja membuat jadwal tetapi sudah diberitahukan oleh bapak Mendagri bahwa penjadualan itu harus menunggu keputusan presiden. Jadi jangan sampai membuat jadwal, lalu menyebarkan undangan tetapi keputusan presiden belum ada. Jadi yang utama adalah didasarkan kepada keputusan presiden mengenai itu. Yang kedua juga tergantung dari kesempatan Mendagri atas nama presiden untuk melakukan pelantikan. Misalnya kalau beliau ada penugasan lain, belum tentu jadwal itu bisa dipenuhi. Oleh karena itu keputusan presiden dulu

yang harus lahir, baru Mendagri memberikan suatu penetapan kapan beliau bisa melaksanakan pelantikan itu. Jadi tanggal 28 Agustus ini masih belum pasti. Yang menjadi dasar pelantikan itu sekali lagi adalah keputusan presiden. Dan sampai detik ini belum ada keputusan itu. Jadi dengan demikian tidak bisa kita mereka-reka kapan gubernur Bali harus dilantik.

DENNY J.A. :

Tapi apakah ketetapan PTUN soal money politics itu mempunyai pengaruh dalam hal presiden berkehendak melantik atau tidak ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Kalau berbicara soal keputusan PTUN, kita tidak bisa menggeneralisir dan tidak boleh berasumsi bahwa putusan tata usaha negara setempat sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti, karena harus ada evaluasi. Kami menghormati fungsionaris anggota DPRD setempat melakukan upaya hukum, tetapi upaya hukum itu harus dilihat dan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu pula PTUN juga perlu dievaluasi apakah dia berwenang atau tidak melakukan peradilan itu ? Jadi bisa dilihat dari hukum acaranya, kalau itu menyangkut soal PTUN.

DENNY J.A. :

Ok, nanti kita detailkan lagi masalah PTUN Pak. Sekarang kita ke Pak Wayan Nuastha. Menurut Bapak, apakah seharusnya Mendagri tetap melantik Gubernur Bali ?

WAYAN NUASTHA :

Kalau menurut saya, panitia pelaksanaan pemilu mengatakan bahwa laporan Ormas tentang dugaan money politics itu tidak sah. Sedangkan sahnya persyaratan itu sudah dipenuhi oleh Ormas yang bersangkutan, baik dari Bali Corruption Watch ataupun dari Pemuda

Hindu, yaitu Ormas yang dikatakan tidak terdaftar di pengadilan tinggi. Sesungguhnya Ormas itu tidak mesti harus terdaftar dari pengadilan tinggi.

DENNY J.A. :

Ok, juga ada masalah di sana, dan Bapak berharap Mendagri datang melantik dulu ?

WAYAN NUASTHA :

Saya memang berharap untuk semua pihak menghormati keputusan pengadilan.

DENNY J.A. :

Ini agak mengherankan, karena Anda dari PDIP dan yang menang juga dari PDIP. Tiba-tiba Anda menggugat pemenang dari partai Anda sendiri ?

WAYAN NUASTHA :

Saya bukan menggugat pemenang, tetapi cara-cara tentang money politics ini yang saya tidak inginkan. Karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ke depan calon pemimpin itu benar-benar bersih dan berwibawa.

DENNY J.A. :

Terhadap ketetapan PTUN ini, bagaimana respons Bapak agar ditunda dulu pelaksanaannya ? Bapak sepakat atau meminta lebih radikal lagi ?

WAYAN NUASTHA :

Karena saya membaca di PTN, di mana saya menguasakan kepada kuasa hukum karena ini dianulir. Dan itu adalah penetapan bukan

keputusan. Kalau menurut saya itu ketetapan untuk menunda, sebaiknya juga ditaati semua pihak sesuai dengan hasil penetapan PTUN Bali.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita ke Pak Oentarto lagi. Ada kehendak sebaiknya Mendagri secara substansial memang menunda pelantikan itu karena ada keputusan PTUN Bali. Bagaimana, Pak ?

Oentarto Sindung Mawardi :

Kembali lagi kepada obyek sengketa hukum. Apa yang disebut dengan putusan pejabat ataupun badan tata usaha negara harus clear dulu. Ada satu putusan tata usaha negara katakanlah DPRD sebagai badan tata usaha negara, lantas sekarang obyeknya apa ? Yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan dalam proses peradilan tata usaha negara. Putusan tata usaha negara itu yang tidak boleh diproses di dalam PTUN antara lain, menurut pasal 2 huruf C UU PTUN adalah suatu putusan yang belum final, yang masih memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, keputusan yang di ambil oleh DPRD itu belum final, sebab memerlukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang itu ? Presiden. Dilihat dari pasal 2 huruf C itu, tidak memungkinkan keputusan itu dilakukan oleh peradilan atau ditetapkan oleh PTUN.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Bapak PTUN baru bisa ikut jika presiden sudah mengesahkan sehingga sudah final bentuknya ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Ya, jadi yang menjadi obyek sengketa itu adalah suatu keputusan oleh pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat individual, konkrit, dan final.

DENNY J.A. :

Ok, Pak. Sekarang kita mengundang Pak Wayan Sudirta dari Bali Corruption Watch. Ada dua hal yang penting di sini, pertama money politics, kedua masalah PTUN. Permasalahan money politics dulu. Bagaimana Bapak yakin bahwa uang yang beredar ini adalah money politics, bukan misalnya uang konsolidasi partai?

WAYAN SUDIRTA :

Ya, kita mencoba dulu berbicara sesuai dengan fakta sehingga pemirsa Metro TV tidak akan tersesat jika mendengarkan dialog kita. Pasal 25 ayat 2 PP 151 Tahun 2000 menyatakan, pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang yang diduga terjadi sebelum, selama, dan setelah rapat paripurna khusus tingkat satu. Yang dimaksud dengan politik uang dalam ayat ini adalah pemberian uang ataupun bentuk lain yang dilakukan oleh calon kepala daerah, wakil kepala daerah, atau yang berkaitan dengan pasangan calon kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan daerah. Begitu luasnya, jadi apa yang saya pegang sebagai data atas kronologi dan pernyataan dua anggota DPR adanya cheque tidak bisa kita mengatakan tidak, kecuali ini sudah terbukti sebagai money politics.

DENNY J.A. :

Seandainya pun ada uang untuk konsolidasi partai menjelang pemilu, itu juga sudah termasuk dalam money politics, ya ?

WAYAN SUDIRTA :

Ya, karena sudah jelas di sini, yang dimaksud dengan politik uang sudah jelas dilakukan oleh siapa saja yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, terang-terangan atau terselubung untuk memenangkan kepala daerah.

DENNY J.A. :

Tapi sekarang ada suatu pandangan yang berbeda, yang satu mengatakan ini money politics, yang lainnya mengatakan bukan. Lembaga mana yang berwenang untuk membuat judgement ?

WAYAN SUDIRTA :

Sebenarnya ada sebuah proses ketika tahapan-tahapan pemilihan daerah itu dilakukan, mana yang disebut money politics ? Sepanjang DPR yang memproses ini jujur dan berpegang pada aturan yang ada, sebenarnya banyak pemilihan kepala daerah seperti misalnya di Maluku yang harus dibatalkan. Kita tidak perlu mencari contoh-contoh yang lain lagi.

DENNY J.A. :

Jadi DPRD sebagai lembaga sudah valid menentukan apakah ini money politics atau bukan, ya ?

WAYAN SUDIRTA :

Mereka wajib bersikap jujur, dan karena itu kalau syarat-syarat itu terpenuhi otomatis, karena jabatannya, mereka harus menetapkan demikian.

DENNY J.A. :

Kedua masalah PTUN. Seberapa mengikat keputusan PTUN ini untuk diikuti Mendagri misalnya ?

WAYAN SUDIRTA :

Ya, masalah PTUN saya mulai dengan surat edaran Menpan tanggal 29 Mei 1991. Sekali lagi agar pemirsanya Metro TV tidak mendapat kesan yang keliru, lebih baik saya berbicara yang otentik saja. Salah satu baris yang menekankan di mana letak pejabat terhadap penetapan dan putusan PTUN. Ketika itu Pak Sarwono membuat edaran yang

bunyiya begini, “untuk itu hendaknya pejabat TUN yang digugat, membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila pejabat TUN tidak mengindahkan putusan atau penetapan pengadilan, hendaknya atasan dari pejabat tersebut melakukan peneguran dan memerintahkan pelaksanaannya.” Jadi perintah atasan itu sifatnya inperatif, tidak boleh berubah lagi.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan pandangan Pak Oentarto, bahwa sebenarnya sebagai obyek hukum ini belum final karena belum ada pengesahan dari presiden, karena itu PTUN belum bisa memberikan review misalnya ?

WAYAN SUDIRTA :

Ya, kalau saya jadi Pak Oentarto mungkin juga saya akan mengatakan demikian. Kita mengambil contoh betapa memang UU PTUN itu masih perlu pengembangan dan penafsiran. Kalau kita semata-mata membaca pasal-pasal, kata demi kata, barangkali gugatan Arief Budiman di Solo, di mana dia menggugat yayasan tidak dimungkinkan dalam undang-undang kita. Tapi hakim bisa menafsirkan secara lebih luas. Untuk kesempatan yang singkat ini saya ingin mengatakan, Pak Oentarto, barangkali kita bisa mendapat pelajaran, mari kita bersama-sama mempelajari apa yang dalam praktek ketatanegaraan yang bernama putusan berantai itu bisa digugat.

DENNY J.A. :

Ok, Pak. Nanti ke Anda lagi. Kita ke Pak Oentarto dulu. Ada dua hal, pertama money politics dan kedua masalah ketetapan PTUN. Jika memang ada money politics, apakah menurut bapak pemilihan ini layak untuk di-review ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Saya sependapat dengan Pak Wayan Sudirta, kalau kaitannya dengan politik uang, itu bukan menjadi ruang lingkungannya PTUN. Karena itu menyangkut soal tindak pidana korupsi. Tapi juga, pemberian uang mesti diklarifikasi, dan dalam hal ini fraksi yang bersangkutan konon kabarnya sudah memberikan klarifikasi. Nah, klarifikasinya internal partai dan dalam hal ini pemerintah tidak campur tangan menyangkut urusan internal partai. Maka yang dijadikan obyek bukan soal money politics tetapi soal keputusan DPRD. Kalau yang menjadi obyek keputusan DPRD, juga masih dipertanyakan apakah sudah memenuhi suatu kriteria keputusan Tata Usaha Negara. Apakah hukum acara dalam melakukan proses peradilan itu juga sudah dipenuhi ? Sebab ada indikasi bahwa peraturan hukum acara juga tidak sepenuhnya dilakukan. Kalau itu memang benar indikasinya, maka kepala PTUN berhak untuk mendapatkan evaluasi. Dengan demikian keputusan atau ketetapan itu belum bisa dikatakan suatu keputusan yang memiliki, memperoleh kekuatan hukum tetap.

DENNY J.A. :

Ok Pak. Sekarang saya bacakan dulu polling Metro TV bekerjasama dengan MARS. Pertanyaan pertama, “Adakah praktek money politics dalam pemilihan gubernur di Bali ?” Respon yang menjawab “Ada” 76%, “Tidak ada” 7%, dan “Tidak tahu” 17%. Pertanyaan kedua, “Jika terbukti terdapat praktek money politics dalam pemilihan Gubernur Bali, setujukah anda bila hasil pemilu itu dibatalkan ?” Yang menjawab “Setuju dibatalkan” 87%, “Tidak setuju dibatalkan” 10%, dan “Tidak tahu” 3%. Pertanyaan ketiga, “Setujukah anda bahwa sudah saatnya pemilihan gubernur dilaksanakan secara langsung oleh rakyat ?” yang menjawab “Setuju” 91%, “Tidak setuju” 7%, “Tidak tahu” 2%.

Jadi apa bedanya money politics dengan uang konsolidasi partai menurut kawan-kawan partai Anda sendiri ?

WAYAN NUASTHA :

Menurut saya, dalam hal ini jelas, itu adalah money politics karena di sini sangat dikaitkan dengan pilkada Gubernur Bali periode 2003-2008. Kalau itu konsolidasi seperti HUT partai, gaji saya malah dipotong. Dan juga baru ini diselenggarakan 'rally motor' di kabupaten kami, gaji kami juga dipotong Rp. 2 juta. Jadi untuk konsolidasi biasanya malah gaji dipotong, bukan diberi.

DENNY J.A. :

Lalu bagaimana dengan perbedaan interpretasi, misalnya ada yang mengatakan bahwa untuk sekarang ini konsolidasi partai justru memberikan uang kepada anggota DPRD, tidak lagi meminta uang. Bapak bisa menangkap logikanya ?

WAYAN NUASTHA :

Ya, memang kalau dalam konsolidasi mestinya lewat struktur atau dari pengurus partai, tidak diberikan kepada perorangan. Di samping itu sebelumnya memang tidak pernah terjadi, justru gaji yang kami dapatkan dipotong.

DENNY J.A. :

Pak Oentarto, Anda melihat ada aroma money politics dalam kasus seperti ini ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Kami membatasi sesuai dengan kewenangan pemerintah, yaitu ada di dalam ruang lingkup normatif, administratif, dan prosedural. Kalau dari pihak institusi, dalam hal ini DPRD, panitia pemilihan yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi. Panitia pemilihan adalah juga fungsionaris-fungsionaris DPRD, dan fungsionaris DPRD itu juga adalah kader-kader partai.

DENNY J.A. :

Dan selama ini DPRD tidak mengatakan terjadi money politics ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Secara institusional kami mengacu begitu, juga dari segi teknis, administratif, dan normatif. Kalau toh memang kasus itu diklasifikasikan sebagai money politics katakanlah dari segi prosedural normatif hal itu tidak diakui oleh panitia pemilihan. Seandainya ada di antara anggota fungsionaris DPRD bersikukuh ada mekanisme penyelesaiannya melalui peradilan, yang dalam hal ini adalah peradilan negeri yang menangani kasus-kasus tindak pidana. Tapi nampaknya ini sedikit dikesampingkan, buktinya proses yang diajukan bukan karena soal money politics tapi soal keputusan yang diambil oleh DPRD melalui PTUN.

DENNY J.A. :

Ok, nanti kita ke Anda lagi. Kita ke Pak Sudirta, jadi money politics ini baru bisa diklaim sebagai money politics jika melalui peradilan, ya ? Bagaimana Anda menilainya ?

WAYAN SUDIRTA :

Pertama, klarifikasi. Tadi Pak Oentarto mengatakan sependapat, bahwa money politics tidak bisa di-PTUN-kan. Yang saya maksud sebenarnya DPR mempunyai wewenang, kalau secara jujur mengakui ada money politics atau tidak. Mereka harus memutuskan sendiri, tapi itu kalau tidak ada masalah. Tapi ketika DPR tidak melaksanakan fungsinya secara baik dengan tatibnya, di sinilah timbul masalah, dan masalah ini berkembang sampai pada mewujudkan SK. Ketika SK dibuat berdasarkan proses yang tidak bagus, di sinilah PTUN mengambil peran. Kedua, apakah benar kalau hal-hal seperti money politics hanya bisa dijangkau oleh peradilan umum ? Saya ingin membacakan pasal 1 dari UU TUN, yang pada intinya menekankan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan itu dapat digugat, itu bunyi

pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Jangan lupa legislatif yang ada sekarang ini sudah tidak legislatif murni, dalam pengertian hanya membuat Perda. Ketika dia membuat Perda memang tidak bisa digugat.

DENNY J.A. :

Jadi menurut anda money politics ini bisa diklaim tidak hanya melalui peradilan umum tapi juga oleh DPRD dan PTUN ?

WAYAN SUDIRTA :

Betul. Bisa diklaim SK nya sah apa tidak ? Ketika money politics tidak diproses secara benar dan menimbulkan SK, SK inilah yang harus dibatalkan dan tidak bisa tidak akhirnya money politics harus dibuka.

DENNY J.A. :

Ok, baik, ak. Sekarang kita menghuBungi Dr. Muhammad Asrul, pakar hukum tata negara. Jadi ada ketetapan PTUN yang meminta agar dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan DPRD tentang penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur. Menurut Anda apakah ketetapan ini mengikat Mendagri ataupun Presiden ?

DR. MUHAMMAD ASRUL :

Ya, saya kira tidak ada seorang pun yang berdiri di atas hukum. Menurut saya, sekali keputusan itu dibuat maka pemerintah harus menjalankan. Dalam hal ini sekalipun ada upaya untuk mengajukan banding atau perlawanan hukum, perlawanan hukum ataupun banding itu tidak menghambat pelaksanaan putusan pengadilan itu. Ini tetap prinsipnya.

DENNY J.A. :

Lalu bagaimana interpretasi yang mengatakan bahwa ketetapan PTUN ini cacat sejak awal, karena dibuat sebelum putusan tentang Gubernur Bali itu final, sebelum ada pengesahan dari presiden ?

DR. MUHAMMAD ASRUL :

Saya kira itu pendapat yang keliru, dan pendapat semacam itu harusnya melalui pengadilan bukan dilakukan perlawanan di luar pengadilan. Dan kita tidak hanya mengajukan sikap-sikap normatif atau dasar-dasar hukum belaka, tetapi yang terpenting dari semua ini adalah proses berdemokrasi secara sehat. Ada satu langkah sebetulnya yang bisa dilakukan, misalnya presiden dalam hal ini melalui Mendagri bersikap patuh pada hukum dengan jalan diadakan status quo terhadap jabatan itu. Misalnya ditunjuk satu care taker, ini satu jalan yang menurut saya tidak akan menghilangkan muka. Karena bagi bangsa Timur kadang-kadang kebijaksanaan itu penting. Kemudian satu lagi bahwa keputusan DPRD ini harus disahkan oleh presiden tetapi bukan berarti bahwa mengesahkan itu kemudian bisa membatalkan keputusan DPRD.

DENNY J.A. :

Lalu Bung Asrul, apa akibatnya jika karena paham hukumnya sendiri, presiden dan Mendagri tetap saja melantik Gubernur Bali ?

DR. MUHAMMAD ASRUL :

Saya kira itu adalah pelecehan terhadap hukum dan satu preseden yang sangat buruk. Ke depan ini hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan orang terhadap hukum. Buat saya sangat penting di era sekarang supremasi hukum ditegakkan.

DENNY J.A. :

Jika itu tetap terjadi misalnya, lembaga presiden dan lembaga peradilan mempunyai paham yang berbeda, berarti ada konflik kelembagaan, ya ? Lalu solusinya apa ?

DR. MUHAMMAD ASRUL :

Pertama-tama barangkali ketika ada persoalan yang genting, maka PTUN bisa meminta fatwa dan pendapat Mahkamah Agung (MA),

karena ada semacam perlawanan dari pemerintah. Ini bukan konflik kewenangan sebagaimana diatur dalam konteks tugas Mahkamah Konstitusi (MK). Kecuali kalau DPRD menolak, presiden tetap melantik, maka ini muncul konflik kelembagan dan itu diserahkan kepada MK. Jadi saya kira exercise yang harus dilakukan adalah PTUN langsung meminta pendapat dari MA, dan MA bisa membawa persoalan ini menjadi persoalan yang sangat serius. Tapi saya kira memang sebalnya masalah ini status quo dulu.

DENNY J.A. :

Tapi yang lama itu dibiarkan saja dulu ?

DR. MUHAMMAD ASRUL :

Dibiarkan saja dulu sampai clear. Dan ada satu lagi, sebagai suatu proses pendidikan politik yang bijaksana, maka DPRD setempat juga harus membentuk panel khusus untuk memeriksa apakah memang terjadi money politic atau tidak. Dan dalam proses berdemokrasi yang lebih sehat, jangan sampai semua kesalahan ditimpakan pada Presiden Megawati. Mendagri Hari Sabarno juga harus lebih cerdas, melihat persoalan lebih arif bijaksana, jangan karena satu persoalan kemudian citra kepala negara menjadi merosot karena bawahannya yang tidak cerdas.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Asrul, terima kasih banyak pandangan Anda. Sekarang gilirannya kita mencari solusi, karena bagaimanapun hal ini harus dipecahkan. Masing-masing narasumber kita mintai pandangannya bagaimana masalah ini harus dipecahkan. Dimulai dari Bung Sudirta, bagaimana, Bung, pemecahannya ?

WAYAN SUDIRTA :

Tolong bedakan masalah Gubernur Bali dalam pengertian Dewabrata, kemudian peranan Pak Wesnawa di satu pihak dengan

pandangan Pak Wayan Nuastha terhadap PDIP dan Megawati di lain pihak. Mereka tetap mencintai Megawati, tetap mencintai PDIP, tetapi mereka tidak suka kalau Dewabrata terpilih dalam konteks dan dikaitkan dengan money politics. Karena itu saya selalu mengatakan, tolong adakan pejabat sementara dulu. Sebab kalau tidak ada pejabat sementara, ada tiga resiko yang akan ditanggung. Pertama, orang-orang PDIP yang notabene orang yang menyayangi Megawati akan protes, bukan pada Megawati, tapi pada Pak Wesnawa dan gubernur. Karena sudah ada penetapan pengadilan kok ditabrak juga, mereka akan diprotes. Kedua, ada resiko bagi pejabat, kalau melantik mereka bertentangan dengan surat edaran Menpan, mereka juga bertentangan dengan ketetapan di mana pejabat wajib mengetahui dan tidak boleh melakukan apa pun yang berkaitan dengan yang ditetapkan. Ketiga, yang paling penting citra Megawati dan PDIP yang akan dipertaruhkan, kalau dia berada dibelakang DPRD dalam posisi yang demikian. Jadi dengan demikian yang paling mudah dan tidak ada resiko adalah sementara waktu diangkat pejabat gubernur sementara.

DENNY J.A. :

Dan pejabat itu adalah gubernur yang sekarang ini ?

WAYAN SUDIRTA :

Itu terserah, bisa pejabat gubernur yang sekarang, bisa yang lain, itu bukan urusan kami. Sampai terpilih gubernur yang definitif. Saya yakin kalau itu yang terjadi, Bali kembali tentram. Kalau tidak, jangan pertaruhkan keamanan Bali, karena Bali itu terlalu penting untuk dipertaruhkan.

DENNY J.A. :

Baik, sekarang kita mendengar dari Pak Wayan Nuastha, apa solusi dari Anda ?

WAYAN NUASTHA :

Saya minta ada review terhadap keabsahan sidang paripurna DPRD setelah dilakukannya uji publik itu. Saya berani menggugat karena ada dugaan money politics dalam sidang paripurna.

DENNY J.A. :

Anda setuju ada solusi tadi bahwa ada pejabat sementara ?

WAYAN NUASTHA :

Saya setuju dan apalagi ada aturan untuk menunda. Terserah nanti siapa, saya bukan tidak senang si A, si B, tetapi yang jelas bagaimanapun juga DPRD Propinsi Bali, khususnya dalam hal ini karena ada dugaan money politics harus melaksanakan Tatib.

DENNY J.A. :

Ok, baik, sekarang dari Pak Oentarto, solusinya ?

OENTARTO SINDUNG MAWARDI :

Solusi itu bisa bersifat jangka panjang untuk masa yang akan datang, menghindari hal-hal yang semacam itu, bisa bagaimana menyikapi proses suksesinya. Jadi kalau dalam menyikapi proses suksesi tadi sifatnya normatif, administratif, dan prosedural oleh institusi yang berwenang, dalam hal ini DPRD, yang sudah memberikan keputusan semacam itu, bisa ditindaklanjuti. Kalau yang sedang menjadi proses hukum, itu silakan untuk tetap juga dilaksanakan. Ini ada dua kamar yang pada suatu saat bisa bermuara pada satu titik. Lantas untuk jangka panjang, melalui pemilihan langsung oleh rakyat, jadi bukan dilakukan oleh DPRD.

DENNY J.A. :

Ok, jadi solusi yang permanen nanti adalah pemilihan gubernur langsung oleh rakyat. Para pemirsa Metro TV, anda mendengar

sendiri tadi ternyata kontroversi gubernur Bali ini jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Tapi kita berharap bahwa semoga Bali menjadi kasus terakhir, karena jika tidak, pemerintahan lokal akan lumpuh. Dan kita mengharapkan ini juga menjadi warning bagi kita semua, agar pemimpin di pusat lebih arif dalam menghadapi dinamika politik lokal. Sampai jumpa lagi minggu depan.

BAB III

MEMERANGI KORUPSI

PERANG BARU TERHADAP KORUPSI

Tanggal : 5 Desember 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Teras Narang (Komisi II DPR), Todung Mulya Lubis
(Pakar Hukum), Yusuf Syakir (KPKPN)

Perang terhadap korupsi di Indonesia sudah terdengar sejak lama. Namun problem korupsi masih begitu pekat di Indonesia. Alih-alih mau memberantas korupsi warisan rezim lama, kita justru dihadapkan pada korupsi-korupsi baru yang dilihat dari dampaknya setali tiga uang dengan model-model korupsi yang lama. Di tengah spesimisme masyarakat terhadap efektivitas gerakan pemberantasan korupsi, pemerintah terus-menerus berusaha menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi. Perkembangan terkini, DPR segera membentuk “Komisi Pemberantasan Korupsi”. Komisi ini mempunyai kewenangan yang luar biasa, seperti melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi, serta melakukan pencegahan dan monitoring. Komisi ini dapat pula mengambil alih kasus korupsi yang belum selesai. Namun pengalaman yang sudah-sudah membuat publik menjadi ragu-ragu dalam menyambut lembaga baru ini. Akankah untuk pertama kalinya, sebuah lembaga dapat secara efektif mereduksi angka korupsi di Indonesia ? Ataukah seperti biasa, lembaga baru itu akan menjadi

gunung kekecewaan publik atas komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah korupsi ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita malam ini adalah “Perang Terhadap Korupsi”. Untuk membahasnya, di studio sudah hadir Bung Teras Narang dari Komisi II DPR, Bung Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum dari Transparency International Indonesia (TII), serta Bung Yusuf Syakir dari KPKPN. Untuk memperkaya diskusi, kita simak dulu pengantar berikut :

“Sejak reformasi sudah banyak sekali undang-undang yang dilahirkan sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Begitu banyak pula lembaga-lembaga baru didirikan untuk melawan korupsi, baik yang dibentuk oleh DPR atau pun yang tumbuh dalam masyarakat. Semangat anti korupsi bahkan menjadi trade mark. Pada awal-awal lahirnya gerakan reformasi, jargon-jargon dan statemen tentang korupsi begitu ramai diteriakkan. Tetapi apakah yang terjadi ? Korupsi kini bahkan bertambah parah.

Akar persoalannya tidak terletak pada kekosongan aturan hukum yang komprehensif tentang korupsi, tetapi lebih pada tataran praktis. Komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi dalam tataran praktis cukup meragukan karena law enforcement di lapangan sangat lemah. Ketika ketua DPR dinyatakan bersalah karena kasus korupsi, partainya dan anggota DPR yang separtai dengannya melindungi dengan keras, dan terus membiarkan sang terpidana tetap memimpin DPR. Ketika isu amplop yang beredar di DPR, sang pengedar isu dikucilkan oleh partainya sendiri. Ketika Jaksa Agung dinilai tidak jujur menyatakan kekayaannya, bawahannya merapatkan barisan untuk membela, dan presiden pun berkeras untuk mempertahankan sang Jaksa Agung. Apa yang dapat diharapkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ? Dengan melihat kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, akankah

kita kembali dibuat kecewa dengan lahirnya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu ?”

Pemirsa Metro TV, pertama kita bertanya dulu kepada Bung Teras, apa keistimewaan komisi ini sehingga kita optimis suatu ketika korupsi dapat diberantas di Indonesia ?

TERAS NARANG :

Namanya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian disingkat menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Suatu fakta yang tidak dapat kita pungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Oleh karena itu kita harus melakukan suatu upaya, apakah itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Dengan dasar pemikiran tersebut kita melihat aparaturnya penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan, ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dasar sosiologisnya. Tetapi ada dasar yuridisnya, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999, terutama pasal 43 dan Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998.

DENNY J.A. :

Apakah keistimewaan tersebut perlu karena kewenangan luar biasa belum dipunyai oleh komisi yang lain ?

TERAS NARANG :

Betul. Kewenangan memang ada beberapa, tetapi tugasnya ada lima, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan ada penambahan yaitu melakukan pencegahan dan monitoring.

DENNY J.A. :

Lawan komisi ini merupakan tradisi korupsi yang sangat panjang. Menurut Anda, apa kendala yang paling besar ?

TERAS NARANG :

Iya. Karena komisi ini merupakan superboby, maka anggotanya nanti adalah superman. Tetapi saya mempunyai cita-cita agar salah satunya wanita.

DENNY J.A. :

Bagaimana kira-kira cara mencari superman tersebut di Indonesia?

TERAS NARANG :

Sebelumnya harus dibentuk panitia seleksi oleh pemerintah. Kemudian panitia seleksi ini dengan ketat melakukan proses penjarangan unsur masyarakat dan pemerintahan. Hasil penjarangan tersebut kemudian disebarakan ke masyarakat. Prinsip utamanya adalah transparansi. Kita menginginkan partisipasi maksimal dari masyarakat tetapi panitia seleksi ini pun harus memberikan waktu yang banyak.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Mulya. Apakah Anda seoptimis Bung Teras, komisi ini akan bisa membuat korupsi di Indonesai K.O ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Saya kurang tahu. Tetapi ini pertama kalinya kita mempunyai undang-undang yang komprehensif tentang kekuasaan komisi yang begitu luas dan dahsyat otoritasnya.

DENNY J.A. :

Apakah belum pernah ada sebelumnya ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Belum pernah. Komisi-komisi sebelumnya gagal karena tidak didukung landasan hukum yang cukup komprehensif dan tegas. Kita

memang sangat berharap kepada komisi ini walaupun “espektasi” itu bisa melahirkan gunung kekecewaan. Karena praktis kita menyerahkan semua pekerjaan pemberantasan korupsi kepada mereka. Saya tidak mengetahui apakah kita bisa mendapatkan superman, superwoman yang betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Kalau kita mendapatkan, tujuan ideal dan luhur tersebut bisa kita capai. Tetapi kalau tidak, bisa menjadi puncak kekecewaan.

DENNY J.A. :

Berdasarkan pengamatan Anda selaku pimpinan banyak LSM, apakah kita bisa mendapatkan superman dan superwoman untuk mengisi lembaga ini ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Menurut saya prosesnya sudah bagus karena ada panitia seleksi. Tetapi harus diingat bahwa koruptor-koruptor ini tidak bodoh, jam terbangnya tinggi. Masalahnya, apakah sumber daya manusia yang ada cukup memadai, kompeten dan kapabel untuk membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan ? Kalau tidak, kita akan dihadapkan pada kelemahan-kelemahan dakwaan yang menyebabkan koruptor itu bebas.

DENNY J.A. :

Anda meragukan kesiapan aparaturnya di lapangan seperti jaksa, polisi dan hakim untuk mendukung kebijakan ini ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Ini kerja raksasa, dan belum pernah ada kekuasaan yang sedemikian besar.

DENNY J.A. :

Menurut Anda ada dua kendala besar yaitu mencari superman dan

superwoman. Dan bagaimana mengontrol lembaga yang mempunyai power sebesar ini ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Memang harus dikontrol. Kalau tidak, “Who guard the guardian?” Ini pertanyaannya.

DENNY J.A. :

Who guard the guardian? Siapa yang mengontrol pengontrol ini?

TERAS NARANG :

Satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam undang-undang ini juga dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

DENNY J.A. :

Ok. Pemirsa Metro TV berikutnya kita akan membahas KPKPN, lembaga yang berhasil mengobok-obok harta pejabat. Kita menjumpai Bung Yusuf Syakir dari KPKPN. Bung, lembaga Anda tampaknya akan menjadi korban pertama KPK. Komentar Anda ?

YUSUF SYAKIR :

Menurut RUU yang baru, begitu KPK berdiri maka KPKPN akan habis riwayatnya. Walaupun tidak secara resmi dikatakan KPKPN akan berada di bagian pencegahan, tetapi di pasal 71 ayat 2 menyatakan pasal-pasal yang mengatur KPKPN tidak berlaku lagi. Termasuk pasal 17 yang menyatakan bahwa KPKPN mempunyai kewenangan dan tugas memeriksa, memantau, mengklarifikasi, menyelidiki berita-berita atau laporan tentang KKN pejabat negara. Isi pasal 17 itu dihapus dan tidak ada gantinya.

DENNY J.A. :

Menurut Anda fungsi KPKPN tidak diambil alih oleh KPK ?

YUSUF SYAKIR :

Tidak seluruhnya. Dari segi undang-undang tidak bisa operasional. Karena itu saya prihatin karena tugas KPKPN tidak diambil alih seluruhnya oleh Komisi Anti Korupsi.

DENNY J.A. :

Menurut Anda setelah ada undang-undang ini maka tidak hanya anggota KPKPN yang dibebas-tugaskan, tetapi fungsi KPKPN pun akan hilang dari lembaga anti korupsi tersebut ?

YUSUF SYAKIR :

Iya, termasuk tugas dan kewenangan KPKPN.

DENNY JA. :

Baik Bung. Kita ke Bung Teras Narang. Apakah benar fungsi KPKPN tidak diambil alih sebagaimana yang dijanjikan ?

TERAS NARANG :

Mengenai masalah fungsi, tugas, dan wewenang KPKPN, akan berlaku apabila KPK sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya selambat-lambatnya satu tahun. Dengan perkataan lain KPKPN masih bisa bekerja sepanjang KPK belum melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan memang betul dalam peraturan peralihan itu dinyatakan tidak berlaku pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 dan pasal 10 sampai pasal 19. Tetapi jangan lupa, ini merupakan bagian dari Sub Bidang Pencegahan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang kemudian akan diatur secara tersendiri oleh KPK.

DENNY J.A. :

Menurut Anda undang-undang ini hanya mengatur secara umum?

TERAS NARANG :

Iya, baru kemudian dioperasionalkan. Karena strukturnya ada pimpinan komisi, ada empat wakil dan dari empat wakil ini ada sub bidang.

DENNY J.A. :

Bung Yusuf Syakir, Anda puas dengan keterangan Bung Teras Narang bahwa akan ada operasionalisasi oleh KPK nanti ?

YUSUF SYAKIR :

Memang bisa, tetapi tidak sekuat kalau dicantumkan dalam undang-undang. Apalagi dalam pasal 13A tidak ada pemantauan, padahal pejabat harus dipantau kekayaannya mulai awal sampai pensiun untuk mengetahui apakah melakukan tindak korupsi atau tidak. Pemantauan tidak ada lagi, hanya didaftar kemudian diperiksa.

DENNY J.A. :

Ke Bung Mulya, apakah ini kelalaian yang fundamental, tidak dimasukkannya fungsi KPKPN dalam undang-undang yang baru ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Dalam ilmu hukum ada dua mazhab, mazhab pertama menghendaki semuanya dibuat secara detail dalam undang-undang, tetapi mazhab lain menyerahkan pada peraturan pelaksana. Operasionalisasinya diserahkan pada peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang. Saya pribadi berpendapat karena ini tradisi baru bagi kita dalam membangun transparansi kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sangat ideal kalau operasionalisasi itu dimuat dalam undang-undang. Di sini akhirnya kita sangat menggantungkan harapan kepada

anggota KPK yang betul-betul superman, superwoman, mempunyai integritas dan komitmen. Kalau mereka bisa menerjemahkan, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa, apalagi ada tekanan politik dari luar, ini akan set back.

DENNY J.A. :

Sebaiknya undang-undang sedetail mungkin untuk menghindari multi interpretasi ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Dalam keadaan seperti sekarang lebih bagus mempunyai undang-undang yang kuat, detail, dan komprehensif untuk mencegah kekosongan hukum atau penyalahgunaan operasionalisasi.

DENNY J.A. :

Bung Yusuf, sesudah ada undang-undang yang baru, masa hidup KPKPN masih satu tahun lagi, berarti ada waktu satu tahun untuk membuat sejarah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ?

YUSUF SYAKIR :

KPKPN akan melaksanakan tugas sampai KPK berdiri.

DENNY J.A. :

Kita mendengar kelompok Anda sedang memeriksa harta presiden, harta Laksamana Sukardi, apakah akan diteruskan ?

YUSUF SYAKIR :

Iya. Kami akan tetap bekerja sampai saat berdirinya KPK.

DENNY J.A. :

Dengan akan dibubarkannya KPKPN satu tahun lagi, adakah pengaruhnya terhadap moral kerja kawan-kawan Anda di KPKPN ?

YUSUF SYAKIR :

Justru semangatnya semakin meningkat karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Mumpung masih ada kesempatan berbuat baik, maka kita akan berbuat baik.

DENNY J.A. :

Lembaga Anda sedikit sekali mendapat public trust. Menurut Anda, apa yang membuat lembaga Anda dipercaya oleh publik ?

YUSUF SYAKIR :

Keterbukaan dan moral courage anggota komisi dalam membuka kasus-kasus besar.

DENNY J.A. :

Apa yang Anda sarankan pada KPK untuk mendapatkan public trust ?

YUSUF SYAKIR :

Saya menyarankan supaya KPK memanfaatkan dan menindaklanjuti 19.000 data yang telah kami kumpulkan.

DENNY J.A. :

Baik, kita ke Bung Mulya. Bung, apa yang Anda sarankan agar KPK mendapatkan public trust sebagaimana KPKPN ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Kalau melihat kewenangan, kekuasaan, dan tugas yang luar biasa tersebut KPK seharusnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Tetapi kalau sampai gagal, kita tidak mempunyai harapan apa pun untuk memberantas korupsi.

DENNY J.A. :

Mungkin perlu ada kasus korupsi besar yang mesti dibongkar KPK?

TODUNG MULYA LUBIS :

Harapan kita adalah bagaimana mencari the person behind the gun yang mempunyai keberanian, nyali, dan integritas. Kalau itu bisa ditemukan, tentu hasil konkrit dituntut dari komisi ini. Seandainya komisi ini tidak mampu menghasilkan hasil yang konkrit dan hanya bicara sebatas wacana, apatisisme akan semakin meluas. Niat baik pemerintah memberantas korupsi tidak akan dipercaya.

DENNY J.A. :

Bung Teras Narang, apa yang Anda sarankan agar KPK mendapatkan public trust yang cukup ?

TERAS NARANG :

Kita harus tetap mengawasi proses rekrutmen terhadap pimpinan komisi ini karena kekuatan dari komisi ini ada di pimpinan. Di samping moralitas dan integritas yang tinggi, yang juga penting adalah profesionalitas.

DENNY J.A. :

Banyak sekali kasus korupsi, bagaimana lembaga ini memulai, mana yang harus dibongkar lebih dulu ?

TERAS NARANG :

Pertama-tama adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Manakala koordinasi dan supervisi tidak berjalan, baru melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

DENNY J.A. :

Karena lembaga ini akan menjadi perhatian nasional, maka kasus pertama yang ditangani sangat penting. Apa kriterianya ? Siapa dulu yang harus diperiksa ? Apakah DPR menyusun kriteria untuk ini ?

TERAS NARANG :

Selain melihat kerugian negara seberapa besar, artinya dari segi jumlah. Kita juga melihat complicated-nya permasalahan serta dampaknya kepada rakyat, ini yang penting. Sehingga diharapkan yang pertama dilakukan oleh komisi ini adalah melakukan yang terbaik.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kembali kita menghuBungi Bung Yusuf Syakir. Salah satu konteks yang dianggap tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi adalah lembeknya komitmen para pemimpin nasional. Contohnya, Akbar Tandjung masih dibiarkan menjadi ketua DPR, Jaksa Agung A. Rahman masih menjadi Jaksa Agung. Bagaimana menurut Anda respon para pemimpin terhadap kasus-kasus korupsi ?

YUSUF SYAKIR :

Kita melihat political will penguasa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, belum memuaskan, masih perlu ditingkatkan.

DENNY J.A. :

Seandainya ada pressure yang kuat meminta Akbar Tandjung mundur atau non aktif sebagai ketua DPR atau A. Rahman non aktif sebagai Jaksa Agung. Apakah ini akan memberi preseden yang lebih baik ?

YUSUF SYAKIR :

Wewenang KPKPN hanya memeriksa kekayaan pejabat saja, masalah politiknya kita tidak ikut campur dan itu bukan wewenang KPKPN.

DENNY J.A. :

Public opinion Oktober lalu sekitar 70% publik kecewa terhadap kinerja pemerintah dalam membongkar korupsi. Anda merasakan kekecewaan publik ini ?

YUSUF SYAKIR :

Memang betul, antusiasme masyarakat terhadap KPKPN sangat luar biasa. Ini menandakan harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi luar biasa besarnya. Hanya respon dari penguasa, terutama eksekutif belum seperti yang diharapkan masyarakat.

DENNY J.A. :

Bung Mulya, apakah Anda setuju bahwa pemimpin kita di era reformasi ini terlalu lembek terhadap kasus korupsi ?

TODUNG MULYA LUBIS :

Saya setuju dengan sinyalemen itu. Tetapi satu hal yang ingin saya kemukakan bahwa RUU yang akan disahkan ini perlu dilengkapi. Misalnya, perlu dibuat aturan yang mewajibkan pejabat negara untuk mengundurkan diri ketika dia sudah disidik. Di sinilah persoalan supervisi dan koordinasi menjadi sangat penting. Apakah kejaksaan, kepolisian, atau instansi lain akan betul-betul kooperatif melakukan pemberantasan korupsi. Sebab kalau tidak, bisa mental di tengah jalan, apalagi pengadilan kita masih perlu diperbaiki dan diberdayakan. Apakah komisi ini mempunyai waktu untuk membangun sumber daya penuntut umum yang betul-betul kapabel dan siap pakai ? Koordinasi ini luar biasa pentingnya, kalau tidak, komisi ini akan disambut dingin.

DENNY J.A. :

Bung Teras Narang, apakah Anda setuju leadership nasional sangat lembek dalam memberantas korupsi ?

TERAS NARANG :

Menurut pengalaman saya, keinginan untuk melakukan perbaikan itu begitu kuat, khususnya masalah penegakan hukum. Tetapi ketika penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sudah dilakukan secara baik, begitu masuk ke pengadilan akan lain lagi ceritanya. Oleh karena itu kita sekarang harus melakukan terobosan, yaitu dengan membentuk KPK ini.

DENNY J.A. :

Apakah ada kompleksitas yang lebih rumit di lapangan ?

TERAS NARANG :

Satu hal lagi, kalau misalnya suatu proses yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan dan ternyata tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka dapat diambil alih. Tetapi sekali KPK mengambil alih maka tidak boleh dilakukan penghentian.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang saatnya kita mendengarkan pesan atau refleksi para pembicara untuk renungan kita semua. Mulai dari Bung Syakir.

YUSUF SYAKIR :

Menurut saya yang penting itu superman-nya, the man behind the gun. Bagaimana orang tersebut, apakah betul-betul mempunyai integritas atau tidak ? Dan sekali lagi political will dari eksekutif terutama, sangat dibutuhkan.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Teras Narang silakan.

TERAS NARANG :

Kita berharap banyak kepada komisi ini. Saya yakin kalau ada pengawasan dan perhatian dari masyarakat, komisi ini akan bisa melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan baik.

DENNY J.A. :

Baik. Bung Mulya, the last word.

TODUNG MULYA LUBIS :

Kita bakal mempunyai komisi yang sangat kuat, superboby, mudah-mudahan kita mempunyai the person behind the gun yang committed, mempunyai integritas. Tetapi tanpa dukungan publik, komisi ini tidak akan efektif. Satu hal yang perlu kita usulkan untuk diupayakan adalah perlindungan saksi. Suatu kasus tidak akan terbongkar kalau tidak ada perlindungan saksi.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih kepada para pembicara. Pemirsa Metro TV, Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin menjadi harapan kita yang terbaik dan mungkin yang terakhir. Jika komisi ini gagal, maka korupsi akan semakin kokoh menjadi ideologi nasional dan mungkin akan lebih ditaati daripada Pancasila sekalipun.

Pemirsa Metro TV, sampai berjumpa Kamis minggu depan.

KORUPSI YANG MAHA PERKASA

Tanggal : 18 Desember 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Asep Rahmat Fajar (Ketua Harian MAPPI UI), Panda Nababan (Anggota Komisi II DPR), Syahrudin Rasul (Anggota Pimpinan KPK)

Dari Sabang sampai Merauke, kita sudah disatukan oleh korupsi. Begitu luasnya persebarannya, begitu eksefis pengaruhnya, sehingga korupsi telah menjadi semacam ideologi nasional, sepadan dengan ideologi Pancasila. Inilah komentar dari mereka yang sinis atau mungkin mereka yang sudah lelah dengan isu korupsi di tanah air. Orde Baru sudah tumbang tapi korupsi tetap jalan terus. Dalam perkara korupsi, reformasi hanya terjadi di permukaan. Kini sudah dibentuk sebuah lembaga baru, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apakah pembentukan lembaga ini benar-benar sebuah terobosan yang efektif untuk mereduksi tingkat korupsi ? Ataukah lembaga ini juga akan layu sebelum berkembang, sebagaimana upaya atau gerakan untuk memberantas korupsi yang sejauh ini senantiasa muncul tenggelam ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara "Parliament Watch" bersama saya Denny J.A. Di studio sekarang

sudah hadir Bung Panda Nababan anggota Komisi II DPR yang juga Sekretaris PDIP. Juga Bung Asep Rahmat Fajar dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), serta Bung Syahrudin Rasul dari KPK. Selamat malam semuanya. Seperti biasa pemirsa, untuk memperkaya diskusi saksikan dulu pengantar berikut ini :

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja dipilih oleh DPR, namun antusiasme publik terhadap lembaga ini terasa datar-datar saja. Berita soal terbentuknya KPK seolah ditelan oleh isu lain yang lebih hangat dan sexy. Mungkin publik juga agak apatis dan sinis dengan segala upaya pemberantasan korupsi. Sejak reformasi sering didengang-dengungkan program pembasmian korupsi. Namun yang terjadi justru sebaliknya korupsi bertambah menyebar, terbuka, dan parah. Mungkin publik mengetahui betapa di Indonesia sekarang ini korupsi sudah maha perkasa. Posisi korupsi sudah menggantikan Pancasila sebagai ideologi nasional. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau, puluhan suku bangsa, dipersatukan oleh problem korupsi yang sama. Korupsi bahkan lebih ditaati daripada aneka kotbah suci yang sering kita dengar di rumah ibadah. Inilah riwayat lima tahun reformasi dari aneka agenda besar yang dimunculkan.

Ketika publik menumbangkan Orde Baru memang korupsi menjadi agenda paling sulit. Agenda lain mulai dari amandemen konstitusi, depolitisasi tentara, sampai otonomi daerah sudah berjalan ke depan. Namun agenda pemberantasan korupsi jalan mundur ke belakang. Setidaknya ada tiga alasan mengapa korupsi begitu sulit dijinakkan. Pertama, praktek korupsi sudah menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan, yang membutuhkan dana. Dari manakah sumber dana itu berasal ? Mau tak mau para pejabat publik harus berkolusi dengan investor yang sudah ada. Para investor bukan pula sinterklas, mereka akan memberi uang jika mereka juga mendapatkan sesuatu. Terjadilah huBungan yang saling menguntungkan, terjadilah korupsi. Kedua, korupsi juga dilakukan secara komunal, praktik money politic terjadi melintasi aneka kekuatan politik. Muncul istilah korupsi lintas partai yang dilakukan secara bersamaan antara beberapa aktivis partai. Jika ada aktivis salah satu partai yang mencoba membuka suara,

maka segera partai lain mengancam membeberkan kesalahan partai tersebut. Kembali terjadi simbiosis mutualisme untuk saling tutup mulut, akibatnya korupsi semakin menggunung. Ketiga, tidak ada tokoh berpengaruh yang nekad menghibahkan diri dalam perang melawan korupsi. Dilihat dari tingkat keparahan korupsi, Indonesia membutuhkan seorang yang teramat berkuasa dan berani mengambil resiko untuk menumpas korupsi. Ia pasti akan banyak sekali musuhnya, bahkan juga mungkin terancam jiwanya. Dengan daftar di atas, kerja KPK memang sangat sulit. Tetapi pimpinan KPK tidak perlu berkecil hati karena politisi dan publik Indonesia juga mungkin semakin tidak peduli dengan korupsi, publik sudah terlanjur sinis dan apatis, Indonesia pun pelan-pelan berjalan ke jurang.”

Kita pertama menghuBungi Bung Asep. Bagaimana Bung prospek dan kendala lembaga baru ini ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Kalau dilihat dari kewenangannya, komisi ini memang luar biasa, super body, bisa mensupervisi semua kasus, baik yang ada di kejaksaan maupun di kepolisian yang mereka tidak sanggup ataupun mungkin tidak meneruskan karena beberapa kendala. Nah, celakanya dengan adanya kewenangan yang sebesar itu, prospek ke depan tidak hanya ditentukan oleh hal itu, tetapi juga ditentukan oleh hal-hal lain. Tidak hanya kewenangan yang penting, tetapi juga public trust. Jangan sampai kewenangannya besar, tetapi public trust-nya rendah.

DENNY J.A. :

Pak Panda Nababan, bagaimana menurut Anda ?

PANDA NABABAN :

Saya terus terang optimis dengan dipilihnya kelima tokoh ini. Saya tahu dan kebetulan kenal puluhan tahun, bukan baru pada saat mau di-fit and proper test, mereka mempunyai integritas yang tinggi.

Saya percaya dan kemudian mereka mendapat kewenangan dengan undang-undang dan kemudian tadi sore di DPR ada peristiwa politik, disahkannya UU Peradilan dan UU mengenai Mahkamah Agung, yang membuat institusi pengadilan ini lebih kuat lagi dalam meminimalisir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya kolusi atau manipulasi di pengadilan.

DENNY J.A. :

Anda merasa komisi ini berbeda dengan berbagai upaya sebelumnya ?

PANDA NABABAN :

Oh sangat berbeda, di samping kewenangan yang begitu besar, extra ordinary crime yang dihadapi mereka. Juga terus terang saya melihat betul-betul dengan yakin bahwa team work dan integritas mereka dengan kewenangan undang-undang yang ada, sebenarnya tidak lagi ada alasan untuk kemudian tidak optimis.

DENNY J.A. :

Ok, bagaimana tadi dengan pandangan Bung Asep, bahwa public trust rendah ternyata kepada mereka ?

PANDA NABABAN :

Itu relatif, public trust seperti yang dikatakan tadi, bahwa proses ini adalah segala macam seperti yang kita lihat sekarang. Sekarang kita melihat mereka sudah dibentuk, sudah diangkat, nanti semoga sebelum tanggal 28 Desember sudah dilantik oleh presiden. Kemudian kita melihat, tetapi kalau kita mengobarkannya sekarang, berarti kita sama sebagai bagian dari para koruptor.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Asep, bagaimana menurut Anda ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Memang seharusnya mereka bisa diandalkan sebagai senjata terakhir masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi. Seharusnya secara teori optimis, tapi realita hasil dan proses itu mungkin bisa dibahas satu per satu. Jangan-jangan berbeda antara realita hasil dan realita proses, saya tidak bisa menjustifikasi, dan juga tidak bisa mengklaim. Tapi bagi Koalisi Pemantau Keadilan minimal ada beberapa hal yang masih perlu diklarifikasi soal rekrutmen ini.

DENNY J.A. :

Sebelum ke sana, tadi Bung Panda mengatakan bahwa lima orang yang dipilih, track record-nya sudah cukup baik dalam soal korupsi, Anda setuju ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Pak Panda mungkin mendapatkan juga hasil investigasi yang telah kami lakukan sekitar satu setengah bulan, yang hasilnya kami berikan ke Komisi II DPR. Sebenarnya ada beberapa harapan kami, kemarin diklarifikasi temuan kami tentang track record, termasuk lima orang ini. Kalau hasil kami walaupun mungkin belum valid, minimal bisa diklarifikasi oleh anggota dewan. Kami cukup kecewa kemarin, apa yang kami berikan dan laporkan sangat minim untuk diklarifikasi.

DENNY J.A. :

Bung Panda, tampaknya ada perbedaan pada siapa yang seharusnya terpilih ?

PANDANABABAN :

Tidak juga, kita sudah berpengalaman dalam hal ini. Waktu itu LSM-LSM memberikan data last minute, masuknya data pada waktu kami sudah mau masuk ruangan baru dikasih. Kalau pekerja yang profesional kenapa tidak beberapa minggu atau beberapa bulan yang

lalu dikasihkan kepada kita. Kemudian juga pengalaman kita sewaktu calon hakim agung membuat rumah, kita menginvestigasinya. Waktu itu ternyata cuma renovasi biasa, bukan seperti yang diinformasikan. Tapi ok, itu sudah lewat. Sekarang fakta ada lima orang putra Indonesia yang kita percaya pada mereka untuk menjalankan tugas ini.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menghuBungi salah satu anggota pimpinan yang terpilih, Bung Syahrudin Rasul. Halo Bung, selamat malam. Pertama kita ingin mendengar dari Anda sebagai orang dalam. Apa yang membuat Anda optimis bahwa KPK berbeda dengan berbagai upaya sebelumnya untuk membasmi korupsi ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Terima kasih, selamat malam juga. Yang membuat saya optimis, pertama adanya gerakan dan partisipasi masyarakat sendiri untuk memberantas korupsi. Jadi kemudian dibentuk satu komisi pemberantasan korupsi yang sangat independen dan bertanggung jawab kepada publik.

DENNY J.A. :

Dan Anda melihat gerakan yang dimotori NU dan Muhammadiyah itu sangat penting ya ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Ya, saya jadi optimis karena semua potensi masyarakat sudah “berteriak” agar korupsi diberantas di republik ini. Dengan demikian komisi ini setelah dibentuk dan dilantik, harus menyusun suatu performance agreement, kontrak kinerja dengan seluruh potensi-potensi masyarakat. Dan sebelum masyarakat bergerak ke luar, komisi ini harus memprioritaskan ke dalam.

DENNY J.A. :

Ok Bung, apa yang Anda pikirkan, yang harus dicapai oleh komisi ini selama enam bulan pertama atau setahun pertama ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Kita membuat strategi penegakan hukum, pencegahan, dan penyadaran masyarakat antikorupsi. Pertama-tama blue print-nya dulu, kemudian kita yang di dalam harus solid, bersih, dan yakin akan tugas ini. Kemudian ke luar, berkoordinasi dengan aparat- aparat dan badan-badan lain yang berwenang melakukan tugas.

DENNY J.A. :

Seberapa jauh Anda yakin ? Lembaga yang lain misalnya lembaga peradilan juga mempunyai suatu semangat yang sama untuk memberantas korupsi ini ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Saya pikir, pertama, masyarakat sudah muak dan bosan dengan korupsi, jadi KPK harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dengan seluruh potensi yang ada, supaya korupsi ini bisa diberantas. Jadi jelas apa yang akan dikerjakan tiga bulan pertama, kedua, dan bulan selanjutnya. Jadi kami akan membuat sebuah disclosure, apa yang menjadi target per waktu dengan jelas, dan itu nanti dicantumkan di website.

DENNY J.A. :

Kira-kira apa kendala yang bapak bayangkan ke depan ini, karena memang korupsi sudah lama sekali mengakar di Indonesia ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Ya, saya kira kendala pasti ada, tapi kita harus optimis dalam rangka mengatasi macam-macam kendala itu. Pertama kita harus

mengubah paradigma, menyamakan persepsi seluruh komponen yang bergerak, karena kalau persepsi terhadap korupsi berbeda itu lebih susah. Sekarang mereka dalam zone yang enak, comfort zone, kita harus mengubah paradigma ini. Mari kita bersama-sama seluruh komponen memberantas korupsi.

DENNY J.A. :

Ok pak, terima kasih banyak. Pak Panda Nababan, menurut Anda kendala apa yang mungkin dihadapi oleh komisi ini ?

PANDA NABABAN :

Terus terang saja jangan sampai kita terjebak pada satu dramatisasi, dengan nyawa terancam misalnya. Kita belum ada mafioso, belum pernah mendengar ada seorang penegak hukum yang betul-betul membongkar kasus, kemudian ditembak. Yang kedua, kendala itu pasti ada, tetapi tidak signifikan. Paling ini permainannya, kalau yang diistilahkan “mafia peradilan”, permainannya sekarang mungkin waktu penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan. Kemudian sedemikian rupa pasal-pasal ditafsirkan segala macam. Di sinilah peran KPK, karena mereka bisa menyidik dan menuntut, dan bisa diandalkan kalau melihat kelengkapan mereka. Jadi kendalanya memang di peradilan itu.

DENNY J.A. :

Ok Bung Asep, bagaimana Anda melihat kendala yang mungkin muncul supaya bapak kita juga melihat situasi ini tidak hanya hitam putih saja ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Di satu sisi saya setuju dengan Bang Panda. Jadi masalah dari lembaga-lembaga yang sekarang, memang bergerak di pengadilan, yang mungkin ada resistensi tentang hal itu, entah itu dari rivalitas

atau apa. Tapi yang paling penting dan harus dibangun adalah masalah kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Ini harus bersama-sama menggarapnya. KPK tidak akan bisa bergerak dengan sangat lancar atau optimal tanpa dukungan publik, karena memang untuk kasus korupsi harus di-pressure. Tentang public trust juga harus dipikirkan, bahwa itu pun akan menjadi suatu masalah besar kalau tidak ditunjukkan lewat kinerja yang baik dari KPK.

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Syahrudin, mengenai dua kendala mafia peradilan dan public trust yang rendah ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Ya, saya pikir itu wajar, karena selama ini macam-macam badan sudah dibentuk, tapi korupsi tetap saja terjadi. Dengan adanya itu, merupakan cambuk terhadap KPK agar pertama kali introspeksi ke dalam, bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi karena kepercayaan masyarakat terhadap kita. Dan bagi saya itu merupakan dorongan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini.

DENNY J.A. :

Bagaimana Anda bisa menilai atau berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menilai apakah lembaga Anda ini bisa efektif atau tidak efektif nantinya ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Saya setuju, kemarin ada yang berpendapat ya kita lihatlah enam sampai satu tahun begitu.

DENNY J.A. :

Apa indikatornya bahwa lembaga ini bisa efektif atau tidak efektif nantinya ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Indikatornya keberhasilan, makanya kita berlima nanti merundingkan, mendiskusikan dengan partisipasi seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen anti korupsi. Kita membuat satu kontrak kinerja, dan dari dasar kontrak kinerja itu kita mengukur keberhasilan dan kegagalannya setiap tiga bulan. Kita mengumumkan kepada publik yang kita rencanakan bersama dan juga yang sudah dihasilkan.

DENNY J.A. :

Ok, Pak, terima kasih banyak. Pemirsa Metro TV, untuk membasmi korupsi pimpinan KPK sudah dipilih oleh anggota DPR Komisi II. Bagaimanakah prospek komisi ini menghadapi korupsi yang sudah menjadi raksasa yang maha perkasa ? Di luar sana kita mendengar banyak sekali komentar-komentar yang agak negatif. Nah, kita ingin agar narasumber ini merespon komentar itu. Pertama, dari Bung Abdulgani Abdullah, wakil ketua panitia seleksi calon. Menurut beliau proses pemilihan di DPR didominasi oleh pertimbangan politik calon pimpinan, yang memiliki skor tinggi di panitia seleksi, seperti Muhammad Yamin dan Marsilam Simanjuntak justru tidak terpilih. Di studio ada Bung Panda Nababan dari DPR, bagaimana Bung, Anda meresponnya ?

PANDANABABAN :

Ini terus terang saja, saudara Gani juga mempunyai bahan omongan. Dia juga tidak mempunyai etika, dia kan panitia seleksi, dan produk mereka sudah selesai. Kalau berbicara begitu mengapa Bambang Widjajanto ? Maka lebih bagus dia tidak usah banyak berkomentar, dalam arti kata, ini adalah produk mereka. Dan kami melihat ini semua betul-betul utuh, kalau coba dikasih informasi lebih awal ke kita, maka mereka dapat bertahan. Coba berikan kepada kami scoring klien. Jadi jangan kemudian tiba-tiba memberi komentar bahwa, DPR lembaga main politik. Itu tidak sehat, apalagi dia merupakan seorang dirjen.

DENNY J.A. :

Ok, kalau mereka mengembangkan sistem scoring, kalau di DPR sendiri bagaimana prosesnya ?

PANDANABABAN :

Waktu kita berkeinginan untuk lebih intens lagi, negosiasi berkali-kali dengan panitia seleksi, baru pada menit terakhir mereka memberi kita dokumen, biodatanya, papernya, dan segala macam. Coba mereka buka sama kami semua, skoring-nya begini, apanya begini, itu pasti mempengaruhi kami. Nah kemudian waktu itu terus terang kita tidak ada scoring, waktu itu memang sudah point to point kepada orang. Jadi kalau memang saya setuju dengan ini, saya pilih dari antara sepuluh ini, Si A, Si B, saya pilih begitu. Jadi ini kebebasan anggota DPR.

DENNY J.A. :

Para anggota sudah bersepakat lebih dahulu pada tokoh-tokoh tertentu ?

PANDA NABABAN :

Tidak, karena ini prosesnya berjalan terus, kemudian ada yang mengingatkan lagi, rapat intern komisi sistemnya begini. Kita dibagi, sesudah itu sistemnya terbuka, jadi tidak ada kesempatan lagi untuk konsolidasi maupun lobbying.

DENNY J.A. :

Anda sendiri tidak heran kalau ada perbedaan dalam penilaian di panitia seleksi ini ? Tokoh tertentu dapat tinggi sekali, tapi di DPR justru rendah sekali dukungan politiknya ?

PANDA NABABAN :

Kita pun tidak tahu itu, bahwa ada skor-skor saja, saya baru tahu sekarang. Kalau itu diberikan ke kita pada waktu itu oleh panitia seleksi, tentu bisa menjadi masukan yang baik.

DENNY J.A. :

Menarik sekali itu, bagaimana menurut anda, dengan komentar bahwa DPR terlalu politis pertimbangannya ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Buat saya sebenarnya masalah yang paling jelas diproses, entah itu panitia seleksi maupun DPR. Kalau kita berbicara masalah good governance, seperti transparansi partisipatif dan akuntabel. Sebenarnya masalah akuntabilitas menjadi reasoning seseorang untuk lolos atau tidak. Tentang masalah yang cukup banyak di beritakan media, yaitu masalah urutan peringkat dari sepuluh besar itu. Sedangkan di DPR, yang menjadi permasalahan adalah bahwa ini prosesnya bukan hanya di KPK, sebelumnya ada Mahkamah Konstitusi, dan hakim agung. Satu hal yang paling menonjol adalah parameter yang dibuat ataupun yang dipunyai oleh DPR. Contoh nyata misalnya di investigasi ataupun verifikasi rumah. Sebenarnya saya sempat juga menanyakan pada waktu itu ke beberapa anggota dewan, apakah ukuran seseorang itu buruk ? Dari hasil investigasi itu apakah hanya mempunyai satu mobil dianggap buruk atau memang orang yang rumahnya sederhana dianggap baik ?

DENNY J.A. :

Jadi Anda melihat jelas dalam proses di DPR tidak dikembangkan sebuah parameter yang di publikasikan lebih dulu ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Betul, dan itu sebenarnya juga yang harus menjadi terobosan Bang Panda, bahwa proses pedoman, panduan pemilihan pejabat publik

bisa dirumuskan secara baku. Kalau di eksekutif bisa dalam bentuk Keppres atau di legislatif dalam bentuk undang-undang. Sehingga nanti tidak selalu terhambat, seringkali sekarang selalu mendengar kata-kata karena Tatib DPR yang tidak menampung dan sebagainya.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Panda, apakah sebaiknya memang harus dikembangkan sebuah parameter lebih dahulu untuk fit and proper test di DPR ?

PANDA NABABAN :

Kita mempunyai standar dan mekanisme. Kita juga terlibat dalam pemilihan Hakim Agung, Kapolri, dan lain sebagainya. Itu sudah ada scoring-nya, sistemnya, maupun parameternya. Hanya dalam hal ini, kembali dari tadi kita membicarakan soal kepercayaan. Saya sederhana saja dan itu juga saya katakan kepada KPK, kalau kita cerdas pasti menjadi pemenang dalam menghadapi persoalan korupsi. Kalau kita peduli dengan reaksi masyarakat, kita pasti dicintai. Kalau kita melihat KPK bisa peduli, jujur, dan smart, tentu akan sukses.

DENNY J.A. :

Jadi membutuhkan waktu yang cukup untuk fair ya?

PANDANABABAN :

Tidak juga, tadi dikatakan apakah enam bulan atau satu tahun. Kalau mereka bekerja signifikan, satu atau dua minggu saja, trust itu bisa tumbuh.

DENNY J.A. :

Bung Syahrudin, bagaimana Anda menilai komentar bahwa DPR ini seleksinya terlalu politis. Anda sebagai orang yang dipilih juga merasakan hal itu ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Ini yang lebih tepat komentar yang memilih.

DENNY J.A. :

Ok sekarang kita kumpulkan lagi pandangan-pandangan dari penelepon. Pertama dari Bung Musa di Medan. Halo, Bung, selamat malam, silakan.

MUSA :

Halo, selamat malam. Saya ingin menanyakan kepada KPK, apakah nanti beliau ini berani melakukan terlebih dahulu prioritas utama pemeriksaan secara pembuktian terbalik terhadap lembaga nomor satu di republik, yaitu kepresidenan, menteri-menteri, dan DPR. Kedua, sepertinya lima orang ini nanti tidak mampu untuk seluruh Indonesia, pasti ada kepanjangan tangannya. Saya ingin mengaitkan dan membandingkan pada masa dulu sewaktu BPKP masih memiliki kewenangan yang leluasa, saya melihat korupsi tidak terlalu gila-gilaan seperti sekarang. Saya mohon nanti kepada KPK akan mempertimbangkan kembalinya kewenangan itu.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Penelepon kedua, Bung Fumbaykuan dari Papua. Halof Bung, selamat malam, silakan.

FUMBAYKUAN :

Selamat malam. Diskusi malam ini menarik sekali. Sebenarnya pembentukan KPK ini sangat cocok untuk negara kita, karena korupsi tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah sudah merajalela, khususnya di Papua. Banyak sekali bantuan yang datang dari pusat, habis di kalangan elit politik maupun eksekutif. Hanya sangat susah untuk membuktikan karena semuanya saling menutupi. Saya merasa KPK sangat relevan. Hanya kami sulit mempercayai lagi, seperti Bawasda

untuk di kabupaten maupun DPR, karena semua oknum terlibat korupsi juga.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak. Pertama kita ke Pak Syahrudin, pertanyaan dari Bung Musa sangat mendasar, apakah bisa komisi ini memulai kerjanya pertama-tama justru kepada yang mengangkat mereka sendiri, yaitu presiden dan DPR ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Terima kasih Saudara Musa. Seperti saudara ketahui dalam UU Tindak Pidana Korupsi itu yang dimaksud dengan pelaku korupsi adalah setiap orang dan korporasi yang melakukan pelanggaran hukum, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri. Jadi siapa saja yang melanggar hukum, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri itu dianggap korupsi. Untuk itu harus ada bukti yang cukup, kemudian dilakukan penyelidikan, dan penyidikan penuntutan. Pada waktu proses pembuktian terbalik, adalah pada waktu di sidang setelah itu.

DENNY J.A. :

Setelah begitu banyak yang bisa diteliti, sebagaimana tadi menurut mereka dimulai dengan strategi yang sangat strategis sekali, dimulai dengan menyelidiki Presiden RI.

SYAHRUDDIN RASUL :

Kalau memang ada bukti, bisa saja. Untuk itulah saya sejak awal mengatakan, bahwa kita membuat suatu performance agreement, suatu kontrak kinerja. Komisi ini membuat satu kontrak kinerja, kita menyusun dan meminta partisipasi dari seluruh masyarakat untuk memberikan bukti.

DENNY J.A. :

Kita sekarang ke Bung Panda Nababan, bagaimana, Bung, Anda menanggapi ?

PANDA NABABAN :

Tapi saya perlu menyampaikan bahwa Presiden Megawati sikapnya jelas. Saya ketemu sewaktu kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PDIP, bersama saya Saudara Teras Narang dan Ketua Fraksi Tjahyo Kumolo. Saya bertanya, “Dari enam belas orang calon pimpinan KPK ini, siapa yang menjadi pilihan kita ?” Dijawab oleh Mbak Mega, “Tidak ada lagi kepentingan kita untuk meminta Si A atau Si B, karena kita tidak mempunyai masalah, tidak ada yang kita khawatirkan.” Besoknya di rapat pleno PDIP, saya menyampaikan pesan ketua umum, supaya dalam pemilihan pimpinan KPK tidak dibebani kepentingan apa pun. Kita diberikan kepercayaan untuk memilih siapa saja.

DENNY J.A. :

Anda setuju memang dimulai dari pimpinan tertinggi untuk diinvestigasi ?

PANDA NABABAN :

Dari siapa saja kita tidak keberatan. Jika memang mau dimulai dari presiden, jangan politicking sambil berteriak kepada KPK untuk memeriksa ini, padahal tidak ada bukti. Jangan seperti itu.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Asep ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Pertama-tama public trust harus dibangun. Memang akhirnya masalah kinerja terutama konkretisasi dari janji-janji yang

dikumandangkan oleh semua pimpinan pada waktu fit and proper test itu dibuktikan. Dan itu akhirnya juga akan masuk ke komitmen, bahwa kemudian mereka kemarin menandatangani yang terakhir kalau kemudian ada hal-hal yang dilakukan sebelum ini tentang perbuatan tercela dari pimpinan ataupun segala macam, mereka berani untuk mundur, mengundurkan diri ataupun diberhentikan. Itu dilakukan kalau memang terbukti seperti itu. Di sisi lain juga melakukan konkritisasi kerja, siapa pun orangnya yang korupsi, harus diperkarakan, dan ini bisa menimbulkan public trust yang cukup.

DENNY J.A. :

Public trust lebih cepat tumbuh bila dimulai dengan menangkap ikan besar, ya ?

ASEP RAHMAT FAJAR :

Tapi yang paling penting, dari parlemen juga berharap masalah standarisasi panduan pejabat publik itu mungkin bisa dilegalkan, mungkin dalam undang-undang atau Keppres, sehingga masyarakat mempunyai satu pegangan. Kami dari Koalisi Pemantau Peradilan untuk ke depan jelas, tetap akan bertindak controlling dan supporting terhadap kinerja dan person KPK.

DENNY J.A. :

Para narasumber, apa yang ingin Anda sampaikan soal pemberantasan korupsi di Indonesia ?

SYAHRUDDIN RASUL :

Marilah kita bersama-sama saling membahu memberikan kontribusi dalam memberantas korupsi. KPK tanpa partisipasi masyarakat tidak ada manfaatnya. Jadi perlu partisipasi publik dan berkoordinasi dengan seluruh aparat dalam rangka memberantas korupsi.

PANDA NABABAN :

Permintaan saya satu, kita memberi kesempatan dan dukungan kepada KPK. Kita berikan komentar-komentar yang memperkuat dan membesarkan hati lima orang ini, memberikan dokumen-dokumen indikasi korupsi. Kita melihat karena kita juga mengawasi KPK, pers juga mengawasi, semua mengawasi, betul tidak seperti yang dikatakan Asep tadi, janji mereka waktu fit and proper test dan mereka juga menandatangani pernyataan di atas segel. Maka sekarang marilah kita semua membantu KPK.

ASEP RAHMAT FAJAR :

Kita sekarang hanya bisa melihat kinerja KPK ke depan. Kawan-kawan LSM tetap bersikap sama, akan mengontrol sekaligus juga menagih komitmen-komitmen KPK, baik dalam hal kinerja maupun personal, seperti yang telah disampaikan di fit and proper test maupun ditandatangani di lembaran negara.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara dan pemirsa Metro TV. Kita mengucapkan selamat kepada semua anggota KPK yang baru saja terpilih. Dan memang tampaknya untuk meningkatkan public trust sejak awal, perlu sekali lembaga ini membuat kejutan di enam bulan pertama atau setahun pertama, misalnya dengan menangkap ikan besar pelaku korupsi.

Pemirsa Metro TV yang budiman, sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Kamis minggu depan.

MENGUSUT KEKAYAAN PEJABAT

Tanggal : 21 November 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Yusuf Syakir (Ketua KPKPN), Agun Gunandjar
Sudarsa (F-PG DPR), Albert Hasibuan (Pakar Hukum),
Muladi (Pakar Hukum)

Sebuah lembaga telah dibentuk untuk memantau dan memeriksa kekayaan pejabat negara. Lembaga itu adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Lembaga ini di satu sisi menunjukkan tekad bulat pemerintah untuk memberantas dan mencegah korupsi. Namun pada sisi lain, pembentukan lembaga ini juga menunjukkan betapa serius problem korupsi di Indonesia dan betapa sulitnya upaya untuk memberantasnya. Reformasi sudah berhasil mengubah konstitusi, mengubah wajah MPR, lembaga presiden, dan DPR. Tetapi reformasi belum berhasil mengentaskan bangsa ini dari kubangan problem korupsi. Berbagai data menunjukkan bahwa tingkat korupsi justru meningkat pada era reformasi. Publik tentu berharap efektivitas KPKPN untuk menekan laju korupsi, dengan mewajibkan para pejabat publik untuk secara terbuka dan reguler melaporkan kekayaannya. Namun sederet pertanyaan tentang KPKPN perlu dijawab terlebih dahulu. Siapa yang harus mengontrol KPKPN seandainya lembaga ini menjadi partisan dan memojokkan tokoh politik tertentu? Apakah KPKPN hanya mempunyai kewenangan memeriksa kekayaan pejabat

publik saja, atau juga mempunyai kewenangan menyidik ? Apakah kewenangan KPKPN sampai pada otoritas untuk penuntutan ? Apakah sebaiknya KPKPN menjelma menjadi komisi anti korupsi yang sangat berkuasa ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Mengapa korupsi begitu sulit diatasi ? Reformasi sudah mengubah konstitusi, mengubah wajah MPR, lembaga presiden, dan DPR. Tetapi reformasi belum berhasil mengubah praktek korupsi. Sebelum reformasi, di tahun 1998, korupsi kita sudah sangat buruk. Bahkan lembaga internasional memberikan skor 2,0. Namun setelah reformasi, di tahun 2002 korupsi kita bertambah buruk lagi, dan skornya merosot menjadi 1,9. Padahal di era reformasi pers sudah bebas, DPR sudah dipilih secara demokratis, dan kita pun sudah mempunyai KPKPN. Apa yang salah ? Itulah topik kita malam ini. Untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Sebuah lembaga dibentuk untuk memantau dan memeriksa kekayaan pejabat negara, KPKPN. Lembaga ini hasil konkret semangat gerakan reformasi untuk memberantas korupsi khususnya di kalangan pejabat negara. Namun empat tahun reformasi, korupsi bertambah hebat dan meluas. KPKPN tampak seperti sebuah skrup kecil yang hendak merobohkan dinding raksasa. Meskipun sulit bagi KPKPN untuk memberantas kultur korupsi, namun lembaga ini dapat melukai citra pejabat tinggi negara secara individual.

Lihatlah apa yang terjadi dengan anggota DPR/MPR yang tidak melaporkan kekayaannya. Sikap agresif KPKPN membuat para anggota DPR/MPR dipermalukan lewat opini publik. Sebagai akibatnya, para anggota DPR/MPR kemudian berbondong-bondong menyerahkan daftar kekayaannya. Lihat pula apa yang dilakukan

KPKPN terhadap Jaksa Agung A. Rahman. Walaupun belum pada kesimpulan final, hasil sementara KPKPN bocor ke publik luas. Ada kekayaan pribadi Jaksa Agung yang belum dilaporkan. Sekali lagi Jaksa Agung beserta keluarganya dipermalukan secara publik. Politik nasional sempat gonjang-ganjing meributkan apa sebaiknya Jaksa Agung dipecat presiden. Kini KPKPN terbang lebih tinggi lagi. Lembaga ini siap memeriksa kekayaan RI-1, Presiden Megawati Soekarnoputri. Pemeriksaan resmi belum dilakukan, namun politik sudah gonjang-ganjing. Spekulasi mengenai harta pribadi Megawati yang belum dilaporkan menghiasi media. Sebelum dilakukan verifikasi fakta, pers sudah memberikan hukuman berdasarkan spekulasi itu.

Siapa yang harus mengontrol KPKPN ? Bagaimana jika KPKPN menjadi partisan dan memojokkan tokoh politik tertentu ? Anggota Komisi II DPR bahkan sempat mengeluarkan gagasan agar KPKPN dibubarkan. Ada tiga isu yang membuat kontroversial. Pertama, publik belum melihat standar tentang siapa tokoh yang harus diperiksa KPKPN terlebih dulu. Mengapa tidak memeriksa terlebih dahulu kementerian BUMN misalnya ? Mengapa presiden diperiksa terlebih dahulu ? Mengapa tidak mendahulukan pemeriksaan terhadap ketua MPR atau DPR ? Siapa yang diperiksa lebih dahulu ini penting karena efek politik pemeriksaan itu. Kedua, bocornya hasil pemeriksaan kekayaan kepada pers. Sementara KPKPN belum sampai pada tahap kesimpulan, pers sudah mendapatkan informasi serta mengembangkan pemberitaan. Akibatnya, sang pejabat sudah menderita padahal belum tentu bersalah. Ketiga, soal kewenangan KPKPN. Apakah KPKPN hanya mempunyai kewenangan memeriksa saja, atau juga mempunyai kewenangan menyidik seperti sekarang ? Ataupun kewenangan itu ditambah lagi dengan otoritas untuk penuntutan ? Apakah sebaiknya KPKPN menjelma menjadi komisi anti korupsi yang sangat berkuasa ? Ataupun KPKPN dibubarkan saja dan diganti Komisi Anti Korupsi. Pro kontra atas KPKPN terus berlangsung. Sementara isu korupsi berjalan terus.”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, pertama kita akan menghuBungi narasumber, Bung Yusuf Syakir. Kita sudah mempunyai KPKPN, tetapi mengapa korupsi di tahun 2002 justru bertambah buruk, apa yang salah ?

YUSUF SYAKIR :

Sebetulnya korupsi di negeri ini sudah pada tingkat akut dan kronis, jadi tidak bisa diberantas dengan usaha yang bersifat instan. Harus ada terobosan yang lebih keras lagi dibanding dengan KPKPN. Jadi harus ada sebuah institusi yang lebih kuat, yang diberi kekuasaan yang lebih besar, yaitu Komisi Anti Korupsi yang sekarang sedang dibahas di DPR. Bukannya KPKPN kurang memadai. Memang KPKPN bagian kecil dari desain untuk pemberantasan korupsi. Kalau bagian kecil ini bekerja sendiri, itu tidak mungkin. Komisi Anti Korupsi akan lahir beberapa bulan mendatang. Sedangkan KPKPN baru memeriksa bulan September 2001. Penyakitnya begitu luar biasa. Pemberantasan korupsi tidak bisa instan, sementara kekuasaan KPKPN terbatas pada pemeriksaan.

DENNY J.A. :

Dalam jangka panjangnya, apakah Anda optimis KPKPN akan memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi korupsi ?

YUSUF SYAKIR :

Pasti itu. Karena seseorang yang sudah diperiksa dan diumumkan kekayaannya, kalau dia akan menerima uang suap 1-2 milyar, mukanya mau ditaruh di mana. Akan ketahuan, karena rekening dia sudah dicatat di KPKPN, kalau dimonitor terus oleh KPKPN. Jadi fungsi ini akan memaksa orang untuk jujur dan terbuka, dan InsyaAllah terbebas dari KKN.

DENNY J.A. :

DPR menganggap KPKPN sudah kebablasan. Jaksa Agung belum tentu bersalah tetapi sudah babak belur karena kerja KPKPN, dan KPKPN dianggap membocorkan dokumen negara ?

YUSUF SYAKIR :

Sebenarnya ada sudut pandang yang berbeda saja. Orang yang belum jelas bersalah oleh media massa sudah dibuka lebar. Itulah zaman keterbukaan. Keterbukaan kita memang seperti itu. KPKPN tidak ada artinya tanpa dukungan opini publik dan media massa. Karena KPKPN harus memperoleh masukan dari masyarakat. Jadi menurut pendapat saya yang terjadi masih wajar dan KPKPN tidak melampaui batas-batas otoritasnya.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Agun Gunandjar Sudarsa dulu. KPKPN baru mau unjuk gigi, tetapi mengapa Anda menyarankan agar lembaga ini dibubarkan ?

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Pertama, kita harus bisa menempatkan KPKPN ini pada posisi mana dalam strategi pemberantasan korupsi. Kita mengenal ada strategi preventif dan represif. Dan KPKPN ini sebenarnya pada posisi yang preventif. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan KPKPN sejauh ini sudah terlalu jauh melampaui kewenangannya., dan melakukan banyak fungsi represif. Misalnya ketika dia melakukan tugas pendataan terhadap Kejaksaan Agung. KPKPN memang mempunyai kewajiban untuk meminta daftar harta kekayaan tersebut, tetapi dia tidak memiliki upaya paksa. Saya melihat bahwa pembentukan opini itu sudah begitu sistematis seolah-olah bahwa sesuatu yang belum dilaporkan, bisa menjadi alat pemaksa untuk membuat dia dipanggil, dan menjadi persoalan ketika dia belum juga memenuhi panggilan itu. Ini yang menjadi polemik seolah-olah dia sudah divonis bersalah. Dan

saya pikir kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPKPN itu sifatnya edukatif. Artinya melaporkan, tidak melaporkan, datang atau tidak datang, buat KPKPN sebenarnya sudah cukup untuk menjadi laporan kepada pimpinan. Kalau saya lebih melihat ke implementasi dengan melihat pemberitaan di media. Contohnya ketika Kompas sudah memberitakan sebaiknya Jaksa Agung dicopot atau mengundurkan diri. Padahal masalahnya belum jelas benar.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, sebelum ke Anda lagi, kita akan hubungi Bung Yusuf Syakir. Anda dianggap melampaui wewenang dalam kasus Jaksa Agung, bagaimana ?

YUSUF SYAKIR :

Masing-masing dari kita bebas berpikir dan berbicara. Menurut Mas Agun Gunandjar Sudarsa begitu, tetapi saya tidak melihat kami melampaui wewenang. Karena di dalam UU No.28 Tahun 1999, bab VIII, prinsip-prinsip asas umum pemerintahan negara antara lain keterbukaan. Keterbukaan artinya aparat kenegaraan harus membuka diri kepada masyarakat, tidak boleh menutup diri.

DENNY J.A. :

Baik, ini mungkin wilayah abu-abu. Kita ke Bung Agun Gunandjar Sudarsa lagi. Tampaknya Komisi Anti Korupsi akan dilahirkan tahun ini. Bisa bercerita sedikit ?

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Mengapa saya mengatakan sebaiknya KPKPN dibubarkan ? Karena kita ingin menempatkan Komisi Pemeriksa ini sebagai bagian strategi penegakan hukum. Namun tuntutan publik menghendaki kewenangan-kewenangan yang berlebihan, kalau perlu sampai memeriksa dan memberikan sanksi. Saya menangkap aspirasi publik

begitu, oleh karena itu saya menyarankan agar KPKPN dibubarkan dan dibentuk Komisi Anti Korupsi/Komisi Pemberantasan Korupsi di mana nantinya KPKPN itu menjadi bagian. Tentunya menurut pendapat kami, komisi ini bisa berjalan terus sampai Komisi Anti Korupsi/Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan otomatis nanti pada tahapan berikutnya akan meleburkan diri.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Yusuf Syakir, Anda setuju jika lembaga Anda ini sebentar lagi akan dileburkan ?

YUSUF SYAKIR :

Bagi saya tidak ada masalah, apakah KPKPN akan berdiri sendiri atau bergabung di mana pun. Yang penting harus ada institusi yang ditugasi memeriksa dan memonitor kekayaan pejabat negara. Itu prinsipnya.

DENNY J.A. :

Ok, kita sekarang menghubungi pakar hukum Bung Albert Hasibuan. Halo, selamat malam. Kita sudah mempunyai KPKPN, tapi korupsi tahun 2002 justru bertambah buruk menurut standar internasional. Mengapa ini terjadi ?

ALBERT HASIBUAN :

Halo, selamat malam. Ya, mungkin karena KPKPN baru saja bekerja, artinya secara formal dia baru bekerja memeriksa harta para pejabat. Oleh karena itu seharusnya ditingkatkan cara kerjanya. Kalau kita melihat UU No.28 Tahun 1999, pasal 17, di situ ada serangkaian tugas dan wewenang KPKPN, mulai dari konfirmasi, penyelidikan, sampai kepada pembuktian terbalik. Jadi kalau semua ini dilakukan, saya pikir secara efektif dia akan berguna mencegah tindakan-tindakan korupsi.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda, KPKPN belum benar-benar maksimal menggunakan semua kewenangannya ? Lalu apakah sudah memadai untuk bekerja efektif, ataukah perlu ditambahi kewenangan KPKPN ?

ALBERT HASIBUAN :

Selama ini ada persepsi bahwa KPKPN hanya sekedar mendaftarkan harta para pejabat negara. Padahal tidak demikian. Tugas dan wewenangnya sangat luas dan kalau digunakan secara umum, maka saya rasa tugas KPKPN dalam hal ini mencegah adanya tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan, nepotisme bisa berlangsung dalam waktu tertentu, karena tugas KPKPN bukan hanya sekedar administrasi harta pejabat, tetapi juga menemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian saya rasa kita belum perlu menambahkan kewenangan KPKPN. Misalnya, saya mendengar adanya kewenangan penyidikan, saya pikir itu nanti dulu. Tetapi kalau KPKPN menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sampai dengan pembuktian terbalik, di sini bisa saja KPKPN itu berlangsung secara efektif dan tugasnya menemukan petunjuk-petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya pikir kalau ini dilakukan, dalam tataran tertentu kita merasakan efektivitas, dan bisa saja akan berkurang.

DENNY J.A. :

Kita juga melihat setelah reformasi, kita semakin mempunyai banyak undang-undang dan banyak komisi, tetapi korupsi juga tidak berkurang. Apa yang salah sebenarnya ?

ALBERT HASIBUAN :

Salahnya itu 'NATO' : no action talk only, no action legislation only. Tidak ada tindakan tetapi undang-undang yang diperbanyak. Jadi kelemahannya pada law enforcement, dan dalam konteks yang negatif kita bisa mengatakan bahwa kita kurang bertindak secara efektif untuk memberantas korupsi.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, nanti kita kembali ke Anda lagi. Selanjutnya kita menghuBungi pakar hukum yang lain, Bung Muladi. Selamat malam, Bung ? Kita sudah mempunyai KPKPN, tetapi standar korupsi kita menurut dunia internasional semakin buruk. Apa yang salah ?

MULADI :

Selamat malam, Bung Denny. Saya setuju dengan saudara Agun Gunandjar Sudarsa dan Pak Yusuf Syakir, bahwa KPKPN itu hanya salah satu aspek saja dalam pemberantasan korupsi dalam segi pre-emptive. Tetapi dari segi kelemahan-kelemahan yang lain, paling tidak ada tiga hal yang menonjol, pertama, kelemahan di dalam law enforcement. Sanksinya tidak mantap, koruptor-koruptor yang di bawa ke pengadilan kecil-kecil dan tidak menonjol, di samping ada penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya administratif terhadap koruptor. Kedua, pengawasan. Sistem pengawasan yang kurang tepat yang sifatnya internal. Maka pengawasan masyarakat menjadi penting. Ketiga, budaya tidak bertanggung jawab. Ini letaknya di luar penegakan hukum, jadi culture of responsibility. Saya kira para ahli perilaku sosial bisa turut berperan dalam masalah ini.

DENNY J.A. :

Jadi ada tiga lingkungan besar, masalah law enforcement, sistem pengawasan, dan budaya tidak bertanggung jawab. Mengenai kewenangan KPKPN sendiri, Anda mengatakan di Kompas edisi 24 Oktober bahwa keberadaan KPKPN perlu ditinjau kembali ?

MULADI :

Saya salah seorang yang turut berbahagia karena ikut membantu menyelesaikan undang-undang, sewaktu menjadi Menteri Kehakiman. Bahwa KPKPN sudah menunjukkan jati dirinya dan sudah mempunyai nilai sosiologis. Jadi kalau dibubarkan dalam arti diintegrasikan saya setuju. Tetapi mengenai kewenangan, saya kira bukan kewenangan

penyelidikan dalam arti KUHAP, untuk menemukan suatu peristiwa dan ditindaklanjuti dengan penyidikan, sesuai definisi KUHAP. Tetapi masih preliminary, masih pemeriksaan, dan merupakan suatu sub sistem dalam suatu jaringan sistem peradilan pidana. Tetapi ada satu eksekutif kemungkinan pelanggaran terhadap the right of privacy, juga freedom of information. Jadi sesuatu yang belum diumumkan dalam berita negara tetapi sudah bocor ke pers. Dan kalau pihak KPKPN mengakui ini bagian dari pressure supaya lebih kuat, saya kira itu suatu proses dan harus dilembagakan. Saran saya, lembaganya dipertahankan dan disempurnakan di masa depan. Soal Komisi Anti Korupsi ini, sebenarnya mempunyai tugas dan jaringan yang luas, tidak hanya represif sifatnya, tetapi juga preventif, termasuk civic education, dan sebagainya. KPKPN seperti yang disampaikan Bung Agun Gunandjar Sudarsa tadi betul, harus dilebur. Tetapi saya tidak setuju kalau nama KPKPN dihilangkan, karena nama ini sudah trade mark dan mempunyai nilai sosiologis. Dilebur di mana pun, KPKPN harus tetap eksis namanya.

DENNY J.A. :

Baik, Pak Muladi, kita akan kembali ke Anda. Kita kembali ke Bung Agun Gunandjar Sudarsa. Tadi Pak Muladi mengatakan ada tiga hal yang menjadi penghalang besar bagi korupsi; law enforcement, pengawasan, dan budaya. Dengan tiga hal yang masih melekat di dunia kita, apakah Komisi Anti Korupsi harus mempunyai kewenangan yang besar agar bisa efektif bekerja ?

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Justru itulah kita melihat bahwa strategi besar dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus diletakkan kembali dari segi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu amanat pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999, walaupun terlambat, InsyaAllah dalam masa akhir sidang ini bisa dibentuk Komisi Anti Korupsi. Komisi ini paling tidak memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kedua, fungsi mengoordinasikan seluruh instansi yang

berwenang dalam rangka pemberantasan korupsi. Ketiga, memiliki kewenangan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi. Keempat, tindakan pencegahan. Dan kelima, kewenangan memonitor seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara. Komisi ini nantinya akan dibagi menjadi empat bidang. Mulai dari bidang pencegahan. Oleh karena itu mungkin Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara akan masuk di bidang pencegahan ini dengan melakukan pendataan kekayaan, pemeriksaan awal, dan sebagainya, untuk mencegah agar pejabat publik tidak melakukan korupsi. Ada bidang penindakan, penyuluhan sampai bidang edukatif.

DENNY J.A. :

Kita tahu bahwa power komisi ini begitu besar, tetapi masalah law enforcement seandainya ini terkait dengan korupsi empat partai besar, bagaimana bisa diatasi ?

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Oleh karena itu di dalam rancangan undang-undang yang sudah kita bahas juga ada yang dimaksud strategi pre-emptive; membangun kode etik pada masing-masing organisasi profesi, organisasi politik untuk semuanya mencantumkan semangat anti korupsi di berbagai organisasi itu. Jadi mulai dari rekrutmen awal di partai politik sebelum menjadi pejabat negara mereka sudah terkena kewajiban itu, sehingga diharapkan korupsi akan bisa dikikis habis karena keanggotaannya harus melangkahi prosedur-prosedur positif yang berlaku selama ini, contohnya KUHAP. Jadi penyelidikan oleh anggota Komisi Anti Korupsi yang juga polisi, penuntutannya oleh jaksa. Namun polisi dan jaksa yang akan masuk adalah mereka yang sudah terseleksi secara ketat sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang ke Bung Yusuf Syakir. Komisi ini mempunyai power yang begitu besar, kira-kira kendala apa lagi yang bisa menghalangi

mereka untuk membongkar dan menghabisi korupsi di tanah air ?

YUSUF SYAKIR :

Kalau kita melihat kekuasaannya memang luar biasa. Tenaga intinya di penyidik dan penuntut. Penyidik diambil dari kepolisian, dan penuntut dari kejaksaan. Sekarang ini saya melihat pernyataan Kejaksaan Agung di Komisi II DPR yang masih meragukan Komisi Anti Korupsi. Kalau nanti Komisi Anti Korupsi ada, tugas kejaksaan apa ? Kelihatannya pemerintah –Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Polri– belum kompak. Ini yang saya pesankan betul, karena nanti tenaganya dari kejaksaan dan kepolisian. Inti Komisi Anti Korupsi di sana. Jika nanti kejaksaan dan kepolisian hanya memberikan orang-orang kelas dua, bisa runyam.

DENNY J.A. :

Baik sebelum kita lanjutkan, kita ke penelepon dulu. Halo, Pak Taufik ? Silakan.

TAUFIK :

Halo, Pak Denny. Saya sebenarnya sudah bosan dengan masalah korupsi, seharusnya ada penegakan hukum yang benar-benar untuk koruptor. Saya kira KPKPN bisa dibubarkan karena pekerjaannya tidak jelas.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, kita beralih ke penelepon lainnya. Silakan, Bung.

MARULI MALAO :

Selamat malam. Menurut saya kalau tugas dan wewenang KPKPN sebatas mengumpulkan bukti dan melaporkan kekayaan pejabat negara, mendingan dibubarkan saja, karena hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kalau untuk penyelidikan ada pada

Kejaksaan Agung dan Kepolisian itu percuma, karena tidak bisa dibantah lagi bahwa Kejaksaan Agung adalah sarang penyamun. Kalau tidak mempunyai wewenang yang lebih tinggi sampai kepada penuntutan, lebih baik dibubarkan saja. Karena kasus-kasus yang selama ini ditangani Kejaksaan Agung tidak ada yang tuntas.

DENNY J.A. :

Baik, kita ke penelepon berikutnya. Halo ? Silakan, Bung.

SUSILO :

Selamat malam. Saya akan mengomentari dua hal. Pertama, untuk Pak Yusuf Syakir, saya kira kita harus memandang KPKPN lebih obyektif lagi, bahwa sebenarnya yang kurang jelas di sini adalah tidak adanya law enforcement. Seharusnya KPKPN bersinergi dengan BPKP atau badan-badan lain yang berwenang untuk menindaklanjuti. Jadi kita tidak bisa begitu saja menyalahkan KPKPN. Paling tidak yang di sana sudah mengawali, sesuatu yang sangat perlu ditindaklanjuti badan-badan lain. Namun yang kita lihat di sini, hasil kerja KPKPN dibiarkan begitu saja. Jadi sebenarnya kalau kita melihat komentar Pak Albert Hasibuan, sebenarnya wewenang KPKPN itu lebih dari itu.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak Bung. Pemirsa Metro TV kita menghubungi kembali Bung Albert Hasibuan. Kita melihat sejak reformasi aturan-aturan hukum semakin banyak, tetapi korupsi juga semakin meningkat, dan penyebabnya law enforcement. Bagaimana menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya ?

ALBERT HASIBUAN :

Bung Denny, saya teringat pembicaraan kita ini sama seperti kita dahulu mempersiapkan UU Anti Korupsi. Sama persis, dan analisisnya juga sama yaitu karena law enforcement, penyelidikan,

dan sebagainya. Waktu itu mantan Wakil Presiden, Bung Hatta, mengatakan bahwa korupsi telah membudaya. Karena membudaya, maka segala macam analisa menjadi kurang mengena. Oleh karena itu saya melihat yang juga penting adalah political will. Adanya politics empowerment yang mendukung pemberantasan korupsi. Jadi itu yang utama, political will untuk menciptakan politics empowerment untuk memberantas korupsi. Dengan adanya political will itu maka segala sesuatu akan berjalan dengan tepat. Korupsi yang telah lama terjadi di Indonesia, harus diberikan semacam terapi, dan terapi itu adalah political will. Saya juga menyesal bahwa political will untuk memberantas korupsi dari pemimpin nasional tidak terlihat sejauh ini.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Albert Hasibuan, kita beralih ke Pak Muladi. Bagaimana law enforcement ini harus diperbaiki ?

MULADI :

Saya kira banyak sekali caranya. Pertama, bagaimana kita menegakkan independensi dan integritas lembaga penegak hukum. Kedua, kualitas perundang-undangan yang baik. Saya kira kita sudah mengusahakan kualitas perundang-undangan ini. Ketiga, sarana dan prasarana, termasuk keberadaan Komisi Anti Korupsi. Ini salah satu usaha kita yang terakhir. Kalau ini gagal sudah kiamat. Keempat, mental dan kualitas penegak hukum. Sistem rekrutmen penegak hukum harus diperbaiki. Dan kelima, partisipasi masyarakat. Masyarakat jangan hanya mengkritik, karena masyarakat juga banyak melakukan korupsi. Saya kira sistem rekrutmen menjadi sangat penting. Harus ada special agency dalam perekrutan penegak hukum yang juga diawasi oleh masyarakat. Sehingga penegak hukum yang mentalnya masih kurang bisa ditransformasikan menjadi sangat kuat dalam waktu yang relatif cepat.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih, Bung Muladi. Bung Agun Gunandjar Sudarsa, apa yang Anda bayangkan tentang Komisi Anti Korupsi ini dalam hal penegak hukumnya ?

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Justru Komisi Anti Korupsi hadir karena kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sudah pada titik yang begitu rendah. Oleh karenanya dibutuhkan hadirnya Komisi Anti Korupsi dengan harapan bisa melakukan hal-hal yang sangat signifikan. Dan juga perekrutannya harus selektif dan persyaratannya pun perlu diperketat lagi.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, terima kasih. Kita nanti kembali ke Bung Yusuf Syakir. Kita hanya akan mendengar komentar-komentar pendek saja dari masing-masing pembicara. Dimulai dari Bung Yusuf Syakir, silakan.

YUSUF SYAKIR :

Masyarakat kita kalau berbicara korupsi, nadanya seperti putus asa. Jadi satu-satunya cara adalah memperkuat political will pimpinan nasional kita. Tanpa political will pimpinan nasional kita, non sense itu bisa terjadi.

AGUN GUNANDJAR SUDARSA :

Saya pikir peran serta masyarakat masih harus terus dibangun. Oleh karena itu kami menghimbau agar masyarakat terus memantau penanganan masalah korupsi.

ALBERT HASIBUAN :

Saya setuju dengan Pak Yusuf Syakir bahwa political will adalah hal utama, tetapi di sini empowerment dari rakyat juga

perlu dikembangkan sehingga menyatu dan terlihat adanya arah pemberantasan korupsi. Sementara KPKPN bekerjalah dengan baik dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Albert Hasibuan, masalah leadership, partisipasi, dan masalah kewenangan. Sekarang kita ke Bung Muladi, silakan.

MULADI :

Apapun bentuknya saya kira KPKPN harus tetap dipertahankan, karena ini merupakan amanat reformasi melalui Tap MPR No.11 dalam rangka pemberantasan KKN.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada pembicara. Pemirsa Metro TV, sejak reformasi aturan tentang korupsi terus bertambah, lembaga pengawas korupsi juga bertambah, tetapi sayangnya korupsi juga bertambah. Kita berharap nantinya KPKPN dan juga Komisi Anti Korupsi memulai sebuah tradisi yang tak mudah yaitu melawan kekuasaan yang paling berkuasa di negeri ini, yaitu korupsi.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

KASUS SUAP DI DPR

Tanggal : 3 Oktober 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Teten Masduki (Koordinator ICW), Sri Soemantri

(Pakar

Hukum Tata Negara), Alvin Lie (Anggota DPR F-PAN)

Isu suap anggota DPR oleh BPPN dalam rangka divestasi Bank Niaga bukan isu pertama dan sangat mungkin bukan pula isu yang terakhir tentang korupsi di lingkungan DPR. Sebelumnya di DPR juga diguncang kasus travel check, ada pula isu money politic dalam divestasi BCA, serta isu money politic dalam penyelesaian kasus BLBI di DPR. Seperti biasa, isu-isu tersebut menghangat namun kemudian menghilang begitu saja, tergeser oleh isu nasional lainnya yang sensasional dan lebih seru. Isu itu kembali menguat tanpa solusi dan preseden yang membuat jera. Lembaga DPR agaknya membutuhkan shock therapy, sebuah metode penyembuhan radikal yang akan sedikit mengguncangkan politik nasional dan membuat jera anggotanya. Banyak alternatif shock therapy tersebut. Dari pembentukan Dewan Kehormatan, pembentukan Dewan Etik, reduksi masa jabatan DPR menjadi 2,5 tahun, kenaikan kesejahteraan anggota DPR, hingga yang paling radikal pemberlakuan hukum mati bagi para anggota DPR yang terbukti melakukan korupsi. Mana yang paling efektif ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Apa yang salah dengan DPR ? Kita berharap DPR menjadi pengawal reformasi untuk memberantas korupsi. Ironisnya justru DPR sendiri acapkali dilanda isu korupsi. Isu terakhir adalah isu suap anggota DPR oleh BPPN. Biasanya kasus korupsi di DPR akan menghilang begitu saja tanpa sanksi, tanpa punishment. Ini terjadi bukan karena anggota DPR tidak salah namun karena mayoritas anggota DPR saling melindungi demi kepentingan bersama. Apa yang harus kita lakukan agar DPR kembali berwibawa dan bersih ? Jika tidak, sentimen anti DPR dan sentimen anti partai akan menguat dan itu berbahaya bagi demokrasi. Itulah topik kita. Sudah hadir di studio Bung Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch (ICW), hadir juga Bung Alvin Lie anggota DPR dari PAN, dan pakar tata negara Bapak Sri Soemantri. Selamat malam semuanya.

Kita mulai dari Bung Teten Masduki. Kita mendengar isu korupsi berulang-ulang terjadi di DPR. Bung Teten, apa yang salah dengan DPR kita ?

TETEN MASDUKI :

Korupsi merupakan abuse of power. Pasca Soeharto ada peralihan kekuasaan, kekuasaan politik jauh lebih kuat di DPR daripada pemerintah. Dan yang paling potensial abuse of power di DPR ada pada tiga fungsinya; pertama, fungsi legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, dan ketiga, fungsi pengawasan. Menurut saya banyak pihak yang memang mencoba memengaruhi kekuasaan politik DPR, mulai dari anggaran, proses legislasi terutama yang menyangkut kepentingan swasta. Banyak pihak-pihak swasta yang mencoba memengaruhi DPR, begitu juga BUMN. Begitu besar dan beragam kepentingan yang ingin memengaruhi DPR, sementara mentalitas DPR dan sistem kontrol internalnya sangat lemah.

DENNY J.A. :

Anda ingin mengatakan kekuasaan DPR sangat besar dan itu bisa diterjemahkan menjadi proyek-proyek begitu ?

TETEN MASDUKI :

Iya, kebijakan-kebijakan politik DPR sudah menjadi komoditi, bisa diperjualbelikan. Kekuasaannya begitu besar tanpa ada accountability.

DENNY J.A. :

Kita melihat tak ada satu pun kasus korupsi di DPR yang tuntas ? Mengapa itu terjadi ?

TETEN MASDUKI :

Karena yang terjadi korupsi gotong royong yang melibatkan semua. Kalau mau menyuap DPR semestinya tidak hanya satu-dua orang, tetapi harus 50% plus satu supaya tidak ketahuan dan suatu kebijakan lolos. Sehingga praktis sistem kontrol DPR tidak akan bisa efektif. DPR tidak mungkin mau mengawasi satu proses penegakan hukum jika nantinya mengarah pada dirinya sendiri. Kalau DPR sudah korupsi akan mematikan semua sistem pengawasan, juga penegakan hukum. Seperti apa yang dikatakan mendiang diktator di Mexico, “Kalau seekor anjing sudah menggigit tulang, dia tidak bisa menggonggong.”

DENNY J.A. :

Apa bahayanya kalau ini dibiarkan ?

TETEN MASDUKI :

Akan muncul sentimen anti partai dan anti DPR yang membahayakan proses demokrasi yang sedang kita bangun. Faktanya, ada tiga penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset, semua menunjukkan masyarakat anti partai. Masyarakat apatis, tidak

peduli lagi terhadap DPR, karena realitas hidup masyarakat juga tidak menjadi pikiran DPR.

DENNY J.A. :

Ada anti DPR dan anti partai sebagai akibat langsung dari tidak terbongkarnya aneka kasus korupsi di DPR ?

TETEN MASDUKI :

Iya. Karena korupsi ini bukan hanya di Jakarta tetapi di daerah yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Pak Sri. Apa yang salah sehingga DPR hasil reformasi dan dipilih secara demokratis seringkali dilanda isu-isu korupsi ?

SRI SOEMANTRI :

Tergantung dari kualitas anggota DPR sendiri. Jika dibandingkan dengan anggota DPR pada tahun 1955 yang kebanyakan pegawai negeri dengan gaji yang pas-pasan, tetapi ternyata anggota DPR pada waktu itu tidak ada satu pun yang melakukan tindakan seperti sekarang. Ini disebabkan karena kualitas anggota DPR dulu berbeda dengan yang sekarang. Seharusnya partai politik melakukan seleksi yang baik, siapa yang tepat untuk dicalonkan sebagai anggota DPR.

DENNY J.A. :

Pak Sri, ada juga masalah SDM dan rekrutmen. Bagaimana internal control di DPR ?

SRI SOEMANTRI :

Saya tidak mengetahui apakah masing-masing partai politik setelah mereka duduk di DPR melakukan pendidikan politik yang

sebenarnya atau tidak. Saya melihat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan pendidikan politik.

DENNY J.A. :

Pak Sri, misalnya kita akan membuat satu perubahan kelembagaan untuk memperkuat internal control dengan mengefektifkan Dewan Kehormatan. Bagaimana ?

SRI SOEMANTRI :

Dalam tata tertib itu dimungkinkan. Tetapi tergantung sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan ? Walaupun ada Dewan Kehormatan tetapi kalau sanksinya tidak efektif, tidak ada gunanya. Perlu dicarikan cara lain, sistem lain. Sebetulnya sudah ada keinginan agar dianut sistem pemilihan umum distrik. Tetapi dalih yang dikemukakan, apakah di daerah-daerah itu sudah ada kader-kader pemimpin yang mempunyai wawasan nasional ? Bahkan ada yang mengherankan, tinggalnya di Jakarta tetapi mewakili daerah Sumbawa, mewakili Papua.

DENNY J.A. :

Mungkin Bung Teten bisa menambahkan solusi apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek ?

TETEN MASDUKI :

Kita mengharapkan kontrol dari partainya sendiri. Tetapi menurut saya justru gerakan anti suap yang dilakukan oleh individu-individu harusnya semakin diperluas. Penting adanya pribadi-pribadi yang mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan muka partai dan lembaga demokrasi DPR.

DENNY J.A. :

Menurut Anda bisa dimulai dari stimulasi individual ?

TETEN MASDUKI :

Iya, inisiatifnya dari situ. Sayangnya mereka yang menganggap tidak pernah merasa disuap, justru menghukum dan menghujat bahkan menganggap mencemarkan nama baik partai dan DPR.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Bung Alvin Lie. Bung, banyak yang bertanya mengapa di DPR selalu dilanda isu korupsi, apa yang salah ?

ALVIN LIE :

Sekarang di DPR terjadi share, kalau dulu kekuasaan sepenuhnya di pemerintah sekarang juga ada di DPR. Sesuatu yang niscaya memang kalau ada pihak yang mencoba memengaruhi kebijakan DPR. Walaupun sebetulnya DPR tidak mempunyai executive power. Walaupun DPR menyetujui suatu penjualan aset negara dan sebagainya, eksekusinya tetap ada di pemerintah. Dalam hal ini, lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mutunya masih rendah. Lobi masih diartikan memberikan sesuatu, bukan memberikan suatu dukungan pemikiran, argumen-argumen, tetapi memberikan satu insentif yang lebih banyak berupa materi.

DENNY J.A. :

Bung, sebagai orang dalam, apakah korupsi di DPR itu benar ? Bukan hanya isu ?

ALVIN LIE :

Saya yakin tidak akan ada asap kalau tidak ada api.

DENNY J.A. :

Karena isu ini terjadi berulang-ulang, banyak yang berkata DPR butuh shock therapy. Menurut Anda shock therapy apa yang membuat tradisi korupsi itu bisa hilang ?

ALVIN LIE :

Kalau kita berbicara sanksi untuk anggota DPR agak sulit. Pak Sri Soemantri sudah menyampaikan kalau pun Dewan Kehormatan, sejauh mana kewenangan Dewan Kehormatan ? Apakah Dewan Kehormatan juga bisa memecat anggota DPR ?

DENNY J.A. :

Bagaimana jalan ke pengadilan ?

ALVIN LIE :

Saya menilai polisi pengadilan pun tidak efektif. Kita melihat sendiri Jaksa Agung mempunyai masalah dengan KPKPN.

DENNY J.A. :

Ada ide, berangkat dari pengalaman Amerika, anggota DPR masa jabatannya dikurangi menjadi 2,5 tahun. setiap 2,5 tahun rakyat yang langsung menghukumnya melalui pemilu. Anda setuju ?

ALVIN LIE :

Ada baiknya masa jabatan DPR dan presiden tidak bersamaan sehingga ada rotasi. Itu salah satu mekanisme kontrol, control by the people dan control by the public. UU Susduk Tahun 1999 banyak kelemahannya. sehingga anggota DPR untouchable, bisa dipecat dari partai tetapi tetap di DPR.

DENNY J.A. :

Karena kita melihat DPR tidak bisa mengurus anggotanya maka rakyatlah yang harus menghukum lewat pemilu, dan mungkin kita mempersingkat jabatan DPR menjadi 2,5 tahun ?

ALVIN LIE :

Mungkin bisa 2,5 atau 3 tahun tetapi yang penting ada rotasi. saya menilai layak untuk dipertimbangkan.

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Sri, ide mempersingkat pemilu 2,5 tahun untuk anggota DPR ?

SRI SOEMANTRI :

Ini salah satu yang masuk akal, artinya melalui satu sistem, tidak diletakkan kepada perorangan anggota tetapi kualitas rekrutmennya. Itu gagasan baik. sekarang kembali kepada anggota dewan, karena harus dituangkan dalam undang-undang yang menjadi fungsi DPR dan presiden.

DENNY J.A. :

Bung Teten, bagaimana dengan gagasan memperpendek masa jabatan DPR ? Anda setuju ?

TETEN MASDUKI :

Saya setuju. Tetapi saya khawatir kalau semata-mata memperpendek masa jabatan DPR justru akan menjadi Rowing Bandit. Karena dalam pikiran Rowing Bandit, kalau kekuasaan itu pendek dia semakin tidak berpikir panjang, sejauh ada kesempatan yang bisa diambil, dia akan ambil, itu bahaya juga. Menurut saya harus komprehensif. Korupsi itu kejahatan kalkulasi, semakin keuntungannya tinggi tanpa ada resiko sedikit pun, korupsi itu akan subur. Kalau hukum tidak fungsional dan tindakan sanksi politik dari pemilih juga tidak dilakukan, korupsi akan tetap terjadi. Karena itu menurut saya pendidikan politik kepada masyarakat harus dilakukan supaya memilih wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan dan punya integritas pada masyarakat.

DENNY J.A. :

Ke Bung Alvin. Penting sekali memperkuat internal control di DPR agar korupsi semakin jarang. Bagaimana menurut Anda untuk mendayagunakan Dewan Kehormatan ?

ALVIN LIE :

Dewan Kehormatan akan efektif kalau diberi kewenangan yang cukup luas dan akan lebih bagus kalau diperlakukan seperti pengadilan Ad Hoc. Sehingga bisa menjatuhkan hukuman, bukan hanya sanksi administratif di kalangan DPR. Alangkah baiknya jika Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi anggota DPR yang korupsi.

DENNY J.A. :

Selama ini dia bersifat ad hoc. Bagaimana jika dibuat permanen dan lebih aktif dalam investigasi ?

ALVIN LIE :

Nanti anggota Dewan Kehormatannya rawan suap lagi.

DENNY J.A. :

Bagaimana jika anggotanya dari luar ? Supaya tidak terjadi “kongkalikong” antara anggota DPR.

ALVIN LIE :

Saya melihat memang harus ada shock therapy, kita belajar dari negara-negara lain, kalau tidak ada hukuman yang sangat berat, akan cenderung disepelekan.

DENNY J.A. :

Baik Bung, kita ke Pak Sri dulu. Pak Sri, jika Dewan Kehormatan susah untuk direformasi, bagaimana kalau dibentuk Komisi Etik yang lebih permanen dengan kekuasaan yang lebih besar dari DPR sendiri?

SRI SOEMANTRI :

Kembali seperti dikatakan Pak Alvin Lie, kewenangan apa yang akan diberikan kepada badan itu ? Selama ini kewenangan itu belum jelas, karena ini baru gagasan.

DENNY J.A. :

Jika Pak Sri diminta mendesain, kewenangan apa yang dibutuhkan agar bisa efektif menjadi internal control di DPR ?

SRI SOEMANTRI :

Harus dituangkan dalam undang-undang. Kalau mempunyai kewenangan yang cukup besar barangkali efektif.

DENNY J.A. :

Mengenai anggotanya, apakah perlu dari luar untuk menjaga independensi ?

SRI SOEMANTRI :

Akan menjadi persoalan karena yang ada dalam tata tertib adalah Dewan Kehormatan, sedangkan Komisi Etik belum ada. Komisi itu harus jelas.

DENNY J.A. :

Lembaga ini mempunyai hak untuk menginvestigasi, untuk melakukan punishment terhadap anggota DPR. Bung Teten, di samping internal control mungkin eksternal control dari luar. Apa yang bisa dilakukan agar DPR lebih bersih ?

TETEN MASDUKI :

Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan pengawasan kekayaannya dengan pendekatan follow the money to track the crime. Itu yang paling efektif. Inilah pentingnya diberdayakan KPKPN.

DENNY J.A. :

Menurut Anda KPKPN bisa dimaksimalkan ?

TETEN MASDUKI :

Sekarang ini KPKPN mengalami kesulitan kalau laporan pejabat banyak yang bohong atau palsu. Begitu banyak anggota penyelenggara negara yang harus diperiksa, sementara kapasitas KPKPN sedikit. KPKPN harus diberi kewenangan untuk mengakses rekening di bank.

DENNY J.A. :

Bung Teten, peran pers sendiri, apa yang bisa dilakukan secara maksimal ?

TETEN MASDUKI :

Yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat dan pers adalah menunjukkan suatu kontradiksi-kontradiksi. Misalnya kekayaan mereka, gaya hidup mereka yang tidak wajar dengan pendapatan resminya, atau ada lobi-lobi dari kalangan swasta kepada mereka.

DENNY J.A. :

Memang pers paling efektif untuk menyampaikan ke publik mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di DPR. Sekarang kita mendengarkan komentar publik melalui telepon dimulai dari Bung Sony.

SONY :

Kita seharusnya menaruh rasa hormat kepada Bu Indri dan Mulyono karena ini satu momentum menguji keberanian Bung Teten. Masyarakat berharap dari Bung Teten sebagai external control, karena di internal control DPR kelihatannya tidak berjalan. Anggota DPR ada 600, apa yakin hanya dua orang itu yang terlibat ?

DENNY J.A. :

Baik, Bung Sony kita sudah menangkap message-nya. Bung Ferry dari Jakarta, silakan.

FERRY :

Kasus korupsi di DPR sekarang ini betul-betul memalukan. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, harus ada tindakan tegas dari pimpinan DPR maupun ketua fraksi terhadap anggota yang terlibat kasus korupsi. Kedua, harus ada political will dari semua pimpinan DPR untuk menuntaskan kasus ini agar tidak muncul lagi di kemudian hari. Sekarang DPR menjadi ladang subur untuk melakukan korupsi.

DENNY J.A. :

Ok, baik terima kasih banyak. Sekarang Bung Umar dari Kalimantan Barat.

UMAR :

Ini persoalan UU Nomor 3 dan UU Nomor 4 tahun 1999. UU Nomor 3 menyatakan yang dipilih adalah wakil partai, sementara UU Nomor 4 mengatakan mereka adalah wakil rakyat. Ada dualisme undang- undang.

DENNY J.A. :

Bung Umar terima kasih banyak. Bung Alvin Lie, tampaknya banyak pihak menghendaki adanya tindakan tegas terhadap anggota DPR, apakah itu realistis ?

ALVIN LIE :

Tindakan tegas itu sebetulnya sudah terlambat, seharusnya mulai kemarin-kemarin. Tetapi bagaimana bisa ? ketua DPR-nya sendiri begitu.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Teten, banyak yang memberikan Anda dukungan bahwa individual DPR-nya itu sendiri yang seharusnya dibuat berani bicara ?

TETEN MASDUKI :

Ketika sistem anti korupsi belum terbangun, Dewan Kehormatan tidak akan efektif, pendekatan hukum juga tidak efektif. Kita sekarang banyak berharap bagaimana individu-individu seperti Mulyono, Pak Alvin Lie dan lainnya justru melakukan ikrar identitas. Gerakan ini harus dimulai dari mereka. Tetapi harus ada perlindungan bagi mereka yang mau melakukan testimoni, misalnya dari jeratan KUHAP dan lain sebagainya.

DENNY J.A. :

Pak Sri, Anda mendukung tahun 2004 kita mulai pemilihan anggota DPR hanya 2,5 tahun saja ?

SRI SOEMANTRI :

Perubahan itu di UUD belum tercantum. Problemnya, apakah tepat kalau itu diatur dalam undang-undang ? Apakah tidak lebih baik dimasukkan ke dalam konstitusi? Berarti amandemen lagi.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro 7V, ini segmen terakhir. Kita akan mendengar komentar, rekomendasi atau harapan singkat dari masing-masing pembicara untuk renungan kita. Dimulai dari Bung Alvin Lie, silakan Bung.

ALVIN LIE :

Untuk memberantas korupsi kita perlu hukuman berat dan saya sangat mendukung hukuman mati. Kita perlu pengadilan khusus untuk korupsi. Untuk anggota DPR yang korupsi, partainya juga perlu dikenakan sanksi yaitu dilarang ikut pemilu berikutnya.

DENNY J.A. :

Mungkin perlu pembuktian terbalik Bung ?

ALVIN LIE :

Ya, kita perlu itu.

DENNY J.A. :

Ok, Pak Sri, silakan.

SRI SOEMANTRI :

Reformasi hukum harus benar-benar dilaksanakan. Pertama, negara kita negara hukum, semuanya harus melalui jalur hukum, yang korupsi harus diadili. Saya setuju diadakan hukuman mati untuk koruptor. Hal tersebut akan memberikan rasa takut kepada mereka yang akan melakukan korupsi.

DENNY J.A. :

Semua khawatir yang terkena hanya kelas menengah, tetapi yang di atas tidak terkena hukuman mati.

SRI SOEMANTRI :

Maka ini termasuk yang di atas.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan pembuktian terbalik, perlu diterapkan juga ?

SRI SOEMANTRI :

Belum ada kesepakatan tentang pembuktian terbalik. Kalau itu bisa dilaksanakan, disepakati dan diatur dalam undang-undang, itu lebih baik.

DENNY J.A. :

Sebagai pakar, Pak Sri merekomendasikan hal itu ?

SRI SOEMANTRI :

Betul, tetapi semua harus berdasarkan undang-undang.

DENNY J.A. :

Bung Teten, the last word.

TETEN MASDUKI :

Saya setuju hukuman mati itu. Tetapi sebaiknya kekuasaan DPR dikurangi. Sistem demokrasi langsung harus menjadi pertimbangan karena demokrasi perwakilan dalam beberapa hal justru telah diselewengkan. Misalnya dalam memilih presiden diserahkan lagi kepada rakyat, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Pengawasan sebagian bisa di-deliver ke masyarakat, misalnya dengan memberi kebebasan masyarakat mendapatkan akses informasi dan memberi perlindungan terhadap mereka. Hak-hak demokrasi yang penting dan mendasar seharusnya dikembalikan ke rakyat.

DENNY J.A. :

Kekuasaan DPR bisa dialihkan ke komisi-komisi yang dibuat oleh civil society. Baik, terima kasih kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, banyak sudah saran yang disampaikan dalam forum ini. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah mulai tahun 2004, kita mengusulkan anggota DPR masa jabatannya 2,5 tahun, separuh dari masa jabatan presiden. Signifikansinya, dengan 2,5 tahun rakyat akan lebih cepat menghukum mereka melalui pemilu dengan tidak memilih lagi anggota DPR yang tidak menyuarakan kepentingan rakyat.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

SUAP DI PUSAT, SUAP DI DAERAH

Tanggal : 10 Oktober 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Ferry Mursyidan Baldan (F-PG DPR RI), Ryas Rasyid (Pakar Otonomi Daerah), Afan Gaffar (Pengamat Politik), Nur Achmad Afandi (Wakil Ketua DPRD DIY)

Apa yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Jawaban yang sinis menyatakan bahwa Indonesia dari barat sampai timur disatukan oleh korupsi. Praktek korupsi menjadi tali penyambung Indonesia. Bahkan korupsi sudah menjelma menjadi ideologi nasional yang jauh lebih eksefif pengaruhnya daripada ideologi Pancasila. Ini jawaban yang setengah main-main tetapi kebenarannya kita rasakan. Bagaimana tidak, korupsi mengepung kita hampir dari semua lini. DPR/DPRD sebagai penentu kebijakan, yang di era reformasi ini kekuasaannya diperbesar dalam kerangka check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, justru menjadi sarang korupsi baru. Demikian juga dengan lini penegak hukum yang sesungguhnya menjadi pihak yang paling menentukan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, juga tidak kedap terhadap virus korupsi. Para penegak hukum, hakim, polisi, dan jaksa dalam banyak kasus menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Korupsi menyebar secara vertikal dan horizontal. Desentralisasi kekuasaan juga dibarengi dengan desentralisasi peluang korupsi. Maka tak perlu heran jika

korupsi dalam skala yang besar juga marak dalam penyelenggaraan kekuasaan di daerah. Kita harus memberantas korupsi dikala kita justru dihadapkan pada krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan yang terjadi di semua lini dan semua level pemerintahan. Seperti terlihat dari lembeknya sikap pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang notabene juga melibatkan orang-orang dalam lingkup kekuasaan sendiri.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Suap di Pusat, Suap di Daerah”. Di studio telah hadir Bung Ferry Mursyidan Baldan anggota DPR dari Partai Golkar. Di sampingnya ada Bung Ryas Rasyid, pakar pemerintahan dan juga Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan. Kita juga akan live dari Yogyakarta dengan Bung Nur Achmad Afandi, Wakil Ketua DPRD, dan Bung Afan Gaffar, pakar politik. Untuk memperkaya diskusi, kita simak dulu pengantar berikut :

“Indonesia dari pusat sampai daerah sudah dipersatukan mata rantai korupsi. Isu suap melanda di semua level pemerintahan. Belum tuntas kita menyelesaikan kasus korupsi Akbar Tandjung, sudah menyusul isu suap anggota DPR oleh BPPN, lalu Jaksa Agung menjadi tertuduh dan menyeruak juga aneka kasus korupsi di daerah. Kasus suap yang melanda DPR dan DPRD sangatlah unik. Misalnya di Yogyakarta, diberitakan sejumlah anggota DPRD meminta dana kepada kontraktor PT Adikarya terkait pembangunan gedung Jogja Expo Center sekitar 42 miliar. Agar pembayaran kepada PT itu lancar, sebagian anggota DPR meminta uang pelicin. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga diramaikan oleh bau tak sedap yang sama. Di Jakarta Sutiyoso terpilih kembali, namun diributkan dengan kasus money politic. Sementara di Yogyakarta, isu sogokan 1 miliar mewarnai pemilihan wakil gubernur. Pengusaha di Yogyakarta mengeluh harus mengeluarkan sejumlah uang untuk pemilihan wakil gubernur. DPRD mempunyai kekuasaan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, sekaligus untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban

gubernur. DPR dan DPRD juga mempunyai kewenangan menentukan anggaran dan legislasi. Penyalahgunaan kekuasaan itu harus dilakukan secara kolektif karena kekuasaan di DPR dan DPRD memang bersifat kolektif. Tidak ada gunanya sebuah rencana kebijakan jika hanya didukung oleh minoritas, karena keputusan akhir lazim diambil melalui voting. Suap yang berhasil haruslah suap terhadap mayoritas anggota DPR atau DPRD. Dalam kondisi seperti ini, korupsi umumnya terbongkar melalui the whistle blowers, istilah ini merujuk pada orang dalam yang juga menerima amplop tetapi kemudian bernyanyi keluar, membuka rahasia. Orang dalam ini membuat kasus terbuka keluar dan menjadi santapan pers.”

Sekarang kita menghuBungi narasumber di studio. Pertama kepada Bung Ferry, ada survei Kompas 6 Oktober 2002. Sebanyak 72% responden menilai korupsi di DPR semakin parah. Apakah benar korupsi semakin parah di DPR ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Saya bukan berapologi, tetapi saya menjelaskan bahwa tudingan korupsi itu lebih kental nuansa politisasinya. Sebagian besar anggota dewan komitmen untuk menuntaskan korupsi, jangan sampai terpelihara menjadi sebuah citra negatif terhadap politisi.

DENNY J.A. :

Kalau kita melihat, beberapa isu di DPR, mulai dari kasus amplop oleh BPPN, cek perjalanan, divestasi BCA, BLBI, dan terakhir soal uang palsu 20 miliar muncul di pers. Mengapa tidak satu pun kasus tersebut yang diinvestigasi secara tuntas ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Saya melihat semua itu memang bertujuan tidak pada penyelesaian masalah, tetapi penempelan citra negatifnya. Lebih banyak unsur politisnya.

DENNY J.A. :

Di DPR ada mekanisme internal untuk mengontrol, yaitu Dewan Kehormatan dan Kode Etik. Tetapi sampai sekarang tidak pernah sekali pun digunakan, mengapa ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Saya kira bukan tidak pernah. Berita harus ada validitasnya, jangan sampai menjadi fitnah harus ada data dan fakta. Atas dasar itu ada kode etik yang sudah mengatur dan kemudian baru dibentuk Dewan Kehormatan. Tetapi ketika hanya baru suatu isu yang tidak bisa dibuktikan terus kemudian mereka bertindak, itu hanya menjadi gerakan politik.

DENNY J.A. :

Ok, ke Bung Ryas. Bung, isu suap di DPR apakah benar hanya politisasi ?

RYAS RASYID :

Saya pikir tidak murni politisasi, pasti ada fakta atau kejadian yang bisa membuat itu dipolitisasi. Sikap self defensive Pak Ferry dapat saya pahami, itu terjadi pada semua korps. Sekarang korps DPR yang bicara, kemarin korps Kejaksaan Agung yang bicara. Saya tidak mau curiga, tetapi kita bertanya ke Pak Ferry dengan pertanyaan yang berbeda, "Apakah Anda percaya bahwa tidak ada korupsi di DPR ?" Saya kira Pak Ferry tidak akan berani mengatakan tidak ada. Rumor yang berkembang, departemen dan kementerian yang akan menggolkan anggarannya tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Demikian juga daerah yang dimekarkan, semua lobi ke DPR.

DENNY J.A. :

Fungsi DPR sebagai legislator dan pengawas anggaran mempunyai proyek begitu ?

RYAS RASYID :

Semua ada, hanya sejauh mana besarnya kita tidak tahu.

DENNY J.A. :

Menurut Anda di mana kesalahannya ? Pemilu sudah demokratis tetapi mengapa masih banyak isu korupsi ?

RYAS RASYID :

Pertama proses rekrutmen yang terburu-buru. Tahun 1999, ketika Pak Harto baru saja lengser, semua partai –kecuali Golkar karena sudah mapan– melakukan rekrutmen dengan sangat terburu-buru. Maka orang yang tidak pantas duduk di parlemen pun menjadi anggota DPR, karena seleksi yang tidak ketat. Kedua, sampai hari ini kita tidak mempunyai UU Etika Pemerintahan yang bisa meng-cover seluruh tingkah laku menyimpang pejabat legislatif, yudikatif, dan eksekutif secara mendetail. Saya sudah pernah mengembangkan undang-undang ini sejak tahun 1994 dan ketika menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Karena hanya menjabat beberapa bulan, saya belum sempat mengambil prakarsa. Tetapi saya yakin naskah UU Etika Pemerintahan tersebut masih ada di kantor Menteri PAN.

DENNY J.A. :

Kita melihat setiap tahun DPR menghasilkan begitu banyak undang-undang, tetapi tidak satu pun menyangkut masalah itu. Mengapa ?

RYAS RASYID :

Tidak dibahas karena yang akan terjerat adalah mereka dulu. Perlu jiwa besar dan tulus untuk menghasilkan undang-undang seperti itu. Tetapi sejauh ini belum ada keberanian untuk membuat itu.

DENNY J.A. :

Bagaimana menurut Anda agar isu korupsi DPR berkurang ?

RYAS RASYID :

Kita harus membuat sistem pemilu dengan proses rekrutmen yang lebih ketat. Pertanggungjawaban kepada konstituen harus diperjelas, sehingga seorang anggota DPR mempunyai rasa takut kepada rakyat yang memilihnya. Perangkat UU Etika Pemerintahan mutlak harus ada untuk sebuah pemerintahan modern yang beradab.

DENNY J.A. :

Bung Ferry, bisakah tahun ini DPR membuat UU Etika Pemerintahan tersebut ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

UU Etika Pemerintahan itu pernah dilemparkan oleh Pak Ryas sekitar tahun 2000. Waktu itu ada pikiran untuk membentuk itu dan ada UU Kepresidenan. Persoalannya, masyarakat harus diberi ruang yang cukup untuk mengontrol.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Ryas dan Bung Ferry. Pemirsa Metro TV, sekarang kita menghuBungi narasumber dari Yogyakarta, Bung Nur Afandi, Wakil Ketua DPRD DIY. Kita mendengar isu suap yang melanda 25 anggota DPRD DIY. Mereka sedang diperiksa polisi, termasuk Anda sendiri. Seberapa benar berita ini ?

NUR ACHMAD AFANDI :

Kasus ini sudah diperiksa di kejaksaan. Ada anggota dewan yang menyampaikan kepada saya bahwa ada hadiah dari eksekutif untuk beberapa anggota dewan. Ketika saya menanyakan dari mana asalnya, dia tidak bisa menjelaskan. Karena tidak jelas sumbernya

dan untuk kepentingan apa, saya menyarankan agar dikembalikan. Sekarang kasus ini masih dalam proses pengajuan dari kejaksaan ke pengadilan negeri.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan Anda sendiri, sebagai saksi atau tersangka ?

NUR ACHMAD AFANDI :

Saya sudah pernah dipanggil sebagai saksi.

DENNY J.A. :

Baik Bung. Isu kedua, ada dana 1 miliar di DPRD untuk meloloskan calon wakil gubernur tertentu. Seberapa benar berita itu ?

NUR ACHMAD AFANDI :

Saya tidak tahu persis kebenarannya. Tetapi ketika saya mencoba berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, mereka mengatakan tidak ada.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, mengapa bertubi-tubi muncul isu korupsi di media massa tentang DPRD ? Apa yang salah ?

NUR ACHMAD AFANDI :

Pertama, masyarakat berkeinginan kuat memiliki lembaga wakil rakyat yang kuat, aspiratif, dan accountable. Kedua, tidak ada etika penyelenggaraan pemerintahan yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Ini menjadi grey area yang seringkali menjadi permainan, apakah sebuah proyek bisa atau tidak bisa disetujui.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Afan Gaffar sekarang. Bagaimana Anda menanggapi isu suap di DPRD Yogyakarta ?

AFAN GAFFAR :

Persoalannya uang tersebut baru dikembalikan setelah diketahui publik. Bagaimana jika publik tidak mengetahui ? Pasti masuk kantong sendiri. Hal semacam ini sudah terjadi di segala aspek kehidupan kita.

DENNY J.A. :

Ada penelitian dari LPEM UI tahun 2001, setelah otonomi daerah ternyata kasus korupsi di daerah meningkat. Anda setuju juga dengan fakta ini?

AFAN GAFFAR :

Hal itu tidak ada hubungannya secara otomatis, bisa berlaku kapan pun, Orde Baru pun sudah begitu.

DENNY J.A. :

Baik. Pak Afan, otonomi daerah membuat DPRD lebih berkuasa, apakah ini juga penyebab adanya korupsi ?

AFAN GAFFAR :

Sama saja, dulu juga begitu. Hanya dulu tidak diekspos karena tidak ada yang berani.

DENNY J.A. :

Menurut Anda ini lebih karena ekspos, bukan karena situasi riil bahwa korupsi meningkat atau tidak ?

AFAN GAFFAR :

Betul. Tidak ada perbedaan antara Orde Baru dan sekarang. Kuncinya leadership, Megawati berani atau tidak memberhentikan Jaksa Agung yang jelas-jelas bermasalah ? Saya tidak setuju dengan Pak Ryas, jangankan etika, hukum saja dilanggar.

DENNY J.A. :

Di samping leadership, perlukah kewenangan DPRD dikurangi, misalnya tidak lagi memilih gubernur ?

AFAN GAFFAR :

Tidak di situ persoalannya. Sekarang kita melaksanakan sistem apa? Presidensialisme murni atau parlementerisme ? Sistem yang kita anut sekarang ini kacau balau.

DENNY J.A. :

Ke depan Bung, apakah Anda menyarankan gubernur dipilih secara langsung?

AFAN GAFFAR :

Tidak perlu disarankan, karena sudah keharusan. Presiden saja dipilih secara langsung oleh rakyat, apalagi gubernur dan bupati.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Nur. Anda dari DPRD, Anda setuju jika gubernur dipilih secara langsung?

NUR ACHMAD AFANDI :

Itu suatu hal yang baik. Rakyat harus mengetahui untuk kepentingan apa mereka memberikan dukungan ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita kembali ke Bung Ryas. Tidak hanya DPR tetapi juga DPRD dilanda korupsi. Sejak otonomi daerah, DPRD semakin berkuasa dan mempunyai peluang untuk menjadikan kekuasaannya sebagai proyek korupsi. Apakah ada hubungannya?

RYAS RASYID :

Saya yakin tidak ada. Dalam UU Nomor 22, kekuasaan DPRD cukup besar, karena untuk menyeimbangkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kita ingin DPRD sebagai wakil rakyat, menjadi tempat di mana kepala daerah bertanggung jawab, karena itu kekuasaannya harus besar. Bahwa kemarin DPRD cenderung menyimpang dalam menjalankan kekuasaan, itu bukan karena UU Pemerintahan Daerah atau otonomi daerah, tetapi karena rekrutmen partai.

DENNY J.A. :

Kita mengetahui SDM masih terbatas, apakah secara kelembagaan perlu ada revisi, misalnya gubernur tidak lagi dipilih oleh DPRD ?

RYAS RASYID :

Saya setuju, tetapi bukan semata-mata karena DPRD terlalu berkuasa. Kita ingin mengoptimalkan proses demokratisasi dan melakukan kampanye pemerintahan yang lebih representatif dan lebih legitimate.

DENNY J.A. :

Apakah itu bisa mengurangi korupsi ?

RYAS RASYID :

Jelas bisa, tetapi jangan lupa sektor lain bisa dimainkan. Penetapan APBD misalnya, justru dalam penetapan APBD itulah permainan bisa berjalan. Saya bertanya pada Pak Ferry, apakah Anda percaya masih

ada anggota DPRD yang tidak terlibat dalam satu pun proyek yang dianggarkan DPRD ?

DENNY J.A. :

Kita ingin mendengar pendapat Bung Ferry. Bung, isu korupsi tidak hanya di DPR tetapi juga di DPRD, bagaimana komentar Anda ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Pertama, masalah otonomi dan korupsi berbeda. Ada atau tidak otonomi, korupsi tetap berjalan. Tidak adil jika kita mengaitkan dua hal itu. Saya dan Pak Ryas yakin otonomi adalah hal yang tidak terelakkan dan harus dijalankan tanpa ada keraguan. Kewenangan dari dewan jangan dikurangi hanya karena ada faktor-faktor yang ditumbuhkan, diciptakan, dan dibangun sedemikian rupa sehingga negatif.

DENNY J.A. :

Ke depan semua gubernur di seluruh Indonesia dipilih secara langsung ?

RYAS RASYID :

Iya, bahkan bisa dilakukan sebelum tahun 2004.

DENNY J.A. :

Kembali ke tema korupsi. Bagaimana menumbuhkan mekanisme kontrol internal di DPR dan DPRD ? Anda mempunyai masukan ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Ketika ada dugaan korupsi, apalagi sumbernya dari dalam, anggota harus berani menyampaikan laporan secara resmi. Jangan disampaikan keluar.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Afan Gaffar. Bagaimana menegakkan mekanisme kontrol internal di DPR atau pun DPRD, misalnya mendayagunakan Dewan Kehormatan ?

AFAN GAFFAR :

Ada satu contoh kasus. Di Amerika, ada senator yang diperiksa di muka publik seperti diadili oleh Dewan Kehormatan atau Komisi Etika, tidak menjadi masalah. Tetapi di sini ada solidaritas bersama di antara anggota DPR dan DPRD, bukan membuka persoalan tetapi justru menutup-nutupi.

DENNY J.A. :

Apakah Dewan Kehormatan perlu diubah menjadi lembaga yang lebih permanen seperti Komisi Etika dan lebih aktif ?

AFAN GAFFAR :

Dari dulu saya mengatakan Komisi Etika, saya tidak setuju Dewan Kehormatan. Karena Komisi Etika inilah yang langsung mengambil tindakan terhadap anggota DPR yang menyimpang.

DENNY J.A. :

Dalam pandangan Anda, Komisi Etika ini permanen atau Ad Hoc?

AFAN GAFFAR :

Harus permanen, dipiih seperti komisi-komisi yang lain.

DENNY J.A. :

Bagaimana cara memilih anggotanya ?

AFAN GAFFAR :

Dipilih dari dan oleh anggota DPR atau DPRD sendiri. Tidak perlu unsur luar karena itu persoalan internal mereka.

DENNY J.A. :

Ok, kita ke Bung Nur. Bung, bagaimana solusinya agar kawan-kawan DPRD mempunyai mekanisme kontrol internal dan berfungsi?

NUR ACHMAD AFANDI :

Komisi Etika adalah pilihan yang sangat baik. Tetapi sering terjadi seperti kasus di Yogyakarta, sumber beritanya tidak mau mengaku. Di internal sendiri tidak ada lembaga permanen yang menangani, akhirnya menguap begitu saja. Dalam beberapa kasus, justru berkembang menjadi intrik politik antar kelompok karena tidak ditangani oleh komisi khusus.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita mendengar suara publik melalui telepon, Bung Khairudin dari Padang. Halo Bung, silakan.

KHAIRUDIN :

Korupsi di Indonesia sudah berurat berakar. Apapun yang dilakukan, masyarakat sudah pesimis karena pada dasarnya tidak ada law enforcement. Walaupun Dewan Kehormatan atau Komisi Etika dibentuk, tidak akan berfungsi dengan baik. Harus ada rekonsiliasi nasional, kita harus bisa mendidik apa pentingnya hukum. Langkah pertama adalah melakukan law enforcement.

DENNY J.A. :

Ok, law enforcement. Ke Bung Ryas, Komisi Etika adalah salah satu cara untuk menjadi internal control. Menurut Anda, di mana dia seharusnya diatur ?

RYAS RASYID :

Etika Pemerintahan adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku etika kekuasaan. Di situ diatur tentang pelanggaran-pelanggaran etika dan hukumannya. Hukuman minimum dalam etika adalah meminta maaf ke publik dan maksimum dihentikan dari jabatan.

DENNY J.A. :

Komisi Etika dalam undang-undang itu hanya untuk legislatif ?

RYAS RASYID :

Tidak, untuk semua kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan ada Komisi Etika yang independen, itu sangat penting. Termasuk didalamnya ada perlindungan terhadap pelapor atau yang menjadi saksi dari sebuah kasus pelanggaran etika.

DENNY J.A. :

Jika anggota Komisi Etika di DPR dipilih dari dan oleh DPR sendiri. Bagaimana prosedur pemilihan Komisi Etika untuk eksekutif ?

RYAS RASYID :

Komisi Etika ini khusus menyangkut etika, harus dibedakan dari pelanggaran pidana, korupsi dan segala macam. Ada hal yang sangat halus, pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori korupsi harus dijaring UU Etika Pemerintahan dengan hukuman yang sifatnya etika. Tetapi tidak berarti mereka yang sudah dihukum dengan UU Etika Pemerintahan, akan lolos dari pidana atau korupsi.

DENNY J.A. :

Bung Ferry, bagaimana supaya Komisi Etika ini bisa kokoh dan berfungsi ?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Salah satunya membangun kultur berparlemen. Mekanisme pemilihan dan rekrutmen harus bisa melahirkan ruang kontrol bagi masyarakat. Masyarakat berhak menyuarakan siapa anggota DPR atau DPRD yang tidak layak duduk di parlemen.

RYAS RASYID :

Itu mungkin terjadi kalau sistemnya tidak proporsional murni seperti sekarang. Kalau sistemnya tidak memilih orang, rakyat tidak bisa mengontrol calon legislatif. Kontrol hanya ada di partai politik, pimpinan partai.

DENNY J.A. :

Kultur berparlemen menurut Anda lebih pada adanya sikap aktif dari pemilih?

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Iya dan ada kesadaran.

DENNY J.A. :

Kita kembali ke Bung Afan Gaffar. Banyak yang menyarankan sistem proporsional diganti sistem distrik. Menurut Anda apakah sistem proporsional sudah tidak bisa diterapkan di mana pun ?

AFAN GAFFAR :

Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau elit partai tidak diberi kewenangan untuk rekrutmen. Persoalannya, di Indonesia yang menentukan orang masuk ke Senayan atau tidak adalah orang-orang seperti Akbar, Hamzah Haz, Megawati, Amien Rais. Tetapi kalau mutlak dari bawah, misalnya calon dari Yogyakarta ditentukan oleh cabang-cabang dan wilayah, persoalannya akan lain.

DENNY J.A. :

Sistem proporsional pun tidak ada masalah jika rekrutmen dilakukan oleh cabang-cabang di daerah begitu ?

AFAN GAFFAR :

Betul. Memang yang paling ideal, kalau kita mau menciptakan lembaga DPR yang accountable adalah dengan sistem distrik maupun pluralitas. Tetapi realitas politik yang ada tidak mendukung, partai-partai besar sudah menutup pintu untuk sistem itu.

DENNY J.A. :

Kita sekarang mendengar suara publik. Pertama Bung Hendra di Palembang, silakan.

HENDRA :

Saya mau bertanya ke Pak Ryas dan Pak Afan. Apa pun sistemnya kembali ke sikap mental masing-masing orang. Kita mengetahui di DPR ada tata tertib yang tidak memungkinkan seorang anggota DPR dipecat. Saya sepakat dengan Pak Afan Gaffar, kita kembali pada leadership setiap orang, apakah leadership kelompok atau leadership bagi diri sendiri. Memimpin hati nurani dan pikirannya, melihat mana yang benar mana yang salah. Intinya pada law enforcement.

DENNY J.A. :

Pemirsas Metro TV, kita akan mendengar pandangan dari para narasumber untuk renungan kita. Dimulai dari Bung Nur, silakan.

NUR ACHMAD AFANDI :

Menurut saya yang penting untuk dilakukan adalah keterbukaan DPR maupun DPRD terhadap masyarakat sehingga kalau ada tuntutan, itu sesuatu yang wajar. Kasus-kasus yang ditemukan di DPR maupun DPRD, perlu segera ditangani sehingga tidak berkembang menjadi

rumor. Benar atau salah, harus ada investigasi secara tuntas. Sehingga masyarakat semakin dewasa.

DENNY J.A. :

Bung Afan Gaffar, silakan.

AFAN GAFFAR :

Kunci keberhasilan pemberantasan korupsi adalah komitmen kepemimpinan nasional. Saya berharap dan memperingatkan Ibu Megawati agar betul-betul mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak. Sekarang giliran Bung Ferry.

FERRY MURSYIDAN BALDAN :

Pengambilan keputusan secara terbuka dan diikuti publik di DPR, menjadi bagian yang penting. Kemudian pendirian Komisi Etika atau Dewan Kehormatan harus dimulai dan dioptimalkan penggunaannya.

DENNY J.A. :

Bung Ryas, the last word dari ketua partai.

RYAS RASYID :

Persoalan besar yang kita hadapi sebagai bangsa adalah krisis kepemimpinan. Saya menggarisbawahi yang dikatakan Pak Afan, kita membutuhkan hadirnya pemimpin di semua lapangan, semua cabang kekuasaan dan di semua tingkatan. Pemimpin yang integritasnya teruji, kompetensinya diakui dan komitmennya dipercaya. Dan ini harus dikombinasi dengan pembangunan sistem, termasuk sistem hukum dan sistem etika yang menjadi acuan bagi bekerjanya pemerintahan yang baik.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sudah banyak gagasan yang diberikan dalam forum ini. Yang terpenting adalah leadership yang efektif dan sebuah Komisi Etika yang permanen untuk tidak hanya menginvestigasi, tetapi juga memberikan punishment terhadap kasus korupsi di DPR dan DPRD.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

POLITIK UANG CALON LEGISLATIF

Tanggal : 20 November 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Pramono Anung (PDIP), Hidayat Nur Wahid (PKS),
Pipit Rochijat (KIPP Eropa)

Menghadapi masa pemilu, partai-partai politik dihadapkan pada situasi dilematis. Untuk meraih dukungan publik, kampanye harus dilakukan secara efektif, kontinyu, dan masif. Karena ada begitu banyak partai yang ikut pemilu, dan begitu luas wilayah Indonesia, maka pertarungan dalam pemilu adalah sebuah pertarungan yang sangat mahal. Persoalannya kemudian, dari mana partai memperoleh dana ? Bukankah ekonomi nasional sedang morat-marit ? Luran anggota banyak yang tidak berjalan. Ingin mengharapkan donasi dari para pengusaha besar, pengusaha sendiri banyak yang terlilit utang. Ingin memeras BUMN atau BUMD, tidak semua partai mempunyai akses. Seandainya pun mempunyai akses, tak semua berani nekat. Maka sampailah kemudian partai ada satu solusi : memungut uang dari para calon legislatif. Tidak ada undang-undang yang melarang calon anggota legislatif menyumbang kas partainya sendiri. Namun harus pula dipikirkan konsekuensinya jika calon wakil rakyat terlalu dibebani biaya. Bisa dipahami jika seorang anggota DPR nantinya akan berusaha keras mendapatkan kembali uang yang telah diinvestasikan

untuk menduduki kursi parlemen. Namun konsekuensinya bisa sangat serius, lembaga perwakilan rakyat itu kian lama kian terdistorsi, bukan lagi sebagai lembaga kepentingan rakyat, tetapi sebagai arena untuk mencari keuntungan ekonomi dan politik.

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Para wakil rakyat kembali akan dipilih dalam pemilu 2004. Apa kendala yang dihadapi partai politik agar terbentuk pemerintahan 2004 yang lebih bersih dan kompeten mengingat biaya kampanye sangat mahal, dan dana partai terbatas ? Diberitakan bahwa sejumlah calon wakil rakyat dipungut biaya yang cukup tinggi oleh partainya. Jika benar demikian, dikhawatirkan ini akan menjadi awal terbentuknya lingkaran KKN baru yang akan menjadi beban pemerintahan mendatang.

Ini topik kita kali ini. Di studio sudah hadir pertama, Pramono Anung dari PDIP, juga Bung Hidayat Nur Wahid dari PKS. Kita juga akan menjumpai Bung Pipit Rochijat dari KIPP Eropa. Untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Apa konsekuensinya jika untuk menjadi anggota DPR, seorang calon harus mengeluarkan uang begitu banyak. Tentu wajar dia pada gilirannya berpikir bagaimana harus mengembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan. Mungkin sebagian adalah uangnya pribadi atau mungkin juga uang pinjaman yang harus dikembalikan. Dalam situasi seperti ini, jika terpilih menjadi anggota DPR, seseorang sudah mempunyai agenda tersembunyi. Ia akan terus mencari cara agar mendapatkan sejumlah uang yang besar. Modal yang sudah ditanamkan untuk menjadi wakil rakyat harus kembali. Motivasi mencari uang akhirnya mengalahkan niat memperjuangkan kepentingan rakyat. Lebih celaka lagi, jalan paling mudah untuk mengumpulkan uang adalah memproyeksikan segala kewenangannya selaku wakil rakyat. Kekhawatiran ini tumbuh setelah mendengar aneka kisah politik uang

yang dipraktekkan oleh berbagai partai politik. Untuk menjadi wakil rakyat, partai memungut biaya. Sebagian dari pungutan itu resmi, sebagian lagi hasil kreativitas oknum partai. Biaya yang dipungut seputar Rp. 5-400 juta. Setiap posisi dalam pencalonan itu ada harganya. Untuk menjadi wakil rakyat tingkat nasional, tarifnya lebih mahal dibandingkan untuk tingkat propinsi atau kabupaten. Calon yang ingin nomor jadi, terkena pungutan yang berlipat-lipat daripada calon di nomor urut yang harus berjuang. Beberapa partai politik memang kini dalam suasana dilematis. Mereka harus bertarung dalam pemilu yang sangat mahal. Total yang diperlukan partai untuk kampanye sangat besar. Dari mana partai memperoleh dana? Bukankah ekonomi nasional sedang morat-marit? Iuran anggota untuk mengisi kas partai tidak berjalan. Ingin mengharapkan donatur dari para pengusaha besar, pengusaha sendiri banyak yang terlilit utang. Ingin korupsi memeras BUMN atau BUMD, tidak semua partai mempunyai akses. Seandainya pun mempunyai akses, tak semua berani nekat. Jalan yang tersedia akhirnya memungut uang dari para calon legislatif. Toh tidak ada undang-undang yang melarang calon anggota legislatif menyumbang kas partainya sendiri. Agar elok didengar, pungutan itu harus diberi nama "sumbangan". Kesulitan partai politik soal dana dapat dipahami. Tetapi harus pula dipikirkan konsekuensinya jika calon wakil rakyat terlalu dibebani biaya. Lembaga DPR dapat terdistorsi, bukan lagi sebagai lembaga kepentingan rakyat, tetapi sebagai ATM. Sebagai mesin uang, setidaknya agar semua modal yang sudah ia keluarkan dapat kembali."

Pemirsa Metro TV, wakil-wakil rakyat kembali akan dipilih dalam pemilu 2004. Apa kendala yang dihadapi partai politik agar tercipta pemerintahan 2004 yang bersih dan kompeten. Kita mulai dari isu pertama, politik uang yang dipungut dari calon wakil rakyat. Berita Media Indonesia, edisi 11 November dari Bung Pipit Rochijat yang mengatakan bahwa partai-partai terlibat memungut biaya sangat tinggi pada calon legislatif.

Kita menghuBungi dulu Bung Pipit Rochijat di Jerman. Halo, Bung? Pertama klarifikasi dulu, apakah benar temuan anda di Sumatera Utara bahwa ada pungutan tinggi terhadap calon legislatif ?

PIPIT ROCHIJAT :

Halo, selamat malam Bung Denny. Waktu itu ada caleg dari PAN yang menceritakan kepada saya. Bidang saya adalah menganalisis penggaBungan-penggaBungan daerah pemilihan. Dan penggaBungan daerah di Indonesia itu ternyata sangat mengejutkan, karena lebih dari 80% daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah daerah pemilihan gaBungan. Sedangkan 54% daerah pemilihan di DPRD adalah gaBungan. Karena mayoritasnya gaBungan, akan timbul konflik internal parpol yang membuka kemungkinan bagi permainan uang. Misalnya di Sumbar yang akan dipecah menjadi enam daerah pemilihan. Nomor urut caleg satu parpol menjadi enam, dibandingkan dengan nomor urut parpol yang daerah pemilihannya hanya satu. Oleh karena itu ketika dia menanyakan soal peluang, dia menceritakan bahwa untuk menjadi caleg PAN dia harus membayar 16 juta untuk administrasi dan dana kampanye bersama-sama. Kemudian di Padang, seorang caleg dari Kabupaten Pasaman bercerita juga bahwa di Sumut, untuk menjadi anggota DPRD propinsi harus membayar Rp. 200- 300 juta, untuk DPR pusat Rp. 400 juta.

DENNY J.A. :

Di Media Indonesia juga disebutkan bahwa menurut Anda kader dari PDIP dan Golkar ?

PIPIT ROCHIJAT :

Ternyata soal membayar dana ini muncul di mana-mana. Golkar, PKB, PPP, dan PBB ternyata juga memungut. Saya sangat mengkhawatirkan kehidupan sistem kepartaian kita. Mestinya ada orang yang mau menjadi caleg sebetulnya kita sangat beruntung, bahwa orang itu peduli dengan kehidupan politik Indonesia. Tetapi

kalau dia dipungut biaya, saya khawatir caleg-caleg itu akan mundur. Dari beberapa yang saya temukan, banyak yang berpeluang meraih jumlah pemilih yang harus diraih, akhirnya mundur. Saya khawatir calon-calon yang mempunyai uang lebih, bergantung kepada para pemberi uang dari luar daripada kepada parpol. Banyak kasus misalnya ditemukan di Amerika Latin. Saya takut pemerintahan mendatang parlemennya jadi lemah.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Pipit terima kasih banyak atas informasi Anda. Sekarang kita akan mengklarifikasi, pertama ke Bung Pramono Anung. Bagaimana Bung, apakah benar PDIP di Sumut memungut biaya yang tinggi sekali sampai Rp. 400 juta ?

PRAMONO ANUNG :

Saya sungguh menyayangkan apa yang disampaikan Bung Pipit yang bersumber dari calon anggota legislatif PAN. Menurut saya itu tidak mempunyai nilai (value new), tetapi ini sudah menjadi berita. Kami ingin meluruskan. Bahwa di dalam internal PDIP kita mempunyai mekanisme melarang pungutan dalam bentuk apa pun, dan itu dituangkan dalam bentuk aturan partai. Karena memang kita berkeinginan di dalam proses rekrutmen, caleg itu tumbuh dan lahir dari bawah, sehingga dengan demikian kita mendorong ke bawah untuk partisipasi publik masyarakat pendukung PDIP untuk memilih calonnya.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, sebelum ke sana, apakah ada biaya-biaya administrasi ?

PRAMONO ANUNG :

Sama sekali tidak dipungut biaya. Semua biaya menjadi tanggung jawab partai pada tingkatannya. PDIP, dalam melaksanakan

kampanyenya, di setiap daerah pemilihan akan dibentuk tim kampanye khusus yang melibatkan semua pengurus, caleg daerah tersebut, sehingga kita akan mendorong adanya gotong royong di antara caleg-caleg yang ada, dan ini merupakan kebersamaan didorong agar mereka bisa bersama-sama. Karena bagaimanapun, tampilnya mereka pada kampanye kalau mereka tidak bersama- sama yang dirugikan adalah partai. Tentunya biaya ini yang pertama adalah dari partai. Yang kedua, dana pribadi, tetapi dana pribadi ini relatif. Kita mengharapkan juga bahwa orang mempunyai kreativitas untuk bisa menarik simpati masyarakat sehingga mereka mau menyumbang, misalnya dalam bentuk bendera, kaos, dan sebagainya.

DENNY J.A. :

Katakanlah, resminya tidak ada kebijakan dari PDIP, bagaimana kemungkinan kreatifitas pemimpin lokal di daerah yang secara diam- diam memungut uang dari caleg ?

PRAMONO ANUNG :

Sebenarnya tidak mungkin. Seperti yang saya katakan tadi karena caleg tumbuh dari bawah dan kita memiliki kriteria, termasuk di dalam kriteria itu disebutkan kalau ada politik uang, maka yang bersangkutan akan digagalkan pencalonannya. Termasuk yang merekomendasi dan menandatangani. Bagaimanapun aturan ini dibakukan dalam internal.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita ke Bung Hidayat Nur Wahid. Bagaimana di partai Anda, apakah juga ada pungutan yang mungkin administratif kepada calon-calon legislatif ?

HIDAYAT NUR WAHID :

Kalau kita merujuk pada pernyataan Bung Pipit Rochijat yang di dilansir di Media Indonesia, maka dinyatakan di situ bahwa

PKS bersih dari “virus” Sumut. Karena faktanya kita memang tidak melakukan pungutan apa pun terhadap calon anggota legislatif. Kita memberlakukan satu hal dan berharap bahwa ini merupakan awal yang baik untuk melakukan demokratisasi dan tanggung jawab bagi calon anggota legislatif.

DENNY J.A. :

Kita tahu bahwa dana terbatas, demikian juga iuran anggota. Bagaimana cara Anda mencari dana kampanye ?

HIDAYAT NUR WAHID :

Saya sangat bersyukur bahwa iuran di PKS berjalan sangat baik. Karenanya kami sering menyebut bahwa PKS singkatannya juga “Partai Kantong Sendiri”. Kita terbiasa memberdayakan konstituen, dan anggota. Kita juga memberlakukan satu peraturan yang sangat ketat terkait bahwa seorang calon tidak boleh mengampanyakan diri, tidak boleh meminta-minta, sampai pada tingkat menyogok. Calon memberikan sumbangan ke partai itu nanti bukan ketika dia dalam proses mendaftar atau proses calon anggota legislatif. Dia mungkin akan menyumbang ketika dia dalam proses kampanye. Mau tidak mau memang ketika melakukan kampanye, pasti ada hal yang dikelola oleh partai dan ada yang dikelola bersama-sama dengan calon anggota legislatif.

DENNY J.A. :

Apa konsekuensinya jika ada pungutan terhadap calon anggota legislatif ?

HIDAYAT NUR WAHID :

Kami memperkirakan memang benar sekalipun saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Kita sudah mengkritisinya ketika kita dulu mengkaji dan memperdebatkan rancangan tentang UU Pemilu. Ketika

kemudian berubah esensi dari pasal 6 ayat 1 tentang sistem pemilu yang berdasarkan stelsell terbuka. Kemudian diubah pada pasal ke 93 dan 107 ketika suara dianggap sah bila seseorang hanya mencoblos tanda gambar saja. Dan ketika seseorang tidak mencapai bilangan pembagi pemilih, maka seseorang akan menjadi calon anggota dewan bukan berdasarkan suara terbanyak yang ia dapatkan, tetapi berdasarkan nomor urut. Inilah kerawanan yang memungkinkan terjadinya pungutan-pungutan atau yang memungkinkan orang berlomba-lomba untuk memberikan uang lebih kepada partai atau untuk mendapatkan ranking tertinggi. Sehingga caleg nomor jadi itu juga diproyekkan akhirnya. Itu sudah sejak awal kita tengarai dan kritisi, tetapi karena ujungnya voting, kita kalah.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kembali ke Bung Pramono Anung. Bagaimana, Bung, apa perspektif buruknya jika ada pungutan itu ?

PRAMONO ANUNG :

Selama dalam proses penjaringan dan penyaringan, yang penting adalah aturan main di dalam internal partai, di mana kita bisa mengeliminasi, mengurangi dan kalau bisa menghilangkan pungutan uang dalam tubuh partai. Dan saya yakin partai-partai sekarang juga menginginkan mereka bisa menampilkan citra yang lebih baik. Untuk itu, proses yang terbuka tadi dan diketahui masyarakat sebenarnya juga mengurangi potensi politik uang dalam tubuh partai. Tetapi bahwa seseorang ketika dia maju dan berkampanye memerlukan dana, itu tidak bisa dipungkiri. PDIP termasuk yang beruntung karena kita mempunyai anggota legislatif di mana-mana, dan partai di beberapa daerah telah memiliki dana dari APBD dan APBN. Maka dana itulah yang digunakan untuk berkampanye partai.

DENNY J.A. :

Tetapi PDIP juga tidak menutup diri jika ada caleg yang memberikan sumbangan secara sukarela misalnya ?

PROMONO ANUNG :

Dalam proses penjaringan dan penyaringan, yang memberikan sumbangan seperti itu akan kita diskualifikasi. Tetapi kalau selama dalam proses kampanye dan sesuai dengan aturan main undang-undang bahwa seseorang boleh menyumbang Rp. 150 juta/orang, ini tentunya bukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang itu sendiri.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak. Kita kembali menghuBungi Bung Pipit Rochijat. Tadi Bung Pramono Anung sudah mengatakan PDIP secara internal atau tertulis melarang pungutan tinggi seperti anda katakan. Bagaimana komentar anda ?

PIPIT ROCHIJAT :

Kalau memang PDIP tidak memungut pungutan, ya, syukurlah. Tetapi kalau anda membaca media cetak antara tanggal 12 dan 14 November, di Surabaya ada sinyalemen bahwa caleg PDIP harus menyeter Rp. 200 juta kepada PDIP propinsi.

DENNY J.A. :

Kita bertanya ke Bung Pramono Anung, bagaimana, Bung ?

PRAMONO ANUNG :

Kalau memang itu benar, maka siapa pun yang menerima, baik itu DPD atau pemimpin partai propinsi pasti tidak diperkenankan oleh DPP untuk memimpin propinsi yang bersangkutan. Hanya sayangnya apa yang disampaikan oleh Bung Pipit Rochijat misalnya di Sumut

tadi temuannya adalah sumbernya dari caleg PAN. Tetapi di Surabaya sumbernya adalah media cetak. Maka dengan demikian kalau Bung Pipit Rochijat bisa membuktikan, kami dari PDIP sangat terima kasih dan kami berjanji, bagi siapa pun yang menerima dan melakukan penyogokan, akan kami gagalkan pencalegannya.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Pipit Rochijat ?

PIPIT ROCHIJAT :

Saya mengatakan tadi kalau memang PDIP melakukan itu saya anggap bagus, tetapi yang jelas seperti di PAN sendiri Pak Amien Rais. membantah keras ada keharusan tiap caleg untuk membayar. Tetapi dari caleg-caleg PAN sendiri mengakui dia ternyata harus setor. Sebetulnya keharusan menyeter itu saya pahami benar bahwa parpol kesulitan mencari uang, tetapi kalau ini terjadi saya sangat menyangkan karena akan menghancurkan sistem kepartaian kita.

DENNY J.A. :

Bagaimana jika biaya yang dipungut itu tidak terlalu besar, karena partai sekarang juga tidak mempunyai dana, dan itu lebih sebagai biaya administrasi dan juga dikembalikan bagi kampanye tokoh itu sendiri nantinya ?

PIPIT ROCHIJAT :

Saya pikir semestinya wakil-wakil rakyat yang saat ini duduk di parlemen yang dimintai sumbangan, bukan caleg. Artinya ini akan menyulitkan caleg-caleg yang tidak mempunyai uang untuk menyeter seperti yang diminta sebagai uang administrasi dari banyak parpol.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, tahan sebentar, kita ke Bung Hidayat Nur Wahid. Bagaimana jika ini hanya pungutan administrasi saja, toh akan dikembalikan untuk kampanye tokoh itu sendiri ?

HIDAYAT NUR WAHID :

Secara prinsip saya setuju dengan Bung Pipit Rochijat bahwa kalau pun ada pungutan sebaiknya memang tidak kepada caleg, tetapi itu pun harus transparan ke publik, dan sebaiknya tidak dibebankan kepada individu, karena memang yang saya khawatirkan kalau terjadi pungutan-pungutan apalagi jumlahnya sangat besar akan memunculkan apatisme publik tentang demokratisasi di Indonesia tentang peran parpol, kualitas pemilu, dan kualitas anggota dewan. Dan kalau publik apatis, bahkan menuduh dan kemudian tidak percaya, sangat kontraproduktif untuk seluruh proses demokratisasi di Indonesia.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung jika ini hanya pungutan administrasi saja yang kecil toh akan dikembalikan kepada caleg itu sendiri ketika pemilu mendatang ?

PRAMONO ANUNG :

Partai kami memisahkan dalam dua hal. Pertama, menjaring caleg dan menentukan nomor urut harus bebas dari pungutan, tetapi ketika sama-sama masuk pada masa kampanye ketika nomor urut dan sebagainya sudah ditetapkan oleh partai, itu memang ada biaya, dan biaya itu secara bersama-sama dan gotong royong dalam rangka mengkampanyekan diri dan partai. Itu memang ada biaya dan ditanggung secara bersama-sama dan juga ada bantuan dari partai pada masing-masing daerah pemilihan. Kalau kampanye memang harus ada, tetapi kalau menyusun nomor urut menurut saya dan di partai kami tidak ada pungutan apa pun.

DENNY J.A. :

Ok, saya bacakan dulu polling Metro TV bekerjasama dengan Mars. Ada dua pertanyaan, pertama, “Setujukah anda dengan penarikan sejumlah uang oleh partai politik peserta pemilu terhadap anggota calon legislatif ?” Sebanyak 81% responden “tidak setuju”, 12% “setuju”, dan 7% “tidak tahu”. Kedua, “Menurut anda apakah pungutan uang yang dikenakan terhadap para caleg akan berpotensi memicu gejala korupsi ?” Sebanyak 83% responden menjawab “ya”, 11% “tidak”, dan 7% “tidak tahu”. Jadi ini juga satu sentimen opini publik yang khawatir, yang mempunyai pandangan yang sama jika benar ada pungutan yang besar kepada caleg mungkin bisa menjadi bibit KKN baru yang justru menjadi beban pemerintahan 2004 mendatang.

Sekarang kita jumpai lagi Bung Pipit Rochijat dari Jerman. Tadi dikatakan bahwa partai membiarkan juga ada biaya untuk kampanye oleh caleg itu sendiri bersama dengan dana partai. Apakah ini menjadi masalah menurut Anda ?

PIPIP ROCHIJAT :

Menurut saya masih menjadi masalah. Sebaiknya parpol sendiri yang menanggung dana kampanye. Karena banyak kasus terjadi di Amerika Latin, kalau caleg juga dibebani dengan dana kampanye, ia akhirnya akan terikat kepada cukong-cukong yang memberi uang, bukan lagi kepada parpol. Sebenarnya itu bukan yang menjadi tujuan dari sistem kepartaian.

DENNY J.A. :

Tapi di Amerika Serikat, sebuah negara yang demokratis dan bahkan lebih mapan misalnya, toh para caleg juga boleh melakukan fundrising dalam rangka kampanye ?

PIPIT ROCHIJAT :

Ya, kalau di Amerika Serikat biasanya parpol yang melakukan. Anda bandingkan kalau di Indonesia dikenal dengan sistem distrik atau sistem mayoritas. Jadi caleg sendiri yang bertanggung jawab. Tetapi kalau parpol yang melakukan fundrising tidak ada masalah karena yang ditakutkan adalah caleg-caleg nanti di parlemen tidak akan disiplin, tidak akan lagi terikat pada parpol. Nanti susah parlemen kita.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, sebentar kita ke Bung Pramono Anung. Katanya walaupun untuk kampanye jika dana itu dari caleg tetap akan bermasalah. Bagaimana menurut Anda ?

PRAMONO ANUNG :

Yang pertama mungkin saya agak berbeda dengan Bung Pipit Rochijat. Bagaimanapun kehidupan demokrasi kita masih berbeda dengan kehidupan di negara-negara lain. Di mana kita juga mengaku bahwa sistem yang kita pilih sekarang ini adalah sistem proporsional terbuka, di dalamnya memungkinkan seseorang untuk mengkampanyekan diri, tidak mengkampanyekan partai, sehingga dengan demikian yang namanya caleg tentunya juga harus menanggung beban secara bersama-sama dengan partai. Tetapi menurut saya dan juga kita telah menetapkan bahwa fundrising itu tidak boleh dilakukan oleh personal atau individu. Jadi fundrising dilakukan pada daerah pemilihan yang sama dan itu dikoordinir partai sehingga tidak bersifat individualistis. Sebab kalau ini individu, kita menghawatirkan terjadi seperti yang dikhawatirkan Bung Pipit Rochijat tadi.

DENNY J.A. :

Ok, bagaimana Bung jika caleg untuk kampanye tidak dipungut biaya?

HIDAYAT NUR WAHID :

Secara prinsip sistem pemilu Indonesia memang tidak distrik tetapi sudah semi distrik, di mana seseorang akan dipilih namanya dan menjadi sah bila pencoblosannya juga mencoblos nama dan tanda gambar partai. Jadi memang ada unsur distriknya meskipun sudah semi distrik, sekalipun kemudian dianulir lagi. Intinya bahwa saya sangat setuju calon anggota legislatif tidak dipungut biaya apa pun. Tetapi ketika dia sudah berada dalam aktivitas kampanye, mungkin saja seorang caleg membiayai dirinya sendiri. Tentu saja organisator utamanya adalah partai politik. Fundrising seharusnya juga dilakukan oleh partai politik bukan individu-individu.

DENNY J.A. :

Kita akan menggali lagi apa yang seharusnya dilakukan agar money politic tidak bekerja dalam pencalonan calon wakil rakyat. Kita ke Bung Pramono Anung dulu. Kita tahu partai anda sudah mempunyai kebijakan resmi, tetapi bagaimana cara partai Anda mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan karena kadang-kadang tokoh lokal itu sangat reaktif ?

PRAMONO ANUNG :

Pertama, bahwa semua proses penyaringan atau rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua unsur partai. Dengan keterbukaan ini memungkinkan eliminasi politik uang dalam proses penjarangan. Kedua, adanya punishment. Punishment disebutkan dan dijelaskan pada semua yang ikut dalam proses itu, membuat mereka tidak akan berani untuk melakukannya. Karena begitu ketahuan, yang bersangkutan akan digagalkan pencalonannya. Tetapi punishment itu belum terjadi, karena dalam proses yang terbuka dan alhamdulillah kita sudah selesai pada level nasional sampai level bawah. Dan pada tanggal 2 Desember ini kita akan mengumumkan seluruh caleg kita yang di proses secara terbuka dan dari bawah.

DENNY J.A. :

Ok, Bung. Bagaimana partai Anda mengontrol di daerah-daerah supaya konsisten dengan kebijakan pusat terkait money politic ini?

HIDAYAT NUR WAHID :

Secara prinsip sistem yang telah terbangun di PKS adalah kegiatan partai tanpa korupsi dan suap. Jadi tidak mengalir begitu saja, menjadi bagian dari tradisi di PKS. Kami tidak terlalu sulit untuk mengontrol dan apalagi di salah satu struktur PKS ada Dewan Syariah, semacam yudikatifnya, yang selalu memberikan pengawasan dan pengarahan. Anggota kami alhamdulillah selalu konsisten dengan itu. Dan satu hal yang sudah saya katakan sesuai dengan undang-undang proses rekrutmen itu terbuka, transparan dan melalui mekanisme yang demokratis. Di PKS tidak mengenal adanya hak prerogratif ketua partai. Kita khawatir hak prerogratif membuka celah terjadinya money politic. Oleh karena itu kami tutup sama sekali, DPP bahkan tidak mempunyai hak prerogratif. Kecuali kalau kemudian ternyata ada informasi yang kuat dan terbukti ada indikasi seseorang melakukan money politic, kami akan segera menyampaikan kepada struktur yang di bawah untuk segera melakukan eksekusi. Tidak boleh calon yang terindikasikan terlibat korupsi untuk masuk sebagai caleg. Alhamdulillah, selama ini tidak ada yang kami berikan sanksi karena caleg itu telah terseleksi dengan baik.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Pramono Anung, mungkin ada close statement ?

PRAMONO ANUNG :

Kami sangat menginginkan bahwa proses penjarangan atau pencalegan dilakukan secara terbuka dan mudah-mudahan dengan keterbukaan ini akan menghasilkan orang-orang dengan kualitas yang lebih baik. Bagaimanapun dalam parlemen mendatang diperlukan

orang dengan kualitas yang lebih baik dan juga mempunyai spesialisasi dalam bidangnya di masing-masing komisi.

DENNY J.A. :

Bagaimana, Bung ?

HIDAYAT NUR WAHID :

Ini adalah era di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk menentukan wakil mereka ke depan. Mestinya mereka sudah bosan memiliki wakil-wakil yang telah terbukti korupsi dan seterusnya. Oleh karena itu jangan lagi memilih wakil rakyat atau partai yang masih memungkinkan terjadinya korupsi. Kedaulatan di tangan anda dan anda bisa memberantas korupsi dengan tidak lagi memilih wakil rakyat dari mereka yang melakukan korupsi sejak ketika dia dicalonkan.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi dalam “Parliament Watch” minggu depan bersama saya Denny J.A.

BAB IV
KONFLIK DAN
REKONSILIASI

POSO KEMBALI BERDARAH

Tanggal : 15 Agustus 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Saleh Saaf (Kabag Humas Mabes Polri), Hamid Awaluddin (Pengamat Politik), Mannase Malo (F-PDKB DPR RI)

Kerusuhan Poso kembali terjadi. Ratusan rumah terbakar, 5 warga ditemukan tewas, dan lebih dari seribu orang mengungsi. Suasana Poso kembali mencekam seperti kota mati. Apa yang terjadi di Poso ? Mengapa di kota sekecil itu keamanan gagal diredakan ? Sejauh ini sesungguhnya berbagai cara sudah dicoba untuk menciptakan rasa aman di Poso. Yang monumental adalah resolusi konflik yang digagas Jusuf Kalla. Bersama timnya, Jusuf Kalla memperkenalkan metode resolusi konflik yang dikenal dengan nama Deklarasi Malino. Pihak yang berkonflik dikumpulkan dalam satu meja secara bertahap, lalu mereka merumuskan sendiri apa yang menjadi penyebab konflik. Lebih dari itu, mereka bertekad untuk saling memaafkan dan menemukan solusi bersama untuk damai. Namun ternyata Deklarasi Malino pun gagal, pertumpahan darah kembali terjadi. Jika memang agama yang menjadi sumbu konflik di Poso, mengapa konflik baru dimulai bulan Desember 1998 ? Dan penganut agama yang sama sudah hidup di Poso sejak puluhan tahun lalu. Lalu muncul spekulasi tentang aktor nasional dan aktor lokal yang memicu konflik komunal

ini. Menariknya, TNI/Polri yang bermain politik secara cantik di Sidang Tahunan 2002 justru kedodoran dalam masalah keamanan dan pertahanan di Poso, bahkan disinyalir terlibat dalam konflik.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. negara gagal melindungi warganya! Ini pernyataan para pendeta di kawasan Timur Indonesia. Mereka melihat kerusuhan masih terus terjadi di Poso sampai hari ini. Sejak tiga tahun lalu sudah lebih dari 500 nyawa melayang. Kita memang mempunyai polisi, namun luas diberitakan, dua desa di Poso menolak polisi. Mereka menduga bahkan oknum aparat polisi terlibat dalam kerusuhan. Tentu dugaan itu belum tentu benar. Apa yang terjadi di Poso? Dan bagaimana solusinya? Itulah yang menjadi topik kita malam ini.

Sudah hadir di studio, pertama Bung Saleh Saaf, Kabag Humas Mabes Polri. Di sampingnya, Bung Hamid Awaluddin, seorang penyusun Deklarasi Malino. Kita juga akan menjumpai Bung Mannase Malo, anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Kita mulai dari Bung Saleh. Pemberitaan berbagai media sangat memojokkan polisi, kita ingin mendengarkan klarifikasi dari Anda. Misalnya, berita Suara Pembaruan kemarin sore bahwa Brimob diduga terlibat dalam kerusuhan di Poso. Seberapa benar berita ini ?

SALEH SAAF :

Mungkin saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu tidak saja ditujukan kepada polisi tetapi juga kepada institusi lain seperti TNI. Tuduhan itu bermaksud untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat yang sedang ketakutan atau yang sedang mengalami konflik bahwa di dalam konflik sekarang ini

sudah ada keberpihakan. Di satu waktu memang TNI yang dipojokkan, bahwa seolah-olah yang melakukan penyerangan dan sebagainya adalah TNI. Beberapa hari kemudian berkembang opini masyarakat di Poso, seolah-olah yang menyerang adalah Brimob. Saya yakin berita itu direkayasa oleh seorang provokator, oleh kelompok tertentu.

DENNY J.A. :

Jadi secara resmi Anda mengoreksi berita ini. Bagaimana kemungkinan jika misalnya oknum atau Brimob yang diserse atau frustrasi yang melakukan penyerangan ?

SALEH SAAF :

Tidak ada. Saya menjamin bahwa tidak pernah akan terjadi seorang atau sekelompok Brimob, petugas keamanan yang bertugas di sana maupun TNI, walaupun dalam kondisi psikologis seperti itu untuk menyerang penduduk yang perlu perlindungan kita.

DENNY J.A. :

Ini berita lainnya, ada dua desa yang menolak penjagaan polisi.

SALEH SAAF :

Memang faktanya demikian, karena masyarakat setempat sudah terprovokasi untuk tidak mau didatangi oleh pokja-pokja hasil kesepakatan Malino I untuk melaksanakan sosialisai. Ada beberapa desa yang menolak total, tidak mau ada kelompok sosialisasi untuk masuk ke sana.

DENNY J.A. :

Jadi berita ini arahnya hanya karena mereka tidak percaya polisi akan menjadi penengah yang netral dan tidak menjadi partisan ?

SALEH SAAF :

Sebetulnya kalau tidak percaya kepada Polri, mereka bisa meminta Kapolda untuk didatangkan aparat yang lebih cukup. Tetapi yang jelas saat ini sedang berkembang opini untuk membenci petugas keamanan. Yang mulai dikedepankan untuk dipojokkan adalah pihak kepolisian.

DENNY J.A. :

Koran Tempo edisi Rabu kemarin, mengatakan bahwa sejak Maret tahun ini belum ada satu pelaku kekerasan pun yang bisa ditangkap oleh polisi di Posso.

SALEH SAAF :

Mungkin yang dimaksud adalah tokohnya. Mungkin seperti yang ditunjukkan atau diinformasikan oleh kelompok yang bertikai. Katakanlah dari kelompok A mengajukan beberapa nama kepada kita, ini tolong ditangkap, kelompok B juga meminta beberapa orang yang harus ditangkap. Sedangkan polisi dalam penegakan hukum tidak mungkin menangkap orang tanpa ada bukti. Saya ingin menjelaskan, sejak Malino I ditandatangani kita sudah memenjarakan orang, malah ada yang sudah divonis dan sekarang sudah keluar lagi. Orang yang mengebom gereja sudah kita tangkap dan enam bulan putusan, dan sekarang mereka sudah berkeliaran lagi.

DENNY J.A. :

Ditambah sekarang mulai rusuh lagi. Mungkin publik layak juga mengetahui, kendala apa yang dihadapi polisi sehingga sulit sekali menjaga kedamaian di sana.

SALEH SAAF :

Yang jelas tidak ada respon yang positif dari masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat kepada Polri. Ini terjadi karena

masyarakat terprovokasi untuk menjauh, tidak mau mendekat dan tidak mau memberikan informasi kepada petugas karena mereka takut diintimidasi.

DENNY J.A. :

Pak Saleh, kita ingin mendengar pandangan salah satu penyusun Deklarasi Milano, Bung Hamid Awaluddin. Bung, apakah Anda puas dengan kinerja aparat menjaga proses itu ?

HAMID AWALUDDIN :

Masalah ketegasan aparat menjadi complain para stakeholder yang ada di sana. Dan ini kembali mereka gaungkan dalam pertemuan di Palu beberapa hari lalu. Tetapi ada keuntungannya, dari hasil pertemuan di Palu itu, mereka sepakat mendukung sepenuhnya segala ikhtiar yang dilakukan oleh Polri dan TNI untuk menegakkan hukum dan menegakkan stabilitas keamanan. Itu sebenarnya model buat Polri sekarang.

DENNY J.A. :

Bagaimana Anda menanggapi isu-isu bahwa aparat keamanan juga menjadi partisan sekarang ?

HAMID AWALUDDIN :

Saya tidak mau terlibat dalam polemik seperti itu karena datanya belum akurat. Yang saya ingin katakan adalah, hal itu sangat merugikan proses perdamaian karena bisa menjadi instrumen bagi siapa pun yang tidak senang dengan perdamaian, melemparkan isu seakan-akan negara ini collapse.

DENNY J.A. :

Kita tidak tahu berita itu benar atau tidak, tetapi opini itu hidup di masyarakat ?

HAMID AWALUDDIN :

Sangat hidup. Bahkan saya mendengar terakhir –tanpa ada keinginan memojokkan satu instansi– Kopassus sedang dituduh semacam itu. Katanya Kopassus pernah terlibat untuk mengecek adanya bantuan asing dan tentara asing di sana, Kopassus juga ingin menangkap siapa dalangnya. Semuanya berkembang begitu cepat, aurnya terang sekali dan itu sangat merugikan.

DENNY J.A. :

Resolusi damai disusun begitu rupa, tetapi mengapa kerusuhan muncul lagi sekarang ?

HAMID AWALUDDIN :

Kalau Anda melihat sejak Desember sampai beberapa bulan setelah itu memang ada bom di sana-sini, namun skalanya kecil sekali. Tetapi satu bulan terakhir tiba-tiba eskalasinya membesar. Menurut saya ada beberapa hal yang bisa menjabarkan. Pertama, dalam kedua komunitas yang sudah damai –Muslin dan Kristen– memang ada orang yang tidak menghendaki saudara-saudaranya berdamai, dan tipe seperti ini ada di dua kelompok. Kalau perspektif ini kita pakai, maka yang bertikai sekarang ini bukan lagi saudara kita dari Muslim versus Kristen, tetapi antara orang yang mau damai dengan orang yang tidak mau damai. Kedua, Anda mengetahui geografis Poso sampai Tentena itu jauh sekali, dipisahkan oleh hutan yang begitu luas dan susah terjangkau. Kalau Bapak Saleh Saaf mempunyai petugas tidak diberikan kelengkapan motor pasukan gerak cepat, bagaimana bisa memonitor sekian ratus kilometer itu ? Yang ketiga, saya tidak membela Polri dan petugas pengamanan, ini dilihat dari perspektif hukum saja. Memang bapak-bapak dari Polri ini mempunyai persoalan yang sangat mendasar sekarang. Dahulu ada Undang-Undang Subversif yang melindungi, begitu Anda menyangka seseorang terlibat, polisi langsung bisa menangkap. Kalau diterapkan sekarang akan konyol, akan langsung diteriaki.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita menghuBungi Mannase Malo. Anda satu-satunya anggota DPR di forum ini, tentu publik layak tahu apa yang sudah DPR lakukan untuk masyarakat Poso ?

MANNASE MALO :

Memang sampai sekarang belum ada suati kegiatan konkrit DPR misalnya dengan memanggil Pemda yang ada di sana untuk bertatap muka. Kami akan segera upayakan, saya akan mengusulkan kepada komisi II DPR untuk melakukan hal itu.

DENNY J.A. :

Menurut Anda sendiri, mengapa Poso kembali rusuh ?

MANNASE MALO :

Apa yang diputuskan kelompok elit politik tidak pernah benar-benar sampai pada grass root, kepada masyarakat yang bertikai. Dan sekarang kita melihat ada gejala bukan sekedar pertikaian horizontal antar kelompok masyarakat tetapi cenderung bersifat vertikal.

DENNY J.A. :

Jadi Anda melihat ada gap yang besar anatara kesepakatan elit dengan dinamika grass root yang sebenarnya ?

MANNASE MALO :

Ya, itu yang saya lihat. Suatu hal yang tampaknya hilang dari masyarakat di sana adalah kepercayaan pada yang lain, sudah tidak ada lagi.

DENNY J.A. :

Apakah Anda juga mengkritik Deklarasi Malino elitis misalnya ?

MANNASE MALO :

Iya. Saya melihat ada pasal-pasal yang mungkin menjadi pemicu juga. Misalnya dalam ayat 5 dan 6, “Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia, karena setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal di sana”. Bagi sekelompok masyarakat, ini justru dianggap sebagai salah satu akar permasalahan. Sekarang terlalu banyak orang datang ke sana, itu justru yang menyebabkan konflik jalan terus.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda, Deklarasi Malino diterapkan lagi tetapi dengan revisi yang radikal, begitu ?

MANNASE MALO :

Dengan revisi yang radikal. Apalagi saya mendapatkan berita bahwa sebagian kelompok Kristen yang menandatangani Deklarasi Malino mulai menarik diri karena mereka sudah merasa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ditandatangani sebelumnya.

DENNY J.A. :

Baik Bung Mannase. Kita cek dulu ke salah satu konseptornya, Bung Hamid. Bung Hamid, ada satu pasal yang menurut Bung Mannase justru membuat situasi lebih buruk ?

HAMID AWALUDDIN :

Saya tidak mau spesifik ke situ. Saya ingin mengatakan dulu secara umum bahwa tidak benar kalau deklarasi ini disusun oleh elit dari Jakarta, kemudian di-inforce ke bawah. Yang menyusun adalah para delegasi akar rumput yang bertandatangan, tidak hanya elit. Saya memberikan contoh, ada seorang pastor bernama Damanik yang pernah disayembarakan kepalanya oleh kelompok dari Muslim senilai Rp. 10 juta, berangkulkan dengan seorang dari Muslim yang membuat

sayembara tentang kepalanya, ini panglima perangnya. Menurut saya sangat benar bahwa ini dibuat oleh mereka sendiri, sepuluh butir itu, tidak ada satu pun kata di luar dari mereka.

DENNY J.A. :

Seberapa jauh ada kelompok-kelompok yang tidak terwakili, namun juga terlibat konflik ?

HAMID AWALUDDIN :

Menurut saya aspek representasi ini sudah cukup. Kedua, Prof. Mannase, poin keenam itu panjang diperdebatkan. Memang ada perdebatan panjang tentang Laskar Jihad waktu itu, jalan tengahnya, Poso adalah bagian integral dari republik. Tetapi kita tidak mau menjadikan Poso sebagai daerah eksklusif, karena itu ada klausul yang mengatakan bahwa semua orang boleh keluar dan masuk dengan catatan menaati adat istiadat.

DENNY J.A. :

Untuk jangka pendek, apa sebaiknya memang Poso ditutup dulu agar para pendatang tidak datang ke sana sehingga suasana akan bisa lebih aman ?

HAMID AWALUDDIN :

Saya kira itu akan lebih mengucilkan Poso. Bagaimana kalau Anda menutup arus ekonominya, proses sosialisasinya, itu akan membuat semakin runyam. Menurut saya, yang perlu dilakukan dan sesuai kesepakatan terakhir adalah melakukan sweeping besar-besaran.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda, Deklarasi Malino masih relevan tanpa perlu direvisi ?

HAMID AWALUDDIN :

Sangat relevan. Dan menurut saya, kita tidak perlu berpikir sebagaimana pengantar Anda bahwa Deklarasi Malino gagal, It's not fair.

DENNY J.A. :

Ok, kita mendengar dari Bung Saleh. Anda setuju Malino diteruskan dengan revisi ?

SALEH SAAF :

Kalau direvisi sementara tidak. Yang harus kita cermati adalah, apa yang sesungguhnya setelah ada Deklarasi Malino. Saya sepakat dengan beliau bahwa bukan tidak berhasil. Orang yang bertikai itu, pada saat kita mengumpulkan kembali para deklaratornya, mereka sepakat bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi.

DENNY J.A. :

Untuk di lapangan, mungkin kawan-kawan polisi lebih tahu apakah sebaiknya sekarang itu ditutup dulu supaya tidak banyak masuk kekuatan luar yang bisa mengacaukan perdamaian ?

SALEH SAAF :

Ini juga yang perlu saya jelaskan. Isu yang dilemparkan kelompok Kristen bahwa pelaku utamanya adalah Laskar Jihad. Dari Laskar Jihad juga membuat isu bahwa kelompok Kristen dibantu tentara asing. Itu semua hanya karena pembentukan opini dari kelompok-kelompok yang saling tidak suka.

DENNY J.A. :

Polarisasi politik begitu tajam sehingga opini pun tidak ada yang obyektif. Bung Mannase Malo, apa yang Anda tawarkan ke depan untuk menyelesaikan konflik di Poso ?

MANNASE MALO :

Sebelum Deklarasi Malino pernah ada satuan pengamanan dari TNI yang membuat situasi bisa tenang. Setelah adanya Deklarasi Malino, ada kebijakan dari Komisi Keamanan dan Penegak Hukum yang merupakan bagian dari Deklarasi Malino, lalu aparat keamanan yang bersangkutan ditarik dan diganti dengan yang ada sekarang, dan justru sekarang terjadi berbagai konflik lagi.

DENNY J.A. :

Sebentar, kita mendengar dulu, ada telepon dari Bung Iyan di Tangerang. Silakan Bung.

IYAN :

Selamat malam. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kalau boleh Kami mengusulkan soal Poso. Pertama, aparat harus benar-benar tegas, tidak ada pilihan lain. Kedua, saya mau bertanya kepada tokoh yang ikut mengonsep Deklarasi Malino I, apa pentingnya kelompok jihad berada di Poso ? Ini sangat melukai masyarakat. Apa kepentingan kelompok jihad harus masuk di Poso ? Terima kasih.

DENNY J.A. :

Baik. Selanjutnya Monang dari Jakarta, silakan.

MONANG :

Selamat malam. Bagaimana cara memerangi pengacau di Poso? Apa tidak seharusnya aparat secara intensif bernama Pemda setempat atau penduduk memerangi pengacau-pengacau ini. Mengapa sampai saat ini, baik di Ambon, Aceh atau mungkin di lain tempat tidak pernah ada hasilnya ?

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak, kita sudah menangkap message-nya. Kita ke Bung Saleh, ini pertanyaan pertama soal ketegasan aparat, juga mengulangi apa yang dikatakan Bung Mannase tadi bahwa memang tampaknya ada persoalan dengan parat di sana ?

SALEH SAAF :

Konsep pengamanan atau operasi Polri dengan menggelar Sintomo Maroso I-II yang sampai saat ini masih berlangsung untuk mencegah konflik-koflik ke depan. Kita mencoba menghitung kekuatan ideal untuk bisa menangani konflik di situ, di samping itu juga kita berusaha mengedepankan personel-personel yang didatangkan dari luar dengan tujuan agar tidak berpihak. Dengan meningkatnya eskalasi, Pimpinan Polri sudah mengeluarkan kebijakan akan mengembalikan kondisi kekuatan keamanan seperti semula. Sebelum Deklarasi Malino, kita menggelar kekuatan 4000 personel dan sekarang sudah tergelar kurang lebih 3380 personel. Setelah kejadian-kejadian ini akan terus bertambah, peralatan juga kita tambah, sarana komunikasi juga kita tambah. Di samping itu kita juga akan menangkap provokatornya.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Hamid. Bagaimana kemungkinan kelompok jihad distop dulu di sana ?

HAMID AWALUDDIN :

Itu adalah pilihan yang tepat dan terbaik. Terbaik karena satu pihak memandang itu satu persoalan, meskipun menurut saya bukan karena itu. Laskar Jihad masuk ke sana setelah konflik, artinya dia bukan sumber persoalan, sudah ada konflik sebelumnya. Tetapi untuk menghindari eskalasi, polisi dan TNI harus berperan menjaga keamanan di sana.

DENNY J.A. :

Jadi kelompok jihad dihentikan dulu. Dari pihak kelompok Kristen apa yang bisa dilakukan ?

HAMID AWALUDDIN :

Saudara kita dari kelompok Kristen juga harus lebih arif, laporan ke luar negeri itu juga harus berhenti. Dan sebenarnya sudah ada terapinya waktu pertemuan Palu kemarin. Mereka mengatakan bahwa untuk menghindari disinformasi, menghindari gosip, dan sebagainya, semua informasi itu harus dikelola oleh dua kelompok. Misalnya ada Crisis Center yang merilis informasi nyata yang dinilai bisa subyektif, semua informasi baik yang masuk atau keluar dikelola oleh sebuah center di mana kedua kelompok berada di dalamnya, itu terapinya. Kedua, terapi yang mereka usulkan bahwa aparat yang dirotasi sedemikian rupa dan fokus pada daerah-daerah rawan konflik yang ada, harus fokus terus di situ.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Mannase Malo. Dua-duanya anak bangsa, bertikai karena agama. Kira-kira bagaimana terapi untuk mereka dalam jangka panjang ?

MANNASE MALO :

Saya mengusulkan dikembalikan lagi aparat keamanan yang dulu. Dulu dianggap sudah kondusif situasinya. Dan itu bukan hanya soal jumlah –kalau boleh tambah kepada Pak Saleh Saaf tadi– bukan hanya soal jumlah 4000 personel tetapi juga menyangkut individunya. Karena individu-individu aparat keamanan pada waktu itu cukup obyektif untuk menangani konflik yang ada. Jadi kalau pun jumlahnya sama tetapi orangnya beda, bisa lain lagi soalnya.

DENNY J.A. :

Apakah Anda melihat lima tahun ini kedua kelompok yang bertikai bisa kembali rekonsiliasi ?

MANNASE MALO :

Kalau akar permasalahannya belum diselesaikan, saya masih ragu. Akarnya harus bersama-sama dipelajari dan dicari tahu masalahnya dengan terbuka semuanya.

DENNY J.A. :

Bung Hamid, apakah Deklarasi Malino ini masih relevan tanpa perlu direvisi ?

HAMID AWALUDDIN :

Menurut saya, revisi itu persoalan teknis. Yang substansinya relevan atau tidak ? Sangat relevan membayangkan, sebelum deklarasi jumlah orang yang meninggal disebutkan ada 1200 orang, setelah deklarasi drastis sekali penurunannya. Yang meninggal mulai bulan Desember hingga sekarang saya kira tidak sampai 30, jauh sekali perbandingannya. Artinya, deklarasi itu menghentikan sebuah moment di mana orang saling membunuh. Dan itu adalah tipe the point of the start new, jadi start with new beginning, memulai untuk sesuatu yang baru.

DENNY J.A. :

Jadi, ke depan tetap deklarasi tetapi dengan aparat keamanan yang lebih tegas ?

HAMID AWALUDDIN :

Persis, dan mereka sudah mencantumkan keinginan itu dalam kesepakatan hari Minggu kemarin.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Saleh. Apa rencana polisi ke depan supaya damai lebih bisa langgeng dijaga ?

SALEH SAAF :

Kita sudah mendapatkan dukungan secara langsung dari dua belah pihak, bahwa kita akan di-back up secara penuh oleh masyarakat untuk melaksanakan tindakan hukum sekaligus melaksanakan razia-razia. Kita akan kembali meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan memberikan kesempatan kepada kami untuk tidak diganggu dalam melakukan razia dan sebagainya. Jangan ada penolakan lagi. Karena kalau polisi memaksakan masuk, yang akan terjadi justru lebih buruk.

DENNY J.A. :

Apakah perlu Darurat Sipil atau Darurat Militer ?

SALEH SAAF :

Saya kira tidak perlu, kita masih sanggup. Kita juga akan melakukan pembinaan lebih intensif dengan memberdayakan pokja-pokja tadi, agar masyarakat tidak mudah diprovokasi. Kita juga akan menambah personel, akan lebih tegas lagi dan akan mengintensifkan pelaksanaan razia terhadap senjata api maupun lainnya yang ada di masyarakat.

DENNY J.A. :

Dan ketiga, walaupun ini Anda membantahnya, tetapi mungkin ada oknum-oknum di Polri yang juga perlu Anda klarifikasi ?

SALEH SAAF :

Tidak tertutup kemungkinan, kita juga tidak harus menutup-nutupi kalau memang ada anggota Polri yang terlibat. Pasti itu adalah oknum dan kita akan selalu melakukan tindakan.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, di segmen terakhir ini kita ingin mendengar pandangan, harapan, atau rekomendasi dari para pembicara untuk renungan kita semua, renungan publik di Jakarta, Poso, atau pun di mana saja di tanah air. Kita mulai dari Bung Mannase Malo, silakan Bung.

MANNASE MALO :

Catatan saya yang terakhir, salah satu wilayah konflik yang berhasil ditenangkan oleh Pemda-nya, itu adalah Maluku Utara. Jadi mungkin perlu juga Pemda Poso mencoba mengadakan studi banding ke Pemda Maluku Utara yang mengalami hal yang sama beberapa waktu yang lalu. Dengan satu pendekatan yang bersifat manusiawi dan personal, dua kelompok horizontal yang bertikai itu akhirnya bisa berdamai karena pada dasarnya mereka bersaudara.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak Bung. Bung Hamid ?

HAMID AWALUDDIN :

Hendaknya kita melihat kerusakan Poso bukan hanya perbedaan Kristen versus Muslim, jangan itu yang ditonjolkan. Mari kita melihat kebersamaan dan persamaan dari kedua kelompok ini. Misalnya kedua-duanya bosan dan tidak mau lagi berperang, ingin hidup berdampingan dengan anak cucu yang terdidik, ingin mengembalikan pengungsi dan seterusnya. Aspek ini yang harus ditonjolkan, termasuk oleh kita yang suka bicara di publik.

DENNY J.A. :

Ok, Pak Saleh, terakhir.

SALEH SAAF :

Saya meminta kepada seluruh masyarakat di Poso atau di mana saja yang sedang bertikai khususnya, memberikan kepercayaan yang lebih lagi kepada aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tingkatkan kewaspadaan, jangan mudah terprovokasi dan jangan menjauhkan diri dari aparat keamanan. Tanpa aparat keamanan yang hadir di tengah-tengah saudara, kita tidak akan bekerja maksimal. Dan masyarakat juga tidak akan merasa terayomi apabila jauh dengan aparat keamanan.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak kepada semua pembicara, semoga pemerintah benar-benar mendengar pernyataan para pendeta di kawasan timur Indonesia. Menurut mereka, negara telah gagal melindungi warganya. Semoga setelah kasus ini negara tidak lagi gagal melindungi warganya baik di Poso, Maluku, Aceh, Papua, atau di mana pun di tanah air.

Pemirsa Metro TV, terima kasih dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

MOMENTUM BARU DI ACEH

Tanggal : 12 Desember 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Wiryono Sastrohandoyo (Ketua Juru Runding RI),
Faisal Saifuddin (Ketua SIRA Jakarta), Ahmad Farhan Hamid (F-
Reformasi DPR RI), Munir (Imparsial)

Zaman sudah bergerak cepat, tetapi Aceh tetap dihadapkan pada situasi yang sama : penderitaan dan kegetiran hidup yang turun-temurun akibat konflik dan pertikaian senjata yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Sejak tahu 1976, sudah lebih dari 12 ribu nyawa melayang di Negeri Serambi Mekkah itu. Tak terhitung lagi berapa kerugian moral dan material yang harus ditanggung rakyat kecil. Berkali-kali upaya memperbaiki keadaan coba dilakukan dan berkali-kali pula upaya itu gagal. Harapan akan kedamaian menyeruak kembali ketika tanggal 9 Desember 2002, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mencapai perjanjian damai, disaksikan oleh lembaga internasional sebagai pihak ketiga. Akankah perjanjian ini benar-benar disepakati oleh kedua pihak? Apakah rakyat Aceh patut berharap banyak kepada keseriusan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali adalah “Momentum Baru di Aceh”. Sudah hadir di studio Bung Wiryono Sastrohandoyo, Ketua Juru Runding Indonesia. Di sebelahnya, ada Bung Faisal Saifuddin dari SIRA. Kita juga akan menjumpai Bung Munir dari Imparsial, dan Ahmad Farhan Habib anggota DPR dari Fraksi Reformasi. Seperti biasa untuk memperkaya diskusi, kita simak dulu pengantar berikut :

“Tanggal 9 Desember 2002, ribuan penduduk Aceh memenuhi rumah ibadah, mereka bersujud syukur dan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari itu pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyepakati perjanjian penghentian permusuhan. Jika segalanya berjalan lancar, maka Aceh kini di pintu gerbang kehidupan yang normal dan damai. Akankah perjanjian ini membuka sejarah baru di Aceh ? Ada dua pandangan yang berbeda, optimis dan pesimis. Yang optimis mengatakan Aceh kini memang memasuki sejarah baru. Untuk pertama kalinya, 24 negara secara aktif mendukung upaya damai di Aceh. Kehadiran dunia internasional memudahkan trust building antara Aceh dan pemerintah RI. Pemerintah Indonesia juga sudah berniat baik melalui diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, bahkan undang-undang itu dapat dimodifikasi lagi demi kesejahteraan dan ketentraman Aceh. Pihak yang pesimis melihat sentimen kemerdekaan di kalangan sebagian elit Aceh masih sangat kuat. Jika merdeka, mereka percaya Aceh dapat lebih kaya daripada Brunei Darussalam, dan bebas mendirikan Negara Islam. Kesan bahwa GAM mau berunding, itu hanya taktis di lapangan. Jika ada kesempatan, sentimen kemerdekaan akan dimunculkan kembali. Di sisi lain, banyak pihak yang diuntungkan oleh konflik Aceh. Berbagai oknum tentara dan oknum GAM mendapatkan uang justru karena konflik. Semakin parah konflik, semakin mahal mereka menjual jasa keamanan dan pungutan liar. Mereka ingin mengabadikan konflik di Aceh, sebaiknya menatap wajah penduduk Aceh yang bersujud syukur. Sudah terlalu lama rakyat Aceh menderita, terlalu

banyak ibu yang kehilangan anak, anak yang menjadi yatim, dan wanita muda yang menjadi janda. Semoga momentum 9 Desember 2002 tidak sia-sia.”

Pemirsa Metro TV, kita menghuBungi narasumber di studio. Bung Wiryono, apa keistimewaan kesepakatan 9 Desember 2002 dibandingkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Perjanjian yang terdahulu itu baru tahap kesepahaman yang bersifat sementara. Tapi pada bulan Mei 2002, kita mencapai satu dokumen yang namanya joint statement, suatu kesepakatan. Dan yang terakhir kita miliki adalah agreement, nilainya lebih tinggi lagi. Ini penting karena pemerintah mempunyai kebijakan untuk menyelesaikan masalah Aceh secara bertahap. Tahap pertama adalah diterimanya Undang-undang NAD sebagai langkah awal. Dalam situasi konflik, korban pertama itu selalu hak asasi manusia. Dan langkah yang paling penting untuk dilakukan adalah to take the guns out of politic.

DENNY J.A. :

Kapan kebijakan itu akan dilaksanakan ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Dalam perjanjian tersebut ada tenggang waktu dua bulan pertama untuk confidence building, kedua belah pihak terpisah dan kemudian dalam bulan pertama joint security committe didirikan, dan pada akhir dua bulan dimulai penyimpanan senjata.

DENNY J.A. :

Dalam kesepakatan ini kita melihat hadirnya Henry Dunant Center. Seberapa besar kontribusi lembaga asing ini terhadap upaya perdamaian di Aceh ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Di dalam setiap usaha menyelesaikan konflik selalu ada pihak ketiga. Dalam penyelesaian masalah Moro di Philipina Selatan, Indonesia bertindak sebagai pihak ketiga. Waktu di Kamboja ada perang, Indonesia juga menjadi penyelenggara Jakarta Inform Meeting (JIM) dan akhirnya menjadi co-president konferensi peralihan. Harus ada pihak ketiga, sebab pihak yang bertikai tidak bisa berbicara secara langsung satu sama lain.

DENNY J.A. :

Orang mengatakan, kesepakatan terjadi di kalangan moderat, tidak terjadi di meja perundingan tetapi di lapangan. Mengenai pihak garis keras dari Indonesia dan GAM, bagaimana mereka bisa ikut tunduk pada kesepakatan ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Ini tantangan bagi kedua pihak. Sampai hari ini hasilnya cukup menggembirakan. Memang tidak mudah kalau sudah berjuang selama 26 tahun lalu harus meletakkan senjata. Sebaliknya, pihak lain juga merasa masih kuat, masih mampu mengalahkan.

DENNY J.A. :

Soal senjata ini problematis karena map of conflict-nya masuk ideologi. Indonesia ingin integrasi, GAM ingin merdeka. Bagaimana kedua ideologi ini bisa bertemu dalam sebuah kompromi ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Itu semua harus melalui proses yang tidak mudah. Kalau kita melihat di Irlandia Utara, Palestina, Kashmir, Srilanka, di seluruh dunia, setelah berakhirnya perang dingin terjadi 111 intra state conflict. Semua terjadi di negara dunia ketiga.

DENNY J.A. :

Dalam pandangan Anda, Undang-undang Otonomi Khusus adalah tawaran tertinggi yang bisa kita berikan?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Dokumen-dokumen yang ada menunjukkan road map-nya, dan kedua pihak sudah komitmen pada road map tersebut.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Faisal. Menurut Anda, apa keistimewaan kesepakatan 9 Desember ini dibandingkan dengan yang sebelumnya?

FAISAL SAIFUDDIN :

Ini kelanjutan proses 10 Mei 2002. Sisi positifnya adalah adanya monitoring team dalam bentuk JSC (Joint Security Committee). Nanti kita bisa melihat kredibilitas JSC dalam memonitor di lapangan. Kita optimis upaya untuk menghentikan permusuhan kali ini akan efektif. Kemudian, hasil kesepakatan kemarin sebenarnya masih dalam kerangka kemanusiaan, belum masuk pada masalah yang sebenarnya. Inti masalah di Aceh adalah konflik politik. Tadi Pak Wiryono juga sudah menyinggung ada dua aspirasi di Aceh, pro kemerdekaan dan integritas. Kedua aspirasi ini harus bisa ditampung oleh pemerintah RI dan GAM. Dan kedua pihak sudah menunjukkan niat baik dengan adanya poin 2f.

DENNY J.A. :

Jadi kesepakatan ini lebih mudah karena masih dalam tataran kemanusiaan. Ketika membicarakan format politik, kesulitan akan jauh lebih besar. Menurut Anda, kompromi apa yang bisa dicapai dua ideologi yang berbeda itu ? Satu ingin merdeka, satu ingin integrasi.

FAISAL SAIFUDDIN :

Instrumen politik yang paling pas adalah yang demokratis, damai, dan bisa menampung dua aspirasi yang berkembang di Aceh, yaitu pro kemerdekaan dan integritasi. Jadi instrumen yang diusulkan oleh SIRA sebagaimana dimandatkan oleh rakyat Aceh sebagai kompromi politik adalah referendum.

DENNY J.A. :

Apakah ini referendum terhadap Undang-undang NAD atau kemerdekaan Aceh ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Kita melihat kesepakatan yang dibuat oleh GAM dan RI belum masuk ke inti permasalahan konflik. Kalau nanti UU NAD mau dijalankan Aceh, tetap harus dipulangkan kepada rakyat Aceh untuk menilai.

DENNY J.A. :

Apakah menurut Anda kesepakatan 9 Desember sudah menutup pintu referendum ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Belum, karena ini masih tahap awal. Jadi belum masuk ke agenda yang sangat politis.

DENNY J.A. :

Kita cek ke Bung Wiryono. Bagaimana Bung, apakah pintu referendum masih tetap dibuka oleh kesepakatan 9 Desember ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Kita harus merujuk pada dokumen yang ada. Di sini dikatakan

bahwa pemerintah dan GAM “Say the common objective to meet the aspiration of the people of Aceh to live in security, deputy peace of prospect and justice”. Jadi ini yang menjadi dasar kedua pihak untuk bekerjasama. Mengenai bentuk pemerintahan di Aceh nanti memang di dalam lingkungan Republik Indonesia. Dengan diterimanya NAD law, NAD law is otonomy law, jadi ini yang sudah disetujui dan ditandatangani.

DENNY J.A. :

Jadi menurut interpretasi Anda, ini sudah menutup pintu referendum untuk Aceh merdeka ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Saya tidak mengatakan itu menutup, tetapi itulah yang disetujui kedua belah pihak. Saya tidak ingin menutup atau membuka. Tetapi satu hal yang harus kami katakan, masalahnya bukan integrasi seperti di Timtim. Jadi mungkin sikap Indonesia yang paling jauh adalah memodifikasi Undang-undang Otonomi Khusus tetapi mungkin tidak mempertanyakan lagi itu, karena sudah ada acceptance.

FAISAL SAIFUDDIN :

Kalau mau mencapai kedamaian yang abadi di Aceh harus menyentuh ke akar permasalahan. Kalau NAD itu menurut saya hanya menyentuh sisi keuangan, bukan ke akar masalah.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menghuBungi Bung Munir. Upaya damai di Aceh tampaknya begitu sulit dilakukan. Menurut Anda sebenarnya apa kendala utamanya ?

MUNIR :

Ada tiga aspek yang mesti kita lihat dalam usaha memperbaiki

kondisi Aceh dan hambatan yang akan dihadapi. Pertama, kita harus melihat ada hambatan yang cukup serius di tingkat perdebatan ideologi NKRI. Hal itu akan tetap menjadi masalah karena perdebatan soal ideologi NKRI di Indonesia masih merupakan retorika politik ketimbang aspek yang substansial. Bahkan perdebatan mengenai ideologi NKRI masih menjadi atribusi aktor-aktor politik nasional. Misalnya kalau kita berbicara tentang NKRI, maka akan menyangkut kepentingan ideologi politik militer dan sebagainya. Ketika berbicara mengenai proses dialog sebagai pola penyelesaian konflik tanpa sengaja, seringkali itu dianggap bertentangan dengan keinginan-keinginan untuk mewujudkan NKRI.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda, perdebatan mengenai NKRI terjadi terutama di tubuh tentara ?

MUNIR :

Ini terjadi di tingkat kepentingan dan dalam tubuh tentara. Sementara otoritas politik sipil yang tumbuh pasca 1998 sebenarnya tidak punya posisi politik yang jelas. Apakah pembicaraan NKRI mesti merupakan bagian dari pembicaraan dengan posisi militer di Indonesia ? Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih melihat ancaman masa lalu tetap menjadi ketakutan besar ketika proses perdamaian yang coba diciptakan. Kalau kita melihat penandatanganan tanggal 9 Desember, respon yang paling menonjol di dalam negeri bisa dilihat dari pernyataan Pagdam misalnya menyatakan, “Ok, itu masa lalu, pelanggaran hak asasi tidak usah diusut kembali, dilupakan saja”.

DENNY J.A. :

Jadi, ancaman masa lalu menurut Anda adalah pelanggaran hak asasi manusia ?

MUNIR :

Pelanggaran hak asasi serius yang dilakukan kedua belah pihak dan sebenarnya juga menjadi sentimen masyarakat sipil di Aceh. Yang ketiga adalah menyangkut ekonomi politik dan politik ekonomi Aceh. Perdagangan senjata, obat, dan ganja juga telah menjadi motif konflik di sana, dan ini menjadi satu persoalan yang serius.

DENNY J.A. :

Soal motif ekonomi politik. Siapa pelaku-pelaku yang paling berpengaruh di sana ?

MUNIR :

Dalam konflik bersenjata semacam ini, kedua belah pihak yang bersenjata memiliki kontribusi dalam proses perdagangan obat dan semacam itu. Saya menduga kebocoran senjata milik TNI justru banyak terjadi di Aceh, dan itu menunjukkan kelemahan sistem kontrol terhadap unsur-unsur militer. Juga akan mengganggu kalau motif-motif ekonomi politik semacam ini tidak diatasi dengan segera. Selain itu, watak korup birokrasi juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Aceh.

DENNY J.A. :

Baik, Bung. Agar damai terjadi di Aceh, bagaimana solusi yang Anda tawarkan ?

MUNIR :

Menurut saya starting point-nya harus berdasarkan pada kesepakatan 9 Desember, karena kesepakatan itu merupakan suatu kemajuan yang paling berarti dalam 26 tahun terakhir. Pihak GAM melunakkan posisi politiknya dengan mengatakan, “Ok, kami starting point-nya koreksi terhadap NAD”, tidak lagi berbicara tentang “Kami harus berdialog dengan Pemerintah Belanda, tidak dengan Pemerintah

Indonesia”. Mereka melihat Pemerintah Indonesia sebagai realitas. Pemerintah Indonesia juga menganggap GAM sebagai suatu realitas politik, starting point-nya mereka terima, “Ok, Kami berdialog dalam proses itu”. Tindak lanjut yang paling penting dalam tahap itu adalah membangun wilayah damai di Aceh dengan mengontrol peredaran persenjataan dan aparatus militer. Dan ini sangat tergantung pada bagaimana otoritas politik sipil di Jakarta bisa mengambil keputusan yang bisa dipatuhi oleh unsur-unsur TNI, dan unsur-unsur di dalam GAM sendiri juga mematuhi.

DENNY J.A. :

Ok Bung, cukup komprehensif. Sekarang kita menghuBungi Bung Ahmad. Bung, Anda satu-satunya anggota DPR di sini. Sebagai wakil rakyat, bagaimana Anda melihat prospek perdamaian setelah 9 Desember 2002 ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Ada satu kata kunci dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Kita tidak mungkin menyelesaikan semua hal pada waktu yang sama, mesti ada step-step yang harus kita lalui. Dan apa yang dicapai pada 9 Desember baru tahapan awal dari sebuah proses panjang. Kita baru membuka pintu untuk masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Dan yang paling berat adalah pada kurun waktu 3 bulan pertama, di mana 2 bulan pertama sebagai confidence building. Setelah itu kita ingin melihat seberapa mampu teman-teman TNI/Polri menahan diri dan saudara-saudara dari GAM percaya pada perjanjian yang sudah kita lakukan, dengan mengumpulkan senjata secara bertahap. Kalau 3 bulan pertama dapat kita lalui dengan baik, Insya Allah prospek penyelesaian konflik di Aceh akan memberi harapan yang lebih sempurna.

DENNY J.A. :

Banyak yang mengatakan, skenario yang kita bangun adalah mengubah GAM menjadi kekuatan sipil yang tidak bersenjata dan berjuang melalui parlemen, begitu ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Berjuang secara politik tidak harus melalui parlemen.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan kemungkinan kendala-kendala lainnya ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Kendala paling besar yang kita hadapi adalah pada tingkat komandan-komandan lapangan, baik TNI/Polri maupun GAM. Pertama, jangan terlalu mengobrol statement yang tidak perlu. Pada dasarnya tugas utama TNI/Polri dan pimpinan GAM adalah melakukan tugas-tugas militer, bukan memberikan statement politik. Kalau tidak, akan terjadi adu argumentasi yang tidak perlu dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang sudah kita capai.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Faisal. Bagaimana kemungkinan GAM berubah dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan politik sipil yang berjuang melalui parlemen ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Saya belum sepakat bahwa GAM nanti akan berjuang lewat parlemen, karena harus ada statement dari GAM tentang hal ini. Kembali ke masalah konflik di Aceh, konflik politik ini harus diselesaikan lewat jalur-jalur politik dengan mengakumulasi aspirasi mereka. Jadi aspirasi yang pro kemerdekaan dan pro integritas harus ditampung.

DENNY J.A. :

Dan Anda melihat masih jauh sekali kemungkinan GAM untuk menjadi kekuatan sipil yang tidak bersenjata ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Iya. Karena kita melihat. Kesepakatan 9 Desember kemarin masih dalam konteks kemanusiaan. Walaupun ada review terhadap NAD, bukan berarti GAM menjamin akan menerima NAD.

DENNY J.A. :

Bung Wiryono, apakah Anda setuju bahwa damai mustahil terjadi jika GAM tidak berubah dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan politik sipil ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Dengan menandatangani kesepakatan 9 Desember, berarti GAM bersedia menyimpan senjata. Setelah itu, sebagai warga negara mereka berhak memperjuangkan aspirasi dalam suasana demokrasi dan damai di mana kemakmuran bisa dibangun.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita mendengar komentar melalui telepon dari Bung Joko di Bogor. Halo, silakan Bung.

JOKO :

Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah dan GAM yang telah mencapai perdamaian. Saya meminta kedua belah pihak jangan meluas ke yang lain, tahap pertama ini diamankan. Kita mesti saling percaya. Saya percaya masih ada pihak yang masih curiga pada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu hati kecilnya sangat baik. GAM juga jangan curiga pada pemerintah. Pemerintah itu niatnya baik, otonomi khusus itu baik, dan jangan meluas ke politik dulu.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih. Bung Ahmad, tahap pertama ini masalah trust building, please keeping. Masalah apa yang menurut Anda paling sensitif dan sanga krusial ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Kadang yang paling tidak bisa kita kontrol adalah pasukan di daerah-daerah terpencil yang informasinya kurang baik diterima, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi masalah sosialisasi itu penting sekali. Tetapi dari sisi lain saya melihat espektasi masyarakat dalam satu-dua hari pertama setelah 9 Desember membawa angin segar bagi para perunding, pemerintah dan GAM. Tinggal bagaimana me-maintain, mempertahankan kondisi ini, bukan hanya membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang paling penting adalah membangun kepercayaan masyarakat kepada dua pihak ini sekaligus kepada upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

DENNY J.A. :

Sekarang Bung Munir. Pada tahap pertama ini, bagaimana kita bisa membuat demiliterisasi sehingga GAM meletakkan senjata dan TNI keluar dari daerah konflik ?

MUNIR :

Perjanjian awal ini adalah untuk mendorong penyelesaian soal Aceh ke wilayah non bersenjata, wilayah perundingan. Tahap awal ini adalah proses membangun saling kepercayaan, itu yang paling penting. Bagaimana GAM yakin bahwa mereka aman, dengan menyerahkan senjata mereka tidak akan diserang. Dan sebaliknya, pemerintah Indonesia menjamin adanya effective control terhadap unsur-unsur militer agar mereka tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kedua, selain menarik jarak dari pertikaian, elemen-elemen bersenjata juga harus mencari jalan bagaimana melindungi ruang

masyarakat sipil di Aceh. Karena masa depan penyelesaian soal Aceh tergantung pada bagaimana ruang yang diciptakan dan jaminan keselamatan terhadap masyarakat Aceh. Misalnya unsur kepolisian di sana diberi hak untuk melakukan tindakan-tindakan polisional, maka jangan lagi menangkap orang atas alasan-alasan politik. Jadi ruang-ruang masyarakat sipil harus kita pertahankan agar masalah Aceh kembali ke dalam wilayah-wilayah tanpa senjata.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita mendengar lagi suara publik melalui telepon. Bung Yanto dari Bekasi. Halo Bung, silakan.

YANTO :

Menurut saya masalah Aceh sudah termasuk separatisme, ingin memisahkan diri dari NKRI. Mengapa tidak diserbu saja seperti DI/TII dulu, jadi kita tidak perlu berunding dengan pemberontak bersenjata.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak Bung. Bagaimana Pak Wiryono ? Ini suara dari garis keras. Mereka menganggap GAM adalah pemberontak bersenjata tapi malah diajak berunding, mengapa tidak ditumpas saja?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Suara demikian ini juga suara rakyat. Akan tetapi kehendak untuk mencapai perdamaian lebih kuat daripada nafsu berperang. Penyelesaian secara damai yang dihormati oleh kedua belah pihak akan lebih lestari. Sebab kalau ada pihak yang dikalahkan, yang dikalahkan ini akan bangkit kembali.

DENNY J.A. :

Apakah kita mempunyai kriteria misalnya setelah beberapa kali upaya damai gagal terus, baru akan diambil tindakan militeristik sebagai upaya terakhir ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Dengan sendirinya kalau sudah mentok, sebagaimana dinyatakan perintah dalam pernyataan tanggal 19 Agustus, pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat.

DENNY J.A. :

Berarti upaya damai saat ini mungkin termasuk upaya yang terakhir untuk damai ?

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Saya tidak ingin sebagai yang terakhir, sebab kalau kita mengatakan terakhir itu time limit-nya terbatas. Di tempat lain, memperjuangkan perdamaian itu butuh waktu jauh lebih lama, kita dalam waktu dua tahun bisa mencapai sesuatu. Dan saya ingin kembali kepada yang tadi, dua bulan pertama itu disediakan untuk confidence building, memantapkan kedua belah pihak untuk bisa saling mempercayai. Permulaan bulan ketiga baru diadakan penyimpanan senjata secara bertahap selama lima bulan, jadi tujuh bulan. Ini waktu yang disediakan untuk membentuk suasana yang kondusif.

DENNY J.A. :

Bung Faisal, karena upaya damai saat ini sangat krusial, bagaimana membuat GAM merasa aman sehingga bersedia menyimpan senjatanya ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Sebenarnya bukan satu pihak saja yang ingin menghentikan permusuhan, GAM dan pemerintah sudah melihat bahwa konflik harus diselesaikan lewat jalur demokrasi, perdamaian. Untuk tahap selanjutnya kita segera membangun trust building, kedua pihak harus merasa aman di lapangan, aparat TNI/Polri juga merasa aman. Ini akan efektif dengan monitoring team yang netral oleh lembaga

internasional. Namun jangan melenceng dulu, jangan berbicara ke arah yang politis dulu.

DENNY J.A. :

Nanti juga terjadi inclusive dialogue menyangkut masalah human right violation, menolak otonomi khusus. Itu artinya ke depan memang lebih rumit ?

FAISAL SAIFUDDIN :

Makanya, ada satu hal yang sangat positif bahwa kedua pihak akan menyediakan ruang gerak bagi masyarakat untuk secara demokratis menggunakan hak-hak mereka.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Ahmad lagi. Bagaimana membuat situasi supaya GAM merasa aman dan bersedia untuk menyimpan senjatanya ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Pasal-pasal dalam kesepakatan untuk menghentikan permusuhan itu sangat jelas bahwa kedua belah pihak sudah ada aturan mainnya, dan yang paling penting ada suatu badan keamanan bersama atau Joint Security Commission. Di sana ada sekitar 50 orang asing selain Indonesia dan GAM, dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan saling percaya di antara kedua pihak. Kalau minggu pertama bulan pertama dapat kita sosialisasikan dengan baik dan kedua belah pihak tidak merasa saling mengancam, itu menjadi bagian awal yang sangat bijaksana sehingga dapat kita teruskan untuk tahap selanjutnya, GAM meletakkan senjata.

DENNY J.A. :

Jadi setelah senjata diletakkan, kita baru masuk ke tema yang jauh lebih rumit, masalah format politik Aceh masa depan ?

AHMAD FARHAN HAMID :

Saya kira formatnya sudah jelas, akan ada inclusive dialogue. Dalam pandangan saya, ini tidak lebih dari musyawarah rakyat Aceh. Di sana akan dilakukan review terhadap pasal-pasal Undang-undang NAD. Saya ingin mengingatkan saudara Faisal, Undang-undang NAD bukan persoalan uang, itu hanya sebagian kecil dari pasal-pasal yang kita singgung dari undang-undang itu. Ada masalah demokrasi, pengembalian budaya masyarakat, itu sangat luas.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, ini segmen terakhir. Masing-masing pembicara menyampaikan komentar terakhir. Dimulai dari Bung Munir, silakan Bung.

MUNIR :

Sekarang yang terpenting, proses yang berlangsung di Aceh harus bergerak dalam prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Aceh. Karena prinsip-prinsip keadilan akan bisa menjawab masa depan proses Aceh. Dan syarat-syarat proses politik sekarang harus memberi jawaban atas tuntutan keadilan masyarakat Aceh.

DENNY J.A. :

Bung Ahmad, silakan.

AHMAD FARHAN HAMID :

Ini adalah sebuah golden gate, pintu emas yang paling baik untuk menyelesaikan masalah Aceh secara bertahap. Jadi semua elemen, baik para elit politik di Jakarta, legislatif, eksekutif, sampai masyarakat paling bawah harus menjaga proses ini secara bersama-sama untuk mensukseskan ide dasar yang sudah kita capai pada 9 Desember. Dan ide dasar itu adalah bagaimana memberikan keamanan, keadilan, dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang Bung Faisal, silakan.

FAISAL SAIFUDDIN :

Saya perlu menekankan di sini, bahwa untuk mencapai perdamaian abadi di Aceh harus diserahkan kepada rakyat Aceh, dengan menghargai semua aspirasi yang berkembang di Aceh. Dan bingkai solusi politiknya adalah referendum.

DENNY J.A. :

Ok. The last word, Pak Wiryono.

WIRYONO SASTROHANDOYO :

Masalah Aceh adalah masalah dalam negeri, sekarang kita membawa masalah Aceh ke Aceh. Dan yang berlaku adalah diplomasi antara anak bangsa di Aceh dan Indonesia. Jadi mereka harus memperkuat perdamaian agar demokrasi dapat berfungsi dan kemakmuran dapat dibangun. Inilah tantangan yang dihadapi rakyat Aceh dan rakyat Indonesia seluruhnya.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sudah terlalu banyak air mata yang tumpah di Aceh. Kini pintu damai telah terbuka. Mereka yang kembali ingin merusak pintu damai itu sebaiknya kita jadikan musuh bersama, tak peduli apakah mereka dari Aceh atau dari Indonesia.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

REKONSILIASI TNI - GAM

Tanggal : 19 Desember 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Sholahudin Wahid (Wakil Ketua Komnas HAM),
Amran Zamzami (Mantan Ketua Komisi Independen Tindak
Kekerasan di Aceh), Ghazali Abas Adan (Mantan Anggota MPR
Utusan Daerah Aceh), dan Abu Sofyan Dawood (Panglima GAM)

Situasi politik boleh berubah, presiden boleh berganti, namun yang dihadapi masyarakat Aceh notabene situasi yang sama : konflik berkepanjangan yang mencekam dan sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa siapa saja, termasuk warga sipil yang tidak tahu apa-apa soal politik. Pemerintahan Megawati belakangan berusaha mempercepat proses rekonsiliasi di Aceh. Secara garis besar, damai akan datang di Aceh jika terpenuhi dua syarat. Pertama, demiliterisasi antara pihak yang bertikai berlangsung secara sukses. Melalui demiliterisasi, bukan lagi senjata yang berbicara, tetapi argumentasi dan kesediaan berkompromi. Kedua, kesepakatan format politik. Perumusan format politik untuk Aceh di masa depan merupakan bagian yang paling sulit dan sensitif dari proses penyelesaian konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia paling jauh hanya dapat memberikan status Otonomi Khusus yang diperluas. Sementara GAM tetap pada keinginannya untuk memerdekakan Aceh. Mungkinkah dua tahapan ini dilalui dengan sukses ? Bagaimana dengan pelanggaran HAM yang dilakukan kedua belah pihak ? Apakah akan diselesaikan dengan

saling memaafkan ? Apakah diperlukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ? Ataupun isu HAM itu harus dilupakan dulu demi redupnya permusuhan ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A.. Ada skenario penting di tahun 2004 atau 2005, pemerintah RI, tokoh GAM, dan Henry Dunant Center diundang ke Oslo, Swedia. Mereka dianugerahi Nobel Perdamaian karena mampu menyelesaikan konflik di Aceh. Rakyat Aceh melihat dunia baru yang damai. Dan dunia melihat Aceh sebagai contoh kasus yang sukses tentang penyelesaian konflik. Akankah skenario ini terjadi ? Penghargaan itu tentu masuk akal, karena kita sukses menyelesaikan tiga isu besar. Pertama, terbinanya rasa saling percaya di Aceh sehingga GAM secara sukarela meletakkan senjata. Kedua, selesainya isu pelanggaran hak asasi yang disepakati oleh kedua pihak yang bertikai. Dan ketiga, tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik politik Aceh demi masa depan. Tiga hal ini harus terjadi secara stimulan dalam dua, tiga, atau empat tahun. Jika tidak, momentum yang ada sekarang ini hanyalah jeda menuju konflik yang lebih besar di masa datang.

Itulah topik kita pemirsa. Sudah hadir di studio Bung Amran Zamzani (Mantan Ketua Komisi Independen Tindak Kekerasan di Aceh), Bung Ghazali Abas (Mantan Anggota MPR Utusan Daerah Aceh). Kita juga akan menjumpai Bung Sholahudin Wahid (Komnas HAM) dan Bung Abu Sofyan Dawood (Panglima GAM) melalui telepon.

Pertama kita akan menghuBungi Bung Abu Sofyan Dawood dari Aceh. Bung Sofyan, setelah 9 Desember, apakah Anda melihat kehidupan di Aceh sudah berubah secara signifikan ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Menurut pemantauan saya kondisi di Aceh belum berubah. Masih ada kekerasan, pengungsi masih ada, juga posko-posko militer yang tidak diinginkan masyarakat.

DENNY J.A. :

Bung, Polri mencatat sejak 9 Desember 2004 hanya terjadi 26 pelanggaran, dan itu kemajuan yang pesat. Anda setuju ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Pelanggaran apa ? Saya belum jelas.

DENNY J.A. :

Pelanggaran yang bersifat kriminal biasanya terjadi banyak sekali, tetapi sepuluh hari setelah 9 Desember 2004, hanya terjadi 26 pelanggaran.

ABU SOFYAN DAWOOD :

Itu angka yang kecil, perubahan sesungguhnya belum terjadi.

DENNY J.A. :

Anda percaya, setelah 9 Desember 2004 pemerintah dan militer ingin berdamai dengan GAM ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Belum, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda kejujuran.

DENNY J.A. :

Jakarta memahami bahwa Aceh akan damai jika GAM meletakkan senjata. Anda setuju ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Permasalahannya bukan meletakkan senjata atau tidak. Kalau RI meletakkan senjata, kita tidak mau membawa apa-apa, senjata akan diletakkan di markas. Senjata bukan untuk diletakkan, tetapi dijaga agar tidak melanggar tanggal 9 Desember.

DENNY J.A. :

Publik di Jakarta ingin mengetahui mengapa GAM masih memerlukan senjata, bukankah sudah ada lembaga internasional yang memantau ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Itu benar. Tetapi bagi kami senjata untuk menjaga diri. Kalau Indonesia benar-benar ingin menyelesaikan masalah Aceh, kemungkinan tidak ada senjata di Aceh.

DENNY J.A. :

Anda percaya lembaga internasional mampu mengontrol tentara Indonesia ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Saya percaya penuh karena mereka harus menjalankan sesuai dengan perjanjian.

DENNY J.A. :

Kita masih mempunyai waktu dua bulan untuk trust building, baru kita bisa melakukan tahap demiliterisasi ?

ABU SOFYAN DAWOOD :

Iya. Kita melihat bagaimana kondisi di lapangan, jangan ada lagi satu pun masyarakat Aceh atau ada gerakan apa pun yang bersenjata.

DENNY J.A. :

Oke Bung, terima kasih. Kita ke Bung Ghazali. Apakah Anda melihat perubahan yang mendasar setelah tanggal 9 Desember 2004 di Aceh ?

GHAZALI ABAS :

Saya kaget dengan prolog yang disebutkan bahwa konflik itu menjadi komoditas, mencari keuntungan. Tragis sekali kalau ini benar.

DENNY J.A. :

Berbeda dengan Pak Dawood. Justru Anda melihat trust building sudah mulai tampak ?

GHAZALI ABAS :

Kita berharap seperti itu.

DENNY J.A. :

Anda melihat jika terjadi demiliterisasi dan GAM secara sukarela meletakkan senjata, Aceh akan aman dari konflik ?

GHAZALI ABAS :

Benar. Senjata adalah biang keladi yang membuat orang menderita. Bila senjata tidak lagi menyala, Insya Allah Aceh akan aman sentosa.

DENNY J.A. :

Kita mempunyai waktu dua bulan untuk trust building.

AMRAN ZAMZAMI :

Damai hanya bisa bersemi dalam jiwa yang bersih.

DENNY J.A. :

Ok. Pemirsas Metro TV, isu lain yang rumit di Aceh adalah pelanggaran HAM oleh tentara Indonesia maupun GAM. Bagaimana agar isu HAM bisa ditangani tanpa mengganggu proses perdamaian. Kita menghuBungi Gus Sholah dari Komnas HAM. Apakah menurut Anda pelanggaran HAM di Aceh ini dilupakan dulu ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Jangan dilupakan tetapi ditunda penanganannya. Semua pihak harus mendukung upaya damai ini. Dan semua pihak juga tidak melupakan itu, kita mengutamakan perdamaian.

DENNY J.A. :

Katakanlah momentum itu datang, penyelesaiannya menurut adat atau agama ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Pertama, melalui pengadilan tetapi rasanya berat dan memerlukan waktu panjang. Kedua, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kebenaran diungkapkan, pelaku pelanggaran meminta maaf, dan amnesti diberikan, korban dan keluarganya diberi kompensasi dan rehabilitasi. Tetapi rehabilitasi membutuhkan undang-undang dan menurut DPR sampai bulan depan tidak ada waktu untuk membahasnya. Ini akan tertunda lagi.

DENNY J.A. :

Sebelum ada Perppu atau undang-undang, komisi itu belum bisa bekerja untuk Aceh ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Belum bisa.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan mekanisme seperti ishlah ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Itu suatu terobosan, kita bisa mencobanya. Ishlah juga bagian dari rekonsiliasi. Yang penting ada kepastian hukum bahwa nasib korban dan keluarganya tidak terabaikan.

DENNY J.A. :

Intinya investigasi untuk menyatakan siapa yang bersalah, lalu amnesti massal, rehabilitasi, dan kompensasi. Menurut Anda ini lebih adil daripada pengadilan terbuka ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Betul, karena pengadilan terbuka akan membuka borok-borok dan memerlukan waktu yang panjang.

DENNY J.A. :

Baik. Bung Amran, apakah Anda setuju sebaiknya masalah HAM ditunda dulu ?

AMRAN ZAMZAMI :

Ya, saya setuju dengan pendapat Gus Sholah, yang penting adalah kearifan dan kemaslahatan untuk menyelamatkan nasib bangsa.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, hak asasi tetap diusut, tetapi rekonsiliasi harus ditepati ?

AMRAN ZAMZAMI :

Kami mengusulkan kepada Gus Dur sewaktu menjadi presiden untuk membentuk KKR. Tetapi sayang belum diselesaikan.

DENNY J.A. :

Menurut Anda kapan momentum untuk membicarakan masalah itu?

AMRAN ZAMZAMI :

At least setelah 7 bulan dari sekarang dan secara be care. Saling membentuk, membina, dan percaya. Di daerah konflik ini, hak asasi dan penderitaan rakyat harus kita rehabilitasi.

DENNY J.A. :

Kita ke Bung Ghazali. Apakah Anda setuju kalau masalah HAM kita lupakan dulu ?

GHAZALI ABAS :

Gus Sholah mengatakan tidak boleh dilupakan. Apa yang terjadi dulu tetap merupakan pelanggaran HAM dan Tap MPR dengan jelas menyebutkan hal ini. Artinya kalau Tap MPR belum dicabut kita belum boleh melupakan.

DENNY J.A. :

Anda setuju demi perdamaian Aceh, elemen rekonsiliasi benar-benar dikedepankan ?

GHAZALI ABAS :

Pasti, tetapi kita jangan sampai mengabaikan Tap MPR tersebut.

DENNY J.A. :

Rekonsiliasi itu umumnya pertama amnesti massal, kedua ada kompensasi bagi korban. Dan itu lebih baik daripada pengadilan terbuka ?

GHAZALI ABAS :

Kita jangan mutlak-mutlakan dalam hal ini, yang satu kita abaikan, yang lain kita ke depankan. Harus secara simultan agar semua pihak merasa dilindungi dan diperhatikan.

DENNY J.A. :

Tap MPR ini tidak menyebut Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran ?

GHAZALI ABAS :

Tidak.

DENNY J.A. :

Gus Sholah, bagaimana supaya kita bisa cepat mendapatkan KKR?

SHOLAHUDIN WAHID :

Sebaiknya kita memberlakukan semacam Perppu KKR supaya bisa dimulai pelan-pelan, menyelesaikan dan mulai lembaran baru untuk melihat Aceh yang baru.

DENNY J.A. :

Berarti tergantung good will presiden untuk membuat Perppu ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Ya. Trauma rakyat Aceh tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Sekarang ini ada kecenderungan national security berubah menjadi

human security. Di situ dikemukakan, human freedom, human survival, dan human being. Ini perlu diantisipasi.

DENNY J.A. :

Ada telepon dari Bung Yusuf di Tangerang. Silakan.

YUSUF :

Saya ucapkan selamat kepada seluruh rakyat Aceh atas kesepakatan damai antara pemerintah RI dan GAM. Agar konflik tidak berkepanjangan, perlu rekonsiliasi dengan penuh keikhlasan antara pemerintah RI dan GAM. Masalah pelanggaran HAM tidak perlu dipersoalkan. Yang terpenting adalah, lupakan masa lalu. Kita membangun bangsa ini bersama-sama dengan harapan pencerahan masa depan.

DENNY J.A. :

Baik kita ke penelepon kedua, Bung Priyo di Bekasi. Silakan Bung.

PRIYO :

Menurut saya investigasi dan segala macam dilupakan saja. Kita saudara sebangsa, setanah air, senasib, dan sepenanggungan. Orang Aceh juga saudara kita. Kalau investigasi ditelusuri, kalau hak asasi ditegakkan rumit sekali. Kalau hak asasi dituntut, tentara akan menuntun juga.

DENNY J.A. :

Kalau tidak ada investigasi, bagaimana kita memberikan kompensasi, karena kita tidak tahu siapa korbannya. Kita ke Gus Sholah. Rekonsiliasi diterima tetapi tidak perlu investigasi dan pengadilan, dilupakan saja. Bagaimana Gus ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Kalau rekonsiliasi jelas tidak memakai pengadilan. Tetapi saya ingin bertanya kepada kedua bapak tadi. Seandainya putri mereka diperkosa, apakah mereka akan berkata seperti itu ? Ini pertanyaan untuk menghantui banyak warga Aceh. Ribuan orang yang mengalami seperti itu. Rekonsiliasi adalah jalan keluar terbaik dengan mencoba mengungkap kebenaran sekaligus memaafkannya. Kita melihat ke depan HAM tetap terjaga.

DENNY J.A. :

Kalau kita melihat di negara lain, sebelum rekonsiliasi, dilakukan investigasi dan dinyatakan secara publik siapa yang bersalah. Anda tidak setuju kalau investigasi itu sama sekali tidak dilakukan?

SHOLAHUDIN WAHID :

Iya.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Amran komentar Anda ?

AMRAN ZAMZAMI :

Masa lalu sudah berjalan. Pertentangan masa lalu dan masa kini korbannya adalah masa depan kita. Yang paling baik adalah, bagaimana mempersiapkan diri terhadap pengalaman masa lalu dan mendesain masa depan buat anak cucu kita.

DENNY J.A. :

Anda tidak setuju bahwa perlu investigasi ?

AMRAN ZAMZAMI :

Investigasi diperlukan, tetapi jangan mencari-cari. Kalau kita

sepakat, kita timbun itu sebagai masa lalu. Jiwa besar dan keikhlasan itu saya kira yang penting.

DENNY J.A. :

Baik Bung, terima kasih. Sekarang Bung Ghazali, dilupakan saja demi rekonsiliasi ?

GHAZALI ABAS :

Ishlah itu istilah Islam, rekonsiliasi atau memperbaiki masa lalu untuk ke depan. Hanya setelah ada vonis dan proses pengadilan, apakah mau memaafkan ? Prosesnya harus tetap jalan. Bentuk kesalahannya apa, siapa yang bersalah, sanksinya bagaimana, itu harus jelas. Persoalan korban memaafkan atau tidak itu urusan nanti.

DENNY J.A. :

Jadi menurut Anda tidak hanya investigasi, pengadilan pun diharuskan ?

GHAZALI ABAS :

Benar.

DENNY J.A. :

Sekarang ini yang penting damai lewat rekonsiliasi, kemudian membahas tahap-tahap politik selanjutnya. Pemirsa Metro TV, isu lain yang penting di Aceh adalah format politik. Mustahil ada damai di Aceh yang permanen jika pihak yang bertikai belum sepakat tentang format politik Aceh di masa mendatang. Kita menghuBungi Bung Amran. Bagaimana mendamaikan dua persepsi yang berbeda? Indonesia ingin NKRI, Aceh ingin merdeka. Bagaimana mencari format politik Aceh di masa depan dengan dua arus ini ?

AMRAN ZAMZAMI :

Format politik ini haruslah format politik dalam keadaan damai. Dan damai itu akan tercipta manakala guns to take get away from politics. Kita harus dapat mengubah perjuangan melalui bullet (peluru) menjadi perjuangan melalui kotak suara.

DENNY J.A. :

Tetapi Indonesia paling jauh hanya memberi otonomi khusus yang diperluas dalam rangka NKRI. Mustahil ada kesepakatan referendum dan memberikan kesepakatan untuk Aceh Merdeka ini.

AMRAN ZAMZAMI :

Mari kita batasi dengan apa yang kita sepakati. Kita sepakat dengan UU Khusus Otonomi NAD dengan starting point, hentikan permusuhan. Kemudian menciptakan suasana yang sejuk di mana kita dapat membuka rasa saling percaya, jujur dan saling menghormati sesama kita, percaya dan menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani.

DENNY J.A. :

Kembali ke Bung Ghazali, format politik masa depan Aceh adalah format politik yang dimodifikasi dalam kerangka NKRI, Anda setuju ?

GHAZALI ABAS :

Ketika masih di MPR, saya meminta pusat mengatur Aceh dalam tiga hal : moneter, politik luar negeri, serta pertahanan dan keamanan. Lainnya biarlah mereka yang mengatur.

DENNY J.A. :

Dalam kerangka NKRI ?

GHAZALI ABAS :

Terserah bagaimana maunya, yang penting GAM sudah mau berdialog dan orang dapat hidup aman, makmur, tentram.

DENNY J.A. :

Gus Sholah, otonomi yang diperluas, dalam kerangka NKRI, itukah format politik Aceh yang paling mungkin di masa depan ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Mengapa mereka ingin merdeka ? Karena mereka menghadapi perlakuan tidak adil, mereka merasa dijajah oleh orang Jawa. Kalau memang benar demikian, ini harus diperhatikan. Keadilan yang harus kita wujudkan di sana. Begitu banyak sumber daya alam dikuras dari sana. Tetapi mereka tidak ikut menikmati.

DENNY J.A. :

Keadilan bisa dicapai dengan cara otonomi khusus yang diperluas dalam NKRI, begitu ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Iya. Tetapi selama pemerintahan daerah masih korup, keadilan akan sulit terwujud. Pemerintah daerah Aceh adalah bagian pemerintah daerah di Indonesia yang rata-rata penuh KKN. Ini belum berubah dibanding dengan tahun-tahun yang lalu.

DENNY J.A. :

Anda setuju mustahil ada perdamaian di Aceh jika masih ada tuntutan referendum ?

SHOLAHUDIN WAHID :

Betul.

DENNY J.A. :

Ok. Pemirsa Metro TV, di segmen terakhir kita akan mendengar komentar-komentar singkat dari para pembicara untuk renungan kita, mulai dari Bung Amran, silakan.

AMRAN ZAMZAMI :

Sekarang adalah tahap penghentian permusuhan. Kita masih dalam proses mencari kedamaian di Aceh.

DENNY J.A. :

Bung Ghazali, silakan.

GHAZALI ABAS :

Kita berharap apa yang terjadi di Jenewa dapat kita patuhi dan terwujud di tengah lapangan. Kita meminta kepada semua pihak, agar bisa menahan diri.

DENNY J.A. :

Gus Sholah yang terakhir. Silakan.

SHOLAHUDIN WAHID :

Pertama, perjanjian adalah sebuah modal sosial yang besar untuk melangkah ke depan. Dibutuhkan kejujuran, keikhlasan, ketulusan, kesabaran, dan pengendalian diri dari semua pihak. Kedua, menurut Martin Luther King Jr, “tidak ada perdamaian tanpa keadilan”. Sekali lagi keadilan ! Ketiga, kita membutuhkan clean goverment, termasuk di Aceh.

DENNY J.A. :

Baik Gus Sholah. Terima kasih kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sudah banyak sekali renungan-renungan yang lahir dalam

forum malam ini. Kapabilitas kita sebagai bangsa akan diuji. Afrika Selatan mempunyai konflik yang lebih rumit dari Aceh, tetapi mampu menyelesaikannya. Jika Afrika Selatan mampu, mengapa kita tidak?

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

REHABILITASI KORBAN KOMUNISME

Tanggal : 28 Agustus 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Dr. Asvi Warman Adam (Sejarahwan LIPI), Sudomo (Mantan Pangkopkamtib), Robertus Guncahyo (Korban 'Bersih Lingkungan')

Komunisme menjadi beban politik yang sangat berat bagi bangsa Indonesia selama lebih dari empat puluh tahun terakhir. Ketika era reformasi bergulir Mei 1998, di mana kita bisa berdiskusi secara dingin dan melangkah ke depan tanpa ada trauma dan beban politik masa silam, ternyata masih berlanjut perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang terkait G/30/S 1965. Banyak korban G/30/S 1965 yang sebenarnya belum diputus bersalah oleh pengadilan. Namun mereka sudah lama menderita karena hukuman politik. Dalam konteks inilah rehabilitasi G/30/S 1965 menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Tanggal 12 Juni 2003, Mahkamah Agung memberikan pandangannya yang mendukung rehabilitasi tersebut. Ali Sadikin saat menerima penghargaan atas jasanya di Hari Kemerdekaan RI, sempat berbisik kepada Presiden Megawati untuk segera memperhatikan korban G/30/S yang sudah lama menderita. Puncak dari semua itu adalah pada Sidang Tahunan MPR 2003, di mana secara jelas dan tegas MPR meminta presiden menindaklanjuti kebijakan rekonsiliasi nasional.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV di mana pun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Bagaimana kita harus merespon konflik politik yang besar di masa silam. G/30/S/1965 dan komunisme merupakan konflik politik terbesar Indonesia sejak proklamasi. Banyak jenderal yang terbunuh, juga ratusan ribu warga bangsa. Sejak saat itu komunisme menjadi beban dan momok politik selama kurang lebih 40 tahun. Komunisme dan pemimpinnya, keluarganya pun –istri, suami, anak, bahkan cucu– mengalami diskriminasi berkepanjangan. Sekarang, wacana rekonsiliasi nasional kembali digulirkan. Muncul usulan rehabilitasi korban G/30/S/1965. Apa efek rehabilitasi ini bagi para korban dan situasi politik nasional kita ? Itulah topik kita malam ini. Di studio sudah hadir Pak Sudomo, mantan Pangkopkamtib. Di sebelahnya ada Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI. Dan kita juga akan menghuBungi Bung Guncahyo, seorang korban isu komunisme dan ‘Bersih Lingkungan’.

Pemirsa Metro TV, Komnas HAM sudah meminta presiden untuk merehabilitasi korban G/30/S dan PKI. Apa efek dari rehabilitasi ini bagi korban dan politik nasional ? Kita menghuBungi dulu Bung Guncahyo selaku korban isu komunisme. Bung Cahyo, di tahun 1965, berapa usia Anda ?

GUNCAHYO :

Dua tahun.

DENNY J.A. :

Dan Anda dihuBungkan dengan isu komunisme melalui siapa ?

GUNCAHYO :

Ayah saya.

DENNY J.A. :

Apakah Anda memang tokoh komunisme ?

GUNCAHYO :

Bukan, tetapi ayah saya dianggap PKI.

DENNY J.A. :

Bisa menceritakan sedikit penderitaan Anda di masa kecil ?

GUNCAHYO :

Saya tidak bisa bercerita, karena sungguh sangat menderita.

DENNY J.A. :

Setelah Anda dewasa, Anda bekerja di mana ?

GUNCAHYO :

Setelah lulus SLTA, saya mencoba masuk Akademi Militer.

DENNY J.A. :

Apa yang terjadi ?

GUNCAHYO :

Setelah dua tahun masuk, ketika sedang latihan peledakan, saya dipanggil dan dibawa ke batalyon. Di sana dibilang saya tidak memenuhi syarat administrasi.

DENNY J.A. :

Karena Anda dianggap tidak 'Bersih Lingkungan' ?

GUNCAHYO :

Waktu itu saya belum mengetahui 'Bersih Lingkungan', tetapi dianggap tidak layak administrasi. Perasaan saya hancur.

DENNY J.A. :

Anda berpindah ke tempat lain ?

GUNCAHYO :

Iya, saya bekerja di PT. Garuda.

DENNY J.A. :

Apa yang terjadi ?

GUNCAHYO :

Saya mendapatkan "sampul D" dan dibawa ke Koramil. Saat kembali ke perusahaan, saya melihat ada "label B" besar sekali.

DENNY J.A. :

Anda merasa disisihkan dari pekerjaan karena tidak 'Bersih Lingkungan' ?

GUNCAHYO :

Iya, benar.

DENNY J.A. :

Bagaimana perasaan Anda saat itu ?

GUNCAHYO :

Sebagai warga negara yang tidak mengetahui tentang G/30/S, saya merasa hak saya sebagai warga negara hilang, merasa terkena diskriminasi.

DENNY J.A. :

Anda mendengar adanya rehabilitasi bagi korban komunisme. Bagaimana Anda meresponnya ?

GUNCAHYO :

Rehabilitasi itu sangat dibutuhkan. Tetapi harus secara hukum.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak atas pandangan Anda. Pemirsa Metro TV, Anda mendengar Bung Guncahyo masih berumur dua tahun ketika terjadi peristiwa G/30/S, namun dia mengalami diskriminasi setelah itu. Kita ke narasumber dulu, Pak Sudomo. Bagaimana komentar Anda mengenai korban 'Bersih Lingkungan' ?

SUDOMO :

Ketika saya masih menjabat sebagai Pangkopkamtib tahun 1978-1983 memang disusun persoalan 'Bersih Lingkungan' atau sering disebut Litsus (Penelitian Khusus). Hal ini ditujukan kepada keluarga ABRI yang terlibat G/30/S PKI. Bukan untuk yang lain. Sebenarnya terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menerapkan.

DENNY J.A. :

Menurut Bapak, kebijakan 'Bersih Lingkungan' salah diterapkan ?

SUDOMO :

Iya, benar.

DENNY J.A. :

Saat periode Orde Baru, apakah ada koreksi terhadap kebijakan ini ?

SUDOMO :

Ada. Saya cepat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Asvi, komentar umum dulu terkait penderitaan yang dialami Bung Guncahyo karena ‘Bersih Lingkungan’.

ASVI WARMAN ADAM :

Saya ingin menanggapi Pak Domo perihal salah penerapan. Kalau salah penerapan, itu salah penerapan yang sistematis dan terencana, karena apa ? Karena Pak Domo mengatakan ‘Bersih Lingkungan’ hanya untuk anggota ABRI atau militer. Padahal tahun 1981 keluar keputusan Mendagri –waktu itu Pak Amir Machmud– yang melarang orang-orang terlibat G/30/S baik langsung maupun tidak langsung untuk menjadi pegawai negeri, anggota TNI/Polri, dan menduduki jabatan seperti guru, pendeta, dan lain-lain. Tahun 1966 Pak Harto juga membuat kategori Tapol A, B, dan C yang berlaku bagi militer dan sipil.

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Domo ?

SUDOMO :

Kategori itu ada tiga. Golongan C untuk simpatisan. Ada sekitar 500 ribu yang sudah dilepaskan waktu itu. Golongan B adalah kader PKI, yang memang terlibat, tetapi kita tidak bisa mencari buktinya, jumlahnya 33 ribu. Kemudian golongan A, yaitu orang-orang yang cukup bukti terlibat dan diproses di pengadilan. Tetapi mulai tahun 1975, saya melepaskan tahap demi tahap dengan nama ‘Operasi Ksatria’.

DENNY J.A. :

Tetapi tampaknya memang ada perbedaan pandangan di pemerintah ?

SUDOMO :

Sebenarnya ini hanya untuk mereka yang berkaitan dengan ABRI.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Asvi melihatnya ?

ASVI WARMAN ADAM :

Betul, tetapi pelepasan secara ksatria itu, sebenarnya lebih banyak karena dorongan atau desakan dari dunia internasional. Dunia mengancam, misalnya akan mengurangi bantuan atau menghentikan bantuan kalau tidak dilakukan perbaikan terhadap persoalan ini.

SUDOMO :

Pembebasan itu sebenarnya sudah lama dipikirkan.

DENNY J.A. :

Baik, Pak. Mungkin itu masa silam sehingga analisis kita berbeda. Ke depan Pak, ada rencana rehabilitasi dari MA, Komnas HAM, dan presiden. Bagaimana menurut Bapak ?

SUDOMO :

Saya sangat setuju dengan rehabilitasi itu.

DENNY J.A. :

Mengapa baru sekarang, apakah menurut Bapak karena situasi politik berubah secara radikal ?

SUDOMO :

Dengan adanya reformasi seharusnya begitu.

DENNY J.A. :

Ok Bung Asvi, mengenai rehabilitasi secara umum pandangan Anda?

ASVI WARMAN ADAM :

Jelas merupakan sesuatu yang harus dilakukan, seharusnya sejak dulu. Sekarang momentumnya sudah ada, Megawati tidak usah menunggu lagi. Penderitaan para korban gerakan itu sudah sedemikian lama. Kalau tidak ada rehabilitasi, anak mereka masih beranggapan, orang tua mereka orang yang pernah dihukum, dan pernah diadili.

DENNY J.A. :

Secara kuantitatif, berapa banyak yang mengalami kasus seperti Bung Guncahyo ?

ASVI WARMAN ADAM :

Banyak sekali. Tahun 1979 menurut Pak Domo masih ada sekitar 1 juta orang yang harus melapor. Umpamanya anggota keluarga mereka lima dan sudah beranak cucu, mungkin jumlahnya bisa mencapai 20 juta orang dan itu luar biasa banyaknya.

DENNY J.A. :

Anda menyarankan rehabilitasi secara massal ?

ASVI WARMAN ADAM :

Betul, karena tidak ada alasan untuk menunda. Soal kompensasi bisa kita bicarakan lebih lanjut.

DENNY J.A. :

Bagaimana menurut Pak Domo, rehabilitasi secara massal ?

SUDOMO :

Iya, artinya itu rehabilitasi untuk 33 ribu orang yang masuk golongan B.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, dua narasumber kita sepakat bahwa sekarang adalah eranya merehabilitasi korban komunisme. Masalahnya siapa yang bisa direhabilitasi dan siapa yang belum dan apa kriterianya ?

Kita akan membacakan dulu polling yang dibuat Metro TV bekerjasama dengan Mars. Ada tiga pertanyaan. Pertama, menurut Anda, perlukah pemerintah memberikan rehabilitasi terhadap para korban G/30/S/1965 ? 73% menjawab “perlu”, 21% “tidak perlu”, dan 6% “tidak tahu”. Kedua, menurut Anda, pada saat ini masihkah komunisme menjadi ancaman bagi Indonesia ? 78% menjawab “masih”, 20% “tidak lagi”, dan 2% “tidak tahu”. Komunisme masih dianggap sebagai ancaman. Dan ketiga, menurut Anda, apakah Tap MPRS No.25 tentang Larangan terhadap Ajaran Marxisme, Leninisme perlu dicabut ? 39% menjawab “perlu”, 52% “tidak perlu”, dan 9% “tidak tahu”. Menarik, mayoritas menganggap perlu rehabilitasi, tetapi mayoritas juga mengatakan komunisme masih menjadi ancaman. Pak Domo, dari semua pelaku dan korban komunisme, siapa yang bisa direhabilitasi dan siapa yang tidak ?

SUDOMO :

Golongan A, sudah diajukan ke pengadilan dan tidak ada sisanya lagi. Sehingga yang perlu direhabilitasi adalah golongan B dan C.

DENNY J.A. :

Menurut Bapak, golongan A jangan direhabilitasi ?

SUDOMO :

Golongan A sudah selesai karena seluruhnya sudah diajukan ke pengadilan.

DENNY J.A. :

Ok. Bung Asvi, pandangan Anda bagaimana ?

ASVI WARMAN ADAM :

Kalau saya bukan hanya golongan A, B, dan C, tetapi termasuk kasus yang lain seperti kasus Caltex tahun 1964-1965. Ada pegawai buruh yang membayar iuran 100 perak untuk Perbum (Persatuan Buruh Minyak) yang oleh pemerintah dianggap sebagai serikat kerja yang berafiliasi dengan PKI. Mereka tetap dibiarkan bekerja oleh Caltex. Namun pada tahun 1985 ketika mereka tidak dibutuhkan lagi, mereka “dirumahkan” dengan alasan bahwa pada tahun 1964-1965 mereka membayar iuran sebanyak 100 perak, terkenal dengan julukan “kanae seratus”, atau kena seratus. Hanya karena 100 perak, masa depan mereka menjadi hancur.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan golongan A, Anda setuju jangan direhabilitasi karena sudah diadili ?

ASVI WARMAN ADAM :

Bagi saya tidak usah dibedakan, karena toh orangnya tinggal 2-3. Tidak usah diberi kategorisasi lagi, karena akan memperlambat persoalannya. Padahal yang lebih banyak tadi golongan yang B dan C. Tetapi ada lagi yang sebetulnya bukan golongan A, B, C dan lain-lain, yaitu Bung Karno. Menurut saya Bung Karno adalah korban ‘65 yang paling besar. Saya tidak tahu apakah Pak Sudomo setuju atau tidak, tetapi Bung Karno adalah korban peristiwa ‘65.

DENNY J.A. :

Apakah rehabilitasi ini perlu diiringi permintaan maaf secara nasional dari pemerintah ?

SUDOMO :

Tidak perlu. Yang penting mereka dinyatakan tidak terlibat apa pun juga, lalu bebas sebagai warga negara seperti lainnya.

DENNY J.A. :

Kalau kita melihat proses rekonsiliasi di negara lain, ada rehabilitasi yang disertai permintaan maaf resmi dari pemerintah atas kejadian masa silam, bagaimana menurut Anda, Bung Asvi ?

ASVI WARMAN ADAM :

Sebenarnya bisa melalui beberapa jalur, seperti melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), tetapi prosesnya masih cukup lama. Rehabilitasi langsung menurut saya lebih baik, sebagai program jangka pendek. Sedangkan KKR setelah itu.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, Anda mendengar sendiri ratusan ribu korban yang direhabilitasi begitu banyak jumlahnya. Tetapi jika ini dilakukan, luka masa silam kita akan sembuh, dan bangsa kita akan melangkah ke depan jauh lebih ringan.

Sekarang kita mendengar pandangan dari pemirsa Metro TV melalui telepon. Pertama dari Bung Sundoro di Semarang, silakan Bung.

SUNDORO :

Saya mempunyai uneg-uneg. Pertama, masalah komunis yang tidak lepas dari sejarah bangsa, Nasakom misalnya. Masyarakat Indonesia

hendaknya sadar, bahwa Nasakom merupakan wadah persatuan. Bilamana ada masyarakat mengatakan Nasakom itu jelek dan busuk, berarti agama juga busuk. Kedua, kalau pemerintah mengatakan bahwa marxisme, komunisme, dan demokrasi itu jelek, tolong pemerintah membukakan dan mengedarkan buku-buku tentang itu.

DENNY J.A. :

Terima kasih Pak Sundoro. Penelepon kedua dari Ainuticar, Tangerang, silakan.

AINUTICAR :

Saya mau berkomentar ke Pak Sudomo. Anda mengatakan demi menegakkan demokrasi di sebuah negara, seharusnya komunisme itu boleh. Tetapi saat Anda sebagai Pangkoptamtib, katanya yang tidak boleh menjadi ABRI hanya warga yang terlibat G/30/S. Tetapi buktinya jangankan menjadi ABRI, PNS yang ketahuan istrinya komunis pun dipecat Pak ?

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih. Pak Sudomo, setelah empat tahun reformasi, Anda melihat masih banyak masalah yang perlu direnungkan kembali?

SUDOMO :

Saya harus mengakui memang demikian. Sebenarnya banyak yang tidak mengetahui bahwa pada saat masuk Pangkoptamtib pada tahun 1973-1983, saya sudah mengubah pendekatan persuasif, persuasi untuk kekuatan. Memang banyak kesalahan tetapi kita mencoba untuk meluruskan dan menegakkan kebenaran, intinya di situ.

DENNY J.A. :

Baik Pak, terima kasih. Pemirsa Metro TV, Anda mendengar sendiri setelah empat tahun reformasi, dengan jarak waktu yang

cukup, Pak Sudomo melakukan refleksi yang cukup menggembirakan, menyatakan sendiri sebenarnya banyak terjadi kesalahan di lapangan mengenai praktek 'Bersih Lingkungan'.

Pemirsa Metro TV, trauma politik kita tidak hanya masalah komunisme, tetapi ada masalah Bung Karno dan masalah Pak Harto. Ada gagasan menarik dari Petisi 50 yang memberi usul rekonsiliasi tentang tiga hal : rehabilitasi komunisme, rehabilitasi Bung Karno, dan adili serta memaafkan langsung Pak Harto. Kita mendengar komentar pertama dari Bung Asvi.

ASVI WARMAN ADAM :

Secara umum saya setuju dengan tiga usulan tersebut. Pertama, yang harus dilakukan adalah rehabilitasi terhadap korban 1965. Kedua, supaya segera dibentuk KKR, karena rekonsiliasi bisa dicapai setelah kebenaran diungkapkan, dan ada investigasi peristiwa pada masa lalu. Dengan demikian rekonsiliasi itu bisa kita harapkan akan berjalan lancar.

DENNY J.A. :

Pak Harto diadili dan langsung dimaafkan, Anda setuju sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional ?

ASVI WARMAN ADAM :

Ada perbedaan pendapat mengenai "dimaafkan" itu. Apakah langsung dimaafkan, atau dimaafkan bersyarat seperti dikatakan Amien Rais. Menurut saya diadili dulu supaya masyarakat mengetahui beliau bersalah atau tidak. Kalau sekarang dibiarkan mengambang, orang akan menduga : Soeharto melakukan KKN, melakukan pelanggaran HAM.

DENNY J.A. :

Ok, Pak Sudomo mau berkomentar ?

SUDOMO :

Saya sependapat. Pokoknya diadili dulu, baru kemudian masuk ke masalah rehabilitasi dan sebagainya. Tetapi saya mengusulkan dibentuk satu panitia nasional untuk melaksanakan. Dan sekarang yang mendesak adalah rehabilitasi komunisme.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada para pembicara, sayang waktu kita tidak banyak untuk mendetailkannya. Pemirsa Metro TV, salah satu buah penting dari reformasi adalah kesediaan para pemimpin kita untuk memulai rekonsiliasi nasional untuk mengatasi luka-luka masa silam yang begitu besar. Dan kita berharap langkah kita ke depan akan lebih ringan karena begitu banyak trauma yang pelan-pelan bisa dicarikan obatnya.

Para pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan bersama saya Denny J.A.

BAB V

TERORISME DAN
RADIKALISME AGAMA

TERORISME MENGANCAM INDONESIA

Tanggal :26 September 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Abu Bakar Ba'asyir (Amirul MMI), Slamet Supriyadi (anggota DPR Fraksi TNI/Polri), Prof. Dr. Muladi (Pakar Hukum), Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum)

Indonesia disebut-sebut sebagai “surga terorisme”. Sebuah tuduhan yang memerahkan telinga. Akan tetapi, terorisme memang problem Indonesia. Serangkaian aksi teror bom terus terjadi. Tragedi Bom Bali yang menewaskan ratusan orang, sebagian besar warga asing, adalah aksi teror terbesar kedua setelah peristiwa 11 September. Dan radikalisme Islam, yang banyak disebut-sebut Barat berada di belakang terorisme global saat ini, juga menjadi problem utama Indonesia. Isu terorisme di Indonesia hadir seperti hantu, menakutkan, dan menyeramkan, namun tidak pernah diketahui secara persis apakah terorisme itu benar-benar ada, apakah benar ada kaitannya dengan beberapa kelompok Islam di tanah air. Sementara pada saat yang sama tekanan Barat, khususnya Amerika Serikat agar Indonesia serius menangani masalah terorisme begitu besar. Maka muncullah gagasan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Terorisme. Persoalannya kemudian, bagaimana menyelamatkan RUU ini dari bias-bias kepentingan asing, bagaimana agar RUU ini benar-benar berbasis pada kepentingan riil bangsa Indonesia ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sudah hadir di studio Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Amirul Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Di sebelahnya Pak Slamet Supriyadi, anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri. Kita juga akan menjumpai dua pakar hukum, pertama adalah Prof. Dr. Muladi, dan kedua adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Hampir semua media cetak terkemuka telah memuat pernyataan duta besar Amerika Serikat sebagai berita utama. Di hadapan banyak tokoh Islam, dia mengatakan pemerintah Amerika tak pernah menuduh tokoh Islam atau Ormas Islam Indonesia sebagai agen terorisme International. Tetapi pada saat yang sama ia justru mempertegas keberadaan jaringan terorisme Al Qaeda di Indonesia. Dan yang membuat lebih was-was lagi, Majalah Time memberitakan Al Faruq terlibat dalam upaya pembunuhan Megawati Soekarnoputri, Presiden RI. Walaupun belum terbukti bersalah Abu Bakar Ba’asyir beserta organisasinya diidentifikasi sebagai teroris International oleh Amerika Serikat. Bahkan pemimpin Senior Singapura, Lee Kuan Yu menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi sarang teroris. Berbagai kekerasan yang terjadi di Singapura dan Malaysia kemudian dikaitkan dengan Abu Bakar Ba’asyir sebagai pemimpin spiritualnya, bahkan juga dianggap menjadi motor bagi proposal berdirinya Negara Islam Raya yang meliputi; Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Philipina. Namun di sisi lain, pengumuman duta besar Amerika Serikat itu juga menambah kekhawatiran. Kehadiran Al Qaeda di Indonesia justru diperkuat dan dikonfrontasi. Opini publik sudah terlanjur percaya bahwa Al Qaeda adalah jaringan terorisme yang sangat lihai dan menghalalkan kekerasan. Pernyataan duta besar Amerika Serikat mengenai tersebarnya jaringan terorisme International di Indonesia harus menjadi sejenis wake up call bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Jika benar Al Qaeda ada di Indonesia, sebelum gerakan ini meluas dan menguat, harus ada tindakan pencegahan dan

resepsi sistematis. Namun mengapa undang-undang penanggulangan terorisme tidak kunjung tuntas ? Sudah siapkah pasukan pengamanan menghadapi, mencegah, dan menaggulangi terorisme dengan kemampuan International ?

DENNY J.A.

Berita terakhir dari asisten menlu Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik. Menurut dia, "AS sudah mempertimbangkan untuk memasukan Jema'ah Islamiyah dalam daftar kelompok teroris International". Mungkin ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan dilabel sebagai teroris International. Bagaimana komentar ustadz?

ABU BAKAR BA'ASYIR :

Bahwa apa yang dinamakan Jama'ah Islamiyah itu sebenarnya tidak ada, jadi itu adalah rekayasa. Mengenai isu teroris atau terorisme yang umumnya ditujukan kepada pejuang Islam, itu tidak lepas dari sifat para kafir dan disebut dalam Qur'an yang selalu membenci Islam. Jadi jiwa orang kafir itu memang begitu terutama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani disebut dalam Qur'an tidak rela kalau sampai orang Islam melaksanakan Syariat Islam, maka diberi label-label yang menakutkan. Saya tidak tahu mengapa mereka menganggap Islam berbahaya, jadi nanti dibuktikan saja. Saya berpendapat bahwa itu hanya rekayasa yang tujuan sebenarnya bahwa Amerika sedang mengobarkan Perang Salib abad XXI. Para ulama sudah sepakat soal ini, bukti-bukti sudah menunjukkannya, karena Amerika sebagai ahlul kitab dan yang ditunggangi zionis Yahudi, sangat takut terhadap eksistensi Islam setelah jatuhnya komunis.

DENNY J.A.

Menurut anda sendiri, mengapa Anda yang dituduh tidak ulama lain misalnya ?

ABU BAKAR BA'ASYIR :

Mungkin saya sebagai pintu masuk yang pertama, yang lain akan terkena juga. Ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, saya menilai Osama Bin Laden dan Al Qaeda secara jujur tidak terlibat dalam peristiwa 11 September. Sampai hari ini tidak ada bukti, bahkan Amerika tidak bisa membuktikan. Dan saya mempunyai bukti yang kuat dari selebaran-selebaran dan orang-orang yang pernah datang menjenguk saya, bahwa Osama Bin Laden dan Al Qaeda itu pejuang yang menegakkan Islam, bahkan saya InsyaAllah percaya bahwa itulah antara lain Tentara Allah yang akan menegakkan kalimat Allah. Itu dianggap sangat merugikan tujuan Amerika untuk menyerang Osama Bin Laden dan kelompoknya, demikian pula menyerang Taliban, karena memang Osama Bin Laden dan kelompok Taliban itu pejuang-pejuang yang benar-benar konsekuen berjuang. Kalau terhadap tragedi 11 September, itu tidak lebih dari rekayasa Amerika untuk membenarkan tujuannya dalam menyerang sasaran-sasaran mereka, yaitu Osama Bin Laden dan Taliban. Supaya ada pembenaran maka dibuat satu peristiwa, dimasukkanlah orang yang menjadi sasaran itu seolah-olah terlibat, meskipun tidak ada bukti sampai sekarang. Saya kira sampai sekarang semua orang akan tahu bahwa itu tidak ada.

DENNY J.A.

Ok, baik Ustadz. Sekarang kita mendengar pandangan yang lain dari Bung Slamet Supriyadi. Menurut anda mengapa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi target Amerika Serikat sebagai teroris internasional di Indonesia ?

SLAMET SUPRIYADI :

Menurut saya, kalau kita melihat tahun 2000 dan 2001, Amerika merumuskan ancaman terhadap negara itu ada lima : terorisme internasional, kebangkrutan ekonomi, dan sebagainya, dan yang kelima adalah Islam Fundamentalisme. Tahun 2000 lebih spesifik lagi : teroris, Islam Fundamentalisme, ditambah teorinya Huntington bahwa ancaman di dunia nanti akan terjadi pembelahan antara

Islam Fundamentalisme dan sekuler. Yang sebetulnya lebih banyak mengarah antara Islam dan non Islam. Kemudian yang ketiga setelah peristiwa 11 September, Bush mengatakan perang terhadap terorisme. Ini artinya bahwa terorisme harus dilakukan dengan teror. Terorisme adalah suatu cara untuk memenangkan pertempuran atau perang politik. Oleh karena itu cara-cara yang dibuat pemerintah Amerika pada dasarnya menghalalkan segala cara termasuk dengan teror. Jadi tuduhan terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini belum ada dasar hukumnya. Oleh karena itu apalagi semenjak di Singapura ditangkap seorang yang diduga meledakkan kepentingan Amerika, dan di Kuala Lumpur mereka mengaitkan dengan Jama'ah Islamiyah.

DENNY J.A :

Tetapi hari ini Panglima TNI Soetarto mengatakan bahwa di Indonesia memang ada jaringan terorisme internasional ?

SLAMET SUPRIYADI :

Apabila memang ada, kita harus menindaklanjuti. Jadi kita tidak mengatakan spesifik, kemungkinan negara kita menjadi daerah operasi dari jaringan terorisme internasional. Ada kemungkinan besar, karena Indonesia sekarang ini semuanya dalam kondisi lemah. Penegakan hukum dan aparat hukum lemah, ekonomi lemah dan masih banyak konflik, baik horizontal maupun vertikal di negara ini. Saya tidak mengatakan Indonesia sebagai sarang terorisme. Tetapi teroris itu ibaratnya virus. Virus itu akan berkembang di tubuh (baca: negara) yang lemah. Tetapi kita belum bisa mengatakan benar atau salah selagi kita belum mempunyai rumusan yang definitif tentang terorisme internasional.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita menghubungi pakar hukum, Prof. Muladi. Halo, Bung. Selamat malam ? Anda salah seorang tim yang membuat UU

Anti Terorisme. Mengapa kita membutuhkan undang-undang ini, mengapa KUHP dan KUHAP tidak cukup ?

MULADI :

Halo, selamat malam, Mas Denny. Kita membutuhkan undang-undang penanggulangan terorisme, pertama, untuk menanggapi isu-isu internasional terhadap apa yang disebut sebagai terorisme. Kedua, menunjukkan kepada luar bahwa kita bisa membuat rumusan yang sesuai dengan kultur Indonesia sendiri apa yang disebut sebagai terorisme, disamping adaptasi terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat universal. Dan selama belum ada undang-undang tentang pemberantasan terorisme ini, maka sebetulnya tidak sah negara lain menuduh orang Indonesia melakukan terorisme. Karena tidak ada hukum yang mendasarinya, berdasarkan asas legalitas. Sebenarnya kalau kita mau jujur, KUHP sudah cukup untuk mengatur perbuatan terorisme itu. Karena RUU sepanjang menyangkut terorisme domestik, maka bisa dioperasionalkan KUHP atau peraturan kitab pidana lain yang di luar KUHP. Tetapi terorisme yang sekarang dibuat lebih ditekankan kepada terorisme internasional daripada terorisme domestik.

Ada beberapa perbedaan atau pengecualian. Pertama, apa yang disebut perbuatan terorisme ? Perbuatan terorisme adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan, menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang bersifat luas terhadap masyarakat dan bisa membahayakan nyawa, kemerdekaan badan, lingkungan hidup, proyek-proyek vital, dan sebagainya. Juga ada yang disebut sebagai memperkuat konvensi-konvensi internasional yang telah kita ratifikasi. Misalnya konvensi tentang pembajakan udara, dan konvensi lain, dan UU No.12 Tahun 1951 tentang bahan peledak, bom, dan sebagainya. Juga kita masukkan sebagai perbuatan terorisme, perbuatan financing terrorism.

DENNY J.A. :

Jadi melalui RUU ini kita akan jauh lebih mudah untuk menangkap calon-calon teroris ? Jika sudah mengesahkan RUU ini, apa efeknya bagi terorisme ?

MULADI :

Kalau sudah ada undang-undang ini kita bisa melihat bahwa kita bisa menghadapi terorisme internasional, siapa saja yang melakukan tindak pidana teror Indonesia, dan ada negara lain yang mengklaim memiliki yurisdiksi mungkin karena terlibat kepentingannya. Kalau terjadi klaim, maka bisa dioperasionalkan undang-undang terorisme ini. Kalau tidak, yang kita perlakukan adalah hukum pidana domestik.

DENNY J.A. :

Baik, Pak Muladi. Kita mendengarkan dulu pandangan yang mungkin berbeda dari pakar hukum lain dari generasi muda. Selamat malam Prof. Hik ? Apakah Anda setuju perlunya undang-undang penanganan terorisme di mana KUHP dan KUHAP tidak terlalu memadai sekarang ?

HIKMAHANTO JUWANA :

Pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah teror atau tindakan terorisme itu perlu dilawan karena merupakan suatu kejahatan. Kedua, saya kurang setuju kalau RUU Terorisme ini menjadi UU Terorisme kalau ada kaitannya dengan skenario yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah Bush. Kita harus mempunyai satu undang-undang untuk melawan terorisme dan ditunjukkan secara khas di Indonesia, tanpa tekanan dari pihak mana pun.

DENNY J.A. :

Terlepas dari ada atau tidak adanya desakan itu, bukankah kondisi obyektif di tanah air memang menghendaki RUU itu ?

HIKMAHANTO JUWANA :

Kondisi obyektif ini, pertanyaan pertama adalah tentu KUHP atau KUHAP bisa dipakai. Hanya hal yang mungkin tidak bisa digunakan adalah karena ada unsur terornya, unsur yang menakutkan banyak pihak. Jadi kalau pun perlu dibuat RUU-nya, seharusnya dimasukkan ke dalam ketentuan itu. Sedangkan mengenai aspek international ada tiga hal yang penting. Salah satunya adalah definisi teror atau terorisme. Ini harus jelas, karena jangan sampai nantinya negara lain akan bisa mendefinisikan secara bebas. Katakanlah menurut Indonesia teror itu apa sehingga dia mempunyai yurisdiksi.

DENNY J.A. :

Tampaknya RUU ini sedang dibahas dan akan keluar menjadi undang-undang. Menurut anda apakah ada kritik yang prinsipal yang ingin disampaikan ?

HIKMAHANTO JUWANA :

Kemungkinan besar kalau dari sisi Amerika Serikat akan menanyakan mengapa masalah agama dan politik akan dikeluarkan. Tetapi menurut saya kalau RUU ini menjadi undang-undang yang khas Indonesia, masalah politik dan agama harus dikeluarkan. Kedua, adalah kerjasama dengan negara lain. Ini harus hati-hati jangan sampai dijadikan entry point untuk negara lain masuk dan kemudian melakukan tindakan-tindakan terhadap warga negara Indonesia. Dan ketiga, jangan sampai UU Terorisme menjadi pemecah bangsa, dalam arti bahwa di Indonesia sensitifitas mengenai Islam dan sebagainya itu sangat tinggi. Jangan sampai dengan adanya undang-undang ini, Amerika Serikat kemudian bilang bahwa war against terrorism bisa diidentifikasi sebagai war against Islam. Ini bisa menjadi masalah bagi kita.

DENNY J.A. :

Baik, Pak Hik, kita tanyakan kepada pembicara di studio.

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Anda setuju kita akan mempunyai UU Penanggulangan Terorisme ?

ABU BAKAR BA'ASYIR :

Sepanjang itu tidak terkait dengan tujuan-tujuan Amerika di dalam memerangi Islam. Dan yang penting jangan sampai semua undang-undang yang dibuat merugikan perjuangan Islam. Oleh karena itu jika pembuatan undang-undang ini karena tekanan pemerintah Amerika saya tidak sependapat. Harus karena kesadaran kita sendiri dalam usaha memberantas kejahatan. Sejauh tidak merugikan perjuangan-perjuangan agama, terutama Islam ya boleh-boleh saja.

DENNY J.A. :

Bung Slamet Supriyadi, bagaimana pandangan anda tentang UU Penanggulangan Terorisme ?

SLAMET SUPRIYADI :

Kami sepakat. Yang penting harus ada kesamaan bahasa dulu apa pengertian dari terorisme internasional. Sejauh kita bisa menyepakati dan tidak lepas dari konvensi internasional, its ok. Tetapi kita melihat PBB sampai sekarang belum bisa merumuskan apa itu terorisme international, sidang OKI pun belum bisa merumuskan. Oleh karena itu agak sedikit membingungkan bagi kita kalau membuat rumusan terorisme. Berusahalah melepaskan kaitannya dengan politik dan agama. Barangkali yang paling penting satu itu.

DENNY J.A.

Baik, Bung nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mendengarkan suara publik melalui telepon, dimulai dari Bung Brojopati di Jakarta. Selamat malam, Bung ? Silakan.

BROJOPATI :

Selamat malam Kang Denny. Secara politik, Indonesia berada di bawah tekanan internasional khususnya Amerika. Untuk itu saya meminta kepada anggota DPR untuk kompak dengan pemerintah. Jadi anggota DPR jangan menyalahkan pemerintah saja. Kedua, untuk Pak Abu Bakar Ba'asyir, ciptakan suasana bahwa memang Islam itu agama yang cinta perdamaian. Kalau pun ada cara-cara untuk melawan tekanan Amerika yang begitu kuat, perlu dicari jalan keluar yang kira-kira bisa menciptakan suasana damai. Dan ketiga dari aspek hukum, ini memerlukan waktu panjang Prof. Muladi dan Prof. Juwana. Jadi dengan hukum ok, tapi jangka panjang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak, Bung. Kedua, dari Bung Manto di Lampung, silakan.

MANTO :

Kalau kita mengartikan terorisme karena tekanan Amerika, maka kita akan terjebak pada pengertian bahwa islam itu adalah terorisme. Karena Amerika sendiri sementara ini adalah negara yang memusuhi orang-orang yang beragama Islam.

DENNY J.A. :

Ok, Bung. Terima kasih banyak. Ketiga, dari Bung Hudaifah di Jakarta, silakan.

HUDAIFAH :

Pertama saya tujukan ke Pak Supriyadi. Pada bulan Maret, Hafid Iqbal Abdulrahman di tangkap di Matraman, dan tiga hari kemudian dijemput oleh pesawat khusus yang dikirim oleh intelijen Mesir. Kalau tidak salah, dia hanya dideportasi, karena tidak pernah berbuat

salah di Indonesia. Kedua, Umar Furouq, ditangkap di bilangan Bogor kemudian dideportasi ke Afganistan, karena saat ke Indonesia dia menggunakan paspor Afganistan, walaupun dia juga memiliki paspor Yordania dan Kuwait. Dia tinggal di sini sudah tiga tahun dengan status sudah kawin dan memiliki tiga anak. Bagaimana kita lengah tidak melakukan investigasi terhadap orang yang kita tangkap, sedangkan mereka dijemput oleh intelijen. Ketiga, untuk Pak Abu Bakar Ba'asyir. Bapak dengan Pak Abdullah Sungkar lama di Malaysia dan mempunyai murid. Dan salah satu murid Bapak ditangkap dengan tuduhan melakukan perampokan, dan dua lainnya lari. Tentunya Bapak tidak bisa mengatakan bahwa saya hanya mengajar agama dan tidak mengenalnya. Apa Bapak tidak memiliki daftar administrasi siapa orang-orang Bapak ? Terima kasih.

DENNY J.A. :

Dimulai dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dulu. Bahwa bagaimana jika Ustadz membuat pernyataan bahwa Islam itu cinta damai dan anti terorisme secara publik ?

ABU BAKAR BA'ASYIR :

Sifat dari Islam adalah cinta damai. Allah sendiri berfirman di dalam Qur'an, "Sesungguhnya Allah menciptakan bangsa-bangsa ini untuk saling mengenal". Bahkan Allah juga memerintahkan kepada umat Islam dalam Al Qur'an, "Umat Islam wajib berbuat baik dan adil kepada orang-orang non Islam yang tidak mengganggu memerangi Islam dan berdirinya Syariat Islam". Jadi pada dasarnya Islam itu membawa perdamaian. Syaratnya satu, pengalaman syariat jangan diganggu. Di dalam kenyataan yang ada, orang kafir selalu mengganggu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita diperintahkan untuk mensosialisasikan syariat itu dengan dakwah. Dengan keterangan-keterangan, kalau itu mendapatkan satu tantangan yang sifatnya argumen, kita mesti menjawab dengan argumen. Tetapi orang kafir dalam sejarahnya selalu kalau mereka memiliki kekuatan, tidak mempunyai argumen, mereka akan menantang kita dengan fisik.

Adalah satu hal yang tidak masuk akal kalau kita sudah mendapatkan tantangan fisik lalu kita hanya diam saja tidak membela diri, tidak membela Islam, maka Islam memerintahkan untuk membela diri seketika itu. Jadi saya mengharapkan dalam hal ini dipahami betul bahwa segala persoalan dan pertentangan yang ada dimulai dari orang kafir, seperti di Indonesia mulai Piagam Jakarta sampai peristiwa Ambon, itu semua orang kafir yang mulai bukan orang Islam.

DENNY J.A.

Sekarang kita menghuBungi lagi pakar hukum internasional, Bung Hik. Pertanyaan dari pemirsa Metro TV yang saya kira cukup relavan. Al Farouk ditangkap di Indonesia, lalu dibawa begitu saja ke luar negeri tanpa proses polisi di sini, tanpa record. Apakah ini benar atau salah ? Bagaimana Anda melihatnya ?

HIKMAHANTO JUWANA :

Ini menjadi masalah besar karena seharusnya aparat Indonesia melakukan penyelidikan, kemudian melakukan assessment apakah benar yang bersangkutan masuk ke dalam kategori terorisme atau pelaku teror. Yang menjadi persoalan adalah karena ada permintaan dari intelijen Amerika Serikat, lalu kemudian dilepas begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Ini kerjasama atau apa, saya juga kurang tahu. Tetapi yang sekarang terlihat adalah perdebatan ekstradisi dan deportasi seolah-olah hampir disamakan. Jika ada permintaan dari pemerintah Amerika Serikat, seharusnya kita meresponnya dengan melihat dulu apakah menurut hukum Indonesia, tindakan tersebut memang tindak kejahatan yang bisa diancam oleh hukum. Yang kedua, kita melihat apakah ada kepentingan Indonesia atau tidak ? Kalau sekarang Amerika mengatakan bahwa ada keinginan dari Al Farouq untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Megawati, seharusnya sudah harus didalami pada saat itu. Ketiga, kita harus melihat standar minimal yang akan diberikan kepada si pelaku. Karena saya mendengar bahwa pelaku ini dikirim ke Afganistan bukan ke Amerika Serikat, karena di sana ada military base-nya Amerika

Serikat. Tetapi apakah perlakuannya sama ketika dia di perlakukan di Indonesia.

DENNY J.A. :

Baik, Bung. Dari informasi terakhir kita mendengar bahwa ketahuan dia berencana membunuh Ibu Megawati baru setelah beliau diinterogasi di luar. Nah, sekarang ini apakah Indonesia bisa meminta kembali dia di sini untuk diadili misalnya ?

HIKMAHANTO JUWANA :

Secara teoritis bisa, pemerintah Indonesia meminta Al Farouq untuk dibawa ke Indonesia. Tetapi karena sekarang ini sudah menjadi tahanan Amerika Serikat, pertanyaannya apakah Amerika Serikat mau melepaskannya. Jika Amerika tidak mau, kita tidak bisa apa-apa.

DENNY J.A. :

Terima kasih. Kita ke Pak Muladi. Dalam draf RUU Terorisme yang Anda susun, bagaimanakah soal Al Farouq ini akan ditangani jika terjadi lagi ?

MULADI :

Di dalam RUU, saling bantu antar negara diatur apakah itu dalam bentuk ekstradisi atau yang disebut mutual legal system dan sebagainya. Tetapi seperti ekstradisi atau mutual legal system harus didasarkan pada suatu perjanjian ekstradisi dan perjanjian mutual legal system. Ada satu syarat yang namanya double criminality. Artinya di sana merupakan tindak pidana, di sini juga merupakan tindak pidana yang sama. Kalau tidak, ini sesuatu yang aneh. Kita belum memiliki undang-undang terorisme, jadi tidak mungkin. Kalau Amerika katakanlah mempunyai undang-undang anti terorisme, itu berarti tidak ada double criminality. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara-cara seperti itu kecuali ada pendekatan yang bersifat resiprokal.

Jadi dari kaca hukum murni dikirimnya Al Farouq ke luar adalah suatu kesalahan, kalau itu alasannya adalah masalah imigrasi. Dikeluarkan dari Indonesia tetapi tidak usah diserahkan kepada Amerika, entah di luar nanti urusannya Amerika. Tetapi kalau itu menyangkut masalah pembunuhan presiden dan wakil presiden, di Indonesia termasuk perbuatan makar, pasal 104 KUHP ancamannya hukuman mati. Jadi lebih baik kita menanganinya sendiri, dan kita meminta ekstradisi kepada Amerika. Kalau tidak ada perjanjian, atas dasar yang namanya reciprocal principle tadi.

DENNY J.A. :

Dan dari kaca mata korban, istri beliau tidak tahu apa-apa soal itu. Bagaimana seharusnya, Pak Muladi ?

MULADI :

Justru itu, jadi ini pendekatannya intelijen. Harus ada pelapornya siapa, siapa korbannya, itu harus jelas dalam berita acara. Diperiksa sebagai apa, sebagai saksi itu kan harus ada orang yang melaporkan saksi terhadap siapa. Dalam hukum acara diatur sangat jelas. Jadi tidak bisa langsung dicomot, diperiksa, tidak tahu apa sebabnya, menurut saya itu intelgency action, bisa dilakukan tetapi harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara.

DENNY J.A. :

Pak Slamet Supriyadi, bagaimana Anda melihatnya ada seorang wanita, suaminya hilang tidak tahu ke mana. Bagaimana agar ini tidak terjadi lagi ?

SLAMET SUPRIYADI :

Saya sependapat dengan Pak Muladi. Saya pikir negara kita sejak peristiwa 19 September membuat beberapa perjanjian (MoU) dengan negara sahabat, terutama negara ASEAN dan juga Amerika

untuk membuat kerjasama sharing informasi dalam rangka kerjasama intelijen. Oleh karna itu kasus Al Farouq dan Abdurrahman itu kaitannya dalam rangka sharing informasi, barangkali perjanjian MoU-nya itu mengatakan kalau ada ini, permintaan itu dideportasi, karena yang jelas mengakunya itu bukan warga negara Indonesia. Sesuai pengakuannya, dia dideportasi ke negaranya. Kedua, kita mendorong rencana undang-undang anti terorisme segera diajukan ke DPR supaya ada payung hukum, sebab kalau demikian aparat keamanan tidak dapat bertindak.

DENNY J.A. :

Baik, Pak Slamet Supriyadi terima kasih banyak. Pemirsa Metro TV, sekarang kita akan mendengarkan pandangan-pandangan yang sifatnya renungan dari para pembicara. Yang pertama dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, silakan.

ABU BAKAR BA'ASYIR :

Dengan izin Allah saya mengajak kepada bangsa Indonesia, dari presiden sampai rakyat, untuk kembali kepada Allah, melaksanakan hukum Allah, hukum Zat yang menciptakan kita. Saya yakin dan kita akan membuktikan bahwa tanpa kembali kepada hukum Allah, persoalan bangsa Indonesia tidak akan dapat selesai, akan terus berkembang kejahatan-kejahatan, kita hanya bisa menyelesaikan dengan kembali kepada hukum Allah. Apalagi mayoritas rakyatnya adalah orang islam, janganlah kita hanya memuji Allah, Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam hari-hari besar, tetapi hukumnya diletakan di belakang kita. Itu namanya melecehkan Allah.

DENNYA J.A. :

Baik, Pak Abu Bakar Ba'asyir, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Muladi, silakan.

MULADI :

Alasan kriminalisasi dari tindak pidana terorisme itu bukan atas dasar motif agama atau politik, tetapi harus didasarkan pada apa yang namanya in this criminal target terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang meninggal dan di samping itu kaitannya dengan kejahatan-kejahatan trans-nasional yang mungkin terjadi. Kedua, UU Terorisme hanya akan menjadi baik kalau didukung oleh suatu pemerintahan yang demokratis juga global justice terjadi di dunia ini. Terima kasih.

DENNY J.A. :

Ok, baik, terima kasih. Sebelum ke Bung Supriyadi kita ke Bung Hik dahulu, silakan.

HIKMAHANTO JUWANA :

Satu hal yang mungkin perlu kita renungkan dalam rangka membuat UU Terorisme adalah undang-undang ini seharusnya merespon kebutuhan masyarakat Indonesia dan sama sekali bukan untuk merespon kebutuhan masyarakat di luar negeri. Terima kasih.

SLAMET SUPRIYADI :

Satu harapan bahwa UU terorisme sagara masuk ke DPR untuk bersama-sama dibahas dengan masyarakat tentunya. Hendaknya rakyat juga bersatu padu dengan pemerintah, DPR termasuk aparaturnya keamanan untuk memerangi terorisme atau pun usaha-usaha pihak luar yang hendak memecah belah bangsa kita ini.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Kita yang awam tidak pernah tahu apakah jaringan terorisme internasional itu benar-benar ada atau tidak di Indonesia. Namun, kita tahu sejak reformasi memang politik kekerasan terus meningkat dan bom meledak di

sana-sini. Sudah waktunya publik bicara, dan tampaknya kita perlu undang-undang penanggulangan terorisme.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

INDONESIA VS TERORISME

Tanggal : 24 Oktober 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Greta Moris (Kedubes Amerika Serikat), Mayjen TNI Sudrajat (Dirjen Strategi Pertahanan Dephan), Permadi (DPR PDIP), Ahmad Sumargono (DPR PBB)

Dua belas hari setelah tragedi Bali, apa yang terjadi dengan negara kita ? Tekanan internasional semakin keras. Amerika Serikat menetapkan Jama'ah Islamiyah sebagai kelompok teroris. Masalahnya, dua tokoh yang tuduh sebagai pemimpin Jama'ah Islamiyah adalah warga Indonesia. Mereka adalah Hambali dan Abu Bakar Ba'asyir. Akankah dua tokoh ini ditangkap ? Lebih jauh lagi, akankah dua tokoh ini dihuBungkan dengan tragedi Bali ? Pro dan kontra pun terjadi. Sebagian mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih tegas bahkan terhadap Ba'asyir. Sebagian lagi mengatakan bahwa Hambali dan Ba'asyir mungkin sudah dizalimi dan diperlakukan tidak adil. Dan pemerintah Indonesia seharusnya lebih tegas dari kecenderungan intervensi asing. Apa yang harus dilakukan pemerintah ? Dan apa pula yang harus dilakukan oleh DPR?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara "Parliament Watch" bersama saya Denny J.A. Sudah hadir di studio pertama Ibu Greta

Morris dari Kedubes Amerika Serikat, di sebelahnya Bapak Sudrajat dari Departemen Pertahanan. Kita juga menghuBungi dua anggota DPR, Pak Permadi dari PDIP, dan Pak Ahmad Sumargono dari PBB. Seperti biasa untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dlu pengantar berikut :

“Sepuluh hari kasus pengeboman di Bali, pemerintah belum juga menemukan pelakunya. Sudah banyak saksi yang didengar dan sudah banyak penyisiran lokasi dilakukan, namun belum ada yang dijadikan tersangka. Pada saat yang sama, opini internasional justru semakin mengental. Berhari-hari tragedi Bali menjadi headline New York Time, Washington Post, dan CNN. Bahkan telah menjadi cover story majalah Time. Umumnya opini mereka semakin keras dengan tuduhan bahwa Al-Qaeda beserta jaringannya terlibat dalam kasus bom di Bali. Lebih maju lagi, Hambali dituduh sebagai operator Al-Qaeda di Asia Tenggara sekaligus pelaku utama. Tetapi opini publik domestik tidak serta merta mengamini opini internasional itu. Jauh lebih banyak publik yang bersifat wait and see, pasif bahkan skeptis atas opini internasional itu. Dan pemerintah Indonesia terjepit di tengah. Ada tiga hal yang mendorong opini internasional mengarah ke Al-Qaeda. Pertama, mereka yakin bahwa Al-Qaeda akan bangkit membalas dendam setelah digempur di Afghanistan. Tragedi Bali dianggap sebagai pemanasan sebelum serangan sesungguhnya yang akan lebih mematikan ke Amerika Serikat. Kedua, mereka tetap menganggap Al-Qaeda masih terus tumbuh. Camp pelatihan di Afghanistan memang sudah dihancurkan, namun organisasi ini terus bergerak melalui sel-sel tertutup dan terbesar. Pemimpin dan aktifis Al-Qaeda mengungsi ke tempat yang lebih memberikan jaminan. Asia Tenggara dan Indonesia layak untuk disusupi. Ledakan bom di Bali adalah puncak gunung es dari fenomena yang tersembunyi itu.

Ketiga, Pemerintah Amerika Serikat juga perlu membuat garis batas yang tegas tentang posisi negara-negara yang penting di dunia. Ada dua pilihan, negara Anda bersama Amerika, atau melawan Amerika untuk isu terorisme. Tak ada jalan tengah, bom Bali dijadikan titik

masuk Amerika untuk menekan Indonesia agar lebih serius menghadapi terorisme. Namun pada saat yang sama banyak cendekiawan yang sulit mempercayai Al-Qaeda dan jaringannya terlibat pemboman Bali. Dari segi motif, aksi terorisme adalah aksi yang rasional, bukan emosional dan spontan. Jika benar jaringan Al Qaeda terlibat dalam kasus Bali, mereka melakukan tindakan yang menyusahkan organisasi mereka sendiri. Peledakan bom Bali menjadi bunuh diri politik yang sulit dipahami.

Setelah hari ke-10 tragedi Bali, semakin terasa jurang yang lebar opini yang berkembang di dunia internasional dan domestik. Jika tidak ditemukan data dan bukti siapa pelaku peledakan, Indonesia akan terus terombang-ambing. Apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini ? Selaku pengawas, bagaimana DPR menilai sepuluh hari kerja pemerintah di dalam menguak tragedi Bali ?”

Pemirsa, kita menghuBungi narasumber di studio, Ibu Greta Moris. Banyak publik Indonesia yang bertanya, mengapa pemerintah Amerika Serikat menetapkan Jama'ah Islamiyah sebagai kelompok teroris ?

GRETA MORIS :

Terima kasih Pak Denny. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya atas nama pemerintah Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas ledakan bom di Bali yang hampir membunuh 200 orang yang tak berdosa dari 29 negara. Ini betul-betul aksi teroris yang kejam dan mengerikan, aksi teroris yang paling besar sejak sejak 11 September 2001. Kejadian tragis ini contoh bagaimana terorisme bisa mengancam institusi demokrasi dan ekonomi di seluruh dunia. Amerika Serikat ingin sekali memberikan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberantas terorisme serta membangun kembali ekonomi dan semangat baru Indonesia. Tentang Jama'ah Islamiyah yang ditetapkan sebagai kelompok teroris internasional oleh Amerika Serikat, ada dua aksi yang penting sekali. Dan Amerika Serikat ikut serta dengan Indonesia,

Australia, dan semua negara dari ASEAN dan negara lain, semua ada 35 negara, yang meminta Komisi Sanksi di PBB memasukkan Jama'ah Islamiyah dalam daftar kelompok yang asetnya harus dibekukan. Dan Jama'ah Islamiyah ditetapkan Amerika Serikat sebagai Front Terrorism Organization (FTO), karena memiliki kemampuan serta niat untuk melakukan kegiatan terorisme, serta telah melakukan aksi terhadap target-target diplomatik serta kedutaan di seluruh kawasan.

DENNY J.A. :

Masalah proses, Ibu Greta Moris mungkin mengetahui bagaimana produser di Amerika untuk menetapkan ini kelompok teroris atau bukan, yang terlibat di sana intelijen ataukah departemen kehakiman misalnya.

GRETA MORIS :

Ada banyak departemen yang prosesnya agak lama. Tentang Jama'ah Islamiyah kami sudah cukup lama bekerjasama dengan pemerintah di kawasan ini untuk menunjukkan langkah efektif terhadap Jama'ah Islamiyah. Penetapan strategis ini adalah cara yang kami kembangkan terus-menerus terhadap kelompok teroris mana pun. Melalui prosedur ini memang akurasinya bisa dijamin, karena ini adalah kasus lama dan bukan keputusan yang baru bagi kami.

DENNY J.A. :

Lalu di Indonesia, kita mempunyai Hambali dan Abu Bakar Ba'asyir. Apa yang akan terjadi dengan kedua tokoh ini, apakah juga menjadi buronan Amerika Serikat sekarang ?

GRETA MORIS :

Sebetulnya kalau Jama'ah Islamiyah sudah ditetapkan sebagai FTO, kasus ini melarang setiap orang di Amerika untuk memberikan bantuan materi atau sumber daya kepada Jama'ah Islamiyah, FTO

atau yang lainnya. Anggota Jama'ah Islamiyah tidak bisa masuk ke Amerika Serikat.

DENNY J.A. :

Mungkin ada keinginan Pemerintah Amerika untuk meminta Indonesia mencari follow up dengan menahan atau mengadili Hambali dan Abu Bakar Ba'asyir misalnya ?

GRETA MORIS :

Sekarang Abu Bakar Ba'asyir di Indonesia dan sudah ditahan oleh pemerintah Indonesia.

DENNY J.A. :

Ok baik Ibu Greta Moris nanti kita kembali ke anda. Sekarang kita ke Pak Sudrajat, kini Jama'ah Islamiyah dicap sebagai teroris. Apa respon kita sebagai pemerintah ?

SUDRAJAT :

Karena kita di dalam kondisi menghadapi kasus-kasus internasional, kita selalu mengacu pada keputusan-keputusan PBB. Action pemerintah kita sejalan dengan politik masyarakat internasional.

DENNY J.A. :

Ada 35 negara yang sekarang mensponsori. Tampaknya PBB pun akan mensahkan, dan berarti Indonesia terikat pula ?

SUDRAJAT :

Begitu PBB memutuskan, maka ada ikatan bagi Indonesia untuk bersama-sama masyarakat Internasional melawan Jama'ah Islamiyah.

DENNY J.A. :

Termasuk Ba'asyir dan Hambali, ya ?

SUDRAJAT :

Menurut informasi yang diperoleh dari penyelidikan di Singapura dan Malaysia, mereka adalah tokoh Jama'ah Islamiyah. Tetapi secara hukum, memang belum terbukti bahwa ada jaringan Jama'ah Islamiyah di Indonesia. Meskipun ada Majelis Mujahidin Indonesia atau yang lain, tetapi Jama'ah Islamiyah yang dituduhkan itu tidak ada bentuknya di sini secara formal. Perlu ada pembuktian-pembuktian yang menurut hukum Indonesia menguatkan dugaan yang bersangkutan memang terlibat Jama'ah Islamiyah.

DENNY J.A. :

Jadi ada jarak antara data intelijen internasional dengan fakta hukum di Indonesia ?

SUDRAJAT :

Saya kira kita bangsa yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan hukum kita harus dihormati. Jangan sampai kita dengan begitu saja mengikuti kehendak dari luar.

DENNY J.A. :

Ok Pak Sudrajat, nanti kita kembali ke Anda lagi. Sekarang kita menghubungi anggota DPR, Ahmad Sumargono. Salah satu tugas DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah. Apakah selama 12 hari pasca tragedi Bali, DPR cukup puas dengan kinerja pemerintah ?

AHMAD SUMARGONO :

Apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi peristiwa di Bali boleh dikatakan sangat excellent. Dalam arti begitu terjadi peristiwa Bali, semua menteri dan presiden turun ke Bali. Bahkan

sampai dikeluarkan Perppu, fasilitas kesehatan terutama rumah sakit juga memberikan service yang luar biasa. Sampai-sampai orang lokal sendiri tidak tertampung. Ini memang agak lain ketika pemerintah menghadapi peristiwa Ambon misalnya, yang sangat lamban. Jadi pihak Amerika, Australia, Inggris, dan orang-orang asing boleh berbangga melihat sikap pemerintah ini.

DENNY J.A. :

Penangkapan Ba'asyir, apakah bagian yang ikut Anda puji ?

AHMAD SUMARGONO :

Berkaitan dengan penangkapan Ba'asyir ini ada hal-hal yang agak membingungkan. Begitu peristiwa Bali, maka Ba'asyir ditahan. Pihak pemerintah mengatakan penangkapan Ba'asyir tidak ada kaitannya dengan Bali. Berarti tidak ada kaitannya dengan terorisme. Artinya ini merupakan satu tuduhan yang sifatnya common crime, bukan extra ordinary crime. Sebab terakhir kita melihat bahwa pihak Polri terutama Pak Da'i Bachtiar dalam keterangannya mengatakan, peristiwa Bali baru akan dibahas oleh pengadilan sesuai dengan Perppu. Jadi kalau penangkapan Pak Ba'asyir dikaitkan dengan terorisme, ini sudah melanggar Perppu. Saya melihat ada pengondisian seolah-olah digiring bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini salah seorang motor dari peristiwa Bali. Padahal ini belum bisa dibuktikan, apalagi kalau kita menganut paham asas praduga tak bersalah.

DENNY J.A. :

Jadi penangkapan Abu Bakar Ba'asyir ini "over dosis" ya ?

AHMAD SUMARGONO :

Betul, dan ini membenarkan dugaan bahwa bahwa Amerika ikut berperan menekan Indonesia.

DENNY J.A. :

Dari kasus ini Anda menganggap Indonesia tidak cukup independen?

AHMAD SUMARGONO :

Artinya begini, memang sudah lama isu penangkapan terutama kepada tiga tokoh. Sekarang misalnya Pak Ja'far Umar Thalib kasusnya sudah selesai, maka selesai juga tugas pemerintah. Kemudian penangkapan Ustadz Habib Rizieq sudah selesai dalam proses. Sekarang penangkapan Ba'asyir, selesailah tugas Indonesia dalam mengikuti keinginan-keinginan Amerika yang menuduh tanpa bukti.

DENNY J.A. :

Dan setelah 12 hari tragedi Bali belum juga ada tersangka. Ini terlalu lambat ?

AHMAD SUMARGONO :

Kalau kita melihat tadi respon sangat excellent, tetapi prestasi dalam arti keberhasilan untuk mendeteksi siapa pelaku utama, siapa dibelakangnya ini, belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Tuduhan-tuduhan terhadap Hambali memang itu case yang berlangsung sebelum terjadi peristiwa Bali, barangkali data-data intelijen sudah ada. Sayangnya, Hambali sampai sekarang ini belum bisa ditangkap.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, berapa lama rakyat bisa toleran terhadap lamanya investigasi ini ?

AHMAD SUMARGONO :

Kalau kita berbicara demikian memang sangat ada alasan. Amerika saja sampai sekarang belum bisa membuktikan siapa yang mengebom

pada 11 September, hanya menduga-duga terhadap Al-Qaeda dan Osama Bin Laden saja.

DENNY J.A. :

Baik Bung, sekarang kita ke kolega anda, Pak Permadi. Apakah Anda puas dengan 12 hari kinerja pemerintah menguak tragedi Bali ?

PERMADI :

Tragedi Bali ternyata sangat mengejutkan pemerintah. Sehingga berbondong-bondonglah pejabat pemerintah ke Bali. Memang perhatian sangat excellent, tetapi penanganannya seperti diliputi kebingungan, sehingga memerlukan bantuan intelijen dari Amerika, Australia, dan lain-lain. Tetapi patut diakui penanganannya agak lambat karena tidak ada yang menyangka itu bisa terjadi. Dan siapa yang disangka pun sampai hari ini belum ada. Jadi pemerintah harus bekerja keras untuk dapat mengungkap peristiwa Bali.

DENNY J.A. :

Kerjasama antara intelijen dengan negara-negara lain merupakan bagian yang Anda puji atau Anda kritik ?

PERMADI :

Tanpa ada peristiwa Bali pun Interpol dan intelijen bekerjasama secara internasional. Tetapi karena kasus Bali ini memang mengejutkan, lalu seakan-akan kerjasamanya agak dipaksakan. Seperti ada tekanan harus menerima intelijen, bahkan intelijen Australia ingin membuka kantor, dan sebagainya. Menurut saya agak berlebihan.

DENNY J.A. :

Menurut Pak Sumargono, independensi pemerintah dalam investigasi ini agak diragukan. Anda setuju juga ?

AHMAD SUMARGONO :

Saya kira tidak, bagaimanapun juga pemerintah masih mempunyai kebanggaan nasional, karena masalahnya bukan hanya teroris-teroris Islam, teroris-teroris Kristen pun ditangkapi, seperti Manuputi dan sebagainya. Saya kira pemerintah mencoba untuk bersifat jujur bahwa masalahnya jangan dikaitkan dengan agama. Bahwa pelakunya banyak dari Islam, karena memang mungkin keadaan demikian.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, sekarang kita menjumpai lagi Ibu Greta Moris. Ada pandangan tampaknya pemerintah Amerika mendikte Indonesia dalam hal ini. Anda setuju itu ?

GRETA MORIS :

Tidak. Kami mau membantu pemerintah Indonesia, dan betul sesudah kejadian di Bali, kami mengirim pejabat FBI ke Bali atas undangan dari pemerintah Indonesia. Dan juga kami mengirim dokter-dokter dan obat medis.

DENNY J.A. :

Dalam kasus Al Farouq, bagaimana tokoh ini yang dianggap melakukan kejahatan di Indonesia tetapi sekarang dalam kendali Amerika Serikat ?

GRETA MORIS :

Saya kira tidak, Al Farouq sedang diselidiki dan juga ada pejabat Pemerintah Indonesia yang berinvestigasi di sana, dan mereka baru kembali. Saya kira mereka mengatakan bahwa semua berita dalam majalah Time adalah benar. Jadi saya kira tidak benar adanya kemungkinan dikte dari Amerika kepada Indonesia.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang kita kembali ke Pak Sudrajat, kalau kemungkinan adanya dikte dari negara-negara luar bagaimana, Pak ?

SUDRAJAT :

Saya tidak melihat ini dikte dari negara luar, karena Indonesia memang sudah berkomitmen untuk bersama-sama dengan dunia melawan terorisme. Dan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini terutama di Bali, sangat erat kaitannya dengan dugaan kita kepada teroris internasional, karena begitu besarnya peristiwa ini. Seperti yang dikatakan Ibu Greta Moris tadi, Bom Bali adalah serangan teroris yang kedua terbesar setelah New York 11 September. Ini membuktikan Bom Bali merupakan suatu tindakan terorisme internasional sehingga di dalam menanganinya harus ada kerjasama internasional. Indonesia mempunyai Memorandum Of Understanding dengan Australia dan negara-negara di kawasan ini untuk memerangi terorisme internasional. Saya kira inilah justifikasi kita bekerjasama dengan mereka. Adapun soal bantuan asing, Inggris pun juga membantu. Ada yang membantu dalam bidang friendship technical, intelijen, humanitarian, karena Indonesia dianggap mempunyai yurisdiksi dan kedaulatan.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak. Sekarang kita mendengar komentar melalui telepon dari Bung Kusnadi di Tangerang, silakan.

KUSNADI :

Saya melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah wajar, karena kondisi kita yang seperti ini, tidak mempunyai uang. Tapi terus terang saya sebagai rakyat Indonesia masih mempunyai harga diri untuk melawan mereka yang diktator. Terus terang saya menyayangkan ucapan Pak Ahmad Sumargono yang mengatakan tiga tokoh itu disangkutkkan dengan teroris. Kalau menurut saya, kita tidak usah

melihat teroris dan segala macamnya, hukum yang harus kita lihat. Sekarang kalau tempat-tempat hiburan dihancurkan oleh mereka, apa itu tidak melanggar hukum ? Kadang-kadang kita telalu ikut campur sama urusan orang. Saya bertanya kepada Pak Sumargono, kalau saya yang berbuat dosa, apakah Anda yang menanggung dosa saya ?

DENNY J.A. :

Baik. Jadi Anda mengkritik FPI ya ?

KUSNADI :

Ya, FPI salah satu contoh yang saya lihat. Ada satu lagi untuk Pak Permadi, masyarakat saat ini sedang bingung. Jangan Anda membuat bingung lagi dengan informasi yang Anda buat seperti kemarin, Ratu Adil, Satrio Piningit. Saya bilang memang itu ada, tapi Anda tidak tahu adanya di mana. Saya minta Anda untuk tidak berbicara hal itu.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak. Kedua Bung Hilman dari Cimahi, silakan.

HILMAN :

Terima kasih. Saya mau bertanya ke Ibu Greta Moris. Amerika sebagai negara demokratis dan kampiun HAM, mengapa dalam menyikapi kasus terorisme di Bali sudah tidak memakai nalar lagi ? Alasan apa yang dipakai Amerika sehingga menuduh golongan Islam sebagai pelakunya ? Sebetulnya yang sudah nyata yang teroris itu Amerika sendiri, seperti memaksakan kepada Irak, Palestina, dan sebagainya. Apa Amerika tidak takut pada Mahkamah Internasional karena merasa menjadi polisi dunia ?

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak Bung. Yang ketiga kita dengar dari Tuti, silakan.

TUTI :

Selamat malam. Sebagai bangsa yang besar, sebaiknya kita juga introspeksi diri. Saya terus terang sering mengajak anak saya naik bus. Di bus saja pengamen bisa meneror penumpang, mereka sekarang tidak lagi meminta tetapi juga mengancam. Itu pengalaman saya di Jakarta. Dan juga narasumber jangan dipilih orang yang semuanya anti-Amerika begitu, harus juga di dengar yang pro-Amerika.

DENNY J.A. :

Pemirsa, kita menghuBungi kembali Bung Ahmad Sumargono. Bagaimana ini, Bung, pemerintah khususnya polisi dianggap terlalu lembek menghadapi aksi-aksi FPI itu ?

AHMAD SUMARGONO :

Saya ingin meluruskan dulu Saudara kita dari Tangerang. Sebelum kasus Bali terjadi, ada beberapa tokoh Islam termasuk tiga orang ini yang konon segera diamankan mungkin dianggap Islam Radikal. Kemudian pertama, Ja'far Umar Thalib, alhamdulillah sudah dibebaskan. Kemudian yang kedua Ustadz Habib Riziq, karena dianggap melakukan kerusakan-kerusakan yang menurut pandangan dari FPI justru hendak menegakkan amanah amar ma'ruf nahi munkar. Itu suatu keyakinan karena pemerintah tidak melakukan tugas-tugas terhadap kerusakan moral yang selama ini terjadi. Saya juga tidak setuju dengan cara-cara seperti ini. Barangkali melalui intervensi, penetrasi, bisa saja itu terjadi. Dan kenyataan ketiga orang ini sudah berhuBungan dengan pihak aparat keamanan. Ini salah satu contoh, jadi bukan berarti teroris. Ada semacam pesan yang berkembang bahwa pihak Amerika menginginkan tokoh-tokoh radikal supaya diambil tindakan. Saya ingin memberikan pandangan bahwa di Indonesia tidak ada Jama'ah Islamiyah, lihat saja UU Keormasan. Berarti kita tidak care dengan masalah ini, ini bukan dari Indonesia. Saya juga menyesalkan mengapa terminologi Islam yang dipakai, dan kita juga belum tahu di mana gerakan ini. Dan kalau kita berbicara tentang terorisme, mengapa Amerika sendiri yang

membunuh rakyat Afghanistan yang tidak berdosa, tidak diajukan ke Mahkamah Internasional ? Kesimpulan kita, Amerika sebagai negara yang berkuasa sekarang ini bisa sewenang-wenang. Oleh sebab itu pemerintah pun sebelum menetapkan terlebih dahulu minta izin ke DPR.

DENNY J.A. :

Ok terima kasih banyak Bung Sumargono atas informasinya. Pak Permadi, Anda setuju bahwa aparat keamanan ke depan agak sulit menegakkan law and order ?

PERMADI :

Sebenarnya sudah sejak setahun yang lalu, BIN memberikan peringatan dan laporan adanya peningkatan kegiatan teror di Indonesia, apakah nasional atau internasional. Tetapi banyak orang yang menganggap itu tidak benar. Misalnya yang sudah jelas di Ambon, Maluku, Aceh, dan Poso, teror setiap hari, tapi kita mengatakan tidak ada teror. Tetapi mungkin peringatan BIN tidak disertai bahan-bahan bukti konkrit sehingga polisi kesulitan menangkap para pelaku. Sebagai akibatnya, mengingat peningkatan itu sudah sedemikian rupa, Al Farouq ditangkap oleh imigrasi bukan oleh polisi, dan karena ditangkap keimigrasian maka dideportasi ke Malaysia dan langsung ditangkap Amerika. Jadi sebenarnya BIN sudah lama memberikan peringatan. Komisi I DPR selalu berkoordinasi dengan BIN dan selalu mendapatkan laporan-laporan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan teroris. Yang menyebabkan semua ini sulit di atasi, kemungkinan juga karena persaingan yang tidak sehat di antara intelejen-intelejen Indonesia, sehingga presiden terpaksa menyatukan intel-intel seluruh Indonesia di dalam satu koordinasi.

DENNY J.A. :

Ok sekarang ke Pak Sudrajat, apa benar ada problem-problem struktural polisi dan TNI sehingga sulit menjaga keamanan ?

SUDRAJAT :

Problem yang kita hadapi dari segi manajemen keamanan nasional sekarang sangat berbeda dengan waktu dulu. Beban permasalahan yang dulu ditangani ABRI dengan personil sekitar 500 ribu, semuanya diserahkan kepada polisi yang jumlahnya kurang dari 250 ribu atau sekitar 230 ribu. Problemnya tiga kali lebih besar, kekuatannya separuh lebih kecil. Kedua, transparansi nasional kita sedang dalam proses transisi, di mana keberingasan masyarakat semakin kuat, yang kedua law enforcement kita menjadi melemah karena ada konstelasi politik yang berubah. Saya kira secara struktural manajemen keamanan nasional kita perlu ditata ulang. Seperti sekarang kita melihat betapa beratnya Polri bertanggung jawab atas seluruh kriminal dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita melihat UU Kepolisian bahwa polisi disusun berjenjang dari bawah ke atas, berarti dari tingkat kecamatan sampai tingkat propinsi di seluruh Indonesia menjadi tanggung jawab Kapolri. Di sini ada semacam pendelegasian, otonomitas kerja yang kurang pas sehingga pihak kepolisian agak over loaded dalam melaksanakan tugasnya. Semua anggota DPR dan MPR harus berpikir kembali. Tap MPR No. 6 dan No. 7. Tidak dalam arti memisahkan antara TNI dan Polri, tetapi bagaimana menata instrumen-instrumen ini sehingga pemegang kekuasaan politik betul-betul bisa menggunakan setiap saat apa saja yang diperlukan untuk menangani masalah.

DENNY J.A. :

Ok, baik, terima kasih, Bung. Sekarang ke Ibu Greta Moris, ada pandangan publik bahwa Amerika Serikat terlalu over dalam mengklaim Islam Radikal di balik aksi-aksi teror.

GRETA MORIS :

Sebenarnya kami belum memberikan komentar tentang tragedi Bali, karena penyelidikan masih berlangsung. Tetapi saya kira terorisme tidak ada kaitannya dengan Islam dan agama. Ini betul-betul aksi teror. Kami sangat menghormati agama Islam.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak. Pemirsa, kita akan mendengarkan renungan dari masing-masing pembicara, dimulai dari Pak Permadi, silakan.

PERMADI :

Saya mengharapkan bangsa Indonesia bisa bersatu. Menyingkirkan perbedaan-perbedaan pendapat untuk menghadapi masalah-masalah yang antara lain datang dari luar negeri. Tanpa persatuan kita akan hancur.

AHMAD SUMARGONO :

Kami mengharapkan bangsa Indonesia menyadari bagaimana rasanya mempertahankan kedaulatan bangsa, dan kita tidak boleh tergantung dengan negara-negara mana pun.

GRETA MORIS :

Amerika Serikat sangat menghargai kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan kami mau membantu Indonesia dalam mengatasi terorisme, membangun demokrasi, dan kesejahteraan.

SUDRAJAT :

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita telah diporandakan oleh kelakuan teroris yang melaksanakan terorisme di mana-mana. Saya kira bangsa Indonesia sudah saatnya bangkit dan marah terhadap terorisme. Dengan kepala dingin dan berpikir secara jernih, mari kita lawan terorisme yang luar biasa dahsyatnya menghantam keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, khususnya kepada teroris, jangan saudara mengatasnamakan Islam, karena terorisme itu melawan Islam. Untuk itu saudara-saudara sekalian, jangan kita tercacaukan isu-isu yang menyesatkan, untuk itu

kita bersama-sama melawan terorisme sebelum mereka mengacaukan bangsa kita yang sedang prihatin ini.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sudah banyak gagasan yang keluar dari forum ini. Salah satu yang terpenting saya kira perlunya menata ulang aparat keamanan, karena merekalah garda depan yang menjaga law and order kita. Dan merekalah yang paling bisa melindungi kita dari terorisme.

Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

SATU TAHUN BOM BALI

Tanggal : 9 Oktober 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Stanley Harsha (Press Attache Kedubes AS), Djuanda
(Pengamat Intelijen), Zulvan Lindan (Anggota I DPR)

Satu tahun sudah peristiwa Bom Bali berlalu. Apa efek tragedi Bali ini bagi kita sebagai sebuah bangsa ? Sejauh ini berkembang sebuah spekulasi, “Di balik Bom Bali ada jaringan teroris regional di Asia Tenggara”. Jaringan ini diduga juga mempunyai jaringan di Timur Tengah dan mempunyai agenda besar membangun Negara Islam Raya di Asia Tenggara. Kontroversi tentang jaringan teroris ini membelah opini publik. Namun perkembangan yang melegakan kemudian datang. Perlahan terkuaklah jaringan terorisme yang akan meledakkan beberapa tempat secara terencana. Para pelaku Bom Bali berhasil ditangkap dan diadili. Perkembangan lain adalah ditangkapnya ‘ikan besar’ bernama Hambali, tokoh yang melegenda sebagai Osama bin Laden versi Asia. Banyak yang meyakini, dengan tertangkapnya Hambali jaringan terorisme di Asia akan lumpuh. Setahun setelah peristiwa Bom Bali, apakah jaringan terorisme itu sudah benar-benar hancur ? Apakah Indonesia sudah benar-benar aman dari serangan terorisme ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. sekarang di studio sudah hadir, pertama Bung Stanley Harsha dari Press Attache Kedubes AS, kemudian Bung Zulvan Lindan. Kita juga akan menjumpai Bung Djuanda, pengamat intelijen dan analisis geopolitik. Seperti biasa, untuk memperkaya diskusi, kita saksikan dulu pengantar berikut :

“Satu tahun sudah bom meledak di Bali, satu tahun pula perang terhadap terorisme secara resmi dikobarkan. Setelah setahun, perlu dinilai apa keuntungan perang melawan terorisme itu, serta pula kerugian yang harus kita tanggung ? Selama lima tahun ini, bom Bali menjadi peristiwa yang paling dahsyat di tanah air. Bukan saja karena banyaknya warga asing yang terbunuh, tetapi juga karena adanya kontroversi jaringan terorisme dengan ambisi yang sangat besar. Berulang kali dinyatakan bahwa, sekarang sedang tumbuh kekuatan yang ingin menegakkan Negara Islam di seluruh wilayah Asia Tenggara hingga Australia. Tak tanggung-tanggung pula disebutkan, bahwa jaringan yang berada dibelakang bom Bali memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Kita tidak pernah mengetahui seberapa benar tuduhan itu, namun opini publik yang terbentuk, baik melalui media ataupun bisik-bisik sudah sedemikian terpolarisasi. Akibatnya bom Bali mendapatkan perhatian yang luar biasa emosional, mengerikan bagi satu pihak, namun juga menjanjikan bagi pihak lain. Setelah setahun bom Bali, banyak perkembangan yang kita peroleh. Perlahan terkuaklah jaringan terorisme yang akan meledakkan beberapa tempat secara terencana. Perkembangan lain adalah ditangkapnya ‘ikan besar’ bernama Hambali, tokoh ini nyaris menjadi legenda Osama bin Laden versi Asia. Banyak yang meyakini, dengan tertangkapnya Hambali jaringan terorisme itu akan lumpuh. Hambali dianggap memainkan peran sentral yang menghancurkan pemilik dana dengan lapangan. Namun ada pula perkembangan lain, di mana Amerika Serikat semakin tidak populer di dunia Muslim, termasuk Indonesia. Perkembangan lain yang buruk adalah diimpornya bom bunuh diri ke

Indonesia. Bunuh diri sudah dianggap biasa, sejauh dilakukan sambil menghancurkan kekuatan musuh. Bahkan oleh sebagian kecil orang ini dianggap jihad. Setahun setelah bom Bali, apakah Indonesia lebih aman ?”

DENNY J.A. :

Pertama kita jumpai Bung Stanley Harsha. Anda selaku warga asing, setahun setelah bom Bali apakah sekarang ini merasa lebih aman ?

STANLEY HARSHA :

Saya rasa pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah di dunia semua orang merasa lebih aman sekarang daripada satu tahun atau tiga tahun yang lalu ? Tentu saja masih ada ancaman dari terorisme internasional, dari Al-Qaeda, atau kelompok-kelompok teroris lain di Indonesia, Amerika, Asia Tengah, Kolombia, Peru, dan di banyak tempat. Jadi di dunia sekarang ini masih belum aman. Di Indonesia, tentu saja karena sudah menangkap lebih dari 100 orang teroris, kondisinya sudah lebih aman, kepolisian juga sudah berbuat sebaik mungkin. Selain itu ada kemauan yang besar dan rencana yang bagus. Tetapi selama masih ada beberapa kelompok yang masih membunuh orang, saya tidak bisa merasa aman di mana pun di dunia ini.

DENNY J.A. :

Majalah Time edisi terakhir mengutip Hambali yang mengatakan bahwa jaringan terorisme di Indonesia sudah hancur. Anda percaya ?

STANLEY HARSHA :

Mudah-mudahan begitu. Tetapi saya masih percaya bahwa ada sel-sel dan ancaman yang bisa masuk kemana-mana. Saya pikir di Amerika dan di negara-negara lain belum hancur. Kita masih harus bekerja keras dan waspada. Jangan tidur !

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Zulvan. Setahun pasca bom Bali, Indonesia sudah lebih aman ?

ZULVAN LINDAN :

Kalau saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa bom yang terjadi, masyarakat biasa-biasa saja. Mereka merasa aman, tidak ada riuh, bahkan ketika kita melihat setelah terjadi bom Bali, rupiah agak goyang, tetapi ketika terjadi bom Marriot tidak ada apa-apa. Jadi saya melihat dari sektor keuangan juga cukup baik setelah bom Bali, kemudian pada situasi sekarang juga masyarakat secara umum, kegiatan-kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa.

DENNY J.A. :

Divonisnya para pelaku bom Bali dan ditangkapnya Hambali, Anda menganggapnya sebagai perkembangan yang signifikan ?

ZULVAN LINDAN :

Seperti yang dikatakan Stanley Harsha, bahwa keseriusan pihak kepolisian melakukan investigasi untuk lebih memahami jaringan-jaringan yang ada di Indonesia, menurut saya itu satu upaya yang cukup positif. Juga masyarakat cukup membantu apa yang dikerjakan polisi. Tetapi kembali lagi, tadi Hambali mengatakan bahwa jaringan terorisme di Indonesia ini sudah hancur, kita tinggal melihat apakah bentuk terorisme di sini sifatnya ideologis atau tidak. Kalau sifatnya ideologis, kita sulit untuk menghancurkan. Tetapi kalau itu hanya sekedar aktifitas balas dendam, atau semangat emosional lalu mereka melakukan terorisme, lebih mudah dihancurkan.

DENNY J.A. :

Nanti kita berbicara lebih detail apakah ini ideologi atau bukan. Bung Djuana, setahun setelah bom Bali, terjadi penumpasan terorisme yang signifikan di Indonesia ?

DJUANDA :

Kalau dilihat dari sisi signifikansinya, ini terlihat dari frekuensi terorisme itu sendiri. Usaha yang dilakukan oleh aparat bersama seluruh masyarakat, rupanya telah menjadikan para teroris kehilangan atau berkurang niatnya untuk melakukan terorisme. Atau yang dikatakan bahwa usaha bangsa Indonesia dalam memerangi terorisme ini mempunyai efek bisuasif yang tinggi, karena rupanya terorisme kehilangan kesempatan karena sudah dikecilkan atau diminimasialisasikan oleh masyarakat, khususnya para aparat.

DENNY J.A. :

Anda melihat dari segi frekuensi, setahun setelah bom Bali, signifikansi dari jaringan terorisme ini tampak melemah ?

DJUANDA :

Saya melihatnya dari satu sisi yang mungkin tidak begitu komprehensif. Saya tertarik dengan ucapan Bung Zulvan Lindan, bahwa kalau melihat terorisme itu biasanya dilihat dari lima sisi. Pertama, apakah latar belakangnya ajaran atau ideologi. Kedua, apakah organisasinya masih induk atau menjadi organisasi sel yang meluas. Ketiga, apakah kemampuan untuk melakukan teror itu mungkin berkembang secara metodik, mekanik, atau teknik. Keempat, apakah alat untuk melakukan teror itu tersedia dengan mudah. Dan kelima apakah logistiknya juga tersedia dengan baik, sehingga nantinya kalau ada kesempatan atau celah, para teroris bisa beraksi melakukan niatnya.

DENNY J.A. :

Kembali kita menghuBungi Bung Stanley Harsha. Bagaimana Anda memahami para pelaku teror ini banyak sekali yang anti-Amerika ?

STANLEY HARSHA :

Setelah 12 Oktober saya tetap di sini, tidak pulang ke Amerika. Dan saya tidak merasa ada apa-apa selama di sini. Saya merasa waktu itu masyarakat terkejut dan pihak radikal tersebut meskipun jumlahnya kecil tapi suaranya besar sekali. Tetapi cepat sekali aparat Indonesia bisa menangkap teroris dan rakyat Indonesia melihat buktinya jaringan terorisme memang ada. Kami sudah percaya dan mengakui itu.

DENNY J.A. :

Mengapa menurut Anda mereka anti Amerika Serikat ?

STANLEY HARSHA :

Saya tidak mengerti. Saya di Amerika Serikat pernah kenal dengan orang radikal juga dan saya tidak bisa mengerti mereka.

DENNY J.A. :

Ok, kita ke Bung Djuanda, mengapa di kalangan pelaku teror ini berkembang sentimen anti-Amerika Serikat yang kuat sekali ?

DJUANDA :

Kita melihatnya dari sisi bahwa yang radikal ini kita batasi saja adalah warga negara Indonesia. Jadi intinya ada pembentukan radikal. Pembentukan radikal ini adalah fungsi waktu. Di dalam konteks fungsi waktu, radikalisme ini terdiri dari adanya ajaran yang membuatnya jadi radikal. Selain itu adalah adanya kenyataan-kenyataan sejarah, sosiologis, dan psikologis yang membuat seseorang menjadi radikal. Menurut saya, rujukannya tadi Bung Denny sudah menyatakan bahwa ada rasa ketidakadilan, salah satunya akibat solidaritas dan keberpihakan banyak orang Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina. Kedua, bahwa jangan lupa ada periode di Indonesia di mana rasa atau kesadaran untuk melawan neo-kolonialisme dan imperialisme yang ditujukan kepada Amerika pada masa lampau.

DENNY J.A. :

Sebentar Bung, kembali ke Bung Stanley Harsha. Menurut Bung Djuanda karena ada persoalan juga di Timur Tengah misalnya, itu bisa membuat sumber radikalisme anti-Amerika, Anda setuju ?

STANLEY HARSHA :

Saya pikir yang tidak setuju dengan kebijakan Amerika Serikat selalu ada. Ada yang kita setuju dan tidak setuju selain dari masalah politik. Tetapi orang radikal yang ingin membenci dan membunuh orang lain, mereka memakai alasan apa pun untuk mencapai tujuan mereka yang buruk. Dan itu hal yang buruk untuk Indonesia dan orang sipil di seluruh dunia.

DENNY J.A. :

Ok Bung Djuanda, mengapa ketidaksetujuan ini harus menggunakan aksi-aksi teror, mengapa tidak melalui cara-cara anti kekerasan ?

DJUANDA :

Terorisme itu hanyalah salah satu bentuk channeling ketidaksukaan, atau channeling yang dipilih adalah terorisme. Jadi kalau kita melihat terorisme, jangan hanya melihat ledakan bom. Jangan lupa bahwa suatu operasi terorisme biasanya disertai dengan perang informasi dan juga perang-perang yang lain.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, setahun sudah tragedi Bali. Dan kita melihat ada perbedaan respon antara Australia dan Indonesia. Perdana Menteri Australia akan menyempatkan datang ke Bali 12 Oktober mendatang. Tetapi Megawati Soekarnoputri, presiden RI memutuskan untuk tidak datang. Apa yang menyebabkan perbedaan ini, kita menjumpai Bung Zulvan Lindan. Bagaimana Bung, pendapat Anda ?

ZULVAN LINDAN :

Bung Denny, sebelum ke sini saya bertanya kepada beberapa pimpinan PDIP tentang kehadiran Ibu Mega di Bali. Mereka mengatakan bahwa memang beberapa hari yang lalu dan cukup lama Presiden berada di Bali dalam acara ASEAN. Kedua, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober ada pertemuan OKI di Kuala Lumpur. Menurut saya itu cukup penting. Karena kita pasti akan mengajak negara-negara Islam yang lain untuk menyelesaikan konflik di masing-masing negara, terutama yang mayoritas penduduknya Islam, yaitu dengan pendekatan-pendekatan yang tidak menggunakan kekerasan. Menurut saya semangat itu tentu akan dibawa oleh pemerintah Indonesia melalui kehadiran Presiden di Kuala Lumpur. Jadi menurut saya bahwa concern kita terhadap peristiwa Bali ini memang tidak dapat diukur dengan kehadiran Presiden secara fisik di Bali. Tentu kita mengharapkan pemerintah mengirim –karena Australia perdana menteri nya hadir– pejabat yang sangat senior setelah presiden, apakah Wakil Presiden atau Menkopolkam untuk bisa hadir di sana.

DENNY J.A. :

Ada kritik dari berbagai koran Australia yang mengatakan bahwa Megawati tidak datang karena pemilu sudah dekat, Megawati khawatir kehilangan suara pemilih Islam jika dia hadir di Bali nantinya. Bagaimana tanggapan Anda ?

ZULVAN LINDAN :

Menurut saya pemilih Megawati dari kalangan Islam kita sudah mengetahuinya, bahwa basis tradisional pemilih Megawati itu adalah kelompok nasionalis. Kalau pun ada kelompok Islam, mungkin kita mengetahui bahwa kelompok Islam garis keras, katakanlah yang kita anggap itu sebagian kecil, ataukah masih melihat tidak bisa menerima kepemimpinan yang performance- nya tidak bisa dilihat dari sudut pandang Islam, tentu mereka tidak akan memilih Megawati dalam pemilu yang akan datang. Jadi alasan itu tidak tepat karena saya kira

masing-masing calon presiden yang akan datang sudah mempunyai kantong-kantong sendiri.

DENNY J.A. :

Menurut Anda apakah Ibu Mega hadir atau tidak, kelompok radikal Islam pasti tidak memilih Mega, ya ?

ZULVAN LINDAN :

Benar, karena mereka sudah punya pilihannya sendiri sejak awal.

DENNY J.A. :

Kritik kedua menyangkan Megawati tidak menggunakan momen satu tahun bom Bali untuk menghibur keluarga korban dengan datang ke Bali, karena jumlah korbannya cukup banyak dan total keluarganya mungkin ribuan jumlahnya ?

ZULVAN LINDAN :

Daerah yang sering didatangi oleh Presiden, baik sebelum atau setelah bom Bali, menurut saya adalah Bali. Memang dalam momen-momen tertentu secara khusus kita mengharapkan kehadiran, tetapi kalau ada tugas negara seperti ke Kuala Lumpur menghadiri satu konferensi yang juga dihadiri oleh seluruh kepala negara Islam, menurut saya itu juga cukup penting. Jadi mohon kita untuk tidak terlalu mendramatisir situasi-situasi seperti itu.

DENNY J.A. :

Kritik ketiga mengatakan, bahwa ini gambaran komunikasi politik Megawati yang agak buruk karena tidak ingin menarik simpati publik dengan ikut datang ke Bali ?

ZULVAN LINDAN :

Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini seharusnya sebuah momen yang dimanfaatkan secara politis. Justru menurut saya, momen ini harus kita manfaatkan dari sudut pandang kemanusiaan bukan sudut pandang politik. Jadi kehadiran Presiden kalau kita mengukur dari sudut pandang politik, apakah kepentingan politik Presiden sendiri atau kelompok-kelompok tertentu ? saya kira kita menjadi tidak obyektif.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan Megawati sebagai simbol pemerintahan yang tertinggi memberikan dukungan kepada yang berduka sehingga tidak terlalu politik, tapi lebih simbolik ?

ZULVAN LINDAN :

Kalau Wakil Presiden, Menkopolkam atau pejabat senior lainnya misalnya, bisa hadir di Bali menyampaikan rasa simpati dan berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa itu, menurut saya sudah cukup. Bukan hanya simbolik, tetapi secara serius menjanjikan bahwa kita akan terus mengatasi persoalan-persoalan terorisme ini secara tuntas.

DENNY J.A. :

Bung Djuanda, tidak datangnya Presiden dalam peringatan satu tahun bom Bali, bagaimana Anda melihatnya ?

DJUANDA :

Saya ingin melihatnya apakah Megawati sebagai seorang leader, politikus, dan seorang state woman. Megawati memiliki kebebasan untuk memilih sikapnya. Apabila kita melihatnya sebagai politikus, dia akan selalu menggunakan dua kriteria, kriteria use atau guna dan opportunity atau peluang. Oleh sebab itu Megawati sebagai politikus, dia akan melihat, apakah kehadirannya itu akan menambah atau

membuat citranya lebih baik, apakah juga kunjungannya ke Bali akan membuat dia semakin mendapatkan dukungan, atau juga apakah setelah dia ke Bali akan mendapatkan lebih banyak network.

DENNY J.A. :

Menurut Anda, Bung ?

DJUANDA :

Kita menyerahkannya kepada Ibu Megawati sendiri. Saya melihat untuk Megawati ketiganya tidak baik. Oleh sebab itu dia tidak sebagai politikus. Mari kita melihat kalau misalnya dia sebagai negarawan. Seorang negarawan, pasti akan memikirkan apakah kunjungannya ke Bali itu berdasarkan kepentingan nasional. Kalau misalnya saya melihat bahwa sebetulnya pertimbangan Megawati ke sana itu sebetulnya ada untungnya juga demi kepentingan nasional. Jadi Ibu Mega mengatakan lebih baik dia tidak ke sana. Selain itu, kunjungan Megawati sebagai negarawan, bisa dilihat dan diukur dari pengalaman humanioranya, dan juga pemahaman atau kesadarannya tentang moral kosmopolitan. Jadi nanti disorot dunia, hadir dan tidaknya Megawati ke Bali.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak, Bung Djuanda. Kita akan mendengar selanjutnya suara publik melalui telepon mengenai setahun tragedi Bali. Pertama, M. Fauzi dari Surabaya. Selamat malam, Bung, silakan.

M. FAUZI :

Selamat malam. Saya ingin berbicara dengan Pak Stanley Harsha. Dengan hati nurani yang sejujurnya, tidak menyangkut Amerika atau orang lain, dia sebagai manusia yang seutuhnya. Bagaimana Amerika bisa mengejar-ngejar teroris, sedangkan perbuatannya seperti satu contoh Umar Al Farouq yang ditangkap tanpa akses dan

yang dipenjarakan di Guantanamo dianiaya semuanya. Afghanistan 'dihabisi' tanpa ada bukti, mereka manusia bukan binatang. Sekarang Irak diratakan. Tidak ada satu pun yang menyebut Amerika itu teroris, sedangkan biang keladinya Amerika semua.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Kedua, dari Linda di Jakarta, silakan.

LINDA :

Terima kasih. Saya ingin memberikan dua statemen. Pertama, saya berangkat dari pengalaman peristiwa 11 September di Amerika, kebetulan saya tinggal di sana. Di sana saya melihat bagaimana para pemuka agama Islam dan orang Islam sendiri membuka apa itu jihad, dan semua masalah Islam, yang mereka berikan itu kedamaian bukan kebencian atas semua yang disampaikannya. Tetapi di Jakarta kok tidak seperti itu ? Kedua, masalah Palestina, kalau di Indonesia orang membenci Amerika karena Islam. Saya sendiri berangkat ke Palestina dan mempunyai sahabat di sana yang beragama Katolik dan tinggal di camp-camp pengungsi. Jadi bukan masalah agama yang dibawa, karena di situ bukan hanya Islam saja, tetapi ada Kristen Protestan dan Katolik, itu yang saya lihat. Mungkin pesan saya perlu edukasi masalah agama kepada penduduk, terima kasih.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak, Linda. Ketiga, Bung Arif dari Bandung, selamat malam, silakan.

ARIF :

Selamat malam. Saya ingin tanggapan dari Pak Djuanda sebagai pengamat intelijen. Kejadian bom Bali belum setahun, sudah ada lagi kejadian bom Marriot. Kalau menurut saya, terorisme di Indonesia itu belum sehebat di pusatnya, katakanlah Afghanistan. Hanya intelijen

kita justru lemah. Mungkin zaman Orde Baru intelijen solid. Sekarang juga mungkin tetap solid, hanya kepentingan-kepentingannya sudah terpecah sejak reformasi bergulir. Menurut saya terorisme di Indonesia itu belum idealis. Jadi hanya kelompok-kelompok Muslim yang merasa kecewa, kemudian secara finansial mudah diiming-imingi pihak luar. Mereka terpengaruh solidaritas dengan pihak Afghanistan.

DENNY J.A. :

Bung Arif terima kasih banyak. Pemirsa Metro TV, kita mengharapkan para narasumber menjawab satu saja dari dua pertanyaan tadi. Pertama yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sendiri melakukan aksi terorisme atau state terrorism, kedua bahwa terorisme di Indonesia itu tidak bersandar pada ideologi tetapi lebih alasan praktis bahkan mungkin ekonomi saja. Dimulai dari Bung Zulvan Lindan.

ZULVAN LINDAN :

Bahwa kekecewaan masyarakat Islam terhadap Amerika itu sangat jelas. Ketika misalnya serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak mendapatkan kecaman dari Amerika. Oleh karena itu reaksi yang muncul adalah ke mereka yang secara ideologis emosional, kemudian mempunyai pemahaman terhadap Islam tapi tidak bisa melakukan sesuatu kekuatan yang mengimbangi aksi-aksi itu. Akhirnya mereka frustrasi, mengambil jalan pintas, apa yang ada di depan mata itulah yang mereka lakukan, walaupun menurut Islam langkah-langkah seperti itu tidak dibenarkan.

DENNY J.A. :

Ok. Bung Djuanda, silakan.

DJUANDA :

Kita tidak bisa menyederhanakan terorisme dalam konteks itu saja. Jadi terorisme itu adalah metode yang berkembang. Mungkin

hari ini kita belajar terorisme yang disebabkan oleh ajaran atau suatu keadaan frustrasi, fatalis dari situasi Timur Tengah. Tetapi bagaimana dengan terorisme-terorisme yang disebabkan oleh lingkungan hidup, aborsi, dan alasan-alasan lain. Jadi jangan menyimpulkan terorisme sesederhana ini.

DENNY J.A. :

Sekarang ini terlalu fokus pada politik ?

DJUANDA :

Persis, jadi kalau terfokus itu –kata Ibu Linda– masyarakatnya menjadi jahiliyah, seolah-olah terorisme itu larinya kepada kelompok tertentu. Yang kedua, saya mengingatkan, betul bahwa kita ini sedang berproses untuk mencerdaskan bangsa, jadi jangan terlampau nglokro, berkeluh kesah.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Bung Stanley Harsha, the last statement from you.

STANLEY HARSHA :

Waktu Amerika Serikat mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan nyawa di Bosnia dan Kossovo yang penduduknya muslim, tidak ada yang mengatakan Amerika adalah negara teroris. Waktu kita menyelamatkan penduduk di Afghanistan, bom waktu sudah dilepas dari Taliban, dan orang Indonesia melihat orang-orang Afghanistan betul-betul gembira, orang-orang waktu itu tidak mengatakan Amerika teroris. Irak sekarang baru lepas dari Saddam Husein, sekarang mayoritas penduduknya mengatakan bahwa mereka berpikir pada masa depan lebih bagus daripada masa yang lalu. Jadi saya tidak setuju dengan Amerika sebagai teroris.

DENNY J.A. :

Jadi lebih beragam sebenarnya persepsi publik tentang intervensi Amerika itu, ya ?

STANLEY HARSHA :

Kita harus melihat dari seluruhnya, seperti juga di Kossovo dan Bosnia yang penduduknya muslim.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Kita mengucapkan simpati yang mendalam setahun setelah tragedi Bali. Semoga saja ucapan Hambali itu benar, bahwa memang jaringan terorisme di Indonesia sekarang sudah melemah.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

BOM BALI DAN ISLAM MILITAN

Tanggal : 17 Oktober 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Azyumardi Azra (Pakar Politik Islam), Matori Abdul Djalil (Menteri Pertahanan), Yasril Ananta Baharudin (Golkar)

Setelah bom di Bali, apa yang akan terjadi dengan Islam 'Militan'? Memang belum ada bukti jelas tentang pelaku bom Bali, tetapi sudah ada pengadilan oleh pers internasional, Trial By The Press. Mereka menuduh bahwa Al Qaeda dan jaringan Islam Militan lokal berada di belakang tragedi Bali. Apa yang harus dilakukan pemerintah RI? Di satu sisi, dunia meminta pemerintah secepatnya menangkap Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir menjadi semacam public enemy nomor satu di Asia Tenggara, setidaknya dalam kacamata Barat. Namun di sisi lain banyak tekanan agar pemerintah tidak terlalu cepat masuk dalam skenario politik global. Apa yang bisa dilakukan oleh DPR menghadapi isu terorisme? Tragedi Bali tampaknya menjadi awal masa suram bagi gerakan Islam garis keras di Indonesia. Walau tidak satu suara, DPR pun mungkin meloloskan Perppu atau UU Anti Terorisme, yang membuat 'Islam Militan' akan semakin terjepit posisinya.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sudah hadir di studio, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djaliil, Pakar Politik Islam, Bung Azyumardi Azra, dan anggota DPR dari Partai Golkar, Bung Yasril Ananta Baharuddin. Seperti biasa untuk memperkaya diskusi, kita simak dulu pengantar berikut :

“Terkait tragedi Bali, akankah pemerintah menangkap dan memeriksa Abu Bakar Ba’asyir ? Dunia internasional semakin menekan pemerintah Indonesia. Amerika Serikat, Australia, dan Philipina membuat pernyataan bahwa Al Qaeda dan jaringan teroris lokal berada di belakang peledakan bom Bali. Mereka meminta Presiden Megawati segera bertindak terhadap jaringan Islam garis keras di Indonesia. Mengabaikan peringatan internasional akan melemahkan Indonesia, apalagi diduga bom serupa sangat mungkin terulang di wilayah lain. Sementara pendukung Ba’asyir tidak kalah kerasnya. Jika Ba’asyir ditangkap tanpa bukti yang cukup, mereka akan melakukan bom bunuh diri. Berulang-ulang mereka meminta agar Presiden Megawati tidak terjebak dalam skenario global. Selama menjadi presiden, tragedi Bali menjadi kasus berat yang dihadapi Megawati. Setidaknya ada tiga alasan, pertama, tragedi Bali sudah menjadi tontonan internasional. Kinerja Megawati mengungkap kasus itu akan dievaluasi tidak hanya oleh kalangan domestik, tetapi oleh dunia internasional. Kedua, Presiden Megawati berlomba dengan waktu. Semakin lama pelaku tragedi Bali terungkap, masyarakat akan saling menuding. Kondisi politik yang tidak sehat, bukan hanya memperburuk kepercayaan dan harmoni masyarakat, tetapi bisa mengundang tindakan main hakim sendiri oleh kelompok politik tertentu. Ketiga, kondisi aparat keamanan Indonesia khususnya kepolisian sedang memprihatinkan. Dalam kondisi seperti ini, Megawati menghadapi dilema. Di satu sisi ingin memenuhi tuntutan internasional untuk bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku tragedi Bali, kebijakan terhadap komunitas Islam garis keras ingin pula ia jalankan. Namun, di sisi lain Megawati

terbiasa berpikir legal dan formal. Ia kekurangan bukti hukum untuk menyeret siapa pun yang dituduh sebagai pelaku. Apa jadinya jika ia bertindak cepat namun karena kekurangan data, justru ada yang menuntut balik Megawati ? Megawati dan kelompoknya tentu tidak menginginkan hal ini.”

Untuk membahas hal ini kita langsung ke Bung Matori. Bung, pertanyaan paling hot minggu ini, apakah pemerintah minggu depan akan menangkap Ba’asyir ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Pemerintah menyadari amanah yang diemban adalah bagaimana membangun sistem nasional yang demokratik. Artinya rule of law harus berjalan. Di saat kita melangkah, senantiasa kita berangkat dari kacamata hukum, bukan karena tekanan internasional dan sebagainya. Dalam hal ini, apakah Abu Bakar Ba’asyir mau ditangkap atau tidak, tergantung tim Polri. Seberapa jauh tim tersebut membawa data dan fakta. Karena tim Polri diberi kesempatan oleh Amerika Serikat untuk melaksanakan interogasi.

DENNY J.A. :

Apakah tim ini yang menginterogasi Al Farouq ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Ya benar.

DENNY J.A. :

Adakah data yang dapat kita dengar dari tim ini ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Masalah data dan fakta adalah urusan kepolisian, pemerintah akan melakukan langkah manakala ada data dan fakta, di mana ketentuan hukum memungkinkan.

DENNY J.A. :

Bung Matori, Anda termasuk Pemimpin Indonesia yang pertama kali mengatakan bahwa Al Qaeda sudah beroperasi di Indonesia. Apakah hal ini lebih karena feeling politik atau Anda memang mempunyai bukti ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Kalau berbicara terorisme, kita harus menunggu bukti-bukti konkrit. Berbagai informasi intelijen yang kita miliki ternyata menunjukkan sasaran teroris adalah orang asing yang berada di Bali. Kami berpikir sudah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa terorisme ini pasti canggih dan jaringan itu sudah ada di Indonesia.

DENNY J.A. :

Ada yang mengkritik kesimpulan Anda terlalu cepat dan Anda terperangkap dalam politik Amerika, bagaimana Anda menjawabnya?

MATORI ABDUL DJALIL :

Saya justru ingin bertanya kepada mereka yang senantiasa apriori terhadap segala yang berbau Amerika disebut sebagai kebohongan dan rekayasa. Sebenarnya pikiran-pikiran demikian ini meninabobokan bangsa kita dan menghadapkan ketidakwaspadaan kepada kita. Ternyata kita yang selama ini gembar-gembor tidak ada teroris, tidak ada jaringan Al Qaeda di Indonesia dan sebagainya, justru kecolongan dengan peristiwa di Bali. Bagaimana kalau kenyataannya seperti ini ?

DENNY J.A. :

Dengan pernyataan Anda tersebut Bung, Anda memperteguh atau justru memperlemah bahwa memang Al Qaeda yang beroperasi ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Saya menjadi semakin yakin dengan berbagai informasi yang ada.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Matori, kita mendengarkan dulu pandangan Bung Azyumardi Azra. Apa yang terjadi dengan publik Islam Indonesia jika Ba'asyir ditangkap ?

AZYUMARDI AZRA :

Saya melihat secara umum kelompok-kelompok yang dikategorisasikan sebagai kelompok radikal kelihatannya berada pada posisi yang sulit, misalnya Habib Rizieq Shihab yang dipanggil dan langsung ditahan, Laskar Jihad yang dibubarkan oleh Dja'far Umar Talib dan sekarang Abu Bakar Ba'asyir. Tetapi pada saat yang sama opini kalangan Muslim yang lain kurang mendukung, justru lebih berpihak kepada pemerintah.

DENNY J.A. :

Ancaman dari pengikut Ba'asyir yang akan melakukan bom bunuh diri, apakah memang sudah seradikal itu ?

AZYUMARDI AZRA :

Gertakan-gertakan itu akan mendorong lebih lanjut tindakan penegakan hukum, dan itu kontraproduktif bagi pendukung Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Karena menunjukkan kelompok ini siap melakukan apa saja, dan itu bisa menimbulkan reperkusi terhadap politik dan keamanan.

DENNY J.A. :

Setelah tragedi Bali, apakah 'Islam Militan' akan tiarap dalam waktu 1 atau 2 tahun ini ?

AZYUMARDI AZRA :

Tergantung perkembangan politik nasional kita secara keseluruhan. Tetapi kita melihat kalangan pemimpin mainstream

muslim, kecenderungannya bersatu mendukung langkah-langkah yang dilakukan Presiden Megawati. Seperti Pak Amien Rais yang mengatakan, “Kita harus meninggalkan perbedaan dan bersama-sama mendukung langkah yang akan dilakukan Presiden Megawati.” Hari ini kita melihat DPR sudah menyetujui Perppu untuk diambil keputusan.

DENNY J.A. :

Islam mainstream sudah mendukung penangkapan-penangkapan yang diperlukan begitu ?

AZYUMARDI AZRA :

Bukan penangkapan, yang lebih ditekankan adalah sudah waktunya bagi pemerintah Megawati untuk menegakkan hukum. Bahwa kemudian ada yang ditangkap berasal dari kalangan Islam tertentu, itu adalah konsekuensi dari usaha penegakan hukum. Sebab selama ini kritik yang dilakukan dan ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum adalah ketidakberanian dalam menegakkan hukum.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Matori, setelah tragedi Bom Bali ini, tampaknya ‘Islam Militan’ agak sedikit tiarap, dan mungkin sekarang masa paceklik bagi mereka ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Sebaiknya begitu, karena kalau ingin memperjuangkan Islam dan membangun keislaman di republik ini, pendekatan dakwah adalah satu hal yang paling tepat. Karena masuknya Islam di Indonesia tidak dengan cara kekerasan.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita mendapat berita, ternyata sudah ada surat penangkapan terhadap Abu Bakar Ba'asyir seperti yang kita dengar di Metro TV. Bagaimana Bung Matori, tampaknya Ba'asyir ditangkap lebih cepat, komentar Anda ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Kalau penangkapan sudah dilakukan, berarti bukti-bukti secara hukum sudah cukup kuat. Selama ini orang mengatakan bahwa pemerintah ragu, tidak tegas, dan sebagainya. Semua ini karena bukti-bukti belum cukup, karena penghormatan kita terhadap hukum. Dan manakala bukti-bukti secara hukum sudah ada, pasti pemerintah melakukan tindakan.

DENNY J.A. :

Ini tampaknya bukti yang dibawa oleh tim investigasi yang mewawancarai Al Farouq ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Polri yang lebih mengetahui.

DENNY J.A. :

Bung Azyumardi, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap lebih cepat, bagaimana komentar Anda ?

AZYUMARDI AZRA :

Mungkin yang dibawa dari Amerika oleh aparat kepolisian dipandang sebagai alasan atau bukti yang kuat. Masalahnya sudah ada pre-judgment, pre-conception di sebagian publik bahwa ini adalah hasil rekayasa internasional, dan hasil pressure internasional. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintahan Presiden Megawati

menjelaskan kepada publik, agar tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang kurang menguntungkan bagi pemerintah.

DENNY J.A. :

Sekarang kita mendengar Bung Yasril. Bagaimana komentar Anda?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Saya ingin bertanya ke Pak Matori atau pemerintah. Kalau sesuai dengan bukti dan alat bukti hukum benar, pasti seluruh rakyat Indonesia mendukung. Tetapi mengapa sekarang baru ditangkap? Ke mana selama ini intelijen kita, katanya sudah ada informasi bahwa di Singapura dan Malaysia sudah melakukan kegiatan, mengapa tidak langsung ditangkap ?

DENNY J.A. :

Bung Yasril, kita beralih dulu ke Bung Matori. Berita terakhir DPR menyetujui pemerintah untuk Perppu Anti Terorisme. Mengapa harus Perppu, apakah KUHP tidak cukup ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Menghadapi terorisme tidak bisa disamakan dengan menghadapi kejahatan biasa. Dalam hal ini pemerintah memerlukan wewenang melakukan penangkapan atas dasar laporan intelijen. Dan kita berharap tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Manakala bukti-bukti yang bersifat analisis atau laporan intelijen didapat, maka aparat keamanan harus mengajukannya kepada hakim. Dalam 3x24 jam diharapkan hakim dapat mengambil keputusan apakah bukti awal tersebut bisa digunakan menangkap seseorang.

DENNY J.A. :

Sehingga kekhawatiran Perppu ini disalahgunakan, bisa ditepis dengan adanya hakim yang menjadi judgement netral. Bagaimana Anda melihatnya Perppu ini ?

AZYUMARDI AZRA :

Alasan perlunya Perppu tersebut bisa dipahami publik, walaupun sebagian publik yang lain khawatir kalau kemudian digunakan menjadi UU Anti Subversif. Tetapi masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan bahwa Perppu ini tidak jauh berbeda dengan RUU Anti Terorisme yang sudah disosialisasikan ke masyarakat. Kalau isinya seperti itu, kalangan LSM dan pembela HAM mungkin bisa memahami.

DENNY J.A. :

Anda mengatakan pentingnya komunikasi politik dari pemerintah, seberapa penting ?

AZYUMARDI AZRA :

Saya melihat komunikasi politik antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok organisasi civil society dan LSM, sejauh ini macet.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Azyumardi. Sekarang kita menjumpai Bung Yasril. Mengapa DPR menyetujui pemerintah mengadopsi Perppu Anti Terorisme ? Mengapa tidak menunggu RUU Terorisme saja ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Itu hasil rapat konsultasi. Pemerintah menjelaskan untuk mengantisipasi terjadinya teror dalam waktu dekat sambil menunggu UU Anti Terorisme, maka diberlakukanlah Perppu tersebut.

DENNY J.A. :

Menurut Anda tragedi Bali dianggap sebagai keadaan mendesak sehingga Perppu pun dibolehkan ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Sebenarnya DPR berharap pemerintah segera memasukkannya RUU Anti Terorisme, tetapi entah ada keterlambatan di mana.

DENNY J.A. :

Kritik dari LSM mengatakan definisi pelaku teroris dalam Perppu adalah individu atau organisasi, tetapi tidak termasuk lembaga negara, state terrorism, mengapa tidak dimasukkan Bung ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Itu kan baru rancangan dari pemerintah. Kita akan membahas bersama pemerintah, dengan mengikutsertakan semaksimal mungkin masyarakat luas.

DENNY J.A. :

Menurut Anda pemerintah lambat ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Benar, mengapa karena peristiwa ini harus menerima tekanan internasional.

DENNY J.A. :

Ok, Bung. Kita bertanya kepada Bung Matori soal kemungkinan berlaku surut Perppu ini, karena tragedi Bali adalah crime against humanity. Bagaimana menurut Anda ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Itu yang harus kita pelajari. Besok masih ada pertemuan terbatas membicarakan kemungkinan Perppu tersebut berlaku surut. Karena teror memang crime against humanity.

DENNY J.A. :

Bung Azyumardi, apakah Anda setuju jika Perppu tersebut berlaku khusus bagi Bali ?

AZYUMARDI AZRA :

Kalau Perppu itu ditujukan untuk bereaksi dan merespon tragedi Bali, mau tidak mau harus berlaku surut, kalau tidak untuk apa manfaatnya.

DENNY J.A. :

Masalah quality Perppu, kemungkinan memasukkan state terrorism sebagai pelaku teroris, bagaimana Anda melihatnya ?

AZYUMARDI AZRA :

Kalau dilihat dari pertumbuhan demokrasi dan penghargaan terhadap HAM, seharusnya dimasukkan, karena pemerintah tidak bisa lagi berlaku sewenang-wenang melakukan penahanan terhadap orang tanpa bukti-bukti yang jelas. Kalau Perppu itu menjadi semacam ISA (International Security Act) di negara-negara lain, berarti sama dengan UU Anti Subversi yang kita miliki.

DENNY J.A. :

Bung Matori, Anda setuju kalau state terrorism masuk dalam Perppu ?

MATORI ABDUL DJALIL :

Kita tidak memasukkan masalah tersebut dalam Perppu tetapi dalam RUU Anti Terorisme. Kalau DPR ingin memasukkan terserah nanti dalam pembicaraan di DPR. Kita bertekad, apa pun yang kita lakukan harus ada payung hukumnya.

DENNY J.A. :

Ada telepon dari Bung Suhaemi di Bekasi, silakan.

SUHAEMI :

Pertanyaan saya ke Pak Matori. Menurut Bapak, bom di Bali itu akibat pertarungan internal Bangsa Indonesia sendiri atau jaringan teroris internasional yang memanfaatkan wilayah Indonesia ?

DENNY J.A. :

Terima kasih. Penelepon kedua, Bung Hilman dari Bandung, silakan.

HILMAN :

Saya ingin bertanya kepada Pak Azyumardi. Istilah 'Islam Militan' dengan 'Islam Radikal' itu bagaimana ? Adanya Laskar Jihad karena ketidakadilan di Maluku. FPI ada karena adanya maksiat yang tidak diberantas oleh polisi. Abu Bakar Ba'asyir karena ingin memperjuangkan Islam, itu bukti demokrasi. Menurut saya kalau ada ketidakadilan pasti ada yang ekstrem. Kuncinya adalah Amerika dan Israel harus lenyap dari dunia.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih Bung. Penelepon ketiga dari Bung Lintang, Jakarta, , silakan.

LINTANG :

Perppu ini saya lihat lebih diarahkan ke dalam negeri. Padahal kita ingin melihat apakah jaringan internasional, apakah orang Afghanistan, apakah orang Amerika meninggalkan Indonesia itu terkait dengan peristiwa Bali ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, kita temui Bung Matori. Anda membuat kesimpulan yang jauh lebih cepat bahkan dari ketua BIN sendiri dan tidak mungkin Anda dianggap masuk dalam skenario Amerika Serikat?

MATORI ABDUL DJALIL :

Pertama yang perlu dijelaskan adalah atmosfer di Indonesia sudah dipengaruhi sedemikian rupa sehingga segala informasi yang datang dari Amerika dianggap bohong dan rekayasa. Itu suatu hal yang ditiupkan begitu keras bahkan sebelum ada bom di Bali. Akibatnya, seluruh pejabat pemerintah sangat berhati-hati dalam membuat statement. Lebih-lebih dalam hal ini BIN atau Pak Hendropriyono yang sangat berhati-hati menyampaikan meskipun sebenarnya dalam pikiran beliau, dari data-data yang beliau kumpulkan, sudah bisa menyimpulkan sebagaimana yang saya simpulkan. Kalau saya yang pertama menyimpulkan, itu karena saya melakukan semacam ice breaking suasana, supaya kita kembali obyektif. Tidak semua informasi Amerika salah, tetapi juga tidak semuanya benar.

DENNY J.A. :

Pernyataan Anda banyak dikutip oleh media-media internasional. Menurut Anda sebenarnya Pak Hendro pun mengetahui, hanya beliau tidak menyampaikannya lebih cepat dari Anda. Kedua, Bung Azyumardi, menurut mereka tidak adil jika 'Islam Radikal' diberantas, karena sebenarnya ketidakadilan yang menjadi akarnya ?

AZYUMARDI AZRA :

Ketidakadilan politik ekonomi menjadi salah satu penyebab radikalisme, tidak hanya di kalangan Islam tetapi juga di masyarakat yang lain. Selain itu ada juga hal yang bersifat ideologis. Misalnya pemahaman agama yang cenderung bersifat literal sehingga praksisnya menjadi lebih keras dan kaku. Pemahaman seperti itu kalau diwujudkan dalam praksis dengan tindakan-tindakan yang keras, sebenarnya juga bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kalau kita melihat adanya kemungkaran, ketidakadilan, pertama-tama kita mengupayakan dengan cara-cara bil hikmah, dengan bijaksana, pengajaran yang baik. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat itu sendiri.

DENNY J.A. :

Apakah Anda melihat doktrin kekerasan juga bagian dari doktrin 'Islam Radikal' ?

AZYUMARDI AZRA :

Munculnya radikalisme itu karena pemahaman yang cenderung literal. Misalnya Amar ma'ruf nahi munkar harus diubah dengan kekuatan, tidak melalui dakwah dan pendidikan penyadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Ada keinginan-keinginan untuk melakukan short cut dalam mengubah masyarakat secara cepat, radikal dan menyeluruh.

DENNY J.A. :

Ok, Bung. Sekarang ke Bung Yasril. Bagaimana kemungkinan Perppu ini tidak hanya menjangir penduduk lokal Indonesia saja ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Seharusnya demikian, Perppu atau undang-undang itu harus menjangir siapa pun di wilayah negara Republik Indonesia yang

melakukan tindakan kriminal. Bahwa nanti ada orang asing, kemudian negaranya memintanya, kalau ada perjanjian ekstradisi bisa kita memikirkan. Tetapi harus ada penyelidikan awal di sini.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan Al Farouq yang ditangkap di Indonesia tetapi seketika itu juga dia dideportasi ke negara lain ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Iniilah yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa kita yang melakukan penyelidikan justru ke luar, padahal sebelumnya ada di sini.

DENNY J.A. :

Baik pemirsa Metro TV, sekarang kita mendengar pandangan singkat masing-masing pembicara, tentang hal-hal penting untuk kita renungkan bersama. Dimulai dari Bung Azyumardi.

AZYUMARDI AZRA :

Peristiwa Bali merupakan test case yang sangat berat bagi pemerintah sekaligus bagi masyarakat. Apakah pemerintah mampu menggalang solidaritas dengan masyarakat, dan pemimpin masyarakat. Kalau pemerintah sendiri, tidak akan kuat. Dukungan dan komunikasi dengan kepemimpinan sosial merljadi sangat penting.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Yasril singkat saja.

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Dalam menghadapi masalah semacam ini kita harus bersatu padu. Betul dalam negeri kita memang ada berbagai kelemahan,

namun kritik justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita menghadapi berbagai rekayasa yang dimainkan pihak asing. Mereka bisa menghancurkan kredibilitas dan citra Bangsa Indonesia di luar negeri dan melemahkan kita, dengan kondisi seperti sekarang mereka dengan manis membantu kita. Tetapi harus selalu kita waspadai. Bagaimana pun kita perlu bekerjasama secara internasional, tetapi kemandirian kita, martabat bangsa harus kita tempatkan di atas segalanya.

DENNY J.A. :

Apakah tragedi Bali justru menyatukan atau memecah kita di kalangan elit ?

YASRIL ANANTA BAHARUDIN :

Dalam wacana memang ada perbedaan pendapat. Tetapi dalam rangka menghadapi ke luar, tidak ada pilihan lain kecuali harus bersatu padu.

DENNY J.A. :

Ok, terakhir Pak Matori.

MATORI ABDUL DJALIL :

Kalau kita konsisten untuk melaksanakan reformasi, membangun sistem nasional yang demokratis hendaknya kita mencatat bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal, anarki, dan teror adalah musuh demokrasi. Kita harus bersatu padu melawan terorisme dengan tetap berpijak kepada aturan perundang-undangan.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada semua pembicara.

Pemirsa Metro TV, bom sudah meledak di Bali. Kita mendukung secara total perang terhadap terorisme, dengan catatan jangan sampai ada pihak yang dihukum karena kesalahan yang tidak dibuatnya, dan jangan sampai aparat keamanan melanggar prosedur hukum dalam menangani masalah terorisme. Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

BOM BALI D MENANGKAP ALUMNI AFGANISTAN AN ISLAM MILITAN

Tanggal : 25 September 2003

Host : Denny J.A.

Narasumber : Muhammad Hafidz (Korban Penangkapan),
Mahendra Datta (Advokat), Romli Atmasasmita (Perancang UU Anti
Terorisme)

Setelah bom meledak di Bali dan Marriot, pemerintah mempunyai agenda besar untuk mencegah teror kembali terjadi. Aksi-aksi penangkapan terhadap pihak yang diduga terkait dengan jaringan terorisme dilakukan. Selain di dalam negeri, banyak warga Indonesia yang ditangkap di luar negeri, seperti di Pakistan, Thailand, Philipina, dan Singapura. Mereka dihuBung-huBungkan dengan jaringan terorisme. Aksi-aksi penangkapan ini segera melahirkan pro dan kontra. Polri dianggap telah melampaui koridor hukum. Sedangkan Polri berdalih akan melakukan apa saja yang perlu demi mencegah terorisme. Mereka yang ditangkap kebanyakan diidentifikasi sebagai alumni Afganistan. Apa benar mereka alumni Afganistan ? Apakah benar Afganistan sudah menjadi sekolah teroris ? Atau status alumni Afganistan hanya sekadar strategi untuk mempermudah penangkapan mereka yang dicurigai terlibat dalam jaringan teroris ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, kita jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita hari ini adalah “Penangkapan Alumni Afganistan Terkait Kasus Terorisme.” Sudah hadir di studio, Bung Mahendra Datta, Bung Romli Atmasasmita, salah seorang perancang UU Terorisme, dan Muhammad Hafidz, korban penangkapan yang pernah datang ke Afganistan. Sebelum berdiskusi, kita simak dulu pengantar berikut:

“Demam penangkapan sedang melanda Indonesia. Beberapa aktivis masjid hilang mendadak. Setelah dilaporkan ke beberapa pihak mulai ke KontraS sampai MUI, terdengar kabar mereka dalam tahanan polisi. Sama dengan Pakistan, kasusnya menyangkut usaha penumpasan terorisme. Setelah bom meledak di Bali dan Hotel Marriot, usaha pemerintah menanggulangi dan memerangi terorisme menjadi lebih keras. Pemerintah tidak hanya mengusik pelaku teror yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan. Penangkapan menjadi modus operandi paling mudah untuk pencegahan. Soal prosedur atau hukum dapat didiskusikan belakangan. Dari mereka yang ditangkap terbongkarlah sejumlah rencana teror, dan tragedi bom pun dapat dihindari. Persoalannya, bagaimana jika terjadi salah tangkap ? Siapa yang mengontrol ? Bukankah laporan intelijen bisa salah ? Beberapa pihak mengusulkan penambahan kewenangan polisi tanpa perlu verifikasi dari hakim. Isu lain, perencana dan penggerak tindakan terorisme akan dihukum walau aksi teror belum terjadi. Bunyi draft revisi itu adalah, ‘Ancaman pidana 3 sampai 15 tahun bagi yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, kendati tindakan teror itu belum terjadi’.”

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, mengapa penangkapan ini bermasalah ? Kita menghugungi Bung Hafidz. Assalamu’alaikum, kapan Anda ke Afganistan ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Wa'alaikum salam, tahun 1986.

DENNY J.A. :

Berapa lama di sana ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Hanya beberapa bulan.

DENNY J.A. :

Setelah pulang dari Afganistan, apa aktivitas Anda ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Aktivitas saya seperti sebelumnya, mengajar, training, dan bisnis.

DENNY J.A. :

Baru-baru ini Anda ditangkap ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Iya, bulan April.

DENNY J.A. :

Anda mengetahui mengapa Anda ditangkap ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Tidak, sebab saya mengira penangkapan itu kecelakaan. Karena saya dibawa oleh orang yang tidak saya kenal, tidak ada surat dan dibawa dalam keadaan mata tertutup.

DENNY J.A. :

Apakah Anda menduga penangkapan tersebut ada hubungannya dengan kepergian Anda ke Afganistan ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Mereka tidak mengetahui kalau saya pernah ke Afganistan.

DENNY J.A. :

Dari pertanyaannya Bung, apakah tergambar mereka menyelidiki Anda pernah ke Afganistan atau ke Ambon ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Pertanyaan pertama adalah “Apakah saudara pernah ke Ambon?” Saya mengatakan, “pernah”. Atas jawaban itu ada yang bilang, “Masukkan dia dalam status”. Saya tidak paham apa yang dimaksud “masukkan dalam status.”

DENNY J.A. :

Ketika Anda ditangkap, apakah polisi menunjukkan surat bukti penahanan ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Saya tidak mengetahui kalau itu polisi, karena tidak berpakaian dinas, mereka juga tidak tampak seperti aparat, rambut panjang, dan memakai T -shirt.

DENNY J.A. :

Keluarga Anda juga tidak mengetahui ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Tidak, bahkan tidak mengetahui saya ada di mana.

DENNY J.A. :

Berapa lama Anda ditangkap ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Saya diambil hari Minggu malam dan dikembalikan Sabtu malam.

DENNY J.A. :

Kapan Anda mengetahui bahwa yang menangkap Anda polisi ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Setelah saya di hotel.

DENNY J.A. :

Apakah Anda akan menuntut ganti rugi ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Saya tidak yakin kalau tuntutan itu dilakukan akan membawa manfaat. Saya khawatir justru akan mempersulit posisi saya.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Hafidz. Pemirsa Metro TV, kita mengetahui agenda besar polisi untuk mencegah terorisme adalah hal yang harus didukung. Tetapi jika prosedur teknis di lapangan dilanggar, agenda besar ini bisa menjadi cacat. Sekarang ke Bung Mahendra Datta. Bung, komentar Anda secara umum tentang penangkapan yang dialami Bung Hafidz, di mana kesalahan polisi ?

MAHENDRA DATTA :

Sebagaimana yang kita soroti tampaknya telah terjadi excessive of power.

DENNY J.A. :

Menurut Anda ada problem dengan prosedur penangkapan ?

MAHENDRA DATTA :

Iya. Ada problem dengan penggunaan wewenang yang berlebihan, excessive.

DENNY J.A. :

Apakah ada alasan pembenar bagi polisi untuk sedikit excessive ?

MAHENDRA DATTA :

Kalau dari segi normatif tidak pernah ada tempat untuk excessive.

DENNY J.A. :

Bagaimana jika alasannya adalah situasi darurat ?

MAHENDRA DATTA :

Situasi darurat harus ada batasan-batasan tertentu. Batasan-batasannya jelas ada di dalam KUHP.

DENNY J.A. :

Misalnya polisi mendapat informasi ada sekian kilo bahan peledak yang akan diledakka sehingga perlu gerak cepat, bagaimana ?

MAHENDRA DATTA :

Kalau itu masih bisa dimasukkan sebagai situasi darurat. Tetapi kalau menangkap, ditutup matanya, didorong, dipukul, dibentak-bentak, apalagi diseret di depan orang ramai, itu excessive of power. Apalagi diputar-putarkan seakan-akan sudah pasti teroris, sehingga masyarakat bisa saja melihatnya sebagai penangkapan orang paling jahat di dunia, muncul stigma. Ekses fisik yang dilakukan, itu sudah jelas menyakiti. Tetapi ekses yang paling gawat adalah terhadap masyarakat sekitar.

DENNY J.A. :

Bung Romli, apakah ada alasan pembenar bagi polisi agar sedikit bisa excessive ?

ROMLI ATMASASMITA :

UU Terorisme yang kita susun memiliki satu paradigma yang berlawanan dengan negara-negara maju dalam penanggulangan teror. Mereka begitu kejam, menggunakan segala cara untuk mencegah dan memberantas terorisme. Indonesia memiliki paradigma ingin rnenegakkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu hak semua negara. Tetapi dalam menegakkan hak kedaulatannya itu ada keseimbangan perlakuan. Artinya juga memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa dan bagaimana memperhatikan korban-korban dari kegiatan terorisme. Dalam menyusun UU Terorisme ini ada unsur keseimbangan hak.

DENNY J.A. :

Menurut Anda negara maju lebih keras daripada Indonesia ?

ROMLI ATMASASMITA :

Benar. Misalnya Patriot Act di Amerika Serikat, mereka bisa menahan setahun lebih tanpa ada peradilan.

DENNY J.A. :

Mengapa tidak mengikuti jejak negara-negara maju jika memang efektif ?

ROMLI ATMASASMITA :

Persoalannya bukan efektivitas, kita berbicara efisiensi. Kalau kita menganut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UUD 1945 Bab 10 A tentang HAM, maka kita harus konsisten dan konsekuen dalam penjabarannya, dalam setiap undang-undang yang lain.

DENNY J.A. :

Bagaimana Bung Hendra, UU Terorisme kita dianggap terlalu lunak ?

MAHENDRA DATTA :

Dari pandangan sosiologis, undang-undang ini hadir di tengah masa reformasi. Kita selalu berbicara pasca Bom Bali, pernahkah kita berbicara pasca Tragedi Tobelo ? Pernahkah kita berbicara pasca terorisme “Idul Fitri Berdarah” ? Mengapa stigma itu selalu muncul pasca Bom Bali ? Ini secara sosiologis tidak bisa diterima, banyak diskriminasi. Masyarakat merasa, ke mana UU Terorisme sewaktu ada pembantaian 3000 orang di Tobelo, ke mana UU Terorisme sewaktu ada pembunuhan bayi yang dilempar ke atas dan “ditadahi” tombak saat Idul Fitri berdarah ?

DENNY J.A. :

Anda merasa undang-undang ini sudah pas ?

MAHENDRA DATTA :

Bukan begitu, kita harus melihat dari segi sosiologis, lahirnya undang-undang ini ada di tengah terorisme yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Kita harus sepakat dulu segala bentuk terorisme harus

diberantas, dari awal sampai yang akan datang. Saya juga membenci terorisme dalam bentuk apa pun. Tetapi dalam penerapannya harus melihat faktor-faktor sosiologis seperti itu.

DENNY J.A. :

Bung Romli, kalau kita melihat secara makro terorisme ini berjaringan internasional. Jika di Malaysia dan Singapura hukumnya begitu keras sementara di Indonesia agak moderat, tidakkah akan terjadi migrasi terorisme ke Indonesia ?

ROMLI ATMASASMITA :

Kalau kita konsisten kepada aturan-aturan yang kita miliki, konsisten dalam penangkapan dan penyelidikan, maka tidak akan terjadi migrasi.

DENNY J.A. :

Apakah dalam RUU tidak diatur Hukum Acara Khusus Pak ?

ROMLI ATMASASMITA :

Ada, kita juga membuat kekhususan. Di samping UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena ini sangat luar biasa. Terorisme itu sangat sulit diterka.

DENNY J.A. :

Anda menganggap penangkapan Bung Hafidz sudah di luar RUU Terorisme ?

ROMLI ATMASASMITA :

Kalau keterangan Bung Hafidz memang seperti itu, maka ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran terhadap KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981. Karena harus ada surat penangkapan, identitas yang

menangkap, dan sebagainya. Itu semua ada dalam UU Hukum Acara Pidana.

DENNY J.A. :

Anda mengusulkan adanya revisi agar Hukum Acara untuk terorisme lebih lunak ?

ROMLI ATMASASMITA :

Revisi terakhir terhadap UU Terorisme antara lain pada kualifikasi tindak pidana perencanaan dan menggerakkan kegiatan sehingga menimbulkan akibat dan sebagainya. Salah satu kualifikasi di situ juga diperluas, kalau pun tidak terjadi, yang menggerakkan dan merencanakan juga mendapat pidana. Kemudian masa penahanan harus diperjelas, dipertegas, di mana, kapan dan berapa lama penyidikan itu. Dan beberapa hal mengenai alat bukti, misalnya laporan intelijen yang bisa menjadi bukti.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, Anda mendengar agenda besar polisi untuk 9 mencegah terorisme itu menjadi trend umum di mana-rnana. Tetapi jika dilakukan dengan melanggar prosedur yang ada, justru set back ke belakang. Perang terhadap terorisme justru akan mendapat perlawanan yang jauh lebih keras.

Sekarang kita membacakan dulu polling Metro TV bekerjasama dengan Mars. Ada tiga pertanyaan, pertama, “Untuk mencegah teror, setujukah Anda jika polisi diberi kewenangan lebih dalam menangkap orang yang dicurigai sebagai teroris ?” Yang menjawab “Setuju” 69%, “Tidak Setuju” 29%, “Tidak Tahu” 2%. Kedua, “Setujukah Anda jika data intelijen dipakai sebagai alasan untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai teroris ?” Yang menjawab “Setuju” 59%, “Tidak Setuju” 35% dan “Tidak Tahu” 6%. Pertanyaan ketiga, “Untuk mencegah terorisme, setujukah Anda bila HAM dikesampingkan

terlebih dahulu ?” Yang menjawab “Setuju” 14%, “Tidak Setuju” 81 %, “Tidak Tahu” 5%.

Mungkin jawaban ini dapat menggambarkan secara makro political mood publik luas bahwa mereka menginginkan polisi mempunyai kewenangan lebih, tetapi tetap dalam koridor hak asasi atau koridor hukum. Banyak aktivis yang ditangkap adalah alumni Afganistan, yaitu mereka yang pernah datang ke Afganistan dalam rangka ‘berjuang’. Mengapa ini terjadi ? Bung Hafidz, bagaimana Anda menanggapi banyaknya penangkapan terhadap orang yang pernah datang ke Afganistan seperti Anda ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Perlu diluruskan tentang definisi alumni Afganistan. Artinya, apakah seseorang yang pernah ke Afganistan bisa diidentikkan dan patut dicurigai sebagai teroris ?

DENNY J.A. :

Ketika Anda ke Afganistan, apa yang Anda kerjakan di sana ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Tahun 1986 ada program di International Islamic University Islamabad, yaitu International Islamic Leadership Training selama satu bulan. Waktu itu sedang hangat-hangatnya konflik antara Afganistan dengan Uni Soviet. Kita banyak mendengarkan masukan dari para aktivis Mujahidin dan sebagainya yang membuat kita tertarik. Sehingga selesai acara di International Islamic University kita mendatangi camp pengungsi dan bergabung dengan para Mujahidin. Kemudian kita belajar macam-macam, tetapi waktunya sangat singkat.

DENNY J.A. :

Apakah Anda mendapatkan training-training militer ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Training militer itu apa misalnya ?

DENNY J.A. :

Misalnya cara menggunakan senjata.

MUHAMMAD HAFIDZ :

Iya, karena senjata sangat mudah diperoleh dan mudah dipelajari, artinya tidak mengalami banyak kesulitan, dorongan rasa ingin tahu membuat kita ingin mengetahui bagaimana caranya. Dan mereka dengan senang hati mengajarkan hal itu.

DENNY J.A. :

Saat itu perang melawan Uni Soviet, bahkan Mujahidin dibantu Amerika Serikat. Tetapi mengapa sekarang berbalik anti Amerika Serikat yang dulu menjadi partner politiknya ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Kita perlu bertanya kepada Amerika. Mengapa orang yang mereka besarkan, sekarang mereka musuhi ? Mengapa orang yang mereka bantu, sekarang mereka musuhi ?

DENNY J.A. :

Setelah pulang, apakah Anda masih membina jaringan dengan kawan-kawan alumni Afganistan, Bung ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Untuk saya tidak ada.

DENNY J.A. :

Tetapi ketika muncul konflik Ambon, mereka yang pernah ke Afganistan bertemu lagi, bersama-sama ke Ambon ya, Bung ?

MUHAMMAD HAFIDZ :

Perang Afganistan berakhir kurang lebih tahun 1992 dan banyak orang kembali ke Indonesia. Tidak ada kecurigaan terhadap orang-orang yang pernah ke Afganistan, karena memang mereka tidak membuat kegiatan apa-apa. Ketika terjadi “Idul Firti Berdarah” di Ambon, mereka melihat umat Islam diperlakukan secara dzalim. Mereka yang merasa mempunyai kemampuan dan pengalaman berperang terpanggil jiwanya kemudian datang ke sana dan memberikan perlawanan kepada orang-orang yang melakukan pembantaian.

DENNY J.A. :

Bung Mahendra, mengapa banyak labelisasi alumni Afganistan ?

MAHANDRA DATTA :

Ini sangat disayangkan. Kemungkinan ada penumpangan program berupa dendam masa lalu atau kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini harus diperhatikan supaya jangan bias.

DENNY J.A. :

Bung Romli, mengapa alumni Afganistan begitu dominan di belakang pelaku teroris ?

ROMLI ATMASASMITA :

Saya tidak mengetahui persis pelajaran apa yang diperoleh dari Afganistan. Tetapi bagi aparat penegak hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan terorisme pasti akan diusut dan diteliti. Apakah sebagai saksi, sebagai pelapor, atau mungkin menjadi tersangka. Itu

tugas operasional kepolisian yang biasa dilakukan. Hanya dalam tugas-tugas itu tentu ada laporan-laporan intelijen yang dipergunakan.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, terima kasih. Pemirsa Metro TV, banyak yang ditangkap adalah alumni Afganistan. Dari mereka, polisi menemukan informasi penting. Sejumlah bahan peledak dan lebih dari 2 ribu butir peluru ditemukan. Hanya prosedur penangkapan itu menjadi pro dan kontra. Dan penting bagi kita untuk tidak membuat generalisasi agar tidak terjadi salah tangkap seperti yang dialami Bung Hafidz. Sekarang kita mendengar suara publik. Pertama dari Abu Amaliah, dari Makassar. Silakan.

ABU AMALIAH :

Konflik Ambon dan Poso merupakan fardlu kifayah bagi orang Islam, kalau tidak ada yang pergi ke sana maka semua orang yang ada di Indonesia akan berdosa. Kemudian terjadi peperangan dan akhirnya kelompok putih menang. Mereka dipaksa untuk memilih, berhadapan dengan aparat atau berdamai, maka muncullah “Deklarasi Malino”. Setelah Deklarasi Malino kelihatan siapa sebenarnya yang terlibat di Ambon dan Poso, kemudian ditangkaphlah mereka, seperti Ustad Agus dan lainnya. Bom Bali kan terjadi setelah kasus itu. Beberapa orang yang terlibat dan ditangkap di Makassar banyak yang tidak terlibat dan tidak tahu-menahu kondisi itu, tetapi mereka memang pernah ke Ambon dan Poso. Ini skenario global, akan menjadi masalah negara jika mereka ditangkap terus, mereka bisa berpikir, mengapa yang lain tidak ditangkap ?

DENNY J.A. :

Menurut Anda ada persoalan salah tangkap padahal ada perjuangan yang sifatnya lebih ke agama, begitu Bung ?

ABU AMALIAH :

Ya, bentuk lain dari suatu perjuangan.

DENNY J.A. :

Tetapi berbeda sama sekali dengan kegiatan teror yang banyak dilakukan oleh mereka yang dicap alumni Afganistan.

ABU AMALIAH :

Kita harus melihat fakta memang terjadi terorisme di Bali dan Marriot.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Sekarang ke Bung Muchtar di Cirebon. Silakan Bung.

MUCHTAR :

Kecurigaan polisi terhadap alumni Afganistan memang tidak ada salahnya. Karena kalau kita melihat kasus Bom Bali, sebagian besar pelakunya alumni Afganistan, walaupun kita yakin tidak semua alumni Afganistan teroris. Himpunan saya kepada anggota teroris itu, tindakan Anda justru menjerumuskan orang Islam ke jurang yang paling sengsara, karena bangsa Indonesia 90% penduduknya beragama Islam. Kalau teroris berjalan terus, investor tidak ada yang masuk, akhirnya terjadi kelaparan. Siapa yang lapar ? Orang Islam. Tindakan Anda justru menjerumuskan orang Islam.

DENNY J.A. :

Sekarang Bung Sanyu dari Tegal.

SANYU :

Kami umat Islam benar-benar yakin dan ikhlas setia kepada negara. Karena Nabi bersabda “Hubbul Wathon Minal Iman” bahwa umat Islam harus setia dan menjunjung tinggi negaranya. Kami prihatin dengan langkah aparat keamanan yang menangkapi umat Islam. Karena umat Islam di mana-mana pasti akan berani mencurahkan jiwa dan raganya demi negara. Suatu contoh, semua pejuang dari Pangeran Diponegoro, Panglima Polim, Pattimura, semua rela berkorban demi negara.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak Bung Sanyu, kita sudah menangkap message-nya. Pemirsa Metro TV, masalah terorisme menjadi rumit karena masuknya sentimen keagamaan. Pemerintah mengatakan penumpasan terorisme sama sekali tidak berhubungan dengan agama, hanya menyangkut individu-individu tertentu dan agama sifatnya hanya ditempelkan saja. Kita akan mendengar solusi dari para pembicara di studio, apa yang harus dilakukan agar terorisme lebih mudah diatasi, tetapi tetap dalam koridor hukum. Dimulai dari Bung Hafidz, silakan Bung.

MUHAMMAD HAFIDZ :

Pertama, harus dihindari stigmatisasi terhadap orang-orang yang dikaitkan sebagai potensial terorisme. Misalnya setiap orang yang pergi ke Afganistan, Ambon, atau ke Poso, jangan dikategorikan sebagai alumni Afganistan atau menjadi teroris. Sehingga akan membuat hati mereka kecut, takut, dan kehilangan rasa percaya diri, padahal mereka pernah melakukan sesuatu dengan baik. Kedua, kalau polisi ingin melakukan penangkapan, hendaknya dengan prosedur yang jelas, keluarga juga mengetahui siapa yang mengambil dan di mana diletakkan, tidak hilang begitu saja. Dan ketiga, kita sepakat segala macam tindak kekerasan seperti di Ambon, Poso, Israel, harus dilawan. Begitu juga tindak terorisme harus dicegah dan diberantas.

DENNY J.A. :

Ok, Bung, terima kasih banyak. Bung Mahendra silakan.

MAHENDRA DATTA :

Pertama, dalam menerapkan UU Anti Terorisme jangan pernah dimanfaatkan atau memanfaatkan emosi. Kalau terpaksa harus emosi terhadap terorisme, maka emosi tersebut harus komprehensif. Semua bentuk teror, tidak hanya pasca Bom Bali tetapi dari awal teror di Indonesia, mulai dari zaman reformasi sampai sekarang harus kita berantas semua. Kedua, jangan sampai terjadi *excessive of power* atau pun penumpangan-penumpangan terhadap satu kepentingan tertentu. Dan yang paling penting adalah jangan menciptakan stigmatisasi atau pun labelisasi.

DENNY J.A. :

Terakhir Bung Romli.

ROMLI ATMASASMITA :

Solusi terbaik saat ini adalah bagaimana menyebarluaskan pemahaman tentang UU Anti Terorisme kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Supaya mereka memahami aturan main yang ada dalam undang-undang ini. Dan yang lebih penting lagi, kita harus bisa menahan diri dalam merevisi undang-undang ini, jangan terlalu *over reacted*.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsas Metro TV, Anda mendengar sendiri opini yang beragam bagaimana caranya agar terorisme menjadi agenda bersama tetapi tetap dalam koridor hukum. Dan kita mendukung sepenuhnya langkah polisi untuk mencegah terorisme. Namun jangan sampai agenda besar itu cacat hanya karena kesalahan prosedur di lapangan.

Pemirsas Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

SIKAP DPR ATAS TERORISME

Tanggal : 31 Oktober 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Hendardi (Ketua PBHI), Habib Husein Alhabsy (Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia), R.K. Sembiring Meliala (F-PDI-P DPR RI), Hamid Awaludin (Pakar Hukum)

Saat menghadapi tragedi 11 September, Amerika Serikat bersatu padu. Kongres 100% berdiri di belakang presiden, mendukung kebijakan perang melawan terorisme. Dukungan yang kuat juga datang dari masyarakat. Bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia pascateror Bom Bali ? Bangsa Indonesia justru terkesan terpecah-belah. Di satu sisi pemerintah ingin serius menyiapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memerangi terorisme. Dari keputusan mengeluarkan Perppu Antiterorisme hingga rencana mengesahkan UU Penanggulangan Terorisme. Pemerintah bahkan mendukung langkah PBB menempatkan Jama'ah Islamiyah sebagai kelompok teroris di dunia. Namun beberapa unsur Islam melihat pemerintah terlalu lunak pada intervensi asing, khususnya Amerika Serikat, dalam menangani isu terorisme yang pada akhirnya bersinggungan erat dengan isu fundamentalisme Islam di Indonesia. Sementara pada sisi yang lain, unsur-unsur LSM juga terus menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah soal terorisme dari perspektif HAM dan demokrasi. Dalam konteks ini, DPR terjepit di tengah-tengah. Begitu sulit merumuskan

formula penanganan masalah terorisme yang tidak bias kepentingan asing, tidak menggelisahkan kelompok agama tertentu, serta tidak berbahaya bagi perspektif HAM dan demokratisasi.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, selamat malam, jumpa lagi dalam “Parliament watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Sikap DPR Terhadap Masalah Terorisme.” Bersama kita, di studio sudah hadir Habib Husain Alhabsy, Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia. Assalamu’alaikum, Habib, apa kabar ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Wa’alaikum salam, alhamdulillah, baik.

DENNY J.A. :

Bersama kita juga hadir Bung Hendaradi, Ketua PBHI, R.K. Sembiring Meliala, anggota DPR dari PDIP, serta pakar hukum Hamid Awaluddin. Seperti biasa, pemirsa, untuk mengarahkan diskusi kita saksikan dulu pengantar berikut ini :

“Suara sumbang tentang kinerja pemerintah melawan terorisme terlontar dari kalangan anggota DPR, kalangan Islam garis keras serta berbagai kelompok LSM. Akankah DPR melunak sehingga jaringan terorisme di Indonesia semakin sulit ditumpas ? Akankah perang melawan terorisme di Indonesia melemah seiring dengan hiruk-pikuk elit politik yang sulit menyepakati agenda tentang terorisme ? Dampak kasus bom Bali menyadarkan betapa ketegasan dan kecepatan menumpas terorisme harus menjadi prioritas. Namun perbedaan strategi menghadapi terorisme sangat menonjol. Bagaimana seharusnya terorisme diberantas ? Kelompok mana yang seharusnya menjadi sasaran ? Apa seharusnya instrumen hukum yang digunakan ?

Setidaknya ada tiga kelompok berbeda yang terlibat dalam pro

dan kontra. Pertama, pemerintah, kedua, kelompok Islam garis keras, dan ketiga, kelompok LSM. Pemerintah sudah mengambil sikap. Ada empat kebijakan dasar yang sudah diambil pemerintah dan semuanya kontroversial. Pemerintah menerbitkan Perppu yang memberlakukan aturan darurat bagi pengungkapan tragedi Bali. Kemudian muncul Inpres yang memberikan kewenangan Menko Polkam sebagai komando utama memerangi terorisme, serta diberikannya mandat kepada BIN sebagai koordinator seluruh intelijen di Indonesia.

Kelompok Islam garis keras menjadi komunitas pertama yang menentang. Kelompok ini gelisah karena beranggapan pemerintah mempunyai skenario untuk menumpas gerakan Islam garis keras. Kegelisahan semakin bertambah setelah Indonesia ikut mendukung dimasukkannya Jama'ah Islamiyah sebagai kelompok teroris versi PBB. Opini di kalangan Islam garis keras pun terbentuk. Mereka menganggap pemerintah Indonesia tunduk terhadap skenario Amerika Serikat. Padahal di kalangan Islam garis keras kebencian atas Amerika Serikat begitu tinggi.

Kelompok lain yang menentang agenda pemerintah adalah koalisi LSM pro reformasi. Bagi mereka, prinsip demokrasi dan HAM adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Prinsip ini tidak boleh dilanggar untuk alasan yang tidak valid. Menurut mereka, teror di Indonesia bukan karena kekosongan hukum atau tidak memudahinya KUHP dan KUHAP, tetapi akibat lemahnya aparat keamanan. Perppu Pemberantasan Terorisme dianggap "obat" yang salah dan berpotensi membuat negara menjadi otoriter. Gagasan tiga kelompok yang berbeda itu bertemu di Senayan. DPR terjepit di tengah. Siapa yang harus didengar DPR ? Pemerintah, Islam garis keras, atau koalisi LSM? Haruskah Perppu mengenai pemberantasan terorisme disahkan sebagai UU Penanggulangan Terorisme, atau justru ditolak ?"

DENNY J.A. :

Yang pertama kepada Habib Husain dulu. Abu Bakar Ba'asyir menantang Menko Polkam dan Kapolri untuk bersumpah bahwa

ia ditahan bukan karena intervensi asing. Bagaimana Habib meresponnya?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Apa yang dikatakan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memang benar, karena kalau kita melihat bagaimana cara polisi menangkap beliau, sampai terjadi pemecahan kaca dan segala macam. Dari segi HAM maupun hukum impossible negara yang beradab melakukan hal seperti itu kepada orang tua kalau bukan karena pesanan sponsor. Analisis kita menunjukkan itu pesanan sponsor. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya Al Qaeda, bagaimana Jama'ah Islamiyah yang sebenarnya ada di Indonesia, tetapi itu dipaksakan untuk harus ada.

DENNY J.A. :

Habib melihat lebih dari segi prosedur penangkapan Ba'asyir ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Bukan saja prosedur tetapi memang seolah-olah pemerintah kita “menjongoss kepada Amerika, kepada polisi George W. Bush. Karena tidak ada pemilihan presiden di Indonesia atau di mana pun –analisa semua orang– kecuali mendapat green light dari Amerika.

DENNY J.A. :

Target pemerintah dalam melawan terorisme ini banyak dirasakan oleh kalangan Islam garis keras. Apakah Habib juga merasakan ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Penyebutan Islam garis keras dan garis quick-quick slow itu tidak pas. Dan bagaimana Islam garis keras tidak menentang pemerintah karena di semua agama ada kelompok garis keras dan radikalnya.

DENNY J.A. :

Habib melihat ada diskriminasi ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Iya, ada diskriminasi terhadap umat Islam dan itu sangat memukul dan menyakitkan.

DENNY J.A. :

Habib, demi bangsa ke depan, bagaimana caranya agar umat Islam bersatu padu membantu pemerintah melawan terorisme, apa yang harus dilakukan ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Umat Islam di Indonesia harus mempunyai rasa nasionalisme, kita menolak disintegrasi bangsa. Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke. Kita pupuk rasa cinta kepada tanah air dan pemerintah harus memperhatikan aspirasi umat Islam.

DENNY J.A. :

Sekarang kita ke Bung Hendardi. Bagaimana Bung, image pemerintah kita menjadi kaki-tangan asing begitu kuat. Komentar Anda ?

HENDARDI :

Hal itu terlihat ketika peristiwa-peristiwa peledakan bom atau teror- teror kekerasan begitu banyak terjadi.

DENNY J.A. :

Sebelum Bali ?

HENDARDI :

Iya, khususnya setelah Soeharto jatuh, tidak ada satu penanganan yang serius. Aparat keamanan dan aparat intelijen tidak memperlihatkan respon yang serius. Dan boleh dikatakan gagal dalam mengungkap motif maupun jaringan teror bom tersebut. Memang betul ada orang-orang yang diadili, ditahan, dan sebagainya. Tetapi jaringan dan motifnya tidak pernah ditemukan. Kemudian pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Perppu Anti Terorisme, seolah-olah dilakukan karena adanya tekanan internasional. Apalagi banyak warga negara asing yang tewas di Bali. Tetapi juga sangat berbahaya kalau Perppu atau ketiadaan payung hukum dijadikan kambing hitam kegagalan intelijen yang tidak pernah dievaluasi.

DENNY J.A. :

Menurut Anda terjadinya teror ini karena kegagalan intelijen ?

HENDARDI :

Intelijen dan semua aparat keamanan. Catatan dari KontraS, beberapa teror bom terjadi pada masa Habibie. Setelah Soeharto jatuh terjadi 6-7 kali. Pada waktu Soeharto kalau tidak salah ada dua bom meledak. Pada masa Gus Dur ada 37 kali peledakan. Artinya seolah-olah kejadian itu bukan sesuatu yang perlu diatasi.

DENNY J.A. :

Sekarang LSM sangat kritis kepada pemerintah. Apa yang harus dilakukan supaya LSM bisa bersatu membantu pemerintah melawan terorisme ?

HENDARDI :

Ingatan kolektif masyarakat sebetulnya masih traumatis dengan pemberian wewenang excessive kepada negara melalui peraturan-peraturan hukum semacam Perppu ini.

DENNY J.A. :

Menurut Anda kalau pemerintah ingin mendapatkan dukungan harus memodifikasi Perppu secara lebih moderat ?

HENDARDI :

Tidak hanya memodifikasi. Ini bukan soal legal frame, persoalannya adalah kerja aparat intelijen dan aparat keamanan. Kalau legal frame work-nya kurang bisa diamandemen.

DENNY J.A. :

Terima kasih Bung. Kita ke anggota DPR dari PDIP, Bung Sembiring. Setelah tragedi Bali pemerintah justru banyak dikritik. Apa tanggapan Anda ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Selama ini pemerintah dianggap lamban bertindak, intelijen tumpul, dan sebagainya. Sekarang ketika pemerintah ingin berbuat sesuatu untuk menangkal terorisme, tetapi kita semua tidak bersatu dan tetap mengkritik pemerintah. Seperti Bung Denny bilang, “Ada apa dengan bangsa kita ? Dengan tragedi yang begitu besar kita tidak bisa bersatu juga.”

DENNY J.A. :

Image bahwa pemerintah kita dianggap kaki-tangan kekuatan asing, bagaimana ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Itu terlalu jauh. Kita harus bangun dari mimpi kita selama ini, kita lakukan bersama-sama seluruh bangsa, tidak bisa pemerintah sendiri melakukan tindakan-tindakan melawan terorisme. Pemerintah memang tidak sempurna, ada hal-hal yang perlu kita kritik terhadap pemerintah.

DENNY J.A. :

Baik Bung. Soal DPR sendiri, apakah cukup bersatu merespon kebijakan pemerintah ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Saya berharap pemerintah akan mendapat dukungan dari DPR, walaupun tidak 100% seperti dialami pemerintah Amerika Serikat.

DENNY J.A. :

Kita mendengar Fraksi Reformasi dan PPP mungkin menolak Perppu, apakah benar ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Memang beberapa fraksi akan menolak tetapi ada juga yang akan menerima Perppu.

DENNY J.A. :

Kita melihat tidak hanya masyarakat tetapi DPR pun terpecah belah. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

DPR merupakan cermin pandangan yang hidup dalam partai politik dan masyarakat. Kalau dalam masyarakat ada beberapa pandangan, itu tercermin juga di DPR.

DENNY J.A. :

Apakah bukan karena kebijakan pemerintah yang terlalu kontroversial soal Perppu sehingga sulit mendapat dukungan dalam spektrum politik yang begitu beragam ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Saat seperti ini, tindakan cepat yang bisa diambil oleh pemerintah adalah memberi wewenang aparat keamanan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Perppu tersebut bisa digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang lebih besar. Perppu itulah jalan keluarnya. Tetapi dalam masa sidang harus dibahas, diterima atau tidak diterima.

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, sekarang kita menghuBungi pakar hukum Hamid Awaluddin. Apa yang salah Bung ? Menghadapi tragedi nasional kita justru terfragmentasi, terpecah-belah.

HAMID AWALUDDIN :

Menarik mengamati kasus ini. Sekelompok orang yang melabelkan diri Islam seakan-akan beraliansi dengan teman-teman NGO melawan negara. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dengan kecenderungan polarisasi seperti ini. Pertama, ketika kita berbicara terorisme selalu berasosiasi bahwa itu ada motif politiknya. Kedua, tatkala kita berbicara terorisme, saudara-saudara kita yang Islam sangat sensitif karena ada label yang secara sewenang-wenang dialamatkan oleh orang atau siapa pun bahwa terorisme identik dengan Islam, padahal itu salah. Ketiga, teman-teman NGO maupun aktivis Islam di masa Orde Baru merupakan musuh negara, musuh pemerintah, mereka ada dalam posisi yang sangat marjinal. Persoalannya, kedua entity ini melihat upaya pemerintah menangkal terorisme yang sudah terlabel sebagai Islam dengan menggunakan Perppu, merupakan instrumen pemerintah untuk kembali melakukan praktek Orde Baru. Benang merahnya di situ.

DENNY J.A. :

Ok, Bung Sembiring mengatakan, apa pun yang pemerintah lakukan dianggap salah.

HAMID AWALUDDIN :

Karena sudah ada labelling, sudah ada mind set di kepala teman-teman itu. Saya ingin melihat persoalan ini dari perspektif kemanusiaan. Ada hampir 200 orang meninggal serentak dengan cara keji. Mengapa kita tidak melihat bahwa perbuatan seperti itu masuk kategori hostage human generis, musuh kemanusiaan.

DENNY J.A. :

Menurut Anda yang membuat pemerintah dikritik, apakah karena trust kepada pemerintah rendah atau karena kebijakan pemerintah yang terlalu kontroversial ?

HAMID AWALUDDIN :

GaBungan dari berbagai hal. Pertama, ada trauma masa lalu. Kedua, karena tidak profesionalnya aparat. Serentetan kejadian jauh sebelum kasus bom Bali tidak pernah diketahui siapa sesungguhnya yang melakukan, apa motifnya, apakah ini terorganisir, atau sekadar kebencian pribadi.

DENNY J.A. :

Seberapa jauh leadership Megawati mempengaruhi fragmentasi masyarakat dalam menghadapi tragedi Bali ?

HAMID AWALUDDIN :

Saya berharap presiden berbicara terbuka kepada publik. Saya membayangkan ketika 11 September terjadi di Amerika, Bush datang ke tempat kejadian dan berbicara kepada publik Amerika tentang visi dan policy negara menghadapi peristiwa tersebut.

DENNY J.A. :

Itu yang absen dari leadership nasional kita, Bung ?

HAMID AWALUDDIN :

Benar.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, kita menerima telepon dari Bung Andre di Jakarta. Halo Bung. Silakan.

ANDRE :

DPR harus dapat dan wajib menolak Perppu Terorisme. Karena tugas intelijen hanya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian diberikan kepada decision maker-nya. Teror adalah masalah sebab-akibat, tidak bisa suatu badan intelijen yang kerjanya hanya mencari informasi tiba-tiba diberi wewenang yang luar biasa.

DENNY J.A. :

Baik, Bung, terima kasih banyak. Ada Bung Maruli dari Karawang. Silakan, Bung.

MARULI :

DPR harus menyetujui dan menerima Perppu tentang Terorisme ini. Biar bagaimana pun pemerintah bertindak berdasarkan peraturan yang dibuat. Saya sangat kecewa melihat sebagian anggota DPR karena mereka masih menolak. Artinya seolah-olah mereka mendukung terorisme, sementara pemerintah sedang berusaha untuk menangkap dan memberantas terorisme.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menghuBungi Bung Hendardi. Tadi Bung Sembiring mengatakan bahwa mungkin ada yang salah pada kita karena apa pun yang pemerintah lakukan, pemerintah disalahkan. Tanggapan Anda ?

HENDARDI :

Pemerintah memang pihak eksekutor, harus mengambil keputusan. Tetapi juga jangan menutup diri dari argumen yang menanyakan “Apa betul produk hukum dan perundang-undangan yang sudah ada dipergunakan maksimal oleh aparat keamanan atau aparat intelijen untuk memberantas terorisme ?”

DENNY J.A. :

Apakah KUHP sudah memadai untuk itu ?

HENDARDI :

KUHP atau UU No.12 Tahun 1951 tentang senjata api belum dipergunakan secara maksimal oleh aparat intelijen kita. Kita tidak mengetahui apa kerja intelijen kita selama ini. Apakah masih piawai untuk menakut-nakuti orang kritis atau lebih pandai mengendus bom? Tetapi buktinya tidak ada satu peristiwa teror bom pun yang mereka berhasil mengendus motif dan jaringannya. Memang ada pelaku-pelaku yang ditangkap, tetapi itu lebih terlihat sebagai kejahatan individual, bukan satu jaringan atau motif. Menurut saya selama ini kerja intelijen tidak beres.

DENNY J.A. :

Menurut anda ini “obat” yang salah terhadap hal-hal yang terjadi sekarang ini ?

HENDARDI :

Iya, selain itu bagaimana nasib korban-korban teror bom yang lalu? Tidak adil semacam itu.

DENNY J.A. :

Ok, sekarang Habib, apakah Anda puas dengan leadership Megawati dalam menghadapi tragedi Bali ?

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Sama sekali tidak puas, bahkan saya sangat menyesal cara Megawati menangani persoalan Bali. Sangat diskriminatif. Kita melihat cara dia memberikan “air condition” untuk Barat dengan cara menerbitkan Perppu dan segala macam. Padahal perundang-undangan sudah cukup memadai. Bahkan kita melihat bagaimana aparat yang sebenarnya menjadi orang terbaik di hadapan Megawati, menyeret Abu Bakar Ba’asyir. Itu adalah cara-cara yang tidak pantas dilakukan oleh suatu negara beradab. Megawati sangat berbeda dengan ayahnya yang begitu mempunyai rasa nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi. Megawati sama sekali tidak memiliki itu. Bahkan dalam keadaan yang kita membutuhkan suaranya, dia diam seribu bahasa.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak Habib. Sekarang kita dengar pandangan Bung Sembiring. Bagaimana kritik terhadap Megawati soal Perppu?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Ada pergeseran tanggung jawab yang signifikan setelah keluarnya Tap MPR Nomor VI dan VII, yaitu penanggung jawab keamanan dalam negeri adalah Kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa menangkap orang sebelum terbukti seseorang itu melakukan perbuatan yang salah atau tertangkap basah. Perppu ini maksudnya apabila cukup adil perkiraan atau laporan-laporan yang bisa dibuktikan di pengadilan, orang bisa ditangkap. Tetapi nanti diserahkan kepada hakim untuk memproses, itu bedanya.

DENNY J.A. :

Baik, Bung. Bagaimana dengan kritik terhadap leadership Megawati ?

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Setiap leader mempunyai gaya tersendiri, tidak bisa dibandingkan antara Bung Karno dengan Megawati. Megawati sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan, “Saya bukan Bung Karno”. Berilah kesempatan kepada beliau selama masa kepemimpinannya, biar rakyat yang menilai apakah beliau masih terus dipercaya memimpin negara ini atau tidak.

DENNY J.A. :

Baik. Sekarang Bung Hamid, soal Perppu apa pendapat anda, Bung?

HAMID AWALUDDIN :

Kita boleh mengkritik Ibu Megawati, tapi ada baiknya dalam menampilkan kritik, persoalan akhlak juga penting. Saya tidak sependapat dengan Habib. Saya tetap membingkai ini dengan akhlakul karimah. Begini, ketika Bom Bali terjadi, semua pihak panik, bangsa kita dan bangsa lain shocking, karena ini persoalan kemanusiaan, orang meninggal ratusan dalam waktu sekejap dengan cara keji. Negara tidak punya pilihan untuk membendungnya saat itu. Dalam perspektif ini saya melihat Perppu itu instrument to detain not happen again. Mari kita melihat Perppu ini secara obyektif sebagai instrumen untuk menghalangi jangan lagi ada kejadian lain. Kita harus stop dan salah satunya dengan instrumen ini.

DENNY J.A. :

Anda melihat Perppu ini hal yang dibutuhkan dalam kondisi yang darurat. Baik, kita akan mendengar pandangan-pandangan singkat dari masing-masing pembicara untuk renungan kita semua. Dimulai dari Habib. Silakan.

HABIB HUSAIN ALHABSY :

Pertama, saya berharap pemerintah tidak memanfaatkan Perppu untuk Pemilu 2004. Kedua, saya memberikan kritik kepada Megawati bukan soal akhlakul karimah atau tidak karimah, tetapi kita berbicara dalam dialog intelektual. Setiap orang mempunyai gaya sendiri.

HENDARDI :

Kita harus melihat tragedi Bali ini dalam dua sisi. Pertama, civil society harus mengutuk peristiwa ini dan meminta pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang niscaya. Kedua, kita harus melihat juga oportunity politik, siapa yang paling diuntungkan, menurut saya militer. Hal ini terbukti, misalnya Kodam tidak boleh dikurangi justru harus ditambah, intelijen harus ada di bawah TNI dan dikembalikan kepada Panglima TNI. Kemudian diuntungkan dengan terbukanya kembali hubungan militer dengan Amerika.

DENNY J.A. :

Terima kasih, Bung Hendardi. Sekarang giliran Bung Hamid.

HAMID AWALUDDIN :

Siapapun pelakunya, terorisme adalah kegiatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu upaya untuk menghentikannya harus didukung.

DENNY J.A. :

Terakhir Bung Sembiring, the last word.

R.K. SEMBIRING MELIALA :

Inilah saatnya kita bersatu padu menunjukkan jati diri satu bangsa yang besar yang mampu menghadapi apa saja yang ada di depan kita. Dan kepentingan nasional kita hendaknya di atas segala-galanya.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, siapa saja dapat menjadi korban teror, mungkin tetangga kita, bahkan keluarga kita. Dan entah berapa banyak lagi korban teror di antara kita. Kita mengetahui bahwa semakin terpecah belah bangsa ini, semakin susah kita menumpas terorisme.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa Kamis minggu depan.

BAB VI

BURUH MIGRAN DI ERA REFORMASI

TERLANTARNYA TKI DI MALAYSIA

Tanggal : 22 Agustus 2002

Host : Denny J.A.

Narasumber : Wahyu Susilo (Sekjen KOPBUMI), Harry Heriawan Saleh (Dirjen Mobilitas Penduduk), Muhaimin Iskandar (F-PKB DPR RI)

Apakah pemerintah serius melindungi warganya ? Pertanyaan ini layak diajukan ketika ratusan ribu warga Indonesia terlantar dan mengalami penderitaan luar biasa di berbagai wilayah di Malaysia. Mereka datang ke negeri rantau setelah tidak banyak harapan hidup lagi di negeri sendiri, setelah mereka terhempas dalam jurang kemiskinan, dan setelah pemerintah gagal menyejahterakan mereka, gagal memberikan pekerjaan yang layak. Mereka datang ke negeri rantau sebagai pahlawan bangsa, karena negara mendapatkan devisa dari status mereka sebagai buruh migran. Memang, mereka melakukan kesalahan karena datang ke Malaysia dengan status ilegal. Namun ini bukan murni kesalahan mereka, karena pada sisi lain pemerintah terbukti tidak memberikan cukup kemudahan bagi mereka yang hendak menjadi TKI/TKW “sang pahlawan devisa”. Kini ratusan ribu buruh ilegal itu, laki-laki dan perempuan, dihadapkan pada perubahan hukum Malaysia yang lebih ketat dalam mengatur buruh migran. Mereka dikejar-kejar aparat keamanan. Ada yang lari ke hutan, ada yang menyebrang pulau, ada yang tertangkap dan

dipenjarakan, bahkan ada yang disiksa. Korban pun berjatuhan. Anehnya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah lagi-lagi lamban bertindak. Pemerintah bahkan saling lempar tanggung jawab antar mereka sendiri. Apakah para buruh migran itu bukan warga negara yang layak dilindungi ? Apakah mereka benar-benar sampah dalam urusan luar negeri Indonesia ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Sekarang di studio sudah hadir Bung Wahyu Susilo dari KOPBUMI, LSM yang memperjuangkan nasib buruh migran. Di sebelahnya ada Bung Harry Heriawan Saleh, Dirjen Mobilitas Penduduk dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita juga akan menjumpai Bung Muhaimin Iskandar, anggota DPR dari PKB. Untuk memperkaya diskusi kita simak dulu pengantar berikut :

“Ratusan ribu pekerja Indonesia kini terlantar dan sedang diburu aparat keamanan Malaysia. Ternyata Indonesia bukanlah surga dengan kolam susu dan tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman seperti dalam lagu Koes Plus, tapi tanah yang tidak lagi berpengharapan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur sudah lebih dari 40 juta orang, sementara investasi asing dari luar justru semakin merosot, diperparah oleh korupnya sistem hukum, serta masyarakat yang gemar saling membunuh karena sentimen etnis dan agama. Akibatnya lebih dari dua juta pekerja memilih hidup di manca negara. Lebih dari 600 ribu terdampar di Malaysia, baik secara ilegal maupun legal. Mereka bekerja di sana, mendapatkan gaji tiga sampai empat kali lipat lebih besar dari upah yang mereka terima di Indonesia. Namun kenyamanan hidup di kampung orang tidak berlangsung lama, Pemerintah Malaysia mengusir TKI yang datang secara ilegal. Kini ratusan ribu TKI itu dalam kejaran aparat, ada yang berhasil kembali ke Indonesia, ada yang ketakutan, lari, lalu tenggelam, dan mati. Ada pula yang hilang tak tentu rimbanya.

Ratusan ribu TKI tidak berdaya. Mengapa para pekerja ini terlantar? Mengapa pemerintah tidak bertindak cepat untuk melindungi warganya sendiri? Dan mengapa DPR diam saja? Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan mereka tidak berdaya, pertama posisi pekerja sangatlah lemah, bahkan dalam UU Perburuhan sendiri mereka tidak termasuk dalam definisi buruh formal dan tidak memiliki serikat buruh. Kedua, kedatangan pekerja Indonesia umumnya menggunakan jasa agen pekerja, dan karena lemahnya pengawasan pemerintah, agen seringkali bertindak sebagai pemeras tanpa memberikan perlindungan sama sekali. Ketiga, yang lebih sulit dimaafkan adalah keterlambatan reaksi pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya. Bahkan nasib ribuan wong cilik di Malaysia tidak disinggung sedikit pun dalam pidato pertanggungjawaban Presiden Megawati di Sidang Tahunan MPR 2002. Lengkap sudah nyanyian nestapa pekerja Indonesia di Negeri Jiran. Lalu siapa kini yang benar-benar peduli terhadap wong cilik? Apa pula yang sudah dilakukan DPR sebagai wakil rakyat?"

DENNY J.A. :

Pertama kepada Bung Wahyu. Berita terakhir lima WNI dicambuk dan 20 TKI meninggal, seberapa buruk sebenarnya kondisi TKI di Malaysia?

WAHYU SUSILO :

Sepanjang tahun 2002 ini, TKI yang berada di Malaysia mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Sejak kerusuhan di Nilas Remban Januari 2002, TKI menjadi sasaran aparat-aparat polisi Malaysia yang melakukan pengejaran melalui Opnyah. Hal yang selama ini juga jarang terungkap. Jadi sepanjang Februari sampai Juni 2002, tercatat 34.400-an orang terusir paksa, dengan metode pengusiran yang saya kira sudah melanggar HAM; rumah dan pemukimannya dibakar. Kemudian dalam Opnyah ini, enam orang TKI meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Sungai Langap Februari 2002, ketika dia menghindari kejaran aparat. Kemudian hampir 276 ribu sudah terusir juga mulai dari Januari sampai bulan Juli. Saya kira ini jumlah yang

jarang diungkapkan, karena ini merupakan hasil dari Opnyah, yang di Indonesia sendiri wacananya belum pernah ada.

DENNY J.A. :

Anda sendiri ke Malaysia ya ?

WAHYU SUSILO :

Bulan Juli kemarin.

DENNY J.A. :

Apa menurut kawan-kawan TKI di Malaysia, selama ini pemerintah Indonesia cukup melindungi ?

WAHYU SUSILO :

Perwakilan pemerintah di sana sangat pasif. Misalnya ketika akta imigrasi diundangkan bulan Maret, ada tenggang waktu samapi enam bulan, tetapi yang dilakukan KBRI hanya memasang spanduk di depan KBRI, memasang iklan di koran-koran lokal. Sementara mayoritas tenaga kerja kita bekerja di perkebunan yang jauh dari kota.

DENNY J.A. :

Kalau tidak salah di Kuala Lumpur juga ada atase perburuhan, seberapa besar yang dilakukan atase ini dalam melindungi kawan-kawan TKI ?

WAHYU SUSILO :

Hanya formalitas saja, mereka hanya memasang spanduk. Sementara sebenarnya titik terbesar dari TKI ada di negara-negara bagian yang jauh dari Kuala Lumpur. Misalnya ada yang di Sabah, Serawak, Negeri Sembilan, dan di Johor. Saya kira fungsi atase ketenagakerjaan bukan hanya di Kuala Lumpur, dan akan lebih efektif

jika berada di konsul-konsul yang ada di beberapa negara bagian di Malaysia.

DENNY J.A. :

Di tempat-tempat yang dekat dengan sentra TKI, ya ? Jadi KBRI tidak banyak melakukan bantuan, atase perburuhan juga tidak membantu, bagaimana dengan perusahaan yang mengirim TKI ?

WAHYU SUSILO :

Biasanya mereka cuci tangan. Sementara ini saya banyak mendengar dari beberapa pengurus PJ TKI yang mengatakan bahwa “TKI ilegal bukan tanggung jawab Kami”. Tetapi banyak yang mengadu ke kantor Kami, mereka kebanyakan dulu diberangkatkan atas jasa PJ TKI.

DENNY J.A. :

Kita juga mengetahui di Malaysia ada pekerja dari negara lain, seperti Philipina dan Thailand misalnya. Apakah mereka lebih dilindungi oleh negaranya dibanding Indonesia ?

WAHYU SUSILO :

Ya, misalnya pekerja dari Philipina, mereka merasa aman karena ada pantauan atau perlindungan yang dilakukan oleh aparat perwakilan yang ada di Malaysia, bahkan pada bulan Februari dan beberapa bulan yang lalu, pemerintah Philipina protes langsung kepada Mahathir.

DENNY J.A. :

Anda beranggapan pemerintah Philipina lebih melindungi warganya dibanding pemerintah Indonesia terhadap buruh migran. Ok Bung, baik nanti kita explore lagi. Sekarang kita ke Bung Herry Heriawan Saleh. Anda dari Depnaker mungkin mempunyai perspektif yang berbeda. Kawan-kawan TKI merasa pemerintah kurang

melindungi, bagaimana menurut Anda ?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Warga negara yang ada di Malaysia itu ada dua kategori. Yang pertama, mereka tergolong sebagai TKI, artinya mereka betul-betul documented dan secara hukum bisa dilindungi. Yang kedua, warga negara Indonesia yang memang tanpa dokumen sama sekali. Dan tentunya jika kita memilah-milah, dari segi jumlah di Malaysia ada sekitar dua juta pekerja asing, sekitar 600 ribu di antaranya masuk kategori ilegal, artinya pendatang tanpa ijin. Dari 600 ribu ini sekitar 80% atau 480 ribu diantaranya adalah warga negara Indonesia. Yang menjadi kontroversi saat ini adalah yang 480 ribu ini. Mereka yang menjadi TKI jumlahnya sekitar 300 ribu, tentunya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melihat atau melindungi yang legal ini. Bagaimana dengan sekitar 480 ribu ? Karena mereka tidak terdeteksi sehingga sulit bagi kita untuk memberikan perlindungan. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, mereka berhak untuk memperoleh perlindungan.

DENNY J.A. :

Jadi alasan utamanya karena mereka datang dengan legal atau ilegal, ya ?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Dalam kesempatan ini kita menghimbau kepada rakyat Indonesia, apalagi ingin bekerja di luar negeri ikutilah prosedur-prosedur yang legal, agar mereka dapat dengan mudah terdeteksi dan memperoleh perlindungan dari negara. Apakah itu perlindungan dari pemerintah Indonesia atau dari house country tempatnya bekerja.

DENNY J.A. :

Bung Wahyu, apa benar pemerintah kurang dapat melindungi karena TKI banyak yang ilegal ?

WAHYU SUSILO :

Ya, menurut saya ini juga bentuk dari tidak bertanggungjawabnya pemerintah. Saya kira Undang-undang Dasar dan juga Undang-undang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi warga negara yang ada di luar negeri, baik dia yang terkena masalah maupun tidak.

DENNY J.A. :

HuBungan lebih ke masalah teknis untuk mendeteksi siapa mereka, di mana mereka, karena tidak ada dokumen akhirnya menjadi susah bagi pemerintah. Bagaimana Anda menanggapi?

WAHYU SUSILO :

Problem TKI tidak berdokumen bukan hanya problem legal yuridis, tetapi kita juga harus melihat faktor-faktor kultural kita dan Malaysia, dua negara yang mempunyai perbatasan darat. Problem lintas batas itu problem yang tak terhindarkan. Misalnya di Sabah, saya kira hampir 400 ribu teman-teman dari Bugis dan NTT sudah menyebrang ke sana sebelum ada negara modern ini. Menurut saya ini juga harus menjadi kesadaran kita, bahwa persoalan TKI tidak berdokumen bukan hanya persoalan hukum tetapi sudah merupakan persoalan budaya.

DENNY J.A. :

Ok, Bung di samping masalah legalisasi formal, apa yang penting dilakukan oleh pemerintah terhadap TKI ilegal di Malaysia ?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Dalam kaitan ini pemerintah sendiri sudah mengambil sikap, tidak saja sejak masalah ini muncul ke permukaan tetapi jauh sebelumnya. Sejak tahun 1995 pemerintah sudah melakukan pertukaran diplomatik dengan Kerajaan Malaysia untuk bagaimana mengatur penempatan

tenaga kerja formal dan informal, dan terbaru pada tahun 1998. Ini tentunya salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya yang bekerja Malaysia. Tetapi tidak dipungkiri bahwa daya tarik yang begitu besar di Malaysia merupakan magnet tersendiri bagi masyarakat kita.

DENNY J.A. :

Sekarang kita menghubungi Bung Muhaimin Iskandar. Halo Bung, selamat malam. Anda satu-satunya anggota DPR disini, apa yang sudah DPR lakukan untuk melindungi TKI Malaysia ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Selamat malam. Sejak peristiwa Januari di Malaysia, pimpinan DPR langsung berangkat bersama Komisi VII dan beberapa anggota badan kerjasama antar parlemen untuk mencoba melakukan diplomasi antar parlemen, untuk menekan kemarahan pemerintah Malaysia terhadap TKI. Kami langsung melakukan perbincangan dengan ketua parlemen Malaysia dan mendapat sambutan yang lumayan. Setelah itu kita langsung rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Kehakiman. Waktu itu kita sudah mengetahui bahwa akan terjadi segera pelaksanaan undang-undang baru tentang keimigrasian Malaysia, dan kita meminta kepada pemerintah untuk segera mengantisipasi. Dan waktu itu disepakati dua hal, pertama agar pemerintah membuat sebuah badan atau institusi ad hoc, yang bisa melakukan pembelaan dan bisa melakukan persiapan-persiapan menghadapi undang-undang itu di Malaysia. Yang kedua, kita bisa melakukan diplomasi soal TKI dengan melalui jalur hubungan-hubungan khusus.

DENNY J.A. :

DPR sudah mempunyai rekomendasi kepada pemerintah, tepatnya kepada departemen apa Bung ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Sudah. Ketiga departemen bertemu di kantor DPR waktu itu, dan bahkan bulan Februari ada pertemuan joint committee antara Indonesia dan Malaysia, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan MoU yang baru, di mana selama ini MoU yang ada lebih merugikan kita.

DENNY J.A. :

Lalu rekomendasi Anda ini, apakah menurut Anda dilaksanakan?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Sama sekali tidak ada tanda-tanda keseriusan pemerintah, dan bahkan pemerintah cenderung menganggap tidak penting masalah ini. Jika ada kesadaran yang terlambat pada pemerintah, kita semua dan juga pers untuk melakukan expose terhadap penderitaan TKI. Karena sebetulnya apa yang terjadi ini bukan hal baru, tetapi sesuatu yang sudah sangat lama dan telah menjadi seperti bom waktu yang setiap saat siap untuk meledak. Dan baru meledak setelah ada yang meninggal, lalu kita terkejut-gopoh dan sekarang ada ratusan ribu TKI yang tidak jelas nasibnya.

DENNY J.A. :

Kita sudah empat tahun reformasi, tapi DPR tidak kunjung membuat Undang-Undang Perburuhan yang melindungi TKI di luar negeri? Apa kendala sebenarnya?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Sebetulnya Undang-Undang Perlindungan TKI ini awalnya akan masuk undang-undang perselisihan perburuhan dan perlindungan tenaga kerja, yaitu dua undang-undang yang sampai hari ini macet gara-gara buruh dan pengusaha menolak. Pembahasan terlunta-lunta karena antara kepentingan buruh dan pengusaha sungguh sulit diakomodasi dalam sebuah undang-undang.

DENNY J.A. :

Apakah Anda merasakan begitu penting untuk secepatnya menyelesaikan undang-undang ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Akhirnya kita sepakat bahwa UU Perlindungan Tenaga Kerja harus keluar dan menjadi undang-undang sendiri di undang-undang tadi. Dan Alhamdulillah sudah keluar dan draft itu sudah selesai. Kita semua sepakat untuk mempercepat proses persidangannya, bahkan ketua DPR dalam sambutan pembukaan beberapa waktu yang lalu menekankan agar seluruh anggota DPR segera mampu menyetujui UU Perlindungan Tenaga Kerja ini. Kita mencoba akan push mulai tanggal 29 ini, melalui pendelegasian dari badan legislasi ke badan musyawarah.

DENNY J.A. :

Kira-kira apa yang paling penting, yang harus ada dalam undang-undang ini ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Bagaimana ada satu koordinasi dan kesadaran sistematis dari seluruh bangsa ini, khususnya pemerintah dalam melihat TKI. Karena TKI sebetulnya adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang mampu memberikan devisa yang sangat besar dan penghidupan yang sangat besar bagi keluarga dan masyarakat. Tetapi mereka tidak pernah dihitung sebagai potensi bangsa, bahkan dianggap sampah. Yang paling menarik adalah Deplu atau Menteri Luar Negeri menganggap bahwa tenaga kerja ini hanya limbah yang bukan menjadi pekerjaan Deplu. Tugas Depnaker untuk meyakinkan Deplu, khususnya Menteri Luar Negeri bahwa TKI menjadi kewajiban semua institusi negara.

DENNY J.A. :

Baik Bung Muhaimin. Sekarang kita mendengar dulu dari Bung Wahyu. Anda mewakili kepentingan buruh, apa yang harus ada dalam undang-undang itu nanti ?

WAHYU SUSILO :

Perlu ada perubahan paradigma pemerintah mengenai kebijakan penempatan buruh migran, karena selama ini Kami menilai paradigma tentang penempatan tenaga kerja itu paradigma komoditi, jadi melihat buruh sebagai barang, sehingga aturan-aturan yang turun dari paradigma ini adalah aturan tata niaga penjualan tenaga kerja. Saya tadi gembira, kalau memang DPR menyetujui undang-undang tenaga kerja ini fokusnya pada perlindungan, artinya dengan paradigma kemanusiaan atau paradigma hak asasi manusia. Posisi buruh sudah bukan diperlakukan sebagai barang tapi dia sebagai manusia yang memang harus dilindungi. Jadi hak-hak buruh itu memang harus ditekankan, misalnya hak atas kerja yang layak, hak atas upah yang layak, kemudian hak untuk bebas dari rasa ketakutan. Dan juga saya kira hak keluarga di tanah air untuk mengetahui informasi mereka di luar negeri. Jadi Kami mengusulkan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran di Indonesia dan perlindungan terhadap anggota keluarganya.

DENNY J.A. :

Sekarang ke Bung Harry, apa yang seharusnya ada dalam undang-undang ini ?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Sebelum Kami menjawab hal tersebut, Kami ingin merespon apa yang diungkapkan oleh Bung Muhaimin. Tadi disebutkan bahwa pemerintah sebetulnya setelah kejadian di Petan Emas itu, pada bulan Februari melauai joint commission meeting itu sudah bersepakat

antara Malaysia dan Indonesia, untuk memperbaharui pertukaran nota diplomatik yang pernah dilakukan. Hal itu telah direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyerahkan tiga proposal untuk ditetapkan menjadi rancangan MoU bilateral. Harapan kita saat itu akan ditandatangani pada saat kunjungan Pak Mahatir kemarin. Karena sesuatu dan lain hal, penandatanganan itu tertunda, dan Insya Allah bulan Desember ini akan dilakukan. Nah tentunya beranjak dari hal tersebut pemerintah memandang bahwa RUU tersebut paling tidak rohnya sudah diakomodasikan di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A. Tentunya kalau Kita melihat dari struktur peraturan perundangan, keputusan menteri itu sendiri mempunyai keterbatasan dalam memberikan tindakan. Artinya dalam pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan. Kami kira ini salah satu poin krusial bagi kita. Jadi dengan adanya undang-undang nanti, mungkin lebih ada sanksi pidana bagi yang menipu atau yang merampas hak para TKI, dan ini menjadi payung hukum yang efektif sekali nantinya.

DENNY J.A. :

Baik Bung. Sekarang kita mendengar suara publik melalui penelepon, dimulai dari Bung Kris dari Tangerang, silakan Bung.

KRIS :

Saya melihat ada opini yang tidak tepat. Untuk apa Kita membahas RUU dengan DPR Malaysia ? Jangan lupa, Malaysia itu negara orang, artinya seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia lepas dari two border line dari batas negara itu tidak berlaku. Jadi permasalahannya kita tidak bisa mengatur negara orang. Untuk apa kita membuat RUU, tidak ada masalah di luar negeri yang ada justru masalah di dalam.

DENNY J.A. :

Jadi RUU ini lebih untuk menekan pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Malaysia ?

KRIS :

Ya, tapi ini sudah salah opini, karena saya juga mengikuti di media. Permasalahannya tidak ada urusannya buruh TKI yang tidak berkualitas atau sebagainya, itu bukan masalah. Karena di sana pun menerima orang yang tidak berkualitas menjadi TKI. Jadi permasalahannya diletakkan di mana, karena itu mesti ada job center. Jadi setiap ke luar negeri, saya selalu mengontak job center setempat. Harus dipikirkan bagaimana Indonesia mengontak ke job center setempat. Nah yang ingin disampaikan terakhir adalah jangan pernah Anda berfikir kita mengatur negara orang, entah itu masalah cambuk penyiksaan, abuse ore something like that, itu haknya negara orang.

DENNY J.A. :

Ok, Bung terima kasih. Kedua Bung Samidi dari Solo, silakan Bung.

SAMIDI :

Seharusnya pejabat-pejabat itu malu, karena mempunyai rakyat yang dicambuk begitu. TKI itu pahlawan lho Pak, mencari uang untuk devisa negara. Jadi pejabat itu jangan saling menyalahkan satu sama lain, tapi saling mengoreksi diri sendiri. Undang-undang di Malaysia itu dijunjung tinggi, kita tidak boleh campur tangan.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak Bung Samidi. Ketiga, Bung Daniel di Jakarta, silakan Bung.

DANIEL :

Berbicara tentang TKI, saya teringat nasib kuli kontrak di zaman

kolonial Belanda dulu. Mereka ditipu, diperdaya, dan diperas. Itu banyak terjadi di sana. Di Lido misalnya, ada cerita kalau para TKI pulang dari Malaysia –terutama TKI gelap di pantai Timur Sumatera itu pulang naik tongkang dengan sarat muatan di tengah malam– ketika sampai di pantai timur disergap lagi oleh polisi, diperas habis-habisan, kemudian dipulangkan ke Jawa. Kemudian mengenai nasib TKI di Nunukan yang membutuhkan tim dokter, psikolog, dan sebagainya, tetapi tidak ada yang menanganinya.

DENNY J.A. :

Terima kasih banyak. Sekarang ada Bung Tangke Padang dari Jakarta, silakan Bung.

TANGKE PADANG :

Pertama-tama dengan Bung Harry, saya sepakat. Di beberapa kesempatan lain Anda berbicara bahwa sebenarnya komunikasi menjadi intinya. Komunikasi kepada para TKI, mengapa harus melalui jalur ilegal ? Kemudian tadi Bung Wahyu yang dari LSM mengatakan bahwa Malaysia –dan saya sudah melihat sendiri itu– memang kedutaan kita saja yang mungkin ada atasannya, mungkin saya tidak tahu kalau konsul sudah ada di negara-negara bagian yang lain. Persoalannya bahwa kedutaannya saja yang di Kuala Lumpur penuh sesak, jadi persoalan-persoalan TKI banyak numpuk di sana. Saya sepakat dengan Bung Muhaimin, itu bukan RUU perselisihan tenaga kerja yang dimaksud, tetapi seharusnya perlindungan dari Depnaker yang Anda atur, jangan Deplu. Supaya menempatkan orang-orangnya yang bagus di setiap kedutaan atau konsul-konsul untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Satu hal lagi Bung Denny, sistemnya yang harus diperbaiki.

DENNY J.A. :

Ok Bung, terima kasih banyak atas masukan dan komentarnya. Kita menghuBungi lagi Anggota DPR, Bung Muhaimin Iskandar.

Tadi ada pertanyaan dari pemirsa Metro TV, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar pemerintah Malaysia lebih terikat melindungi TKI ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Saya setuju kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Malaysia, justru kita harus membenahi sistem ketenagakerjaan kita, khususnya TKI yang belum dianggap penting oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini. Contoh yang konkrit, banyak diplomat kita yang tidak mengerti urusan TKI, bahkan tidak mau mengetahui. Di Arab Saudi, kita banyak mengirim tenaga kerja ke sana, banyak diplomat tidak bisa menggunakan bahasa arab. Bagaimana mau melindungi TKI ?

DENNY J.A. :

Lalu apa yang harus dilakukan Bung ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Khusus untuk Malaysia, ada cara diplomasi. Pertama, diplomasi sebagai persahabatan sesama tetangga, dengan berbagai langkahantisipasi. Saya kira apa yang dilakukan Menteri Yusril Ihza Mahendra patut Kita apresiasi. Langkah-langkah pendekatan apa pun yang dilakukan. Yang kedua, kita juga harus memiliki harga diri, keluarkan dulu seluruh tenaga kerja, agar Malaysia juga tahu bahwa kita memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Sehingga kita juga dihargai sebagai bangsa.

DENNY J.A. :

Dan juga dengan mendesak satu perjanjian bilateral ?

MUHAIMIN ISKANDAR :

Saya mempunyai catatan penting untuk pemerintah. Sejak Februari pemerintah berjanji akan membuat MoU, tetapi sama sekali

tidak ada bukti dan tidak pernah menteri kita berangkat ke sana. Pemerintah tidak serius. Karena itu, langkah pertama, cobalah kita memulangkan semua dulu. Kita sementara menata kembali, karena itu menyangkut harga diri kita, baru setelah itu kita menata secara perlahan dan sistematis.

DENNY J.A. :

Bung Harry, apa yang harus kita lakukan agar pemerintah Malaysia lebih terikat melindungi TKI ?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Baik, sekaligus juga merespon apa yang diungkapkan para pemirsa Metro TV via telepon. Kalau kita melihat, dengan adanya undang-undang keimigrasian baru di Malaysia ini, sebetulnya banyak hikmah yang bisa kita petik. Karena kalau kita melihat masalah migran Indonesia yang ada di Malaysia dengan membagi secara statistik, permasalahannya 20% ada di Malaysia, dan 80% permasalahan di Indonesia ini bisa ditekan ? Tentunya dengan adanya janji dari Bung Muhaimin, badan legislasi DPR untuk segera memproses undang-undang penempatan tenaga kerja di luar negeri. Menurut saya ini suatu langkah bagaimana kita bisa menekan 80% permasalahan yang ada di dalam negeri. Ini kunci utamanya.

DENNY J.A. :

Jadi RUU ini memang jauh lebih signifikan sebagai payung hukum?

HARRY HERIAWAN SALEH :

Ya, sebagai payung hukum. Di samping itu, kita sendiri harus secara simultan dan sesegera mungkin membuat MoU atau pun agreement dengan pemerintah Malaysia, tidak hanya mengenai masalah pemulangan TKI secara terkoordinir, sekaligus juga penempatannya.

DENNY J.A. :

Sekarang Bung Wahyu, apa yang harus ada dalam bilateral agreement nantinya ?

WAHYU SUSILO :

Menurut saya pemerintah Indonesia harus berani mengubah total apa yang selama ini sudah dilakukan dengan Malaysia, karena juga kualitas perjanjiannya bukan bilateral lagi. Yaitu menata Memorandum of Understanding, lalu pertukaran nota diplomatik tahun 1998. Kami menekankan harus ada penghapusan pasal tentang kewajiban majikan menyimpan paspor. Itu yang menyebabkan banyak TKI menjadi tidak berdokumen, karena papor itu kan nyawa bagi orang di luar negeri, malah disandera oleh majikan. Saya kira pemerintah harus mengusulkan penghapusan pasal tentang penyanderaan paspor itu.

DENNY J.A. :

Pada segmen terakhir kita ingin mendengar komentar singkat dari masing-masing pembicara untuk renungan kita semua. Kita mulai dari Bung Muhaimin, Bung Harry, dan terakhir komentar Bung Wahyu. Silakan Bung.

MUHAIMIN ISKANDAR :

Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama langkah-langkah emergency, yaitu seluruh komponen yang ada di seluruh departemen yang terkait dengan masalah TKI harus membuat langkah-langkah sementara yang efektif. Dalam hal ini langkah-langkah emergency yang bisa melayani dan melindungi para TKI. Yang kedua, kita merombak seluruh sistem diplomasi tenaga kerja kita, bahwa TKI bukan hanya masalah departemen tenaga kerja, tetapi masalah interdepartemental. Dalam hal ini seluruh komponen yang menyangkut hajat hidup orang-orang kita di luar negeri, bahkan sampai pada tingkat memasarkan tenaga kerja kita. Dalam kaitan ini departemen-departemen atau pemerintah, khususnya presiden harus mampu melakukan koordinasi dengan bawahannya agar bisa melindungi tenaga kerja.

HARRY HERIAWAN SALEH :

Ada dua hal yang melengkapi pendapat Bung Muhaimin. Pertama, kita harus segera membangun suprastruktur dan infrastruktur mengenai masalah ketenagakerjaan yang berada di luar negeri. Suprastruktur berupa perangkat hukum perundang-undangan berikut pelaksanaannya, kemudian infrastruktur termasuk organisasinya, tentunya organisasi yang nanti mengikat semua sektor dalam menyelenggarakan masalah tenaga kerja ke luar negeri. Yang kedua, saya kira ini himbauan yang perlu kita suarakan, yaitu perang melawan perbudakan, war against slavery. Tentunya ini tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, karena kita melihat yang menjadi korban adalah rakyat. Ini saya kira adalah wujud dari slavery.

WAHYU SUSILO :

Kita perlu mengubah paradigma komoditi menjadi paradigma kemanusiaan. Saya menegaskan agar pemerintah sekarang sudah bukan saatnya saling lempar tanggung jawab dan perang mulut antara Menaker dan Menlu. Presiden harus sensitif terhadap persoalan ini, karena waktu bertemu Mahathir, masalah ini dilewatkan begitu saja. Diplomasi yang paling bisa berhasil adalah diplomasi presiden langsung terhadap Mahathir.

DENNY J.A. :

Baik, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, sudah banyak solusi yang ditawarkan dalam forum ini. Satu yang penting, dalam waktu dekat kita mengharapkan DPR membuat sebuah payung hukum untuk melindungi TKI di Malaysia atau pun di negara lain. Dan saatnya bagi DPR untuk menunjukkan bahwa mereka memang bekerja untuk melindungi warga negara.

Pemirsa Metro TV, sampai jumpa lagi Kamis minggu depan.

TANGISAN BURUH DI LUAR NEGERI

Tanggal : 23 Oktober 2003

Host : Denny J.Am

Narasumber : Nurdianti Akma (Komisi VII DPR), Imam Prasodjo (Sosiolog), Titik (Korban TKW), Jacob Nuwa Wea (Menakertrans)

Jutaan warga Indonesia mencari nafkah di manca negara : Malaysia, Hongkong, Singapura, Taiwan, kawasan Timur Tengah, dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang disiksa, diperkosa, tidak digaji, dipenjara, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, tanpa perlindungan berarti dari pemerintah setempat maupun pemerintah Indonesia. Mereka adalah 'wong cilik' yang selalu menjadi bahan kampanye dalam pemilu. Namun janji-janji untuk meningkatkan dan memperjuangkan mereka, yang selalu disuarakan oleh partai-partai politik, pemerintah, juga DPR sejauh ini hanya angin surga belaka. Penderitaan TKI dan TKW terus berlangsung, seakan-akan mereka bukan warga negara yang perlu dilindungi. Bahkan sama sekali tidak ada penghargaan atas jasa mereka dalam menambah devisa negara. Mengapa setelah lima tahun reformasi tak juga lahir payung hukum yang kuat untuk melindungi 'para pahlawan devisa itu' ? Mengapa pemerintah belum juga memberikan prioritas memadai untuk mengurus masalah-masalah buruh migran ?

DENNY J.A. :

Selamat malam pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam acara “Parliament Watch” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Tangisan Buruh di Luar Negeri”. Sudah hadir di studio, Bung Imam Prasodjo, sosiolog dari UI, Ibu Nurdiati Akma, anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Reformasi, dan seorang korban tenaga kerja wanita yang kita samarkan namanya menjadi Ibu Titik. Untuk memperkaya diskusi ini, kita saksikan pengantar berikut ini :

“Berapa lagi korban buruh migran yang diperlukan agar pemerintah dan DPR cepat bertindak ? TKW merasa beruntung bisa kembali ke Indonesia. Isak tangis tidak terbendung ketika mereka menjumpai keluarga yang menunggu sejak lama. Mereka mengalami siksaan dan diperkosa. Sebagian berhasil melarikan diri dan mengadu ke polisi, tetapi justru dipenjara. TKW dan TKI adalah ‘wong cilik’ yang menjadi bahan kampanye berbagai partai politik saat pemilu. Mereka dihujani janji diperjuangkan kepentingannya. Tetapi apa yang mereka dapatkan ? Mengapa anggota DPR tidak bersuara keras tentang penderitaan buruh migran di luar negeri ? Mengapa ‘wong cilik’ hanya dijadikan simbol kampanye ?

Indonesia bukan lagi ‘kolam susu’ seperti yang dinyanyikan Koes Plus tahun 70-an. Nelayan semakin sulit mencari ikan, harga solar naik, sementara sewa kapal semakin mahal. Tanah pun bukan lagi surga. Begitu banyak lahan padi yang mengering dan mati karena kurangnya curah hujan. ‘Iming-iming’ bekerja di luar negeri akhirnya begitu memikat. Tetapi bagaimana perlindungan hukum bagi mereka ? Perlindungan bisa terlaksana jika pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi kepada ‘wong cilik’. Namun kenyataan menunjukkan, ‘wong cilik’ dibutuhkan sekadar sebagai slogan.”

DENNY J.A. :

Pertama, kita menghuBungi Ibu Titik dulu. Bu Titik, di negara mana Anda bekerja ? Dan kapan terakhir Anda di sana ?

IBU TITIK :

Di Kuwait. Terakhir bulan Agustus 2002.

DENNY J.A. :

Bisa menceritakan pengalaman pahit Anda ?

IBU TITIK :

Saya bekerja di Kuwait dengan harapan bisa membantu orang tua, tetapi tidak berhasil. Saya 'dikerjai' adik majikan.

DENNY J.A. :

Anda di perkosa adik majikan ?

IBU TITIK :

Iya. Saya mau melapor ke majikan, tetapi adik majikan mengancam saya akan di penjara.

DENNY J.A. :

Di penjara ?

IBU TITIK :

Iya. Saya tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Kemudian saya kabur ke kedutaan, tetapi di kedutaan tidak diurus.

DENNY J.A. :

Anda merasa Kedutaan Indonesia tidak banyak membantu ?

IBU TITIK :

Iya.

DENNY J.A. :

Siapa yang akhirnya membantu Ibu ?

IBU TITIK :

Saya beberapa kali meminta ijin tetapi tidak berhasil, kemudian saya mencari majikan saya. Katanya saya akan dipulangkan hari itu juga, tetapi justru dipenjarakan.

DENNY J.A. :

Ibu kemudian hamil ?

IBU TITIK :

Iya.

DENNY J.A. :

Ibu pulang ke Indonesia ketika sedang hamil besar ?

IBU TITIK :

Iya.

DENNY J.A. :

Dan lahir bayi setelah itu ?

IBU TITIK :

Iya.

DENNY J.A. :

Apa efeknya bagi keluarga Ibu akibat bayi itu ?

IBU TITIK :

Saya tidak diterima.

DENNY J.A. :

Hubungan Ibu dengan suami bagaimana ?

IBU TITIK :

Saya masih berhubungan dengan suami, tetapi setiap hari bertengkar.

DENNY J.A. :

Apakah ayah dari anak itu, sang majikan, masih ikut membiayai Ibu ?

IBU TITIK :

Tidak sepeser pun.

DENNY J.A. :

Baik Bu, nanti kita kembali lagi. Pemirsa Metro TV, kita menyaksikan salah satu contoh korban pekerja di luar negeri, dan banyak lagi yang mungkin saat ini sedang menangis di sana. Mengapa pemerintah sangat lamban melindungi warga negaranya sendiri ? Kita ke Bung Imam Prasodjo. Bung, mengapa ini terus terjadi ?

IMAM PRASODJO :

Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, toiletnya menjadi saksi bisu dua orang ibu TKW yang melahirkan. Saya pernah meng-interview pekerja di sana yang membantu melahirkan. Di sekitar sana ada Kampung Rawa Bokor, yang kemudian banyak mengadopsi anak-anak itu.

DENNY J.A. :

Banyak sekali TKW yang diperkosa, kemudian hamil dan pulang ke Indonesia membawa anak.

IMAM PRASODJO :

Betul. Banyak juga yang menjadi volunteer untuk mengadopsi anak itu. Bahkan ada seorang haji, namanya Haji Zaini, mengadopsi tiga anak. Dan dua orang yang membantu melahirkan di toilet Terminal III Bandara Soekarno-Hatta.

DENNY J.A. :

Mangapa terus terjadi ? Apa yang belum dilakukan pemerintah ?

IMAM PRASODJO :

Pertama, sistem perlindungan tidak ada. Sebuah negeri yang mengirimkan TKI atau TKW begitu besar –konon sampai 5 juta– tetapi UU Perlindungan Buruh Migran tidak ada. Hanya diatur dengan Keputusan Menteri Nomor 104 dan asuransi. Asuransi pun terlalu banyak TKI yang tidak bisa mengklaimnya. Ada data yang menyatakan 12 TKW diperkosa, 37 orang dipukuli, 25 orang tidak dibayar. Semua data ini baru untuk satu kabupaten. Dan mereka tidak bisa mendapatkan hak asuransinya.

DENNY J.A. :

Ok, kita ke Ibu Nur. Apa yang pemerintah belum lakukan sehingga terulang penyiksaan terhadap warga negara kita di luar negeri ?

NURDIATI AKMA :

Saat Komisi VII rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja, kita menanyakan apa perlindungan yang diberikan kepada TKI yang ada di luar negeri ? Muncullah diskusi soal RUU yang sedang kita garap. Tetapi sampai hari ini kita tidak mempunyai Memorandum of

Understanding (MoU) dengan negara penerima, sehingga tidak ada perlindungan terhadap TKI.

DENNY J.A. :

Belum ada kesepakatan negara kita dengan negara penerima ?

NURDIATI AKMA :

Betul, kondisi tenaga kerja kita sangat labil. Keterbatasan pendidikan, pengetahuan, menyebabkan mereka menjadi bulan-bulanan.

DENNY J.A. :

Mengapa belum juga dibuat MoU untuk melindungi tenaga kerja di sana ?

NURDIATI AKMA :

Kita sudah mendorong, tetapi menurut menteri harus level pimpinan negara, dalam hal ini presiden.

DENNY J.A. :

Seandainya ada MoU, apa yang paling penting harus ada untuk melindungi TKI ?

NURDIATI AKMA :

Kalau ada MoU, paling tidak hak dan kewajiban tenaga kerja tercantum. Kita tidak mengetahui jam kerjanya berapa ? Apakah 24 jam atau 8 jam ? Kalau ada MoU, paling tidak ada waktu bagi mereka untuk istirahat. Kemudian ada jadwal cuti sekali dalam sebulan misalnya. Pertemuan semacam arisan seluruh tenaga kerja di kedutaan. Di situ mereka membuka apa yang terjadi pada dirinya

sehingga si majikan tidak akan sembarangan karena ada pertemuan yang mengikat.

DENNY J.A. :

Mereka terisolasi dari pengawasan publik. Bagaimana kalau ada MoU yang memaksa majikan membuat pertemuan sesama TKI sehingga penyiksaan bisa diketahui lebih awal ?

IMAM PRASODJO :

Sebetulnya MoU sudah ada, contohnya di Malaysia, tetapi justru merugikan TKI. Misalnya ada klausul yang menyatakan; “majikan diwajibkan menyimpan paspor pekerja dan mengembalikan paspor pekerja tersebut ke Kedutaan Indonesia sekiranya pekerja tersebut telah lari”. Padahal kalau kita ke luar negeri, paspor harus kita pegang. Tetapi paspor TKI dipegang majikan. Kalau mau diperkosa, dipukuli, dan dia melarikan diri, maka ia tidak punya dokumen dan akhirnya dianggap sebagai ilegal kemudian dipenjarakan. Sembilan belas TKI di Kuwait juga begitu kasusnya.

DENNY J.A. :

Tampaknya harus ada kontrol publik sehingga mereka mempunyai hak untuk bertemu dengan sesama TKI secara reguler, misalnya per bulan.

NURDIATI AKMA :

Ada mediator untuk menampung keluhan-keluhan mereka.

DENNY J.A. :

Kita ke Ibu Titik lagi. Dalam pengalaman Anda, apakah diperbolehkan meninggalkan rumah ?

IBU TITIK :

Tidak boleh.

DENNY J.A. :

Bagaimana menggunakan telepon untuk menghuBungi kenalan atau keluarga ?

IBU TITIK :

Tidak bisa.

DENNY J.A. :

Pernah Anda mencoba ?

IBU TITIK :

Tidak pernah. Saya pernah disuruh mengangkat telepon temannya, tetapi dimarahi dikira saya yang menelepon. Saya tidak mempunyai teman, keluar juga tidak bisa.

DENNY J.A. :

Jika nanti ada aturan yang mewajibkan majikan membuat TKI bisa berkumpul sebulan sekali, apakah itu sangat menolong ?

IBU TITIK :

Iya, pasti membantu.

DENNY J.A. :

Baik, Bung Iman. Apakah MoU itu perlu direvisi minimal harus ada kontrol publik ?

IMAM PRASODJO :

Tidak hanya itu. Ini soal hak informasi, mereka mengalami kesulitan untuk mengetahui keluarganya. Ada satu pelanggaran, bagaimana seseorang terisolir dan tidak bisa mendapatkan akses informasi tentang keadaan di luar. Hal seperti ini sering membuat mereka frustrasi.

DENNY J.A. :

Ok Bung. Menurut Ibu, MoU ini perlu direvisi ?

NURDIATI AKMA :

Saya melihat pada umumnya mereka sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan siapa pun. Ini melanggar HAM. Kalau ada pertemuan sekali sebulan, itu cukup membantu. Mereka bisa memberi informasi bahwa majikannya galak, jahat, tidak digaji, dan sebagainya.

DENNY J.A. :

Pemirsa Mteri TV, begitu banyak TKI yang disiksa di luar negeri. Mengapa pemerintah kita sangat lambat melindunginya ? Kita mendengarkan satu cuplikan pendapat Bung Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial, “Dari 330.000 pekerja yang ada, angka yang masuk hanya 1,2% yang ada masalah. Itu pun bisa kita selesaikan dengan baik”.

DENNY J.A. :

Kita membacakan dulu polling yang dibuat oleh Metro TV bekerjasama dengan Mars. Pertanyaan pertama, “Melihat nasib TKI yang memprihatikan di luar negeri, setujukah Anda pengiriman TKI ke luar negeri untuk sementara waktu dihentikan ?” yang menjawab “Setuju” 67%, “Tidak Setuju” 32%, “Tidak Tahu” 1%. Pertanyaan kedua, “Menurut Anda apakah pemerintah sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh migran di luar negeri ?” Yang

menjawab “Sudah Memadai” 2%, “Belum Memadai” 97%, “Tidak Tahu” 1%. Pertanyaan ketiga, “Setujukah Anda pada pernyataan Bachtiar Chamsyah bahwa kasus kekerasan yang menimpa 1,2% TKI di luar negeri hanya presentase yang kecil dan dapat diselesaikan dengan baik ?” Yang menjawab “Setuju” 1%, “Tidak Setuju” 97% dan “Tidak Tahu” 2%.

Sebelum ditanggapi lebih lanjut oleh narasumber, kita menghuBungi Menteri Tenaga Kerja, Bung Jacob Nuwa Wea, pihak yang mempunyai otoritas menjawab hal ini. Pak Jacob, bagaimana dengan pernyataan anggota DPR agar Pak Jacob mundur sebagai Menakertrans ?

JACOB NUWA WEA :

Apa yang disampaikan pimpinan dewan menurut saya keliru, mereka tidak mengetahui mekanisme. Kalau mereka menganggap kinerja Menakertrans tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka bisa memanggil saya. Pernyataan semacam ini hanya menunjukkan kebodohan DPR.

DENNY J.A. :

Bagaimana dengan kritik yang menyatakan Pak Jacob lalai melindungi TKI sehingga terjadi kasus penyiksaan ?

JACOB NUWA WEA :

Kita tidak lalai, kita selalu tanggap. Ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya satu tempat saja, di Indonesia juga ada.

DENNY J.A. :

Ok, Pak. Bagaimana Bung Imam ?

IMAM PRASODJO :

Menanggapi Pak Bachtiar Chamsyah tentang jumlah TKI bermasalah 1,2%. Justru data dari Polri di minggu pertama tahun

2002, dari 78.634 TKI, yang bermasalah 9.016. minggu kedua dari 77.649, yang bermasalah 8.733. kalau dihitung rata-rata 12%

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Jacob, terlalu banyak yang disiksa dan Anda dianggap kurang memperhatikan hak ini ?

JACOB NUWA WEA :

Siapa bilang kita kurang memperhatikan ? Segala macam sistem sudah kita lakukan. Peraturan sudah kita sempurnakan dengan Keputusan Presiden 104 A Tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Kita meminta bantuan perwakilan kita di berbagai negara untuk memberikan perlindungan. Kalau hanya satu orang mengawasi sekian ratus ribu orang, apa mungkin ?

DENNY J.A. :

Tetapi bisa dilakukan melalui MoU dua negara. Misalnya dipaksakan dalam MoU, TKI bisa sebulan sekali berkumpul dengan TKI lainnya supaya ada public control.

JACOB NUWA WEA :

Di Arab Saudi tidak gampang membuat MoU, bahkan saya mengundang Menteri Tenaga Kerja Sosial Arab Saudi ke Indonesia, tetapi kita belum berhasil meyakinkan dia untuk membentuk MoU. Jangankan di sana, di Malaysia pun yang sudah dua tahun sulitnya setengah mati.

DENNY J.A. :

Ibu Nur mempnyai tanggapan soal MoU ini ?

NURDIATI AKMA :

Kalau memang MoU-nya sulit, tolong TKI atau TKW tidak dikirim untuk menjadi pembantu rumah tangga

DENNY J.A. :

Bagaimana Pak Jacob, sebelum ada MoU di-stop dulu pengirimannya ?

JACOB NUWA WEA :

Kalau perlindungan tidak ada itu tidak betul. Kita membuat perlindungan secara maksimal. Namun mengenai MoU, tidak mudah bagi kita mempengaruhi negara lain. Anda menyuruh stop, saya bisa, tetapi kalau rakyat unjuk rasa ke saya, saya disuruh ke DPR. Pernah saya stop tetapi semua orang ribut. Saya bisa bilang stop tetapi kalau di DPR ribut, apakah DPR mau bertanggung jawab ?

DENNY J.A. :

Pemirsa Metro TV, begitu banyak TKI disiksa di luar negeri, tetapi mengapa pemerintah Indonesia terkesan lamban untuk melindungi warganya sendiri ? Sebelum ini kita explore, kita mendengar suara publik melalui telepon. Bung Anton dari Bekasi, silakan Bung.

ANTON :

Rakyat sudah tidak ada pilihan. Di dalam negeri, mereka susah payah mencari sesuap nasi, pemerintah tidak peduli pada mereka. Mereka mengadu nasib di negeri orang, tetapi disiksa dan diperkosa. Kita ini mempunyai negara atau tidak ? Seharusnya negara melindungi rakyatnya.

DENNY J.A. :

Anda melihat kurang perlindungan dari pemerintah ?

ANTON :

Tidak ada, bukan kurang lagi. Tidak ada lagi negara melindungi rakyatnya. Setiap hari kita bergelut dengan preman-preman. Di jalanan pun kita menemukan segala ketidaknyamanan, tidak ada yang melindungi rakyat.

DENNY J.A . :

Ok, kita sudah menangkap pesan Anda. Kedua dari Endah, silakan.

ENDAH :

Kami dari Panca Karsa Mataram melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan TKW, telah mencatat ada 125 orang korban kekerasan yang sangat berkualitas, yaitu korban pemerasan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Dalam satu desa ada tiga anak penganiayaan korban pemerkosaan. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah cukup sensitif melihat persoalan perempuan, yang menjadi TKW.

DENNY J.A. :

Ok, Bu, terima kasih banyak. Ketiga dari Bung Salim, silakan Bung.

SALIM :

Kalau kita berbicara tingkat pemerkosaan, di Arab Saudi tingkat pemerkosaan kecil. Demikian juga penyiksaan, tidak banyak, Pak. Tetapi banyak majikan yang tidak membayar gaji, sehingga banyak TKW yang menjual diri.

DENNY J.A. :

Secara sukarela, Bung ?

SALIM :

Iya, banyak sekali. Saya 8 tahun di sana, sehingga mengetahui secara persis. Sementara ini yang ditonjolkan hanya pemerkosaan, penyiksaan. KBRI sama sekali tidak membela rakyat Indonesia. Tidak seperti pembantu dari Thailand, kalau ada masalah sedikit pemerintahnya langsung mengirim tim khusus.

DENNY J.A :

Thailand lebih melindungi begitu ?

SALIM :

Sangat melindungi. Tidak ada orang Saudi bertindak macam-macam dengan pembantu dari Thailand.

DENNY J.A :

Terima kasih banyak atas informasinya. Pemirsa Metro TV, Anda mendengar sendiri saksi mata dari Arab Saudi yang menyatakan justru Pemerintah Thailand mengambil sikap lebih keras sehingga tenaga kerja mereka lebih dilindungi. Berbeda dengan Pemerintah Indonesia yang tidak banyak memberikan perlindungan.

Pemirsa Metro TV, ini segmen terakhir, kita mulai dari Ibu Titik selaku korban untuk memberikan sedikit harapan dan isi hatinya. Silakan ibu Titik.

IBU TITIK :

Harapan saya kedutaan melindungi secara tegas terhadap TKW, itu pesan saya. Karena saya tidak pernah dilindungi.

DENNY J.A. :

Baik, Bu. Ke Ibu Nur, silakan Bu.

NURDIATI AKMA :

Karena rentannya, sebaiknya pengiriman TKW di-stop dulu, mereka terlalu sering dilecehkan dan dianiaya. Kalau pun dikirim, lebih baik yang berpendidikan cukup tinggi, misalnya pendidik atau perawat.

DENNY J.A. :

Tenaga kerja boleh dikirim, tetapi lebih baik pria dulu ?

NURDIATI AKMA :

Betul. Saya juga meminta didirikan atase perburuhan di setiap negara penerima tenaga kerja untuk memberi perlindungan. Kalau dibilang KBRI tidak memberi perlindungan, mungkin karena kekurangan SDM.

DENNY J.A. :

Ok. Sekarang yang terakhir dari Bung Imam.

IMAM PRASODJO :

Ini gambaran negeri yang gagal memberikan lapangan pekerjaan, tidak mampu mengembangkan ekonomi, akhirnya banyak warganya mencari pekerjaan di luar negeri. Kita gagal menciptakan pendidikan yang baik. Terlalu banyak tenaga yang hanya mampu bekerja sebagai buruh tingkat bawah. Tetapi ini bukan kesalahan satu instansi, ini kesalahan sistem besar. Satu hal yang mudah, bagaimana Depnaker atau instansi lain menyediakan ambulan untuk para korban di Bandara Soekarno-Hatta.

DENNY J.A. :

Tidak ada ambulan ?

IMAM PRASODJO :

Tidak. Kemudian dokumen-dokumen palsu agar ditertibkan. Demikian juga asuransi, karena terlalu banyak yang belum mendapatkan santunan. Terakhir, terkait draft RUU Ketenagakerjaan, kalau anggota DPR sudah meneriakkan cepat, pemerintah harus menyambut. Kita melihat dalam satu-dua bulan ini apakah UU Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja betul-betul disahkan. Kalau tidak, berarti yang salah adalah pemerintah dan DPR.

DENNY J.A. :

Ok, terima kasih banyak kepada semua pembicara. Pemirsa Metro TV, ada 40 juta pengangguran di dalam negeri dan sebagian ingin bekerja ke luar negeri. Tetapi sebuah kompromi perlu dilakukan, yang dikirim sebaiknya lelaki dulu sebelum ada perlindungan yang pasti. Karena TKW yang berpendidikan rendah sangat rentan dan susah dilindungi. Akibatnya terjadi lagi berbagai kasus penganiayaan dan pemerkosaan.

Sampai berjumpa Kamis minggu depan bersama saya Denny J.A.

ASAL TULISAN

1. 8 Agustus 2002, Tentara dan Komisi Konstitusi, J. Kristiadi, Syamsudin Haris, Salim Said. Host : Denny J.A.
2. 15 Agustus 2002, Poso Kembali Berdarah, Saleh Saaf, Hamid Awaluddin, Mannase Malo. Host : Denny J.A.
3. 22 Agustus 2002, Terlantarnya TKI Di Malaysia, Wahyu Susilo, Harry Heriawan saleh, Muhaimin Iskandar. Host : Denny J.A.
4. September 2002, Terorisme Mengancam Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, Slamet Supriyadi, Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Host : Denny J.A.
5. 3 Oktober 2002, Kasus Suap di DPR, Teten Masduki, Sri Soemantri, Alvin Lie. Host : Denny J.A.
6. 10 Oktober 2002, Suap di Pusat, Suap di Daerah, Ferry Mursyidan Baldan, Ryas Rasyid, Affan Gaffar, Nur Achmad Affandi. Host : Denny J.A.
7. 17 Oktober 2002, Bom Bali dan Islam Militan, Azyumardi Azra, Matori Abdul Djalil, Yasril Ananta Baharudin. Host : Denny J.A.
8. 24 Oktober 2002, Indonesia VS Terorisme, Greta Moris, Mayjen TNI Sudrajat, Permadi., Ahmad sumargono. Host : Denny J.A.
9. 31 Oktober 2002, Sikap DPR Atas Terorisme, Hendardi, Habib Husein Alhabsy, R.K. Sembiring Meliala, Hamid Awaludin. Host : Denny J.A.
10. 14 November 2002, Perempuan Tersingkir dari DPR ?, Choesyana Soffat, I Nyoman Sumaryadif Hamdan Zoelva, Eka Komariah Kuncoro. Host : Denny J.A.
11. 21 November 2002, Mengusut Kekayaan Pejabat, Yusuf Syakir, Agun Gunandjar Sudarsaf Albert Hasibuan, Muladi. Host : Denny J.A.

12. 5 Desember 2002, Perang Baru Terhadap Korupsi, Teras Narang, Todung Mulya Lubis, Yusuf Syakir. Host : Denny J.A.
13. 12 Desember 2002, Momentum Baru di Aceh, Wiryono Sastrohandoyo, Faisal Saifuddin, Ahmad Farhan Hamid, Munir. Host : Denny J.A.
14. 19 Desember 2002, Rekonsiliasi TNI-GAM, Amran Zamzami, Ghazali Abas, Solahudin Wahid, Abu Sofyan Dawood. Host : Denny J.A.
15. 26 Desember 2002f Sistem Dua Ratus Partai, Eros Djarot, Tumbu Saraswatif Amir Santoso, Sjahrir. Host : Denny J.A.
16. 23 Januari 2003, Mengganti Presiden Megawati, Patrialis Akbar, Jacob Tobing, Satya Arinanto. Host : Denny J.A.
17. 30 Januari 2003, Kontroversi Akbar Tandjung Pasca Kalah Banding, Dwi Ria Latifa, Mahadi Sinambela, Maswadi Rauf. Host : Denny J.A.
18. 6 Februari 2003, Memilih Politisi Dalam Sistem Pemilihan Terbuka, Ali Masykur Musa, Todung Mulya Lubis, Hamid Awaludin. Host : Denny J.A.
19. 12 April 2003, Menjaring Partai Peserta Pemilu, Anas Urbaningrum, Ray Rangkuti, Muchtar Pakpahan. Host : Denny J.A.
20. 11 Juni 2003, Komplikasi Pemilu Di Aceh, Usman Hamid, R.K. Sembiring Meliala, Smita Notosusanto. Host : Denny J.A.
21. 21 Agustus 2003, Membatalkan Pemilihan Gubernur, Oentarto Sindung Mawardi, Wayan Nuastha, Wayan Sudirta, Dr. Muhammad Asrul, Host : Denny J.A.
22. 28 Agustus 2003, Rehabilitasi Korban Komunisme, DR. Asvi Warman Adam, Sudomo, Robertus Guncahyo. Host : Denny J.A.
23. 25 September 2003f Menangkap Alumni Afganistan, Muhammad Hafidz, Mahendra Datta, Romli Atmasasmita. Host : Denny J.A.
24. 9 Oktober 2003, Satu Tahun Bom Bali, Stanley Harshaf, Djuanda, Zulvan Lindan. Host : Denny J.A.

25. 16 Oktober 2003, RUU Kerukunan Umat Beragama, Munir, Ichtijanto, Abdul Ba'sid. Host : Denny J.A.
26. 23 Oktober 2003, Tangisan Buruh Di Luar Negeri, Nurdiati Akma, Imam Prasodjo, Titik, Jacob Nuwa Wea. Host : Denny J.A.
27. 13 November 2003, Upaya-Upaya Penggagalan Pemilu, Idrus Marham, Arbi Sanit, Hamid Awaludin. Host : Denny J.A.
28. 20 November 2003, Politik Uang Calon Legislatif, Pramono Anung, Hidayat Nur Wahid, Pipit Rochijat. Host : Denny J.A.
29. 18 Desember 2003, Korupsi Yang Maha Perkasa, Asep Rahmat Fajar, Panda Nababan, Syahrudin Rasul. Host : Denny J.A.

Pendapat Pembaca

Persoalan besar yang kita hadapi sebagai bangsa adalah krisis kepemimpinan. Kita membutuhkan hadirnya pemimpin di semua lapangan, semua cabang kekuasaan dan disemua tingkatan. Pemimpin yang integrasinya teruji, kompetensinya diakui, dan komitmennya dipercaya. Dan ini harus dikombinasikan dengan pembangunan sistem, termasuk sistem hukum dan sistem etika yang menjadi acuan bagi bekerjanya pemerintahan yang baik.

*Prof. Ryas Rasyid dalam talkshow Parliament Watch
Bertema Suap di Pusat, Suap di Daerah*

Saya khawatir, kalau semata-mata memperpendek masa jabatan, DPR justru akan menjadi rowing bandit. Karena dalam pemikiran rowing bandit, kalau kekuasaan itu pendek, dia semakin tidak berfikir panjang. Sejauh ada kesempatan yang bisa diambil, dia akan ambil. Itu bahaya.

*Teten Masduki dalam talkshow Parliament Watch
Bertema Kasus Suap di DPR*